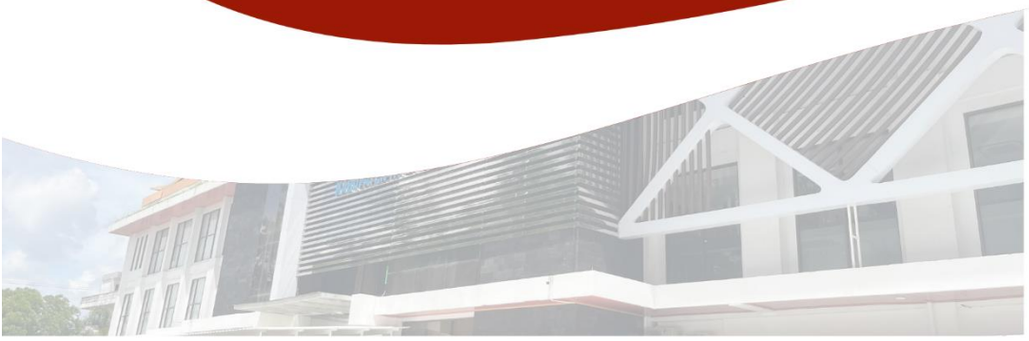
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG





RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029





LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2025-2029

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
   a. manfaat;
   b. berkeadilan;
   c. keterpaduan;
   d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
   e. tatakelola pemerintahan yang baik;
   f. berkelanjutan;
   g. berwawasan lingkungan;
   h. efektif dan efisien; dan
   i. kemandirian.

(2) Kebijakan dalam RPJMD dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:

a. RPJMN Tahun 2025-2029;
b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
c. RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045;
d. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
e. Visi, Misi dan Program Strategis Kepala Daerah Terpilih;
f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
g. Berorientasi pada kinerja Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah:

a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi; dan
c. sebagai pedoman dalam:
    1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
    2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

(2) Sistematika RPJMD terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum daerah;
c. Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. penutup.

(3) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

(1) Visi RPJMD adalah terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang religius, sejahtera dan bermartabat.

(2) Misi RPJMD adalah:

a. mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya;
b. mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan;
c. meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial

perekonomian daerah pelayanan Masyarakat; dan

d. mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

(3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

BAB V

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

(1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:

a. bencana alam;

b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik sosial budaya;

e. gangguan keamanan;

f. pemekaran daerah; atau

g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapaSt terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
d. struktur Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Perubahan RPJMD yang dituangkan pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dasar hukum dan atau penjelasan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode kedua atau rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

(3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

(2-69/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dalam upaya menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Agar pembangunan daerah dapat mengefektifkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan secara berkualitas.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

RPJPD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka panjang yang dilaksanakan melalui RPJMD sesuai tahapan pembangunan 5 tahunan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian RPJMD sesuai 4 tahapan pembangunan, karena setiap tahapan pembangunan dalam RPJPD harus dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana 5 (lima) tahun dalam RPJMD. RPJP Nasional dan RPJPD tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan teknokratik RPJMN dan RPJMD serta RPJMN dan RPJMD Pemilu dan Pilkada.

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2045 diharapkan dapat menjadi panduan dalam mencapai visi dan misi pembangunan

daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Dokumen ini akan menjadi alat strategis yang mengarahkan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 166

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**
DAFTAR GAMBAR ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **IV**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 2
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA 9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 13
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **16**
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 16
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 16
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 44
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 88
2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 106
2.1.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 122
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 127
2.2.1 REALISASI APBD 128
2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030 138
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 148
2.3.1 PERMASALAHAN 148
2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH 167
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... 282
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 282
3.1.1 Visi dan Misi 282
3.1.2 Tujuan Dan Sasaran 300
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 315
3.2.1 Strategi 315
3.2.2 Arah Kebijakan 318
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 325
3.2.4 Dukungan Terhadap prioritas Nasional (SIPD) 374
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **420**
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH 420
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 422
4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 485
4.2.2 INDIKATOR MAKRO 490
4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) 491
BAB V PENUTUP **503**
5.1 KESIMPULAN 503
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN 504
5.3 PEDOMAN TRANSISI 506

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 10
Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah 16
Gambar 2. 2 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah 17
Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... 18
Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... 19
Gambar 2. 5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 23
Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah . 24
Gambar 2. 7 Tren Capaian Indikator Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 sd 2023 29
Gambar 2. 8 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan..... 33
Gambar 2. 9 Perkembangan Capaian Timbulan Sampah Terolah Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 sd 2024 35
Gambar 2. 10 Rumah Tengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024 36
Gambar 2. 11 Indeks Resiko Bencana Prov. Kalimantan Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020– 2024 37
Gambar 2. 12 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2024 40
Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 43
Gambar 2. 14 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 51
Gambar 2. 15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan..... 51
Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 58
Gambar 2. 17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 60
Gambar 2. 18 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Juta Rupiah) 62
Gambar 2. 19 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 65
Gambar 2. 20 Perbandingan Gini Ratio Tahun 2024 Kabupaten & Kota di Provinsi Kalimantan Selatan..... 66
Gambar 2. 21 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten & Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024 69
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 70
Gambar 2. 23 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 73
Gambar 2. 24 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Disesuaikan Tahun 2020-2024 74
Gambar 2. 25 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 75
Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 76
Gambar 2. 27 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024 78
Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 79
Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 80
Gambar 2. 30 Pertumbuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024..... 81
Gambar 2. 31 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sosial 82
Gambar 2. 32 Jumlah Penduduk yang masuk Kelompok Rentang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 sd 2024 83

Gambar 2. 33 Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 84
Gambar 2. 34 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 85
Gambar 2. 35 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024 86
Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2024 87
Gambar 2. 37 Capaian Rasio PDRB Terhadap Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2024 89
Gambar 2. 38 Capaian Rasio PDRB Terhadap Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024 90
Gambar 2. 39 Capaian Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja Tahun 2020-2024 ... 91
Gambar 2. 40 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 92
Gambar 2. 41 Capaian IMDI Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 94
Gambar 2. 42 Perbandiingan Perkembangan Pilar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) IDSD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 95
Gambar 2. 43 Capaian Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024 99
Gambar 2. 44 Perkembangan Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2023 100
Gambar 2. 45 Perbandingan Perkembangan Pilar Infrastruktur IDSD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024..... 101
Gambar 2. 46 Persentase Desa dengan Status Mandiri Tahun 2021 sd 2024..... 102
Gambar 2. 47 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 105
Gambar 2. 48 Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 106
Gambar 2. 49 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 107
Gambar 2. 50 Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 .. 108
Gambar 2. 51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 109
Gambar 2. 52 Persentase Perda dan Perkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 110
Gambar 2. 53 Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 111
Gambar 2. 54 Perbandingan Capaian Skor IDSD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2024 113
Gambar 2. 55 Persentase Belanja Pegawai Dan Sub Total Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Realisasi Tahun 2020 - 2024 Dan Proyeksi Tahun 2026 - 2030 144
Gambar 2. 56 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024 148
Gambar 2. 57 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024 149
Gambar 2. 58 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024 150
Gambar 2. 59 Tujuan Pembanguan Berkelanjutan 169
Gambar 3. 1 Persandingan Elemen Visi RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 288
Gambar 3. 2 Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 289
Gambar 3. 3 Keterkaitan antara misi RPJMD dengan isu strategis pembangunan 297
Gambar 3. 4 Tahapan dan Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah 374

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 19
Tabel 2. 2. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 20
Tabel 2. 3. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (hektare) 22
Tabel 2. 4. Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 23
Tabel 2. 5. Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah .. 24
Tabel 2. 6 Daya Dukung dan Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 26
Tabel 2. 7 Daya Dukung Daya Tampung Air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.. 27
Tabel 2. 8 Capaian Indikator Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2018 sd 2023 29
Tabel 2. 9 Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2018 sd 2023 30
Tabel 2. 10 Capaian SPAM Perpipaan dan Akses air minum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024 31
Tabel 2. 11. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah 33
Tabel 2. 12. Akses Sanitasi Rumah Tangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024 34
Tabel 2. 13. Timbulan Sampah Terolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 35
Tabel 2. 14 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Prov. Kalimantan Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah..... 39
Tabel 2. 15 Jumlah penduduk dan Sex Ratio menurut kecamatan 41
Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2030 di Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Tengah (Ribu Jiwa)..... 44
Tabel 2. 17 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) 46
Tabel 2. 18 PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024(Milyar Rupiah) 49
Tabel 2. 19 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024..... 53
Tabel 2. 20 Pergeseran Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADHB antara Tahun 2020 dan 2024..... 54
Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (%)..... 56
Tabel 2. 22 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024..... 61
Tabel 2. 23 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024 64
Tabel 2. 24 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 68
Tabel 2. 25 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 72
Tabel 2. 26 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024.. 73
Tabel 2. 27 Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 77
Tabel 2. 28 Pencapaian Indikator Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024..... 88
Tabel 2. 29 Capaian Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja Tahun 2020-2024 91
Tabel 2. 30 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Predikat Tahun 2021-2024..... 93
Tabel 2. 31 Persentase Rumah Layak Huni dan Permukiman yang Layak..... 103
Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 115

Tabel 2. 33 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 122
Tabel 2. 34 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 123
Tabel 2. 35 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 125
Tabel 2. 37 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024..... 126
Tabel 2. 38 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024 127
Tabel 2. 39 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 - 2024 129
Tabel 2. 40 Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 - 2024 131
Tabel 2. 41 Proporsi Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024..... 132
Tabel 2. 42 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 135
Tabel 2. 43 Rasio Liquiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024..... 136
Tabel 2. 44 Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 . 138
Tabel 2. 45 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026-2030 139
Tabel 2. 46 Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 - 2030 142
Tabel 2. 47 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 – 2030..... 146
Tabel 2. 48 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 – 2030 147
Tabel 2. 49 Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 156
Tabel 2. 50 Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 156
Tabel 2. 51 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 172
Tabel 2. 52 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2045 183
Tabel 2. 53 arah kebijakan pembangunan RPJPD Kalimantan Selatan tahap I (2025-2029) 185
Tabel 2. 54 Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 192
Tabel 2. 55 Penjelasan Perumusan Visi RPJPD 2025-2045..... 210
Tabel 2. 56 Penjabaran Akronim HST Selamat..... 211
Tabel 2. 57 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2045..... 212
Tabel 2. 58 Penjelasan Misi RPJPD Kab. Hulu Sungai Tengah 2025-2045 213
Tabel 2. 59 Arah Kebijakan Tahapan I (2025-2029) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 215
Tabel 2. 60 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Target Indikator Utama Pembangunan 219
Tabel 2. 61 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026 225
Tabel 2. 62 Permasalahan dalam Proyeksi Capaian Indikator TPB "Belum Mencapai Target (SB) 229
Tabel 2. 63 Proyeksi Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Masing-masing Indikator..... 236

Tabel 2. 64 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 274
Tabel 3. 1 Persandingan Visi RPJPD dengan RPJMD 287
Tabel 3. 2 Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 292
Tabel 3. 3 Persandingan Misi RPJPD dengan RPJMD..... 297
Tabel 3. 4 Persandingan Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 299
Tabel 3. 5 Persandingan Misi RPJMD Prov Kalimantan Selatan dan RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah..... 300
Tabel 3. 6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 306
Tabel 3. 7 Persandingan dan Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... 309
Tabel 3. 8 Tabel Keselarasan antara indikator sasaran visi RPJPD dengan indkator tujuan RPJMD 312
Tabel 3. 9 Tabel Keselarasan antara indikator sasaran pokok RPJPD dengan indkator sasaran RPJMD..... 313
Tabel 3. 10 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... 316
Tabel 3. 11 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... 320
Tabel 3. 12 Program Prioritas Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 333
Tabel 3. 13 Penjabaran Janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati ke Dalam Program Pembangunan Daerah..... 361
Tabel 3. 14 Keterkaitan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah 362
Tabel 3. 15 Keterkaitan Trisula Pembangunan RPJMN dengan Prioritas Pembangunan RPJMD..... 365
Tabel 3. 16 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan 366
Tabel 3. 17 Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Kab. Hulu Sungai Tengah..... 373
Tabel 3. 18 SANDINGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, ASTACITA, 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 375
Tabel 4. 1 Program Pembangunan yang merupakan Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029 422
Tabel 4. 2 Target Indikator Kinerja Utama Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029 487
Tabel 4. 3 Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 . 490
Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Daerah Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029492

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Agar pembangunan daerah dapat mengefektifkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan secara berkualitas.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah untuk periode 2025-2030. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan **Samsul Rizal** dan **Gusti Rosyadi Elmi** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Periode 2025-2030, serta telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 Sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Daerah wajib menyusun

RPJMD yang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Dokumen RPJMD ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2025-2029 ini merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2025-2045. Hal ini merupakan bagian dari hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 menggunakan dasar peraturan perundangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878)
14) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
31) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
32) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

34) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
38) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

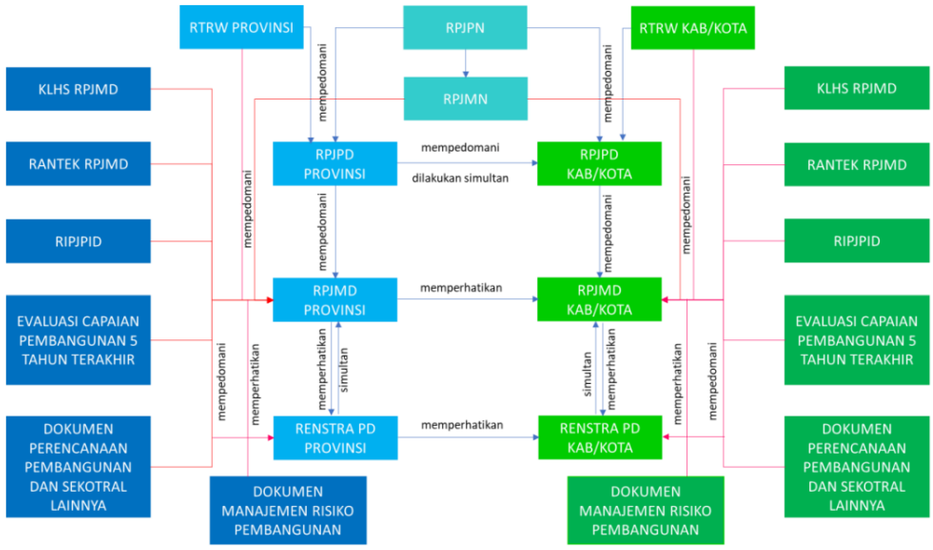
41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
47) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
48) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
49) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
50) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

51) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
52) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036.
53) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045;

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

RPJMD ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode yang sesuai dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan lainnya. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus selaras dengan pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya diterjemahkan secara operasional ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan dilaksanakan setiap tahun melalui RKPD serta Renja Perangkat Daerah. Dengan kedudukan RPJMD yang strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, maka RPJMD menjadi jembatan dan terjadi saling keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD mejadi pedoman dan penyelerasan dalam menyusun sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah. Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tahap periode pertama dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 - 2045.

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah dengan periode yang sama dengan periode RPJMD. Renstra PD adalah merupakan rencana

operasional untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renstra PD mempedomani RPJMD dalam hal penyelarasan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program berikut indikator dan target kinerja pembangunan RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program berikut indikator dan target kinerja pembangunan Renstra PD. Pada dokumen Renstra PD juga merinci pelaksanaan program RPJMD ke dalam kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta pagu anggaran sebagai pelaksanaan operasional dari RPJMD.

1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyelarasan RKPD dengan RPJMD meliputi penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program beserta indikator dan target kinerja tahunan RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka penyusunan RKPD harus mempedomani RPJMD, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. RKPD merupakan jembatan antara perencanaan lima tahunan (RPJMD) dengan implementasi atau pelaksanaannya berupa penganggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Provinsi (RPJMN dan RPJMD Provinsi)

Penyusunan RPJMD mempedomani RPJMN dan RPJMD Provinsi melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan, program beserta indikator kinerja dan target pembangunan jangka menengah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas / strategis nasional dan provinsi dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang (RTR), baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adanya integrasi antara RTR dengan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW kabupaten/kota juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. RTRW berperan sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah, memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya sehingga harmonisasi antara RTRW dengan RPJMD dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dengan baik. Penyusunan RPJMD mempedomani RTRW melalui penyelarasan antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta program RPJMD dengan tujuan, sasaran, kebijakan, arahan struktur dan pola ruang wilayah serta program pada RTRW.

1.3.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS ke dalam RPJMD adalah dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dalam RPJMD.

1.3.7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan maupun revisi/reviu RPJM Desa dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan desa dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan atau prioritas bidang pembangunan dan program sesuai dengan kewenangan, kondisi, karakteristik dan potensi desa.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan daerah dalam periode lima tahun yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan:

1) Perwujudan Visi, Misi, Program Prioritas Kepada Daerah Terpilih
2) Instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan dan lima tahunan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan perencanaan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.
3) Arah kebijakan keuangan daerah.
4) Strategi pembangunan daerah.
5) Kebijakan umum daerah.
6) Program Perangkat Daerah (PD) dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
7) Program Perangkat Daerah (PD) dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek geografi dan demografi;

b Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

c. Aspek Daya Saing Daerah;

d. Aspek Pelayanan Umum.

2. Gambaran Keuangan Daerah

3. Permasalahan Dan Isu Strategis

a. Permasalahan pembangunan daerah; dan

b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi dan Misi; dan

b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;

b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan

b Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

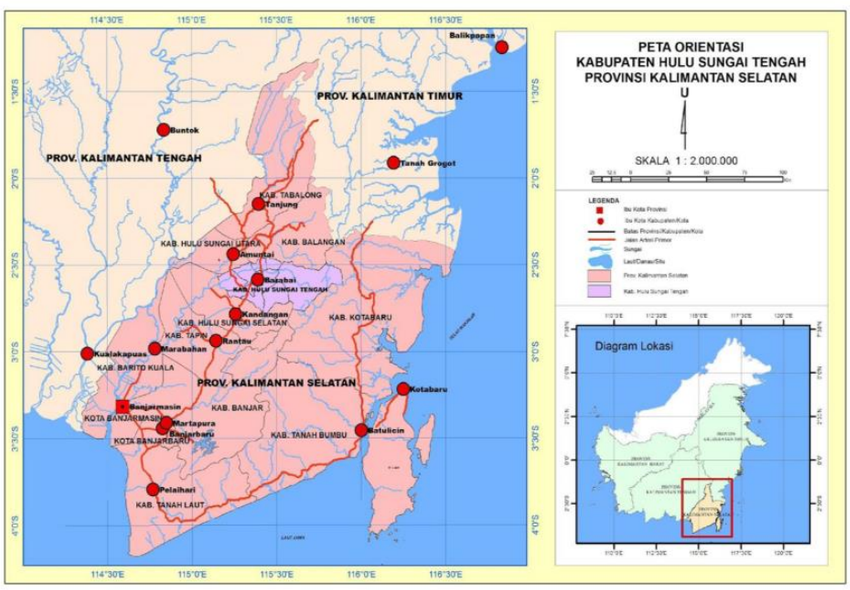
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di antara 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih seluas 1,770,77 km^2. Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut:

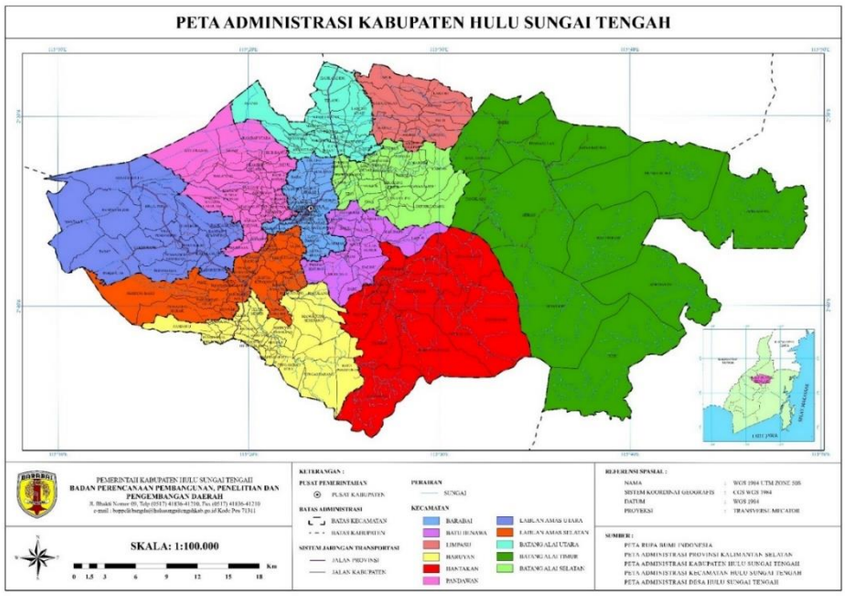
Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah persis berada diperlintasan Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah maupun ke Provinsi Kalimantan Timur, serta perlintasan antar kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Gambar 2. 2 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Dengan posisi geografis kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka posisi ini sangat strategis menjadi penghubung utama antar wilayah dan menjadi jalur distribusi barang dan jasa yang penting. Sebagai daerah pertanian, maka posisi geografis dan berada diperlintasan jalur distribusi tersebut juga mempunyai peran strategis sebagai daerah produksi yang berperan menjadi pemasok kebutuhan daerah sekitarnya baik pada kabupaten tetangga baik dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Posisi ini juga punya peran strategis menjadi jalur perdagangan dan pergerakan jasa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menjadi pusat distribusi dengan tumbuhnya kawasan pergudangan sebagai sub distribusi perdagangan yang melayani kabupaten sekitar. Posisi ini juga berperan dalam mendukung logistik maupun pertahanan ibukota Nusantara.

Secara ekonomi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas 1,770,77 km2 berkontribusi menyumbang PDRB sebesar 3,29 % dari Rp. 286.818,87 milyar nilai PDRB provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai daerah pertanian, maka peran dalam ketahanan pangan adalah sebagai salah satu lumbung pangan di provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi 11,41 % dari produksi padi provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.029.567,93 ton pada tahun 2024, nomor 3 penyumbang terbesar setelah Kabupaten Barito Kuala dan Banjar. Begitu pula

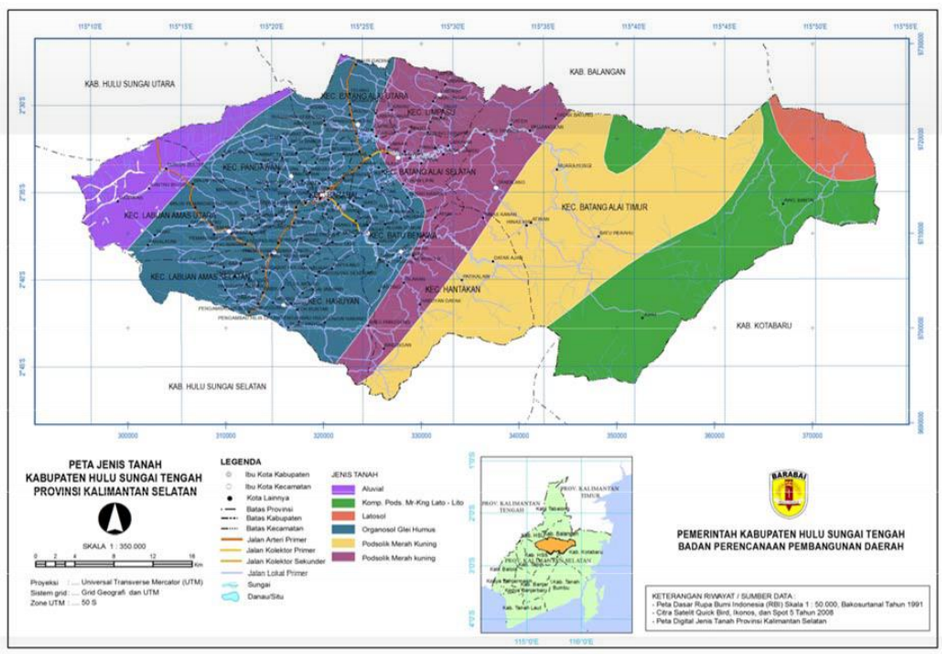
disektor peternakan khususnya ternak unggas, maka populasi unggas di kabupaten Hulu Sungai Tengah menyumbang 15,42 % dari populasi se provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu 2.531.462 ekor, tertinggi kontribusinya. Produksi telur khususnya ternak itik mencapai 1.975.108 butir, tertinggi nomor 2 setelah kabupaten Hulu Sungai Utara di provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup banyak seperti lahan, pertambangan, keanekaragaman hayati seperti hutan, sumber daya air dan lain-lain. Sumber daya lahan meliputi lahan kering dan lahan basah yang banyak digunakan untuk usaha pertanian. Berdasarkan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC (terdiri atas Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

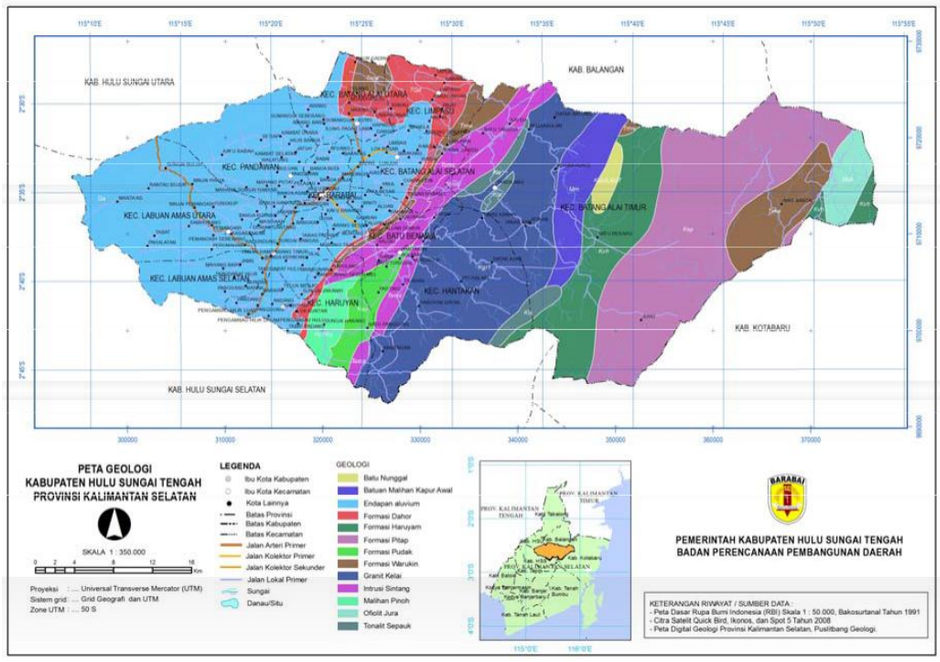
Sumber daya alam berupa bahan tambang juga terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahan tambang yang terdapat berupa batu bara, batuan, marmer dan lain-lain. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate:*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub- volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub- volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high- grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2020

Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : BAPPELITBANGDA Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Potensi bahan tambang di kabupten Hlu Sungi Tengh dapt dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	NAMA BAHAN GALIAN	KECAMATAN	DESA/LOKASI	SUMBER DAYA CADANGAN		MANFAAT/ KEGUNAAN
1	Batu Gamping	Batang Alai Timur	Gunung Batubagapit	107,9	Juta m^3	Semen, Gelas
2	Marmer	Batang Alai Timur	Gunug Batu Sawar	169,8	Juta m^3	Ornamen
3	Marmer	Batang Alai Timur	Desa Sulang'ai	167,9	Juta m^3	Ornamen
4	Granit	Batang Alai Timur	Batu Kembar	15,7	Juta m^3	Granit Tile
5	Granodiorit	Batang Alai Timur	Gunung Tiranggang	5,416	Juta m^3	Granit Tile
6	Diorit	Batang Alai Timur	Sungai Pitangongan	183,3	Juta m^3	Granit Tile
7	Gabro	Batang Alai Timur	Gunung Tembara	163,5	Juta m^3	Granit Tile
8	Batu Malihan	Batang Alai Timur	Desa Pembakulan	4.870	Juta m^3	Bahan bangunan; pengerasan jalan
9	Batu Bara	Batang Alai Timur	Desa Nateh	-	Juta m^3	Energi
10	Emas	Batang Alai Timur	Dusun Mangga Jaya	-	Juta m^3	Perhiasan
11	Emas	Batang Alai Timur	Desa Sulang'ai	-	Juta m^3	Perhiasan
12	Minyak Bumi	Batang Alai Timur	Desa Nateh (hutan samprong)	-	Juta m^3	Energi
13	Sirtu, Pasir, Batu Kali	Batang Alai Selatan	Desa Wawai, Desa Rangas, dan Desa Labuhan (Sepanjang Sungai Batang Alai)	-	Juta m^3	Bahan Bangunan
14	Mangan	Batang Alai Selatan	-	-	Juta m^3	Bahan Logam
15	Sirtu	Batang Alai Utara	Desa Hapingin dan Desa Ilung (Sepanjang Sungai Batang Alai)	17,976	Juta m^3	Jalan, Bahan Bangunan
16	Lempung	Batang Alai Utara	Desa Haur Gading	-	Juta m^3	Keramik, Gelas, Bata
17	Sirtu, Batu Kali, Tanah Orok	Limpasu	Desa Pihandam	-	Juta m^3	Bahan Bangunan
18	Sirtu	Barabai	Sungai Barabai	12,753	Juta m^3	Jalan, Bahan Bangunan
19	Lempung	Barabai	Desa Pajukungan	-	Juta m^3	Keramik, Gelas, Bata
20	Lempung	Pandawan	Desa Pandawan	-	Juta m^3	Keramik, Gelas, Bata
21	Batu Gamping	Batu Benawa	Desa Wake	210,7	Juta m^3	Semen, Marmer, Keramik
22	Phosphat	Batu Benawa	Liang Hadangan	-	Juta m^3	Pupuk, Pasta Gigi
23	Pasir Kuarsa	Batu Benawa	Desa Layuh	500	Juta m^3	Semen, Gelas
24	Batu Bara	Batu Benawa	Desa Kalibaru	-	Juta m^3	Energi
25	Batu Bara	Batu Benawa	Desa Layuh	-	Juta m^3	Energi
26	Batu Bara	Batu Benawa	Desa Wake	-	Juta m^3	Energi
27	Emas	Batu Benawa	Desa Layuh	-	Juta m^3	Perhiasan
28	Marmer	Hantakan	Gunung Rajang Wake	3,937	Juta m^3	Ornamen

NO	NAMA BAHAN GALIAN	KECAMATAN	DESA/LOKASI	SUMBER DAYA CADANGAN		MANFAAT/ KEGUNAAN
29	Granit	Hantakan	Desa Timan	862,7	Juta m^3	Granit Tile
30	Phosphat	Hantakan	Gunung Rajang Wake	-	Juta m^3	Pupuk, Pasta Gigi
31	Galena (Timah Hitam)	Hantakan	Desa Pasting	8.670	Juta m^3	Bahan Campuran Oli
32	Emas	Hantakan	Desa Pantai Mangkiling	-	Juta m^3	Perhiasan
33	Emas	Hantakan	Desa Bt. Hayam Makmur	-	Juta m^3	Perhiasan
34	Minyak Bumi	Hantakan	Desa Batu Tunggal	-	Juta m^3	Energi
35	Minyak Bumi	Hantakan	Desa Pantai Mangkiling	-	Juta m^3	Energi
36	Marmer	Haruyan	Gunung Ambilik	181,7	Juta m^3	Ornamen
37	Marmer	Haruyan	Gunung Ambulung	107,3	Juta m^3	Ornamen
38	Andesit	Haruyan	Gunung Jambu	100	Juta m^3	Bahan bangunan
						pengerasan jalan
39	Mangan	Haruyan	Gunung Tawo	-	Juta m^3	Bahan Logam
40	Batu Bara	Haruyan	Desa Mangunang	100,2	Ha	Energi
41	Gambut	Labuan Amas Utara	Sungai Buluh	-	Juta m^3	Energi

Data dikutip dari Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kal-Sel

Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 terdiri dari dua kategori utama, yaitu sawah beririgasi dan sawah non irigasi. Total luas lahan sawah di kabupaten ini mencapai 26.364 hektare, dengan 9.831 hektare merupakan sawah beririgasi dan 16.533 hektare merupakan sawah non irigasi. Kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar adalah Labuan Amas Selatan dengan total 3.829 hektare, diikuti oleh Labuan Amas Utara dengan 3.210 hektare. Sementara itu, kecamatan dengan luas lahan sawah terkecil adalah Hantakan, dengan total 87 hektare. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi pemanfaatan lahan sawah di setiap kecamatan, yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian di wilayah ini.

Rincian luas penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (hektare)

Kecamatan Subdistrict	Irigasi Irrigation	Non Irigasi Non Irrigation	Jumlah Total
Haruyan	1.397	1.385	2.782
Batu Benawa	1.108	409	1.517
Hantakan	83	4	87
Batang Alai Selatan	1.494	545	2.039
Batang Alai Timur	30	149	179
Barabai	522	491	1.013
Labuan Amas Selatan	1.630	2.199	3.829
Labuan Amas Utara	1.659	1.551	3.210
Pandawan	1.250	492	1.742
Batang Alai Utara	1.433	1.128	2.561
Limpasu	315	139	454
Hulu Sungai Tengah	9.831	16.533	26.364

Sumber : Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2025, 2025.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum masih didominasi oleh daerah persawahan, perkebunan dan berupa hutan. Bentuk penggunaan lahan seperti ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dan merupakan penunjang utama sistem perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, daerah penggunungan yang didominasi hutan sebagai

pengatur tata air dan menjadikan daerah penyangga bagi wilayah di bawahnya.

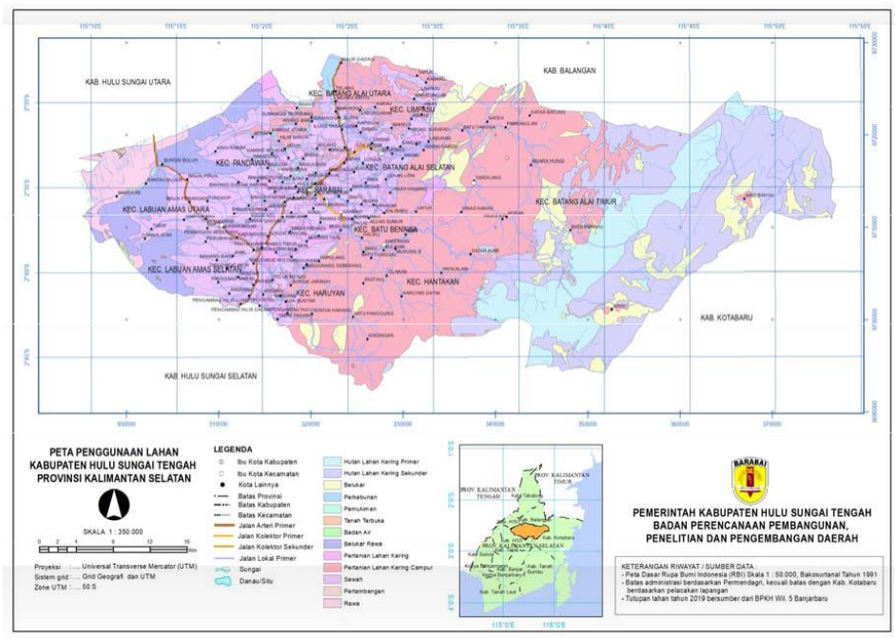
Berdasarkan penggunaan lahan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016-2019 penggunaan lahannya dapat dilihat sebagaimana pada tabel dan peta berikut :

Tabel 2. 4. Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	14.896
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	35.291
3	Belukar	12.419
4	Perkebunan	585
5	Pemukiman	4.157
6	Tanah Terbuka	204
7	Badan Air	70
8	Belukar Rawa	9.441
9	Pertanian Lahan Kering	7.039
10	Pertanian Lahan Kering Campur	56.963
11	Sawah	31.531
12	Pertambangan	160
13	Rawa	4.361
Total Luas (Ha)		**177.118**

Sumber : BPKH Wilayah V Banjarbaru KLHK, 2021

Gambar 2. 5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada dalam wilayah Sub-Sub DAS Batang Alai yang merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS Barito sebagai daerah tangkapan air sebelah barat Pegunungan

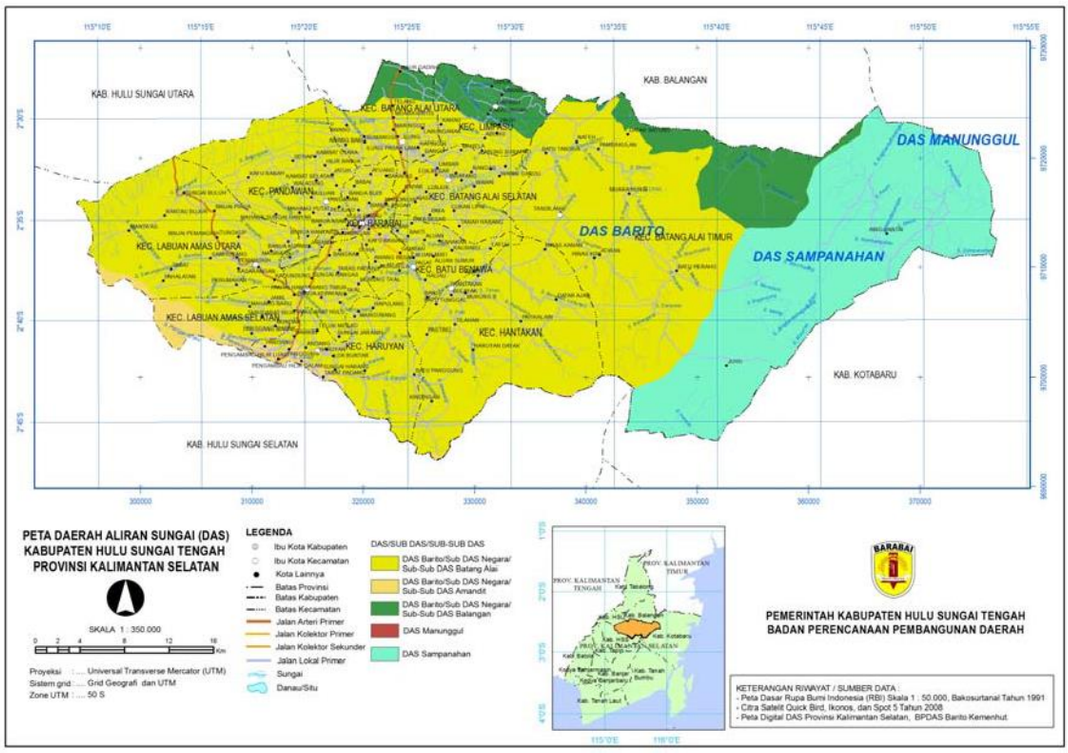
Meratus dan DAS Sampanahan sebagai daerah tangkapan air sebelah timur Pegunungan Meratus.

Tabel 2. 5. Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO.	DAS	SUB DAS	SUB-SUB DAS	LUAS (HA)
1.	Barito	Negara	Balangan Batang Alai Amandit	13.990 121.765 3.520
2.	Sampanahan	-	-	37.800
3.	Manunggul	-	-	5
JUMLAH				177.080

Sumber : Peta Digital DAS Provinsi Kalimantan Selatan, BPDAS Barito KLHK

Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air

dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

Potensi keanekaragaman hayati, kabupaten Hulu Sungai Tengah punya kawasan hutan lindung seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat keanekaragaman hayati seperti keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan data Daya Dukung Lahan Permukiman (DDLB) di berbagai kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagian besar wilayah memiliki status "daya dukung lahan permukiman baik", yang menunjukkan bahwa kapasitas lahan secara umum cukup untuk mendukung permukiman dengan kondisi yang stabil. Kecamatan Batang Alai Timur memiliki nilai DDLB tertinggi sebesar 3.635,81, menandakan potensi daya dukung lahan yang sangat tinggi untuk pengembangan permukiman.

Sebaliknya, Kecamatan Barabai memiliki nilai DDLB terendah sebesar 2,94 dengan status "daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang", yang mengindikasikan kapasitas lahan permukiman di wilayah ini lebih terbatas dan membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang.

Variasi daya dukung lahan antar kecamatan ini menjadi faktor penting dalam penyusunan strategi pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Wilayah dengan daya dukung lahan tinggi dapat diarahkan untuk pengembangan permukiman baru, sementara daerah dengan daya dukung terbatas memerlukan pendekatan mitigasi, seperti peningkatan

infrastruktur, pengelolaan tata ruang yang lebih ketat, serta kebijakan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat.

Tabel 2. 6 Daya Dukung dan Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KECAMATAN	DDLB	STATUS
Haruyan	19,71	Daya dukung lahan permukiman baik
Batu Benawa	17,93	Daya dukung lahan permukiman baik
Hantakan	149,01	Daya dukung lahan permukiman baik
Batang Alai Selatan	7,95	Daya dukung lahan permukiman baik
Batang Alai Timur	3635,81	Daya dukung lahan permukiman baik
Barabai	2,94	Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang
Labuan Amas Selatan	13,47	Daya dukung lahan permukiman baik
Labuan Amas Utara	20,19	Daya dukung lahan permukiman baik
Pandawan	15,50	Daya dukung lahan permukiman baik
Batang Alai Utara	12,15	Daya dukung lahan permukiman baik
Limpasu	17,38	Daya dukung lahan permukiman baik

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2045

Adapun data "Kebutuhan dan Ketersediaan Air" di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Daya Dukung Daya Tampung Air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih	DDA	Status
			Domestik	Non Domestik	Total			
1	Barabai	29.833.778,1	2.221.864,5	10.910.194,56	13.132.059,06	16.701.719,04	2,271827896	Bersyarat atau Sedang
2	Batang Alai Selatan	25.785.424,34	694.230	16.223.379,84	16.917.609,84	8.867.814,497	1,524176558	Bersyarat atau Sedang
3	Batang Alai Timur	72.657.340,77	235.498	113.529,6	349.027,6	72.308.313,17	208,17076	Aman atau Baik
4	Batang Alai Utara	30.393.057,43	561.778,8	11.088.057,6	11.649.836,4	18.743.221,03	2,608882768	Bersyarat atau Sedang
5	Batu Benawa	13.697.749,04	586.482	9.313.211,52	9.899.693,52	3.798.055,515	1,383653848	Bersyarat atau Sedang
6	Hantakan	45.196.230,42	378.870	1.343.433,6	1.722.303,6	43.473.926,82	26,24173254	Aman atau Baik
7	Haruyan	35.393.565	666.840,4	29.301.989,76	29.968.830,16	5.424.734,845	1,181012566	Bersyarat atau Sedang
8	Labuan Amas Selatan	52.893.837,89	847.646,8	35.186.607,36	36.034.254,16	16.859.583,73	1,467876584	Bersyarat atau Sedang
9	Labuan Amas Utara	105.607.390,6	893.520	35.296.352,64	36.189.872,64	69.417.517,94	2,918147616	Bersyarat atau Sedang
10	Limpasu	18.216.635,11	326.660,4	8.367.131,52	8.693.791,92	9.522.843,193	2,095361297	Bersyarat atau Sedang
11	Pandawan	68.801.390,01	985.616,8	36.087.275,52	37.072.892,32	31.728.497,69	1,855840904	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah		498.476.398,7	8.399.007,7	193.231.163,5	201.630.171,2	296.846.227,5	2,472231193	Bersyarat atau Sedang

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2045

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

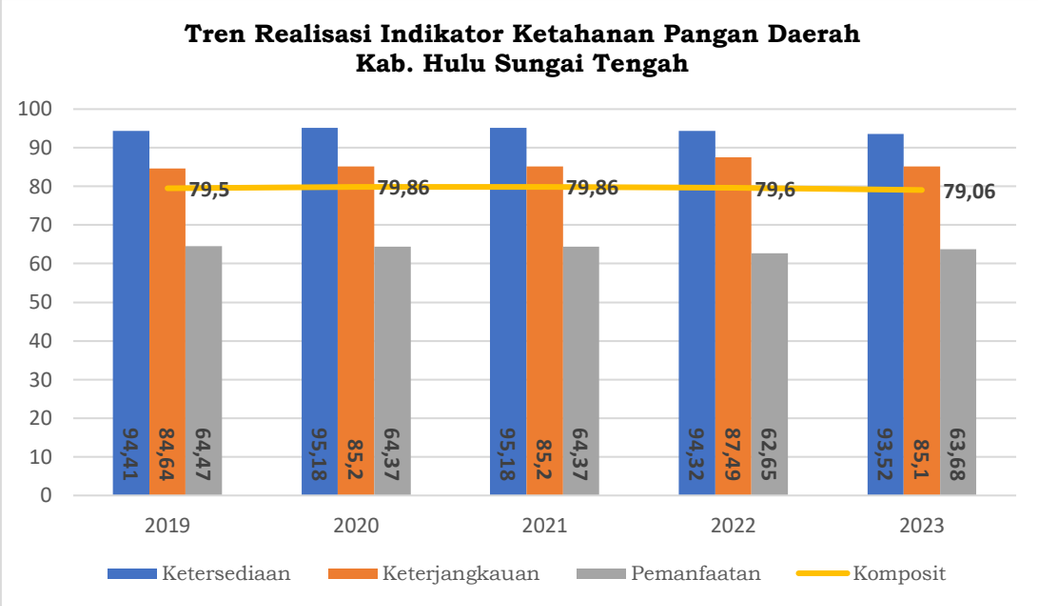
A. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta selaras dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ketahanan pangan yang baik memungkinkan masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan secara sistemik dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor terkait. Upaya ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan melalui produksi domestik yang memadai, stabilitas pasokan dan harga, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, serta perbaikan kualitas konsumsi yang didukung oleh infrastruktur memadai. Dukungan kebijakan ekonomi makro, stabilitas harga, dan distribusi pangan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.

Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan secara objektif, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. IKP Kabupaten Hulu Sungai Tengah dihitung berdasarkan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Adapun data indikator ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 2. 7 Tren Capaian Indikator Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 sd 2023



Sumber : Diolah dari data publikasi Badan Pangan Nasional, 2025

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2018 sd 2023

ASPEK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan		94,41	95,18	95,18	94,32	93,52
Keterjangkauan		84,64	85,20	85,20	87,49	85,10
Pemanfaatan		64,47	64,37	64,37	62,65	63,68
Komposit	**78,69**	**79,50**	**79,86**	**79,86**	**79,60**	**79,06**

Sumber : Diolah dari data publikasi Badan Pangan Nasional, 2025

Capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlihatkan bahwa aspek ketersediaan berada pada tingkat tinggi dan relatif stabil, dengan nilai tertinggi pada 2020–2021 sebesar 95,18 sebelum menurun bertahap menjadi 93,52 pada 2023. Keterjangkauan menunjukkan tren positif pada awal periode, meningkat dari 84,64 pada 2020 menjadi 87,49 pada 2022, meskipun kembali turun ke 85,10 pada 2023. Sebaliknya, pemanfaatan cenderung berfluktuasi dengan sedikit penurunan dari 64,47 pada 2020 menjadi 62,65 pada 2022, namun kembali meningkat ke 63,68 pada 2023, yang menandakan adanya upaya perbaikan partisipasi masyarakat. Secara agregat, indeks komposit berada pada kisaran stabil 78–80, dengan capaian tertinggi pada 2021 sebesar 79,86 dan sedikit menurun menjadi 79,06 di 2023.

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan pangan suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan minimum yang dianjurkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar risiko ketidakcukupan gizi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator ini meliputi ketersediaan pangan, daya beli masyarakat, distribusi pangan, pengetahuan gizi, serta kondisi kesehatan dan lingkungan.

Pemantauan indikator ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi krusial mengingat pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.Adapun data capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 9 Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2018 sd 2023

KABUPATEN/PROVINSI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Selatan	2,67	2,51	2,72	2,78	4,47	4,48
Hulu Sungai Tengah	4,87	4,34	4,64	4,52	8,79	5,55

Sumber : BPS pada tabel data dinamis, diakses pada 14 Agustus 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang periode 2018–2023 cenderung berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018, nilai prevalensi di HST mencapai 4,87%, hampir dua kali lipat rata-rata provinsi sebesar 2,67%. Meskipun sempat menurun menjadi 4,34% pada 2019, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi (2,51%) dan kembali naik menjadi 4,64% pada 2020. Tahun 2021 menunjukkan sedikit perbaikan menjadi 4,52%, namun pada 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga 8,79%, jauh melampaui rata-rata provinsi 4,47%. Tahun 2023 prevalensi HST menurun menjadi 5,55%, namun selisih dengan provinsi

yang berada di 4,48% tetap menunjukkan adanya kesenjangan ketahanan pangan yang perlu diatasi.

C. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum mengukur persentase rumah tangga yang memperoleh sumber air minum layak, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Akses ini mencakup ketersediaan air minum yang aman secara kesehatan, dapat diperoleh setiap saat, serta berada pada jarak yang wajar dari tempat tinggal. Sumber air minum layak meliputi air perpipaan (PDAM), sumur bor atau pompa terlindungi, sumur gali terlindungi, air kemasan bermerek, atau sumber mata air terlindungi.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, indikator ini diukur berdasarkan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi. Data capaian menunjukkan tren peningkatan setiap tahun pada periode 2020–2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Capaian SPAM Perpipaan dan Akses air minum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	**78.73**	**79.13**	**79.63**	**80.18**	**82,11**
Persentase pelayanan akses layak air minum	**78,73**	**79,13**	**79,63**	**80,18**	**82,11**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan data lima tahun terakhir, terlihat peningkatan rata-rata sebesar ±0,85 poin persentase per tahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 1,93 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini menunjukkan perbaikan akses air minum yang konsisten di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meskipun indikator *air minum aman*—yang mengukur kualitas air secara langsung hingga parameter mikrobiologis—belum memiliki data realisasi.

Jika tren kenaikan capaian akses layak air minum ini terus berlanjut, dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2029 persentasenya berpotensi mencapai kisaran 86–87%. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa peningkatan cakupan layanan diiringi dengan pemenuhan standar kualitas air minum aman agar capaian indikator tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga memenuhi aspek kesehatan masyarakat.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan pada suatu wilayah, yang meliputi kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Nilai IKLH menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, karena kualitas lingkungan yang baik akan mendukung kesehatan masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan.

Perkembangn nilai IKLH kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 IKLH 67,65 maka pada tahun 2024 meningkat menjadi 71,67. Adapun capaian masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

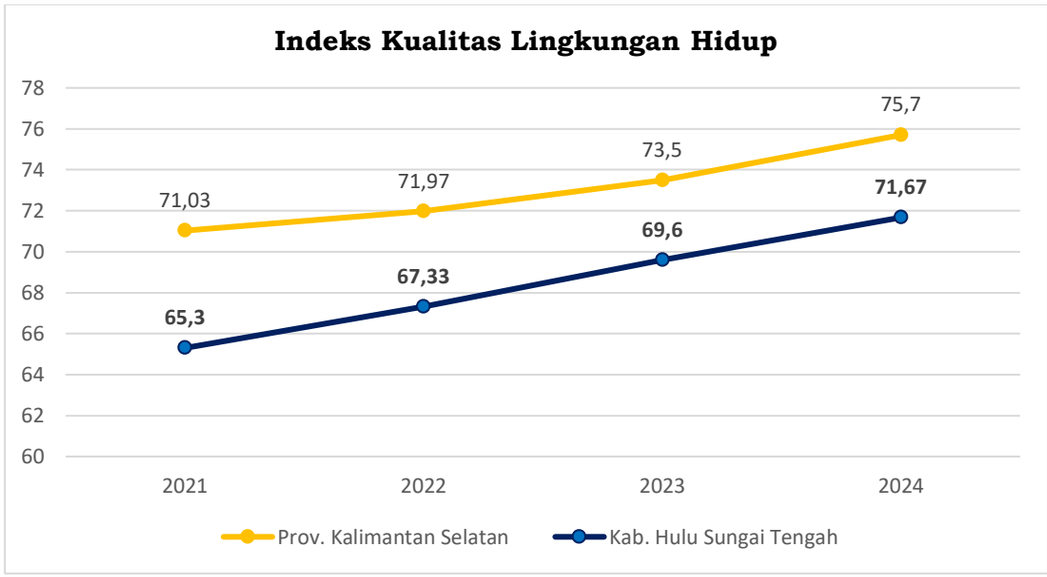
Tabel 2. 11. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Air	54	59	57,5	57,5
2.	Indeks Kualitas Udara	90,13	90,51	93,46	98,33
3.	Indeks Tutupan Lahan	38,78	38,78	46,23	-
4.	IKLH	65,3	67,33	69,60	71,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 65,30, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 71,03.

Gambar 2. 8 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Diolah dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Ranwal RPJMD 2025-2029 Prov. Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2022, indeks ini meningkat menjadi 67,33, sementara Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan menjadi 71,97. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 69,60, masih berada di bawah capaian provinsi sebesar 73,50.

Memasuki tahun 2024, IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali meningkat signifikan menjadi 71,67, mendekati rata-rata provinsi yang mencapai 75,70.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah kondisi di mana rumah tangga memiliki fasilitas pembuangan tinja yang terhubung dengan sistem pengolahan limbah yang memenuhi standar kesehatan dan tidak mencemari lingkungan. Indikator ini penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, peningkatan akses sanitasi aman menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.

Tabel 2. 12. Akses Sanitasi Rumah Tangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024

Item	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses sanitasi	57.668	58.527	59.450
a. Akses AMAN	125	125	125
b. Akses layak individu (tidak termasuk aman)	28.245	28.940	52.102
c. Akses layak Bersama	14.419	14.409	5.422
d. Akses Layak Khusus Perdesaan	8.493	8.455	1.220
e. Akses Belum Layak	6.386	6.598	581

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Akses sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, akses sanitasi aman masih sangat rendah dan relatif stagnan (125 rumah tangga), sementara mayoritas rumah tangga masih menggunakan akses sanitasi layak non-aman, baik individu maupun bersama. Pada tahun 2024 terlihat pergeseran signifikan, di mana jumlah rumah tangga dengan akses layak individu meningkat tajam hingga 52.102, sedangkan akses bersama dan perdesaan justru menurun drastis. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan fasilitas sanitasi, namun tantangan besar masih ada untuk memperluas cakupan sanitasi aman sesuai standar kesehatan dan target SDGs.

C. Timbulan Sampah Terolah

Timbulan sampah menggambarkan volume sampah yang berhasil ditangani melalui proses pengolahan. Indikator ini menjadi cerminan efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah, sekaligus upaya mengurangi beban sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peningkatan jumlah sampah yang terolah akan berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.

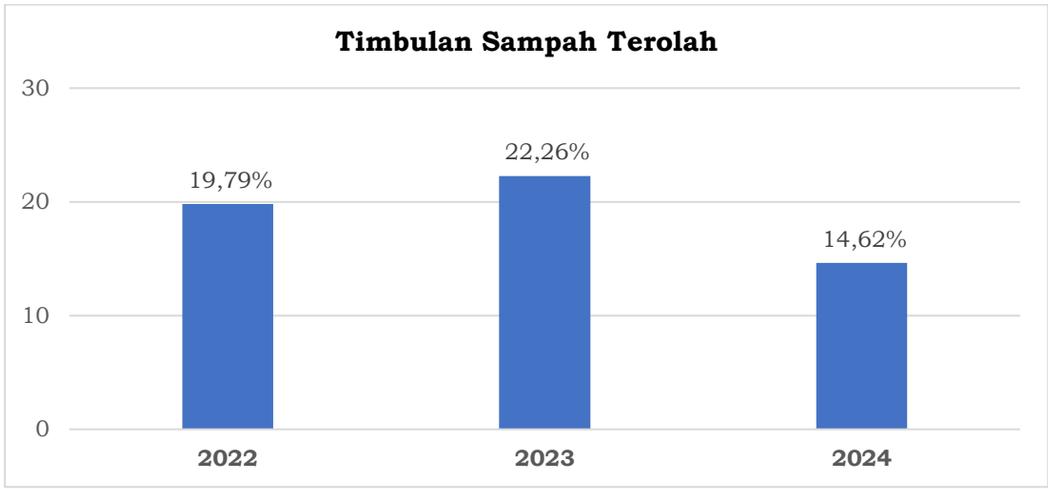
Tabel 2. 13. Timbulan Sampah Terolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Uraian	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah (ton/hari)	20.64	23.42	19.61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Data menunjukkan bahwa volume timbulan sampah terolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat dari 20,64 ton/hari pada 2022 menjadi 23,42 ton/hari pada 2023, namun kemudian menurun menjadi 19,61 ton/hari di 2024. Persentasenya juga berfluktuasi, naik dari 19,79% di 2022 menjadi 22,26% di 2023, lalu turun tajam ke 14,62% pada 2024. Pola ini menandakan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kapasitas pengolahan sampah, konsistensi pengelolaan masih menjadi tantangan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. 9 Perkembangan Capaian Timbulan Sampah Terolah Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 sd 2024



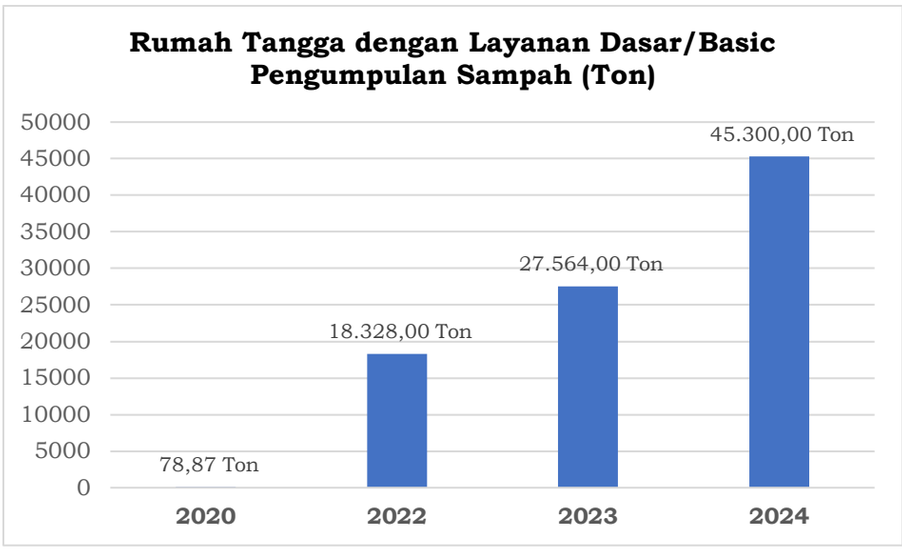
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang terorganisasi di suatu wilayah. Indikator ini mencakup layanan pengumpulan yang dilakukan secara rutin dari sumber sampah rumah tangga menuju tempat penampungan sementara atau lokasi pengolahan.

layanan pengumpulan sampah dasar merupakan pelayanan yang menjangkau sebagian wilayah dan belum sepenuhnya mencakup seluruh rumah tangga. Sementara itu, data mengenai layanan pengumpulan sampah penuh yang mencakup pengangkutan hingga ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir belum tersedia.

Gambar 2. 10 Rumah Tengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Data layanan dasar pengumpulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam volume sampah yang terlayani selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang dikumpulkan tercatat sebesar 78,87 ton. Angka ini kemudian meningkat tajam menjadi 18.328 ton pada tahun 2022, naik lagi menjadi 27.564 ton pada tahun 2023, dan mencapai

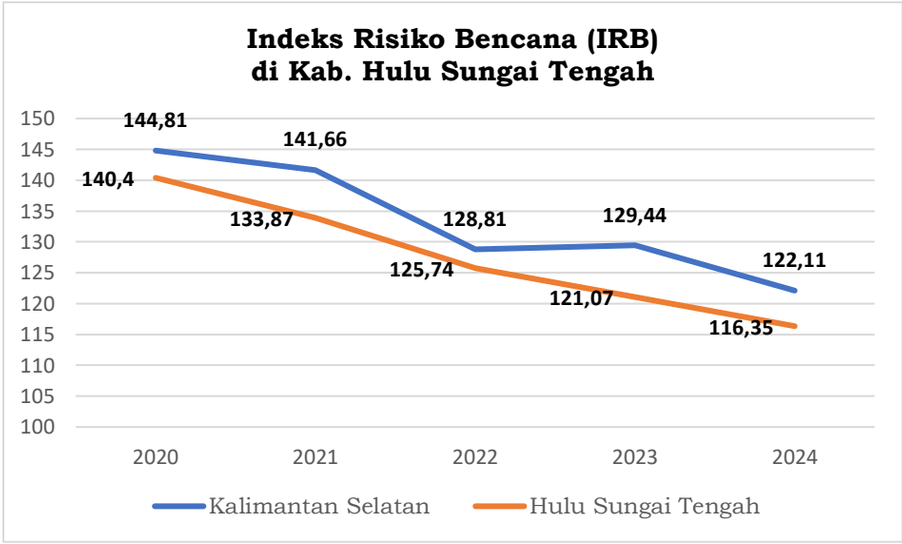
45.300 ton pada tahun 2024. Adapun Data layanan penuh pengumpulan sampah saat ini belum tersedia.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 secara umum berada dalam kategori risiko sedang. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daerah yang berada pada kategori tersebut, dengan kecenderungan indeks yang terus menurun sejak tahun 2020 hingga 2024. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam konteks risiko bencana relatif lebih terkendali, meskipun tetap berada dalam kelas risiko sedang yang masih memerlukan perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan kebencanaan daerah.

Gambar 2. 11 Indeks Resiko Bencana Prov. Kalimantan Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020– 2024



Sumber: BNBP (publis buku IRBI), 2024

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Nilai IRB tercatat sebesar 140,40 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 133,87 pada tahun 2021, 125,74 pada tahun 2022, 121,07 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 116,35 pada tahun 2024. Secara kuantitatif, terjadi penurunan sekitar 24,05 poin dalam

lima tahun, atau setara dengan penurunan kurang lebih 17,1 persen dibandingkan tahun 2020. Pola ini menggambarkan penurunan risiko bencana secara bertahap dari tahun ke tahun tanpa adanya kenaikan kembali (rebound) dalam periode yang sama, sehingga dapat dikategorikan sebagai tren penurunan yang relatif stabil.

Dibandingkan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Selatan, IRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara konsisten berada pada tingkat yang lebih rendah sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IRB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 144,81 dan menurun berturut-turut menjadi 141,66 (2021), 128,81 (2022), sedikit meningkat menjadi 129,44 (2023), sebelum kembali turun menjadi 122,11 (2024). Selisih nilai IRB antara provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4,41 poin pada tahun 2020 dan melebar menjadi sekitar 5,76 poin pada tahun 2024. Dengan demikian, secara deskriptif dapat dinyatakan bahwa tren penurunan IRB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif lebih stabil dibandingkan tren provinsi, dan posisi indeks kabupaten yang senantiasa lebih rendah dari rerata provinsi menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada level yang relatif lebih baik dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim merupakan manfaat ekosistem yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan iklim lokal, regional, maupun global. Ekosistem, terutama hutan, rawa, dan lahan basah, memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO_2) yang merupakan salah satu gas rumah kaca utama penyebab perubahan iklim. Selain itu, jasa lingkungan ini juga mencakup regulasi suhu, kelembapan, dan pola curah hujan melalui interaksi antara vegetasi dan atmosfer.

Tabel 2. 14 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Prov. Kalimantan Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah

Kabupaten	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim					
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Hulu Sungai Tengah	81.176	18.767	29.948	26.405	3.042	156.340
Prov. Kalsel	1.214.108	855.097	957.576	624.759	43.321	3.713.860

Sumber : Dokumen Ranwal RPJMD 2025-2029 Prov. Kalimantan Selatan.

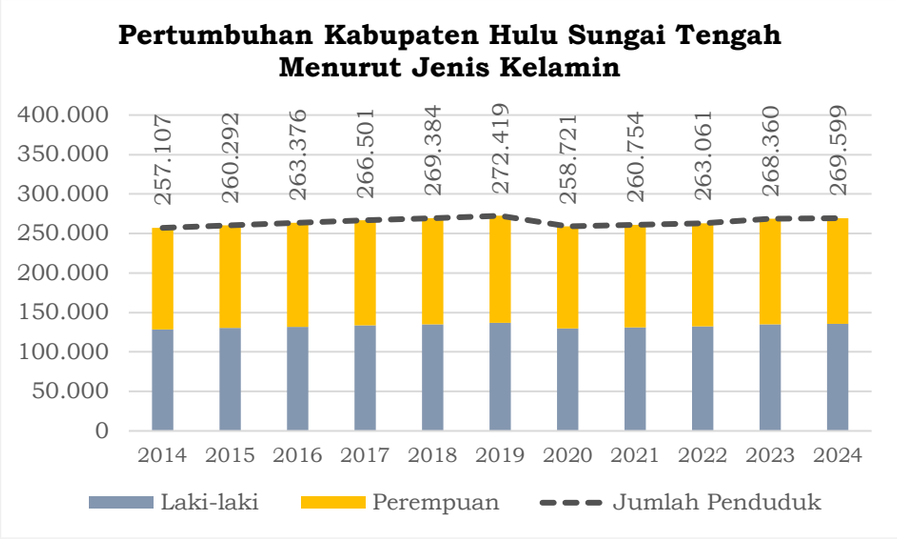
Perbandingan distribusi jasa lingkungan pengatur iklim menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kapasitas tertinggi dalam kategori tinggi dengan persentase mencapai 76,97%. Distribusi ini menunjukkan pentingnya peran ekosistem alami, seperti hutan dan lahan basah, dalam mendukung kemampuan pengaturan iklim di wilayah-wilayah dengan kapasitas tinggi. Di sisi lain, wilayah dengan kategori rendah membutuhkan intervensi berupa peningkatan ruang hijau, restorasi ekosistem, dan pengurangan emisi untuk memperbaiki fungsi ekosistem pengatur iklim.

2.1.1.7 Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Gambar berikut menyajikan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut jenis kelamin selama periode tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 2. 12 di bawah memperlihatkan tren pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 12 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2024



Sumber: kompilasi data Hulu Sungai Tengah Dalam Angka s.d 2025, Hasil Olahan 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama satu dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung positif, meskipun tidak sepenuhnya linier dan mengalami dinamika tertentu, khususnya pada tahun 2020. Tren ini mencerminkan perkembangan sosial-ekonomi dan arah pembangunan wilayah yang berlangsung secara berkelanjutan. Pada tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebanyak 257.107 jiwa, terdiri dari 128.464 jiwa laki-laki dan 128.643 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai 272.419 jiwa pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3.062 jiwa per tahun atau sekitar 1,2 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penyesuaian jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus mencatat jumlah penduduk sebesar 258.721 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Penurunan ini bukan disebabkan oleh faktor alami seperti migrasi atau penurunan angka kelahiran, melainkan akibat dari peningkatan akurasi metodologi pencacahan dan pembaruan basis data kependudukan nasional. Oleh karena itu, SP2020 ditetapkan sebagai baseline baru dalam penghitungan dan proyeksi penduduk di tahun-tahun berikutnya.

Setelah tahun 2020, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat menjadi 260.754 jiwa, bertambah menjadi 263.061 jiwa pada tahun 2022, 268.360 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 269.599 jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan antara tahun 2014 dan 2024, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 12.492 jiwa, atau meningkat sebesar 4,9 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk setelah tahun 2020 tercatat relatif melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, mencerminkan adanya transisi demografi yang perlu diantisipasi secara tepat dalam kebijakan pembangunan kependudukan daerah.

Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut jenis kelamin tahun 2024:

Tabel 2. 15 Jumlah penduduk dan Sex Ratio menurut kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio
1	Haruyan	11.370	11.114	22.484	102,3
2	Batu Benawa	10.401	10.306	20.707	100,92
3	Hantakan	6.762	6.336	13.098	106,72
4	Batang Alai Selatan	12.278	12.280	24.558	99,98
5	Batang Alai Timur	3.797	3.595	7.392	105,62
6	Barabai	27.880	28.076	55.956	99,3
7	Labuan Amas Selatan	15.186	15.084	30.270	100,68
8	Labuan Amas Utara	14.417	14.317	28.734	100,7
9	Pandawan	18.207	17.714	35.921	102,78
10	Batang Alai Utara	9.655	9.453	19.108	102,14
11	Limpasu	5.814	5.557	11.371	104,62
Jumlah		**135.767**	**133.832**	**269.599**	**101,45**

Sumber: kompilasi data Hulu Sungai Tengah Dalam Angka tahun 2025

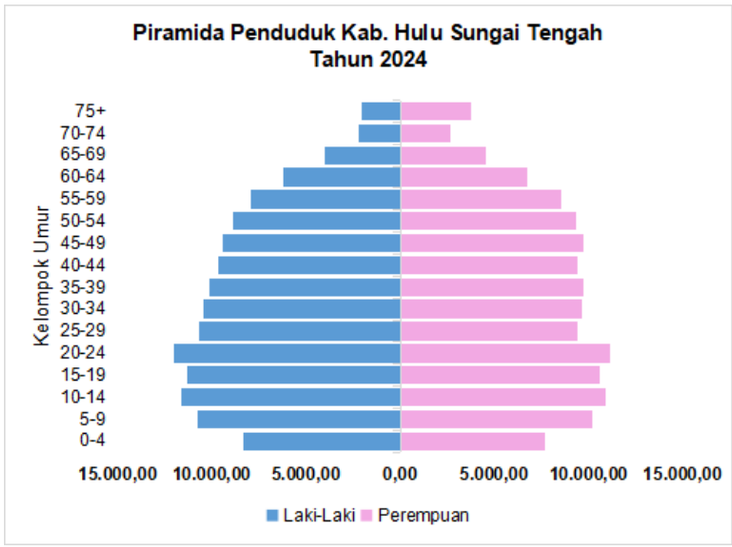
Distribusi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 menunjukkan pola persebaran yang bervariasi di antara sebelas kecamatan yang ada. Total jumlah penduduk tercatat sebesar 269.599 jiwa, terdiri dari 135.767 jiwa laki-laki dan 133.832 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 101,45, yang mengindikasikan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Kecamatan Barabai menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 55.956 jiwa atau sekitar 20,8 persen dari total penduduk kabupaten. Tingginya angka ini mencerminkan posisi Barabai sebagai pusat administrasi dan perekonomian daerah, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan simpul pelayanan publik utama di tingkat kabupaten. Selanjutnya, Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Selatan menempati urutan berikutnya dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 35.921 jiwa dan 30.270 jiwa, yang menunjukkan peran kedua kecamatan tersebut sebagai kawasan penyangga perkotaan serta lokasi permukiman yang tumbuh pesat.

Di sisi lain, Kecamatan Batang Alai Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 7.392 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Limpasu dengan 11.371 jiwa. Kondisi ini dapat diasosiasikan dengan keterbatasan aksesibilitas, kondisi geografis yang relatif terpencil, serta tingkat pelayanan infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, wilayah-wilayah ini tetap memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi dan potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Dari sisi komposisi gender, Kecamatan Hantakan menunjukkan sex ratio tertinggi, yaitu sebesar 106,72, mengindikasikan dominasi penduduk laki-laki yang cukup signifikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan struktur pekerjaan atau sektor ekonomi lokal yang lebih banyak melibatkan tenaga kerja laki-laki, seperti sektor kehutanan, pertambangan rakyat, atau pertanian lahan kering. Sebaliknya, Kecamatan Barabai memiliki sex ratio terendah yaitu 99,3, yang berarti jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini cukup lazim di kawasan perkotaan, di mana peran sosial perempuan dalam sektor jasa, pendidikan, dan pelayanan cenderung lebih besar.

Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2025, Publikasi BPS 2025, Hasil Olahan 2025

Distribusi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 20–24 tahun, yaitu sebanyak 23.120 jiwa, terdiri dari 12.030 laki-laki dan 11.090 perempuan. Kelompok usia lainnya yang juga memiliki jumlah cukup besar adalah usia 10–14 tahun (22.495 jiwa), 15–19 tahun (21.955 jiwa), dan 5–9 tahun (20.967 jiwa).

Jumlah penduduk secara umum cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini terlihat pada kelompok umur lanjut usia (65 tahun ke atas), yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Misalnya, kelompok umur 70–74 tahun berjumlah 4.893 jiwa, dan kelompok 75 tahun ke atas berjumlah 5.786 jiwa.

Dari segi jenis kelamin, penduduk laki-laki mendominasi pada sebagian besar kelompok umur, terutama pada usia produktif dan anak-anak. Ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan paling mencolok terlihat pada kelompok umur 20–24 tahun, dengan selisih 940 jiwa lebih banyak laki-laki.

Sejalan dengan dinamika kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya, proyeksi penduduk menjadi instrumen penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam

memperkirakan kebutuhan pelayanan dasar, alokasi sumber daya, serta pengendalian pertumbuhan penduduk di masa mendatang.

Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2030 di Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Tengah (Ribu Jiwa)

KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan	4.323.33	4.372.11	4.419.74	4.466.21	4.511.56	4.555,83
Hulu Sungai Tengah	271.23	273.67	276.03	278.31	280.53	282.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan

Tabel proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperkirakan terus meningkat dari 271,23 ribu jiwa pada 2025 menjadi 282,67 ribu jiwa pada 2030. Kenaikan rata-rata sekitar 2.200 jiwa per tahun ini mencerminkan laju pertumbuhan yang relatif moderat. Pola ini konsisten dengan tren transisi demografi yang ditandai oleh melambatnya pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlah penduduk tetap bertambah. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Kalimantan Selatan, proyeksi penduduk Hulu Sungai Tengah hanya menyumbang sekitar 6,3 persen dari total penduduk provinsi, menegaskan peran Hulu Sungai Tengah sebagai daerah dengan populasi menengah.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek

berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Analisis PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 17 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.704,46	24,17	1.744,45	23,59	1.840,25	23,15	1.983,04	23,07	2.170,81	23,18
B	Pertambangan dan Penggalian	52,39	0,74	53,50	0,72	58,25	0,73	63,12	0,73	67,19	0,72
C	Industri Pengolahan	990,17	14,04	1.040,97	14,08	1.112,74	14,00	1.104,78	12,86	1.183,21	12,63
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	12,72	0,18	13,61	0,18	14,77	0,19	15,95	0,19	17,11	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,20	0,50	36,48	0,49	38,91	0,49	42,76	0,50	45,31	0,48
F	Konstruksi	594,12	8,42	618,75	8,37	668,87	8,42	745,75	8,68	813,01	8,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819,73	11,62	869,66	11,76	979,03	12,32	1.103,54	12,84	1.187,86	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	333,67	4,73	342,69	4,63	384,70	4,84	458,58	5,34	509,85	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263,00	3,73	278,85	3,77	309,58	3,90	344,17	4,00	376,08	4,02
J	Informasi dan Komunikasi	329,81	4,68	359,14	4,86	391,31	4,92	430,28	5,01	467,97	5,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,20	2,21	165,59	2,24	177,05	2,23	197,32	2,30	211,79	2,26
L	Real Estate	238,54	3,38	256,15	3,46	277,38	3,49	299,27	3,48	323,00	3,45
M,N	Jasa Perusahaan	14,53	0,21	15,21	0,21	16,53	0,21	18,72	0,22	20,68	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	724,16	10,27	764,78	10,34	778,81	9,80	827,77	9,63	930,45	9,93
P	Jasa Pendidikan	528,22	7,49	557,40	7,54	598,09	7,53	631,34	7,35	681,63	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,79	2,15	171,50	2,32	184,43	2,32	198,32	2,31	217,09	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,65	1,47	105,14	1,42	116,88	1,47	129,33	1,50	142,98	1,53
Total	**PDRB ADHB**	**7.052,36**	**100,00**	**7.393,87**	**100,00**	**7.947,58**	**100,00**	**8.594,04**	**100,00**	**9.366,02**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Nilai PDRB meningkat dari Rp 7.052,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 9.366,01 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi lintas sektor di wilayah tersebut.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB, meskipun proporsi kontribusinya sedikit menurun dari 24,17% pada 2020 menjadi 23,18% pada 2024. Namun demikian, secara nominal sektor ini tumbuh signifikan dari Rp 1.704,46 miliar menjadi Rp 2.170,81 miliar.

Sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan nilai dari Rp 990,17 miliar (14,04%) pada 2020 menjadi Rp 1.183,21 miliar (12,63%) pada 2024. Meskipun terjadi penurunan persentase kontribusi, nilai absolut sektor ini tetap tumbuh.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mencatat pertumbuhan positif, dengan peningkatan nilai dari Rp 819,73 miliar (11,62%) pada 2020 menjadi Rp 1.187,86 miliar (12,68%) pada 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi dan distribusi barang di masyarakat.

Sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari Rp 333,67 miliar (4,73%) pada tahun 2020 menjadi Rp 509,85 miliar (5,44%) pada tahun 2024, mencerminkan meningkatnya konektivitas dan pergerakan logistik dalam wilayah.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib turut mengalami pertumbuhan nilai dari Rp 724,16 miliar (10,27%) menjadi Rp 930,45 miliar (9,93%) pada periode yang sama, meskipun proporsi kontribusinya terhadap total PDRB sedikit menurun.

Sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, serta informasi dan komunikasi juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, memperkuat peran sektor jasa dalam struktur perekonomian daerah.

Tabel 2. 18 PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024(Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.225,92	25,37	1.231,47	24,74	1.246,69	24,10	1.273,42	23,64	1.320,52	23,36
B	Pertambangan dan Penggalian	36,15	0,75	36,63	0,74	38,32	0,74	39,86	0,74	41,16	0,73
C	Industri Pengolahan	681,74	14,11	696,94	14,00	728,00	14,07	732,18	13,59	757,38	13,40
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	7,58	0,16	7,90	0,16	8,50	0,16	9,10	0,17	9,68	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,03	0,52	25,67	0,52	26,99	0,52	29,10	0,54	30,32	0,54
F	Konstruksi	415,56	8,60	427,33	8,58	445,68	8,61	474,78	8,82	503,41	8,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	514,79	10,65	537,21	10,79	574,50	11,10	601,50	11,17	626,00	11,07
H	Transportasi dan Pergudangan	228,18	4,72	233,86	4,70	249,02	4,81	266,53	4,95	281,78	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,85	3,74	185,45	3,73	198,58	3,84	217,30	4,03	232,06	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	257,67	5,33	279,73	5,62	298,36	5,77	321,09	5,96	342,30	6,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	102,11	2,11	103,92	2,09	102,95	1,99	112,87	2,10	119,63	2,12
L	Real Estate	174,35	3,61	181,35	3,64	192,49	3,72	204,45	3,80	214,93	3,80
M,N	Jasa Perusahaan	9,10	0,19	9,36	0,19	9,87	0,19	10,52	0,20	11,19	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,89	9,25	465,73	9,36	465,18	8,99	475,64	8,83	514,78	9,11
P	Jasa Pendidikan	362,64	7,50	380,86	7,65	403,76	7,80	420,98	7,82	438,89	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,96	2,07	109,72	2,20	115,36	2,23	123,12	2,29	129,85	2,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	64,22	1,33	65,10	1,31	69,31	1,34	73,57	1,37	78,99	1,40
Total	**PDRB ADHB**	**4.832,74**	**100,00**	**4.978,23**	**100,00**	**5.173,56**	**100,00**	**5.386,01**	**100,00**	**5.652,87**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Nilai total PDRB ADHK naik dari Rp 4.832,75 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.652,88 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang positif dan berkelanjutan di berbagai lapangan usaha.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp 1.320,52 miliar (23,36%) pada tahun 2024, meningkat dari Rp 1.225,92 miliar (25,37%) pada tahun 2020. Meskipun persentase kontribusinya mengalami sedikit penurunan, nilai riil sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan.

Sektor Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan dari Rp 681,74 miliar (14,11%) pada tahun 2020 menjadi Rp 757,38 miliar (13,40%) pada tahun 2024. Sektor ini tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan stabil, dari Rp 514,79 miliar (10,65%) pada tahun 2020 menjadi Rp 626,00 miliar (11,07%) pada tahun 2024.

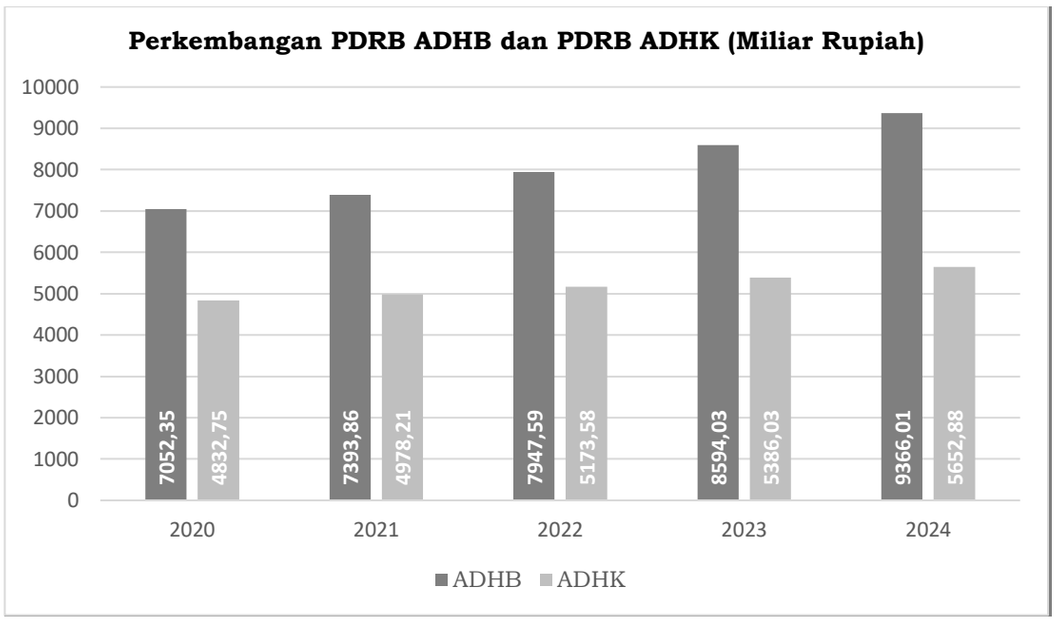
Sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp 228,18 miliar (4,72%) pada tahun 2020 menjadi Rp 281,78 miliar (4,98%) pada tahun 2024. Begitu pula dengan sektor Informasi dan Komunikasi, yang mengalami peningkatan dari Rp 257,67 miliar (5,33%) menjadi Rp 342,30 miliar (6,06%) selama periode yang sama.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat kenaikan dari Rp 446,89 miliar (9,25%) pada tahun 2020 menjadi Rp 514,78 miliar (9,11%) pada tahun 2024, menunjukkan peran yang tetap signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

Secara grafik Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK, serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai

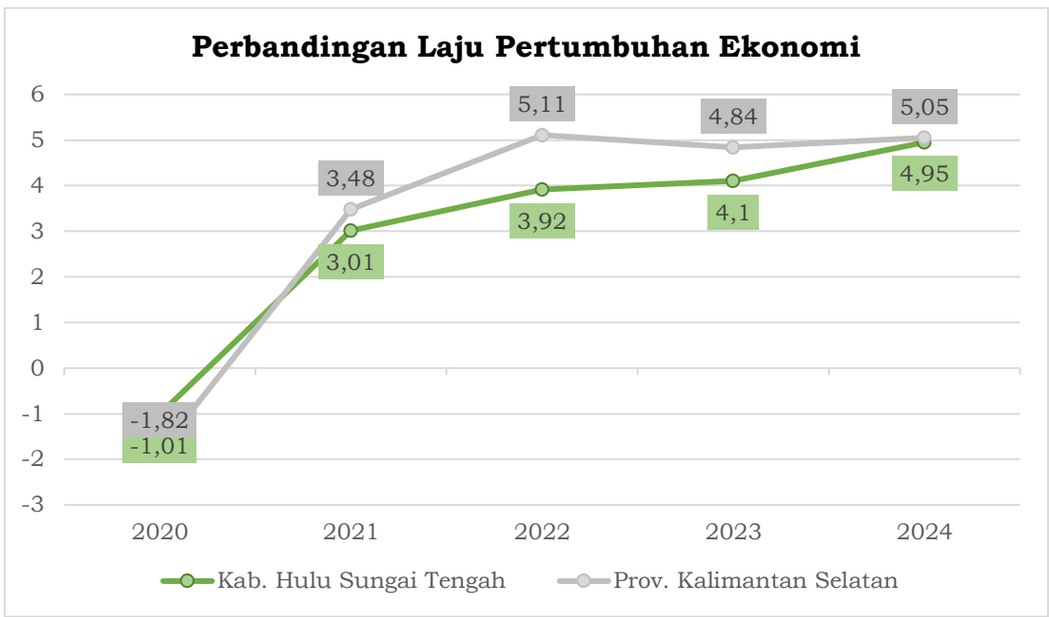
Tengah antara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 14 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Gambar 2. 15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 yang mencapai 4,76% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,09%. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020

menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak signifikan bagi keduanya, di mana Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan sebesar -1,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang lebih dalam yaitu sebesar -1,82%.

Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 3,01%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 3,48%. Tren pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,92%, meskipun masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 5,11%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat menjadi 4,10%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,84%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus menunjukkan perbaikan dan meningkat menjadi 4,95%. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2019–2024 mencapai 3,46%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 3,79%. Meskipun demikian, tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus menunjukkan pemulihan dan penguatan.

Tabel 2. 19 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024

KATEGORI	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,17	25,37	23,59	24,74	23,15	24,1	23,07	23,64	23,18	23,36
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,75	0,72	0,74	0,73	0,74	0,73	0,74	0,72	0,73
C	Industri Pengolahan	14,04	14,11	14,08	14	14	14,07	12,86	13,59	12,63	13,4
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,16	0,18	0,16	0,19	0,16	0,19	0,17	0,18	0,17
E	Pengadaan Air	0,5	0,52	0,49	0,52	0,49	0,52	0,5	0,54	0,48	0,54
F	Konstruksi	8,42	8,6	8,37	8,58	8,42	8,61	8,68	8,82	8,68	8,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,62	10,65	11,76	10,79	12,32	11,1	12,84	11,17	12,68	11,07
H	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,72	4,63	4,7	4,84	4,81	5,34	4,95	5,44	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,73	3,74	3,77	3,73	3,9	3,84	4	4,03	4,02	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,68	5,33	4,86	5,62	4,92	5,77	5,01	5,96	5	6,06
K	Jasa Keuangan	2,21	2,11	2,24	2,09	2,23	1,99	2,3	2,1	2,26	2,12
L	Real Estate	3,38	3,61	3,46	3,64	3,49	3,72	3,48	3,8	3,45	3,8
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,19	0,21	0,19	0,21	0,19	0,22	0,2	0,22	0,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,27	9,25	10,34	9,36	9,8	8,99	9,63	8,83	9,93	9,11
P	Jasa Pendidikan	7,49	7,5	7,54	7,65	7,53	7,8	7,35	7,82	7,28	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,07	2,32	2,2	2,32	2,23	2,31	2,29	2,32	2,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,33	1,42	1,31	1,47	1,34	1,5	1,37	1,53	1,4
Total	**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sebesar 23,07% terhadap PDRB ADHB dan 23,64% terhadap PDRB ADHK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022, kontribusi sektor ini mengalami sedikit penurunan dari 23,15% (ADHB) dan 24,10% (ADHK). Penurunan tersebut masing-masing sebesar 0,08% (ADHB) dan 0,46% (ADHK).

Sebelumnya, pada tahun 2021, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 23,59% (ADHB) dan 24,74% (ADHK), yang berarti terjadi penurunan berturut-turut pada tahun 2022 sebesar 0,44% (ADHB) dan 0,64% (ADHK). Jika dilihat secara tren, sejak tahun 2020 kontribusi sektor ini terus mengalami koreksi dan fluktuasi.

Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tetapi juga diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti bencana banjir, fenomena cuaca ekstrem La Niña Triple Dip, serta alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan perlambatan dalam pemulihan sektor ini.

Pada tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya pulih, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 23,18% (ADHB) dan 23,36% (ADHK). Namun, capaian ini masih berada di bawah posisi sebelum pandemi, yakni lebih dari 24%, yang menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam tahap pemulihan menuju kondisi normal.

Tabel 2. 20 Pergeseran Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADHB antara Tahun 2020 dan 2024

KATEGORI	URAIAN	2023	2024	Pergeseran
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,07	23,18	0,48
B	Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,72	-1,37
C	Industri Pengolahan	12,86	12,63	-1,79
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,19	0,18	-5,26

KATEGORI	URAIAN	2023	2024	Pergeseran
E	Pengadaan Air	0,5	0,48	-4
F	Konstruksi	8,68	8,68	0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,84	12,68	-1,25
H	Transportasi dan Pergudangan	5,34	5,44	1,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4	4,02	0,5
J	Informasi dan Komunikasi	5,01	5	-0,2
K	Jasa Keuangan	2,3	2,26	-1,74
L	Real Estate	3,48	3,45	-0,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,63	9,93	3,12
P	Jasa Pendidikan	7,35	7,28	-0,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,31	2,32	0,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,5	1,53	2
Total	**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**	**100**	**100**	

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Meskipun nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kontribusi dari 23,07% pada tahun 2023 menjadi 23,18% pada tahun 2024 (naik 0,48%), namun peningkatan ini masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB, pertumbuhannya tidak jauh melampaui sektor-sektor lain yang berkembang lebih cepat.

Sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,79%, dari 12,86% menjadi 12,63%. Penurunan ini cukup signifikan dan mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga efisiensi dan daya saing industri pengolahan, yang merupakan salah satu sektor kunci dalam struktur ekonomi daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,25%. Meskipun secara nominal sektor ini mungkin tumbuh, namun laju pertumbuhannya kalah dibandingkan dengan sektor lain.

Sebaliknya, sektor transportasi dan pergudangan mencatat peningkatan kontribusi sebesar 1,87%, dari 5,34% menjadi 5,44%. Peningkatan ini menandakan semakin

pentingnya sektor ini dalam mendukung distribusi dan logistik daerah.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif dengan peningkatan kontribusi sebesar 0,5%. Ini menunjukkan adanya geliat pada sektor pariwisata dan layanan pendukungnya.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menunjukkan lonjakan kontribusi yang paling tinggi, yakni sebesar 3,12%. Kenaikan ini menunjukkan peran signifikan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Sebaliknya, beberapa sektor lainnya seperti jasa keuangan (-1,74%), informasi dan komunikasi (-0,2%), serta jasa pendidikan (-0,95%) mengalami penurunan kontribusi yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,26	0,45	1,24	2,14	3,7
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,17	1,34	4,62	4,01	3,25
C	Industri Pengolahan	-3,46	2,23	4,46	0,57	3,44
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	4,22	4,27	7,61	7,05	6,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,37	2,53	5,14	7,83	4,2
F	Konstruksi	-2,91	2,83	4,29	6,53	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,37	4,36	6,94	4,70	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,88	2,49	6,48	7,03	5,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,65	2,54	7,08	9,43	6,79
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	8,56	6,66	7,62	6,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,77	-0,93	9,63	5,99
L	Real Estate	2,02	4,01	6,15	6,21	5,12
M,N	Jasa Perusahaan	-3,07	2,76	5,49	6,56	6,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,04	4,22	-0,12	2,25	8,23
P	Jasa Pendidikan	1,08	5,02	6,01	4,26	4,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	9,76	5,14	6,73	5,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,67	1,37	6,47	6,14	7,37
Total	PDRB	-1,01	3,01	3,92	4,11	4,95

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selain struktur perekonomian, laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor juga dapat diketahui dengan

melihat PDRB atas dasar harga konstan. Tabel berikut menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut lapangan usaha, dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2023, nilai PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 5,386 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,174 triliun rupiah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,11 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 3,92 persen, atau naik 0,19 persen.

Namun demikian, peningkatan ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan lonjakan pertumbuhan dari tahun 2021 ke 2022 yang mencapai 0,91 persen (dari 3,01% menjadi 3,92%). Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi perlambatan ini adalah belum optimalnya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan—sektor utama penopang perekonomian daerah—yang hanya tumbuh 2,14 persen pada 2023, meskipun terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sektor-sektor lain menunjukkan kinerja yang cukup baik:

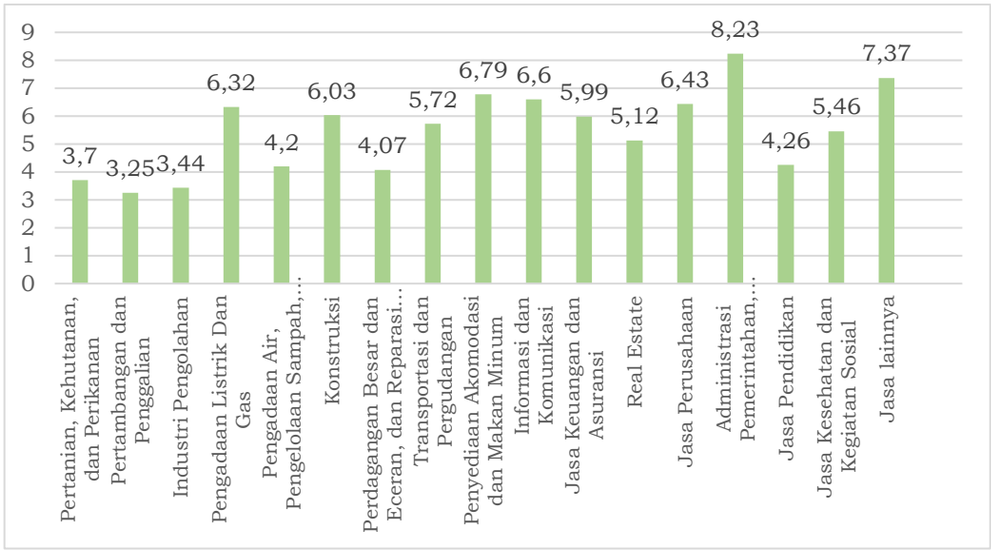
- Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi dengan 9,43 persen, menunjukkan pemulihan yang kuat di sektor pariwisata dan perhotelan.
- Jasa keuangan dan asuransi mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 9,63 persen, menandakan adanya geliat pada aktivitas perbankan dan keuangan.
- Sektor pengadaan air, limbah, dan daur ulang serta pengadaan listrik dan gas juga tumbuh stabil tinggi masing-masing sebesar 7,83% dan 7,05%.
- Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 7,03 persen,

mencerminkan pentingnya sektor logistik dan distribusi dalam perputaran ekonomi daerah.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan yang merupakan salah satu sektor strategis, justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan hanya 0,57 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,46 persen. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam peningkatan produksi atau daya saing industri lokal.

Sektor administrasi pemerintahan juga tumbuh lamban dengan hanya 2,25 persen, yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja serta program-program publik untuk mendorong kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pertumbuhan yang cukup merata dan relatif positif di hampir seluruh lapangan usaha.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,23 persen, menunjukkan peningkatan belanja pemerintah atau efektivitas program-program publik. Diikuti oleh Jasa Lainnya yang juga tumbuh signifikan sebesar 7,37 persen,

serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 6,79 persen, mengindikasikan terus meningkatnya mobilitas dan kegiatan pariwisata.

Sektor-sektor jasa lainnya yang mencatat pertumbuhan tinggi adalah:

- Jasa Perusahaan: 6,43 persen
- Informasi dan Komunikasi: 6,6 persen
- Pengadaan Listrik dan Gas: 6,32 persen
- Konstruksi: 6,03 persen
- Jasa Keuangan dan Asuransi: 5,99 persen
- Transportasi dan Pergudangan: 5,72 persen

Pertumbuhan yang cukup baik juga tercatat di sektor:

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 5,46 persen
- Real Estate: 5,12 persen
- Jasa Pendidikan: 4,26 persen
- Pengadaan Air dan Limbah: 4,2 persen
- Perdagangan dan Reparasi Kendaraan: 4,07 persen

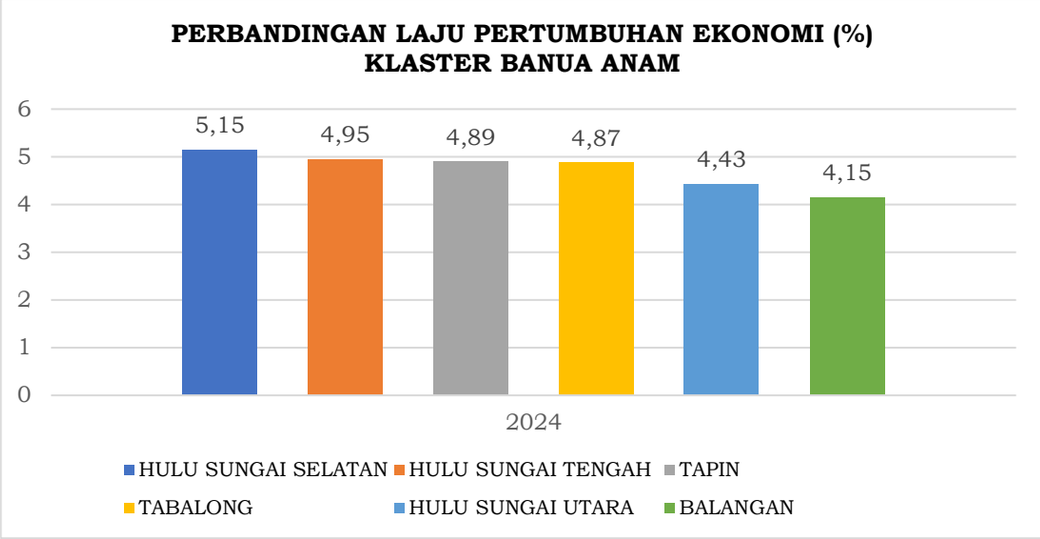
Sementara itu, beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, seperti:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 3,7 persen
- Industri Pengolahan: 3,44 persen
- Pertambangan dan Penggalian: 3,25 persen

Kinerja sektor-sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berada dalam tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup solid, dengan dorongan utama berasal dari sektor jasa, administrasi publik, dan pariwisata.

Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan beberapa kabupaten sekitarnya tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kalimantan Selatan, 2025

B. PDRB per Kapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut disajikan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel 2. 22 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Perkapita (Juta Rupiah)	27,26	28,34	30,15	32,28	34,85
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB (%)	0,18	4,84	7,49	8,13	8,98

Sumber : Diolah dari data BPS Hulu Sungai Tengah, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2020-2024 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita terus mengalami kenaikan, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara nominal.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp27,26 juta, kemudian naik menjadi Rp28,34 juta pada tahun 2021, Rp30,15 juta pada tahun 2022, Rp32,28 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp34,85 juta pada tahun 2024. Kenaikan nilai nominal ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor inflasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat.

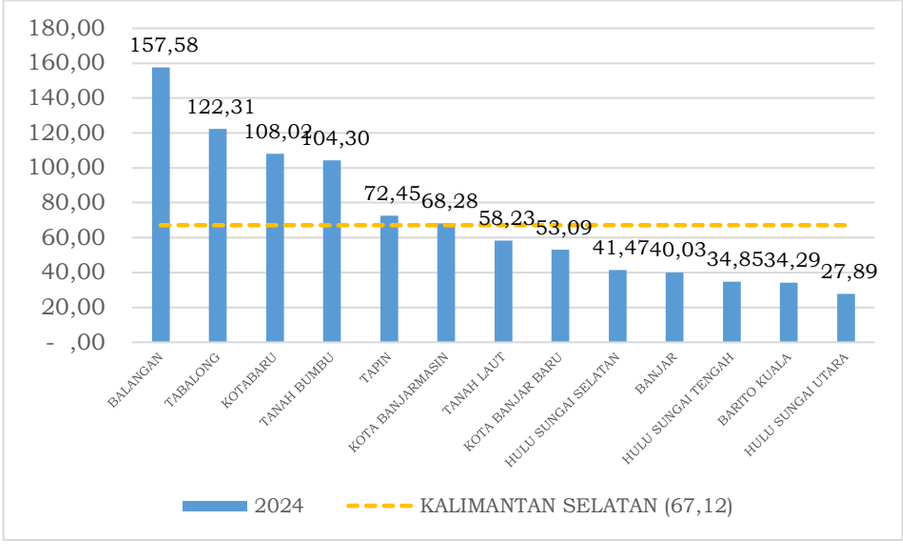
Namun, untuk memahami dinamika ekonomi secara lebih mendalam, perlu dilihat juga laju pertumbuhan ekonomi riil yang menggambarkan pertumbuhan volume produksi barang dan jasa. Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Setelah hanya tumbuh 0,18% pada tahun 2020—yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19—pertumbuhan ekonomi melonjak menjadi 4,84% pada tahun 2021, 7,49% pada tahun 2022, 8,13% pada tahun 2023, dan mencapai 8,98% pada tahun 2024. Tren positif ini

mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan nilai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirangkum sebagai berikut:

Gambar 2. 18 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan perbedaan struktur dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan mencatatkan nilai PDRB per kapita tertinggi, yakni sebesar Rp157,58 juta. Disusul oleh Kabupaten Tabalong dengan nilai sebesar Rp122,31 juta, serta Kabupaten Kotabaru yang mencapai Rp108,02 juta. Ketiga kabupaten ini dikenal sebagai daerah dengan dominasi sektor pertambangan, khususnya batubara, yang memberikan kontribusi besar terhadap output ekonomi daerah.

Tingginya nilai PDRB per kapita di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama hasil tambang. Aktivitas pertambangan yang padat modal dan bernilai tinggi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan, meskipun belum

tentu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata jika tidak disertai dengan pemerataan pendapatan.

Sebaliknya, beberapa kabupaten lainnya mencatatkan nilai PDRB per kapita yang relatif rendah. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi terendah dengan nilai Rp27,89 juta, diikuti oleh Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp34,29 juta, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp34,85 juta. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, yang nilai tambahnya relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan.

Perbedaan nilai PDRB per kapita ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang besar mampu menghasilkan output ekonomi yang tinggi, sementara daerah lainnya yang tidak melakukan eksplorasi kekayaan alam serupa cenderung memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang lebih rendah.

C. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan. Pola konsumsi ini mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan perubahan pola hidup. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), proporsi pengeluaran untuk kedua komponen tersebut mengalami variasi, namun secara umum pengeluaran untuk makanan tetap menempati porsi yang lebih besar dibandingkan non makanan. Adapun data terkait pengeluaran konsumsi makanan per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 23 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai :					
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita Sebulan (Rp)	565.671	605.674	558.296	734.127	769.588
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi non Makanan Perkapita Sebulan (Rp)	443.854	560.367	363.293	495.517	539.359
Persentase :					
Persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita (%)	56,03	51,94	60,58	59,70	58,79
Persentase pengeluaran konsumsi non makanan perkapita (%)	43,97	48,06	39,42	40,30	41,21

Sumber : Diolah dari Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025

Berdasarkan data periode 2020–2024, terlihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi makanan per kapita mengalami fluktuasi, dimulai dari 56,03 persen pada tahun 2020, turun menjadi 51,94 persen pada 2021, lalu meningkat signifikan menjadi 60,58 persen pada 2022. Pada 2023, persentase ini sedikit menurun menjadi 59,70 persen, dan kembali turun tipis ke 58,79 persen di tahun 2024. Sementara itu, persentase pengeluaran untuk non makanan bergerak berlawanan arah, dengan puncak tertinggi pada 2021 sebesar 48,06 persen, dan titik terendah pada 2022 sebesar 39,42 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan proporsi dari tahun ke tahun, kebutuhan pangan tetap menjadi komponen pengeluaran utama masyarakat HST, yang dapat dipengaruhi oleh faktor harga bahan pokok, daya beli, dan kondisi ekonomi daerah.

D. Indeks Gini

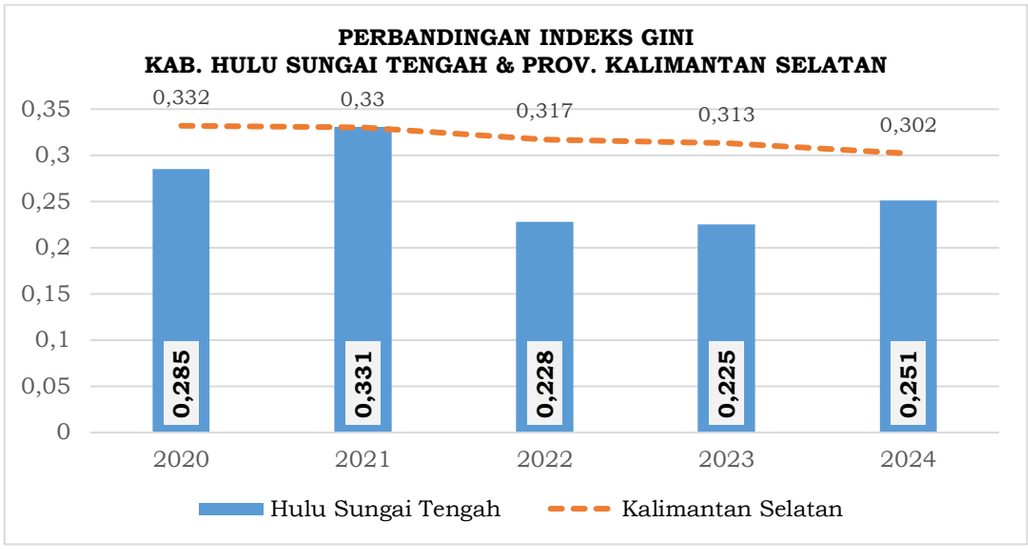
Pada tahun 2020, Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 0,285. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 0,331, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 0,228. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 0,225. Untuk tahun 2024, data Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami sedikir kenaikan dengan nilai 0,251.

Sementara itu, Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 adalah 0,332, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,330 di tahun 2021. Tren penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 0,317, kemudian 0,313 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0,302 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan, Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif lebih terkendali dibandingkan dengan kondisi di tingkat provinsi.

Grafik di bawah ini menggambarkan perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 2. 19 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024



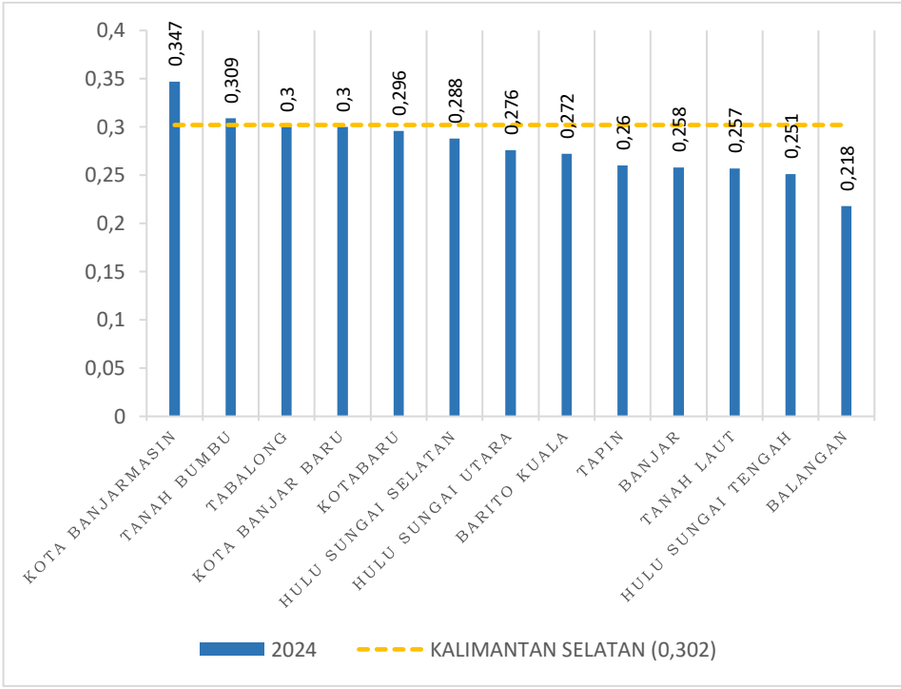
Sumber : diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Gini di wilayah klaster Banua Anam selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sebagian besar kabupaten mencatatkan nilai Indeks Gini di atas 0,28. Kabupaten Tabalong mencatat nilai tertinggi sebesar 0,346, diikuti oleh HSU (0,319), sementara Tapin dan HSS memiliki nilai yang lebih rendah yaitu 0,274 dan 0,300. Hulu Sungai Tengah (HST) berada di tengah-tengah dengan nilai 0,285.

Pada tahun 2021, HST mengalami lonjakan ketimpangan dengan Gini Ratio tertinggi di klaster sebesar 0,331, disusul oleh HSU (0,378) yang menjadi yang tertinggi di antara semua kabupaten. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2023, tren penurunan ketimpangan terjadi secara menyeluruh di seluruh wilayah Banua Anam.

Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai 0,225 menjadi kabupaten dengan tingkat ketimpangan terendah nomor 2 setelah Kabupaten Balangan.

Gambar 2. 20 Perbandingan Gini Ratio Tahun 2024
Kabupaten & Kota di Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

E. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Semakin rendah nilai indeks ini, semakin merata distribusi kegiatan ekonomi antarwilayah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan data nilai Indeks Williamson provinsi kalimantan selatan dalam lima tahun terakhir sebagai gambaran perkembangan pemerataan wilayah.

Dalam periode 2020–2024, nilai Indeks Williamson HST berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada awal periode dan menurun di tahun terakhir. Nilai pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,395, naik menjadi 0,429 di tahun 2021, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 0,502 dan 0,503. Penurunan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 0,433. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pembangunan antarwilayah dalam kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan kesenjangan pada pertengahan periode, kebijakan pemerataan pembangunan yang dijalankan mulai memberikan dampak positif. Arah penurunan nilai Indeks Williamson diharapkan terus berlanjut pada periode RPJMD 2025–2029 sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan inklusif di wilayah yang juga mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik makanan maupun non-makanan. Fenomena ini merupakan persoalan yang terus berlangsung dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel berikut menyajikan data lengkap perkembangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 24 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	5.64	15.470	0.430	0,060
2021	6.18	16.770	0.533	0,086
2022	5.92	16.144	0.749	0,147
2023	5.84	16.008	0.630	0,144
2024	5.81	16.027	0.745	0,141

Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selama periode 2020–2024, kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan penurunan yang relatif lambat. Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,64 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,18 persen. Setelah itu, angka kemiskinan mengalami penurunan bertahap masing-masing menjadi 5,92 persen pada 2022, 5,84 persen pada 2023, dan 5,81 persen pada 2024.

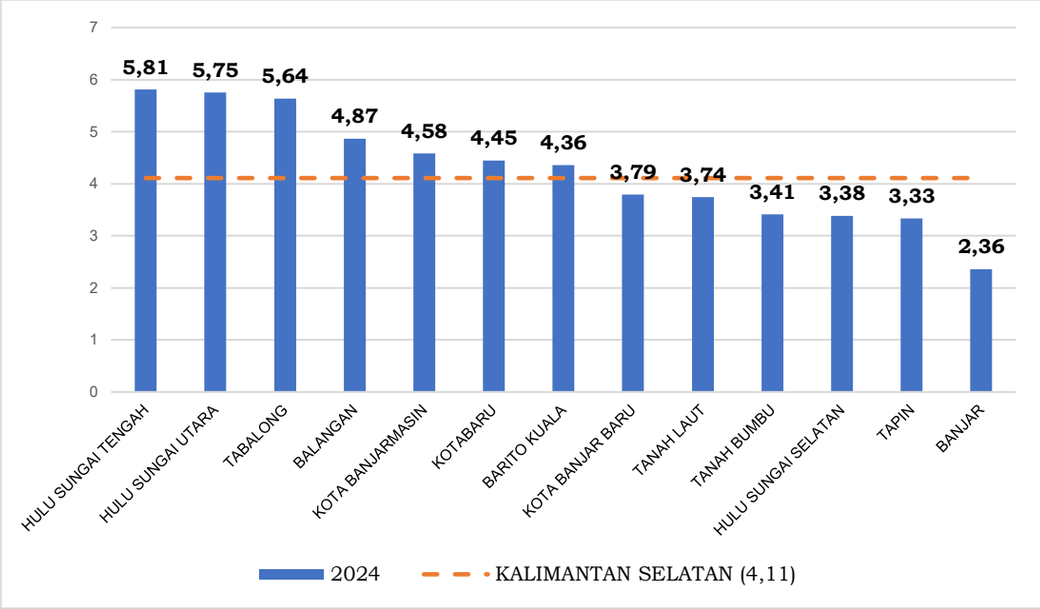
Dalam hal jumlah, penduduk miskin juga menunjukkan tren yang hampir serupa. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.470 jiwa, naik menjadi 16.770 jiwa pada 2021, lalu menurun secara bertahap menjadi 16.144 jiwa pada 2022, 16.008 jiwa pada 2023, dan 16.027 jiwa pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dalam empat tahun terakhir berlangsung sangat lambat, dengan selisih hanya sekitar 1,6 persen antara 2021 dan 2024.

Indikator tingkat kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Nilai P1 meningkat dari 0,430 pada tahun 2020 menjadi 0,533 pada 2021, kemudian naik signifikan menjadi 0,749 pada 2022, turun menjadi 0,630 pada 2023, dan kembali naik ke 0,745 pada 2024. Pergerakan ini menunjukkan perubahan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang tidak stabil selama periode tersebut.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin juga mengalami variasi. Nilai P2

meningkat dari 0,060 pada tahun 2020 menjadi 0,086 pada 2021, kemudian naik tajam ke 0,147 pada 2022, dan meskipun menurun sedikit menjadi 0,144 pada 2023 serta 0,141 pada 2024, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan awal periode.

Gambar 2. 21 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten & Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 5,81 persen, menempatkannya sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Selatan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara (5,75 persen) dan Kabupaten Tabalong (5,64 persen) yang berada di posisi kedua dan ketiga tertinggi.

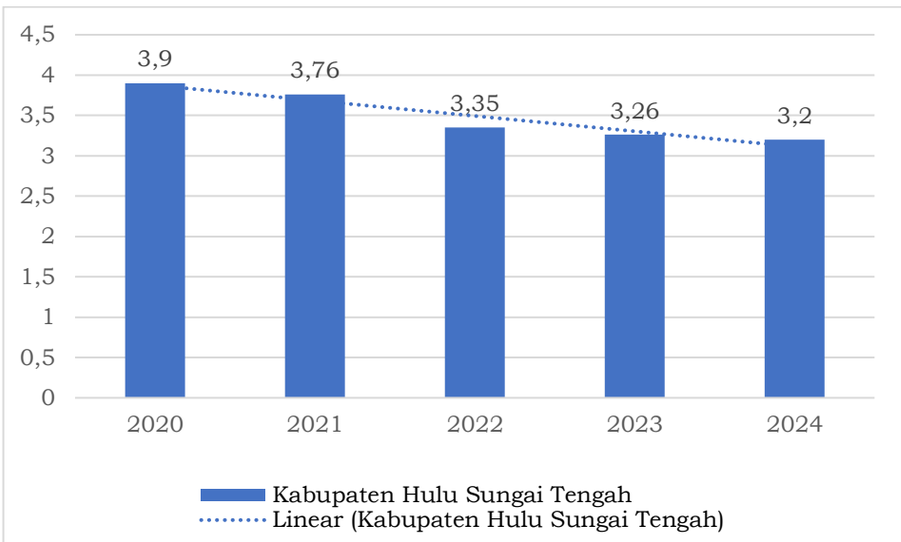
Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,11 persen, tingkat kemiskinan Hulu Sungai Tengah lebih tinggi sekitar 1,7 poin persen, yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah ini masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi.

Sementara itu, beberapa daerah menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Kabupaten Banjar mencatat persentase kemiskinan terendah sebesar 2,36 persen, diikuti Kabupaten Tapin (3,33 persen), Hulu Sungai Selatan (3,38 persen), dan Tanah Bumbu (3,41 persen).

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 3,96% dan berhasil turun menjadi 3,76% pada tahun 2021. Perbaikan semakin terlihat pada tahun 2022 dengan capaian 3,35%, kemudian menurun lagi menjadi 3,26% pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, TPT berhasil ditekan hingga 3,20%, menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah, seperti pemberdayaan UMKM, optimalisasi sektor pertanian, perdagangan, serta upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPT berhasil diturunkan sebesar 0,76 poin persentase atau sekitar 19,2% dari kondisi awal, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah serta landasan penting dalam penyusunan target dan strategi pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029.

Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Kompilasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2024

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), yang menunjukkan rata-rata usia hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan diperoleh dari data hasil sensus serta survei kependudukan.

Dimensi pengetahuan dilihat dari dua indikator utama. Pertama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Kedua, Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu estimasi lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah di masa mendatang.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yaitu rata-rata pengeluaran penduduk per tahun yang telah disesuaikan dengan daya beli (purchasing power parity/PPP), mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga dimensi tersebut digabungkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas hidup masyarakat suatu wilayah.

Selama periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 71,45 dan secara konsisten mengalami peningkatan hingga mencapai 73,33 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Perkembangan lebih rinci mengenai komponen penyusun IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Umur Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM
2020	71,46	12,2	8	12.153	71,45
2021	71,66	12,21	8,01	12.280	71,67
2022	72	12,22	8,28	12.448	72,32
2023	72,33	12,24	8,29	12.782	72,76
2024	72,60	12,68	8,52	13.176,	73,33

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2020, Angka Umur Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 71,46 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan secara konsisten selama lima tahun terakhir, hingga mencapai 72,60 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

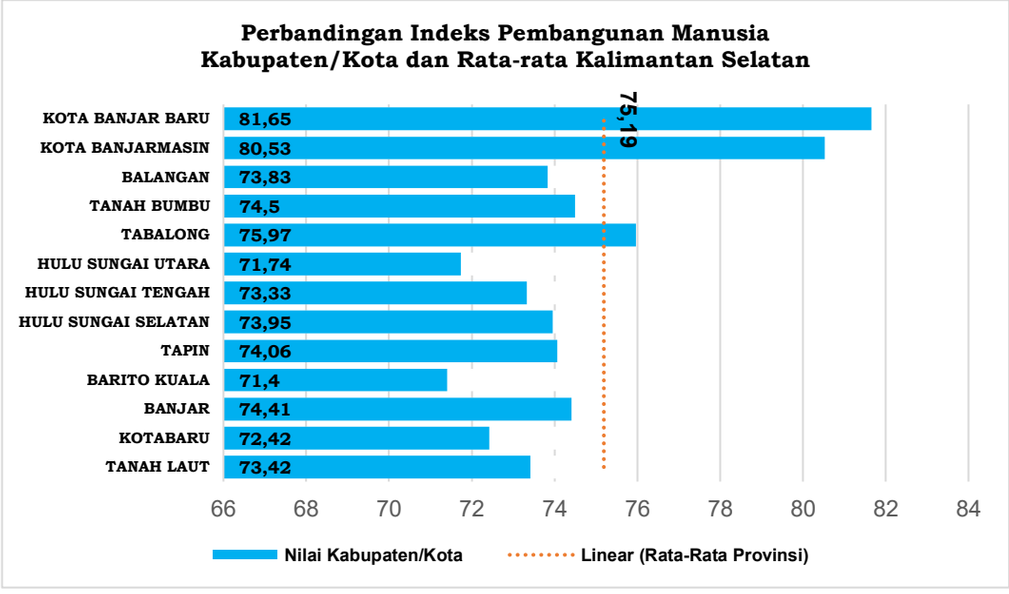
Angka Harapan Sekolah (HLS), yang mencerminkan estimasi lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia sekolah, juga mengalami peningkatan. Dari 12,20 tahun pada 2020, angka ini naik secara bertahap menjadi 12,68 tahun pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di daerah tersebut.

Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun rata-rata pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, meningkat dari 8,00 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,52 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan lebih lama.

Dari sisi ekonomi, Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan mengalami kenaikan dari Rp12.153.000 pada tahun 2020 menjadi Rp13.176.000 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan yang terjadi pada masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan perkembangan positif kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. IPM daerah ini meningkat secara stabil dari 71,45 pada tahun 2020 menjadi 73,33 pada tahun 2024.

Gambar 2. 23 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan,2025

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 73,33, yang menempatkannya pada peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun IPM Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, secara relatif masih berada di posisi menengah ke bawah dibandingkan daerah lain di provinsi ini.

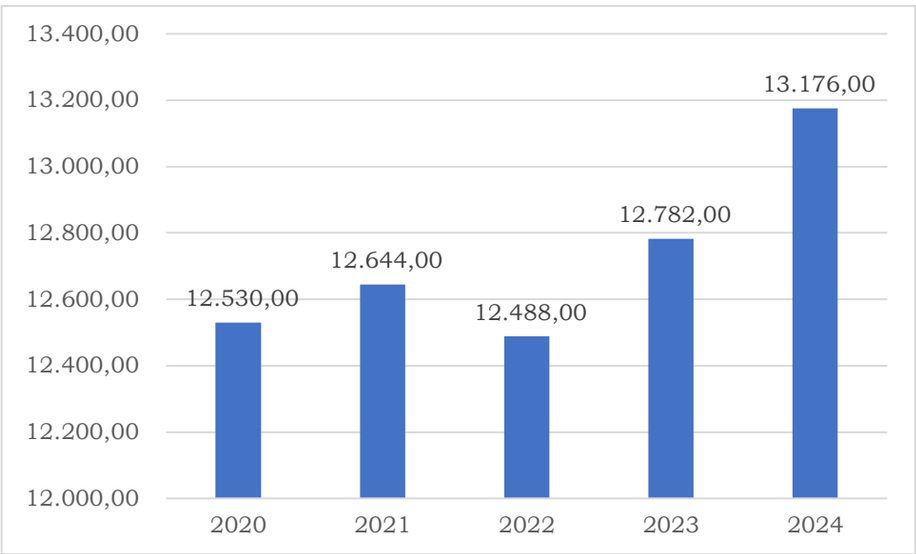
Kota Banjarbaru menempati posisi tertinggi dengan IPM mencapai 81,65, disusul oleh Kota Banjarmasin (80,53), yang mencerminkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kabupaten di daerah. Sementara itu, Kabupaten Barito Kuala mencatatkan IPM terendah di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 71,40.

Jika dilihat dari klaster Banua Anam yang terdiri dari enam kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di peringkat ke-5. Peringkat ini berada di atas Kabupaten Hulu Sungai Utara (71,74), namun masih tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di klaster tersebut. Kabupaten Tabalong menempati posisi tertinggi dengan IPM sebesar 75,97, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik di wilayah tersebut.

I. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan memberikan gambaran kondisi hidup layak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Hulu Sungai Tengah mencapai Rp13,016 juta per tahun naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,83 persen. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

Gambar 2. 24 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Disesuaikan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

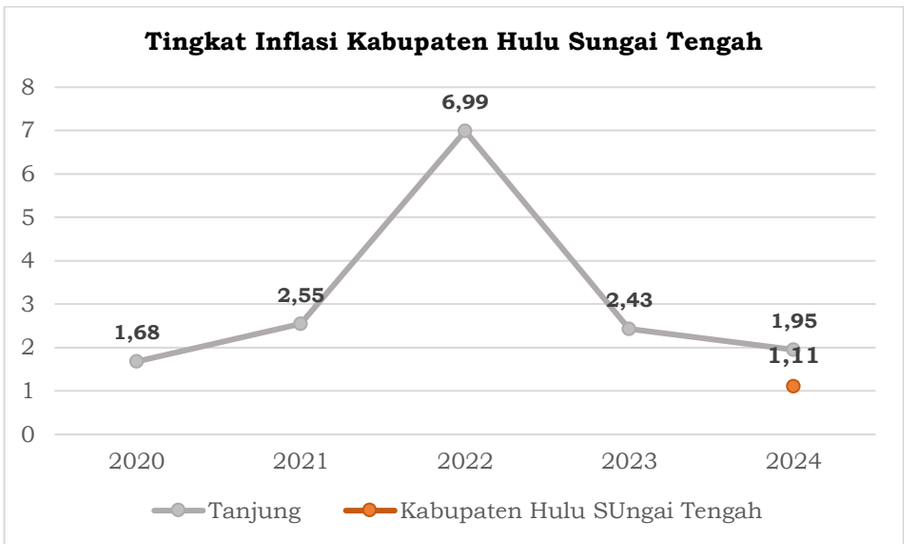
J. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar

negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Gambar 2. 25 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kalimantan Selatan, 2025

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelum tahun 2024 masih merujuk pada ukuran inflasi di Kota Tanjung. Hal ini disebabkan oleh belum

tersedianya pengukuran inflasi secara mandiri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, mulai tahun 2024, pengukuran inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilakukan secara tersendiri. Dengan demikian, data inflasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perekonomian di wilayah tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan konsistensi peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 71,46 tahun, kemudian naik menjadi 71,66 tahun pada 2021, 72,00 tahun pada 2022, 72,33 tahun pada 2023, dan mencapai 72,60 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan kesehatan, baik melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan tenaga kesehatan, maupun program preventif seperti imunisasi, posyandu, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Meskipun capaian ini positif, tantangan tetap ada, seperti menjaga kualitas lingkungan, mengatasi penyakit tidak menular, serta memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Dengan mempertahankan peningkatan ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpeluang mencapai angka harapan hidup yang lebih tinggi di masa depan, mendekati target nasional.

B. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Indikator angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan ukuran penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, serta efektivitas intervensi pemerintah di bidang kesehatan ibu dan anak. AKI menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga 42 hari setelah berakhirnya kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Kedua indikator ini secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sehingga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 26 Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu	N/A	79.1	171.2	126.3
Angka kematian bayi	N/A	17.1	17.7	10.4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

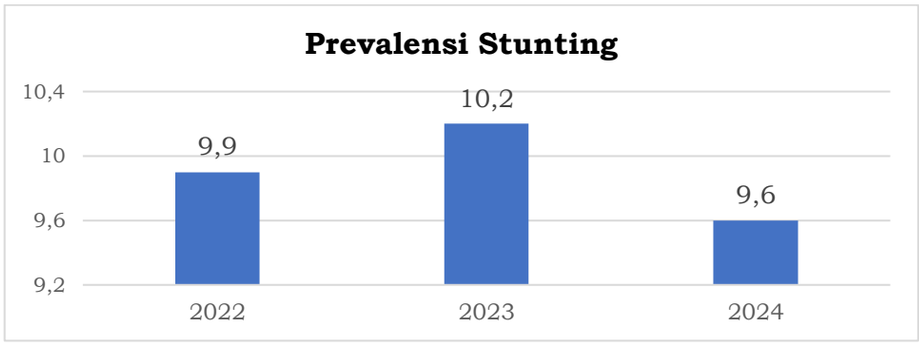
Berdasarkan data Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021–2024, terlihat dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 data tidak tersedia. Memasuki tahun 2022, angka

kematian ibu tercatat sebesar 79,1 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini relatif masih tinggi, namun pada tahun berikutnya justru melonjak tajam hingga mencapai 171,2. Lonjakan tersebut dapat mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan maternal, seperti keterlambatan rujukan, keterbatasan tenaga medis, atau meningkatnya kasus komplikasi kehamilan. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan yang cukup berarti dengan penurunan menjadi 126,3 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian bayi menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2022, AKB berada pada posisi 17,1 per 1.000 kelahiran hidup dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 17,7. Angka ini masih berada di atas target nasional yang ingin menurunkan AKB di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 10,4 per 1.000 kelahiran hidup.

C. Prevalensi Stunting

Indikator prevalensi stunting merupakan ukuran persentase balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta stimulasi yang tidak memadai, sehingga tinggi badan anak lebih rendah dibanding standar usianya. Indikator ini penting untuk memantau kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, karena stunting berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Gambar 2. 27 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

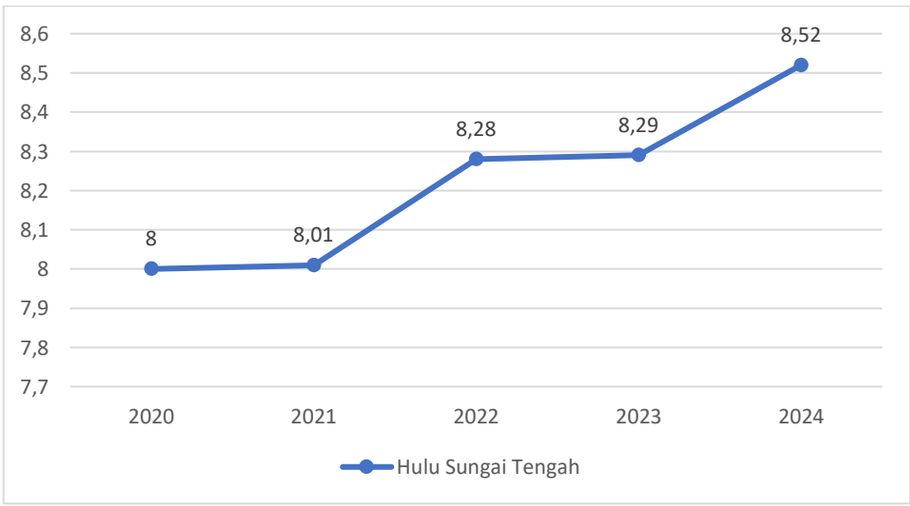
Prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 9,9 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 10,2 persen pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menekan kasus stunting, baik karena faktor gizi, kesehatan lingkungan, maupun pola asuh. Namun, pada tahun 2024 prevalensi stunting menurun kembali menjadi 9,6 persen.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,00 tahun, kemudian naik tipis menjadi 8,01 tahun pada 2021, meningkat lagi menjadi 8,28 tahun pada 2022, 8,29 tahun pada 2023, dan mencapai 8,52 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, di mana penduduk usia 15 tahun ke atas semakin lama menempuh pendidikan formal.

Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

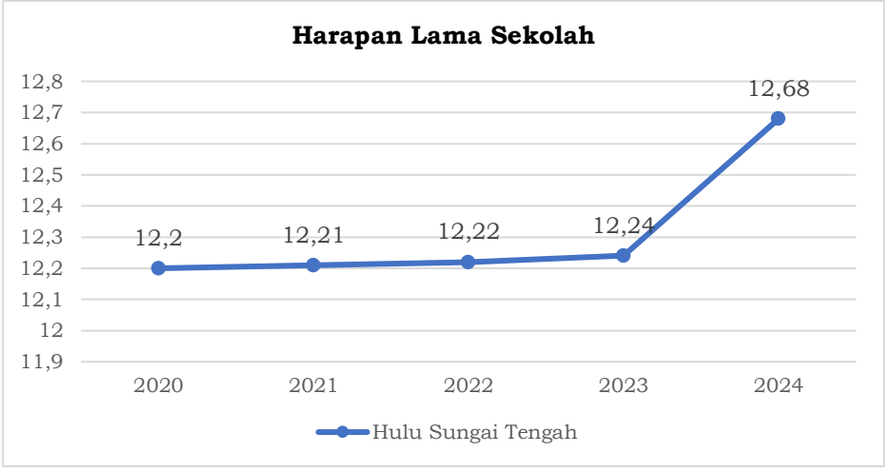
Meskipun ada peningkatan, capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat masih berada pada level pendidikan setara kelas VIII SMP. Artinya, sebagian

penduduk belum menamatkan pendidikan menengah atas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong keberlanjutan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi melalui kebijakan seperti beasiswa, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang merata, serta program pengentasan putus sekolah. Jika tren positif ini dapat dipertahankan dan dipercepat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpeluang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif di masa depan.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, HLS berada di angka 12,20 tahun, kemudian naik tipis menjadi 12,21 tahun pada 2021, 12,22 tahun pada 2022, dan 12,24 tahun pada 2023. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada 2024, yakni mencapai 12,68 tahun. HLS menggambarkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak yang memasuki usia sekolah pada tahun tertentu, dengan asumsi pola partisipasi pendidikan saat ini terus berlangsung sepanjang hidup mereka.

Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

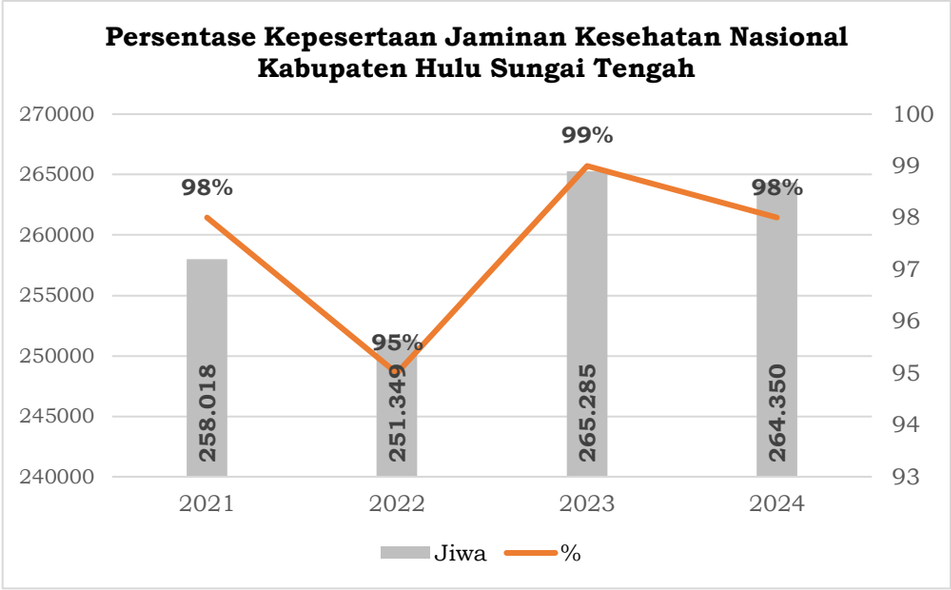
Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah. Nilai yang mendekati 13 tahun ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, anak-anak berpotensi menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas bahkan sebagian dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun demikian, peningkatan yang relatif lambat pada awal periode 2020–2023 menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk memperluas pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan.Perlindungan Sosial yang Adaptif

C. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan instrumen utama dalam sistem jaminan sosial nasional yang menjamin perlindungan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Analisis pada bagian ini menggambarkan kecenderungan capaian kepesertaan selama periode 2021–2024, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana penduduk telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan daerah. Narasi berikut menyajikan perkembangan tren kepesertaan dan proporsinya terhadap total penduduk, yang mencerminkan tingkat keterjangkauan dan kesinambungan layanan kesehatan di wilayah ini.

Gambar 2. 30 Pertumbuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



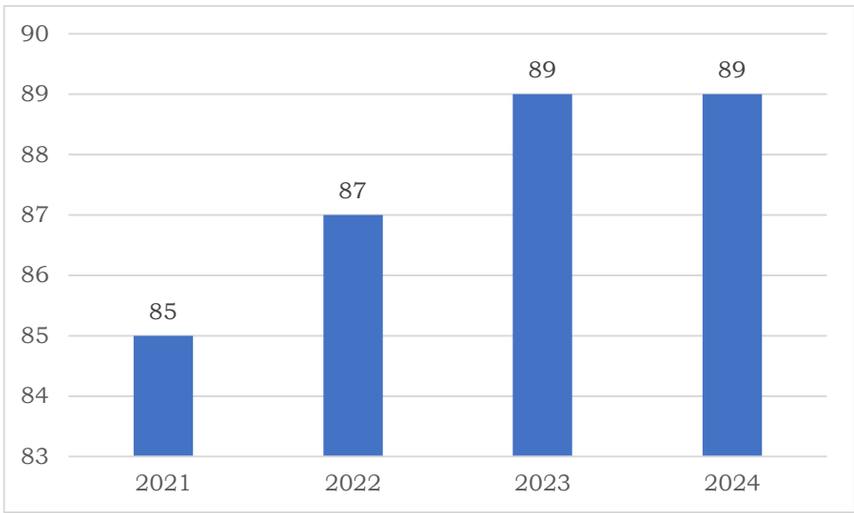
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Pada tahun 2021, jumlah peserta tercatat 258.018 jiwa (98%), kemudian menurun pada 2022 menjadi 251.349 jiwa (95%). Setelah itu, capaian meningkat tajam di tahun 2023 hingga 265.285 jiwa (99%), sebelum sedikit turun kembali di tahun 2024 menjadi 264.350 jiwa (98%).

D. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebagai intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat rentan yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kerentanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang membutuhkan, baik karena faktor ekonomi, disabilitas, usia lanjut, maupun kondisi kedaruratan sosial lainnya. Melalui bantuan sosial, diharapkan tercipta jaring pengaman sosial yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong tercapainya keadilan sosial.

Gambar 2. 31 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sosial



Sumber : Dinas Sosial, 2025

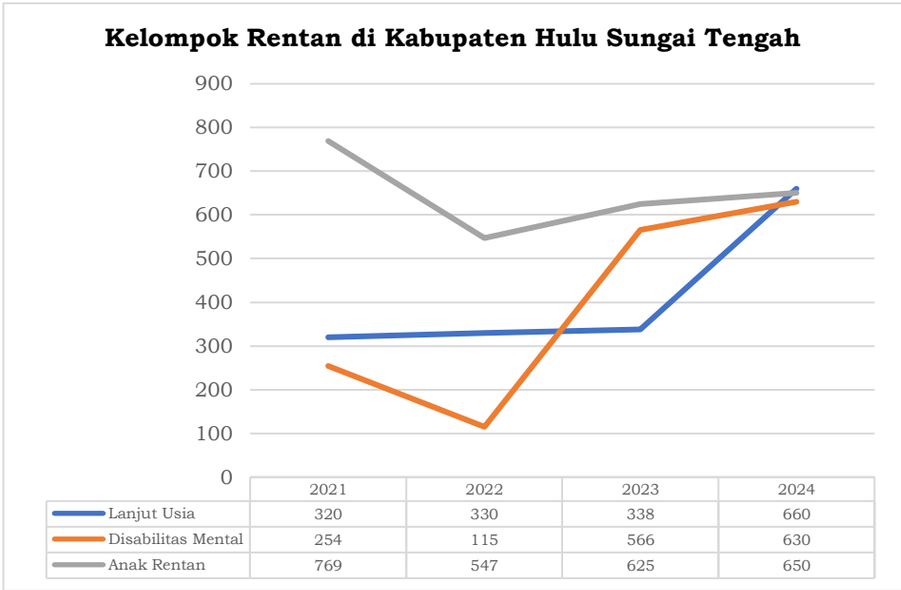
Capaian persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 persentase penerima berada di angka 85 persen, kemudian meningkat menjadi 87 persen pada tahun 2022. Tren kenaikan ini berlanjut hingga

tahun 2023, di mana capaian mencapai 89 persen dan stabil pada tingkat yang sama di tahun 2024.

E. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial menjadi perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak rentan. Perlindungan sosial ini merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar sekaligus melindungi mereka dari risiko sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

Gambar 2. 32 Jumlah Penduduk yang masuk Kelompok Rentang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 sd 2024



	2021	2022	2023	2024
Lanjut Usia	320	330	338	660
Disabilitas Mental	254	115	566	630
Anak Rentan	769	547	625	650

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas mental menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlahnya tercatat 254 jiwa, kemudian menurun tajam menjadi 115 jiwa pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan cukup tinggi hingga 566 jiwa dan meningkat lagi pada 2024 mencapai 630 jiwa. Lonjakan ini dapat diartikan sebagai hasil dari semakin baiknya pendataan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi disabilitas.

kelompok lanjut usia (lansia) jumlahnya cenderung stabil pada awal periode, yaitu 320 jiwa pada 2021, meningkat sedikit menjadi 330 jiwa di 2022, dan 338 jiwa di 2023. Namun pada 2024, angka ini melonjak drastis hingga 660 jiwa. Peningkatan

signifikan tersebut dapat menggambarkan adanya perbaikan dalam pencatatan data lansia serta kemungkinan bertambahnya angka harapan hidup masyarakat.

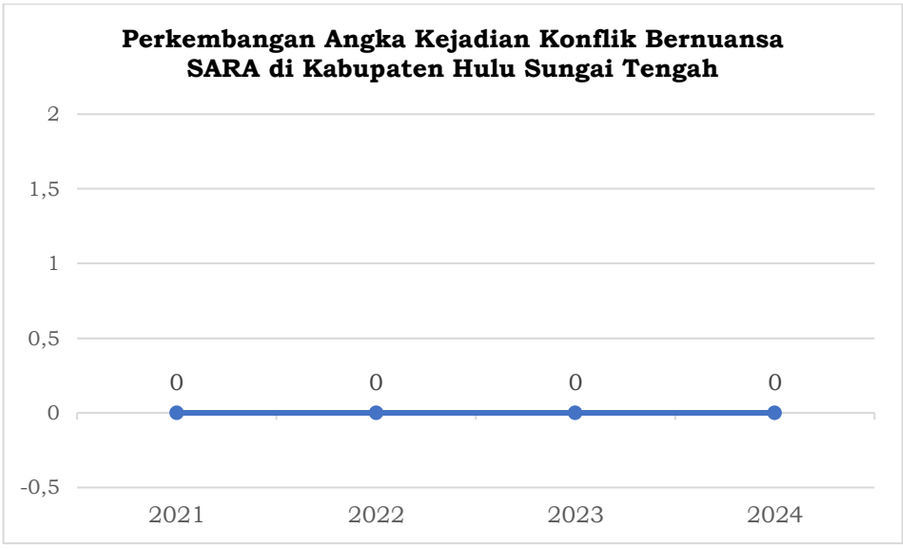
Jumlah anak rentan mengalami fluktuasi dengan tren yang relatif stabil. Pada 2021 tercatat sebanyak 769 jiwa, menurun cukup tajam menjadi 547 jiwa di tahun 2022, lalu kembali meningkat menjadi 625 jiwa pada 2023, dan sedikit bertambah menjadi 650 jiwa di tahun 2024.

2.1.2.4 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (Angka SARA)

A. Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA

Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menggambarkan kondusivitas sosial, toleransi antarwarga, dan stabilitas keamanan daerah. Keberadaan data ini mencerminkan sejauh mana kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis dalam keberagaman. Pemantauan terhadap angka kejadian konflik SARA dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan upaya pencegahan dan penguatan kerukunan sosial dapat terjaga dengan baik.

Gambar 2. 33 Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Sumber : Bakesbangpol Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Selama periode 2021 hingga 2024, angka kejadian konflik bernuansa SARA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat nihil atau 0 kasus setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan tren

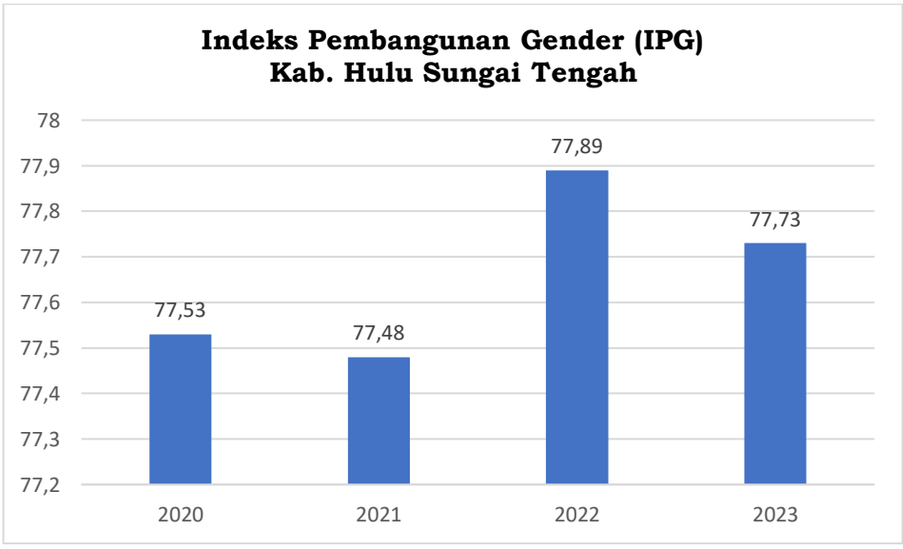
yang sepenuhnya stabil tanpa fluktuasi, di mana tidak terdapat laporan atau peristiwa yang mengindikasikan gangguan hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Dengan capaian yang konsisten di angka nol selama empat tahun berturut-turut, indikator ini menggambarkan keadaan sosial yang tetap damai dan terpelihara dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPG menunjukkan sejauh mana capaian pembangunan manusia yang dinikmati perempuan setara dengan yang dicapai laki-laki.

Gambar 2. 34 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Dinsos, PPKB, PP & PA Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2023 menunjukkan pola fluktuatif dalam kisaran nilai yang relatif stabil. Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 77,53, kemudian sedikit menurun menjadi 77,48 pada tahun 2021. Nilai tersebut

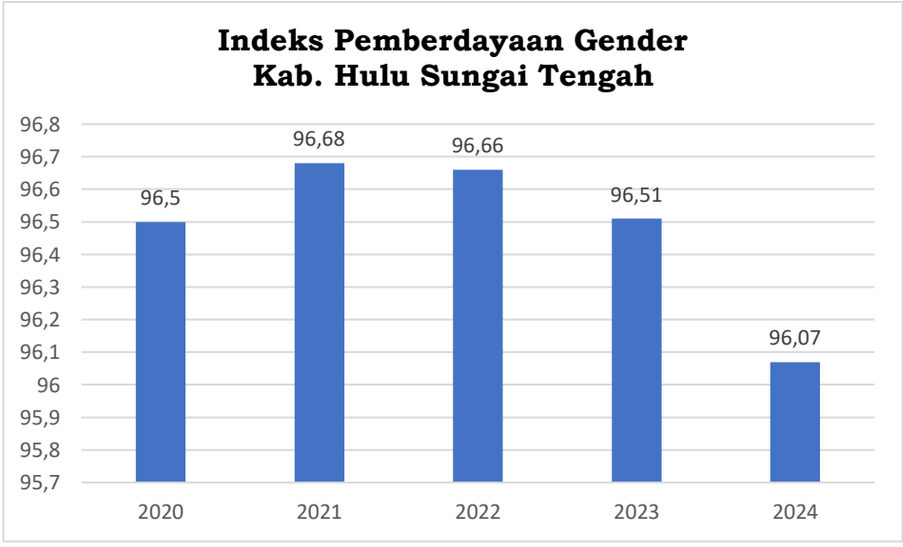
meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 77,89, dan sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 77,73.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berperan dan berpartisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Nilai IDG menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam posisi strategis serta akses mereka terhadap kesempatan dan sumber daya pembangunan di wilayah daerah.

Pengukuran indikator ini menjadi penting untuk menggambarkan tingkat kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan daerah. Data capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut.

Gambar 2. 35 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024



Sumber : Dinsos, PPKB, PP & PA Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan pola relatif stabil dengan kecenderungan menurun secara perlahan. Pada tahun 2020, nilai IDG tercatat sebesar 96,50, kemudian meningkat tipis menjadi 96,68 pada tahun 2021. Setelah itu, nilai IDG mengalami sedikit penurunan menjadi

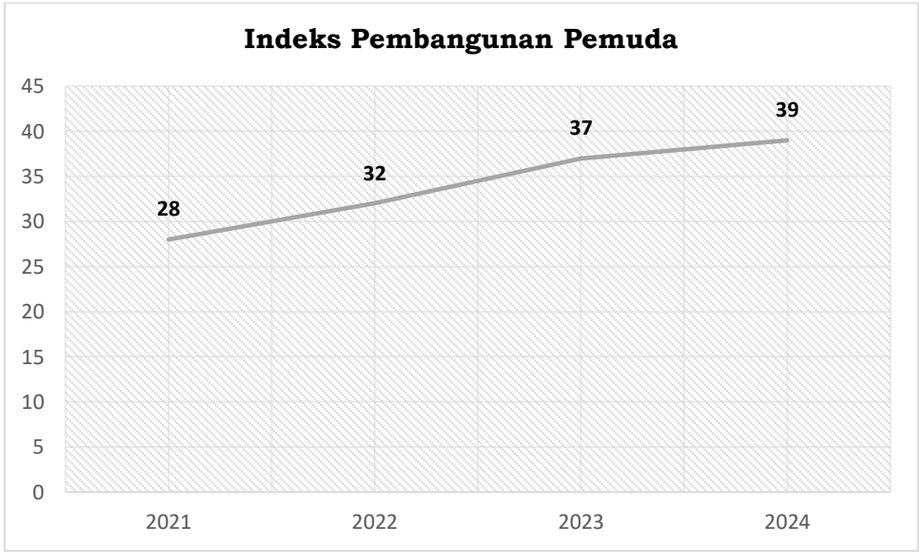
96,66 pada tahun 2022, 96,51 pada tahun 2023, dan 96,07 pada tahun 2024.

C. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek, antara lain pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, serta gender dan inklusi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana potensi generasi muda telah berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pengukuran IPP menjadi penting untuk mengetahui kondisi dan kemajuan pembangunan kepemudaan secara menyeluruh, baik dari sisi kapasitas individu maupun peluang partisipasi sosial dan ekonomi. Data capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut.

Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2024



Sumber : Disporapar Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, nilai IPP tercatat sebesar 28, kemudian meningkat menjadi 32 pada tahun 2022. Nilai ini terus naik menjadi 37 pada tahun 2023 dan mencapai 39 pada tahun 2024.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan sebagai salah satu indikator demografi yang menggambarkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kelompok usia kerja menanggung kebutuhan hidup kelompok anak-anak dan lanjut usia dalam suatu wilayah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan, semakin besar potensi produktivitas penduduk, sedangkan nilai yang tinggi mencerminkan beban tanggungan yang lebih besar. Pembahasan pada bagian ini memberikan gambaran mengenai keseimbangan struktur umur penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta kecenderungannya dalam beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk memahami kapasitas daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi berbasis demografi. Adapun pencapaian pada indikator rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Pencapaian Indikator Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio ketergantungan	%	50,01	44,95	45,61	46,13	46,63

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

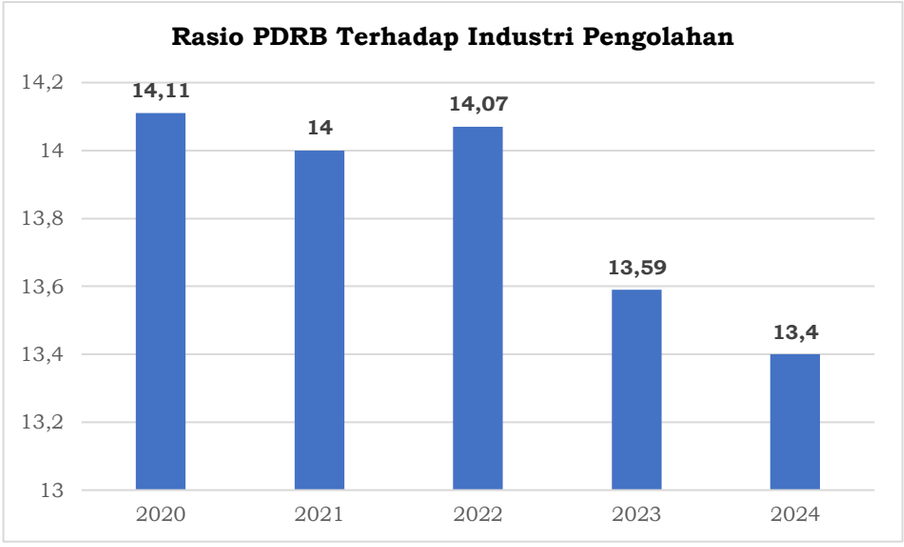
Rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat kembali dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 50,01 persen, kemudian menurun cukup tajam pada 2021 menjadi 44,95 persen. Setelah itu, rasio mengalami kenaikan bertahap dari 45,61 persen pada 2022, menjadi 46,13 persen pada 2023, dan 46,63 persen pada 2024.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IDSD Sesuai Pilar)

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator penting dalam menilai struktur dan kinerja sektor industri terhadap perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan tingkat industrialisasi serta kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dari kegiatan produksi. Melalui analisis terhadap perkembangan rasio ini, dapat terlihat bagaimana dinamika sektor industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sektor usaha, dan peningkatan daya saing daerah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 37 Capaian Rasio PDRB Terhadap Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

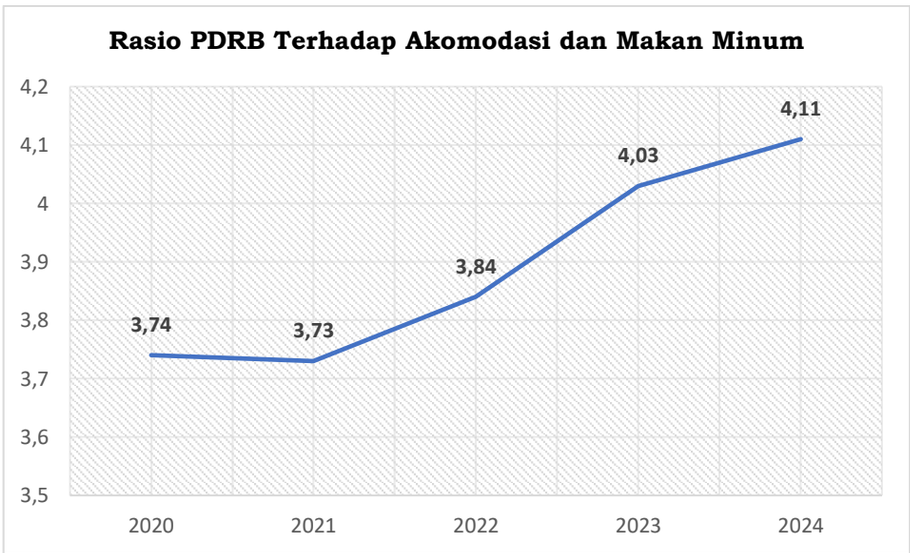
Rasio PDRB terhadap industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 14,11 persen, sedikit turun menjadi 14,00 persen di tahun 2021, kemudian kembali naik ke 14,07 persen pada tahun 2022. Namun, sejak 2023 mengalami penurunan cukup tajam

menjadi 13,59 persen dan kembali turun ke 13,40 persen pada 2024.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Indikator ini mencerminkan seberapa besar peranan usaha perhotelan, rumah makan, dan kegiatan kuliner dalam membentuk total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perkembangan rasio ini menjadi cerminan dari aktivitas ekonomi berbasis jasa dan konsumsi masyarakat, sekaligus menunjukkan potensi daerah dalam menggerakkan sektor-sektor penunjang pariwisata, perdagangan, serta ekonomi kreatif. Melalui analisis pada bagian ini, disajikan gambaran umum mengenai arah pertumbuhan dan kontribusi sektor akomodasi serta makan-minum terhadap struktur ekonomi daerah selama beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 38 Capaian Rasio PDRB Terhadap Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Rasio PDRB terhadap sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,74 persen, sedikit menurun menjadi 3,73 persen pada 2021, namun kemudian mengalami kenaikan bertahap menjadi 3,84 persen di tahun 2022, 4,03 persen pada 2023, dan mencapai 4,11 persen pada 2024.

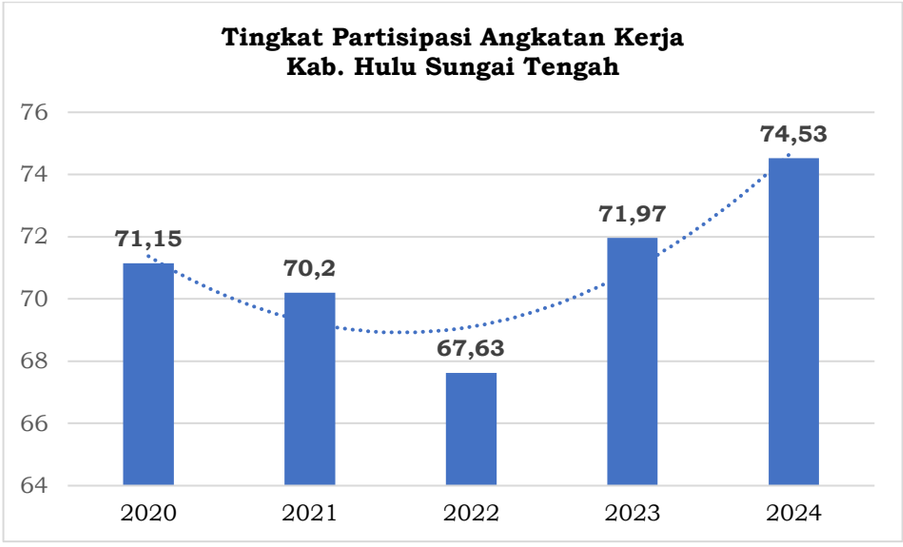
C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pelaku usaha atau wirausaha dengan total penduduk usia kerja di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif yang berbasis usaha mandiri, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Capaian rasio kewirausahaan daerah pada tahun 2024 adalah 21,24%.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja di suatu daerah.

Gambar 2. 39 Capaian Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS, 2025

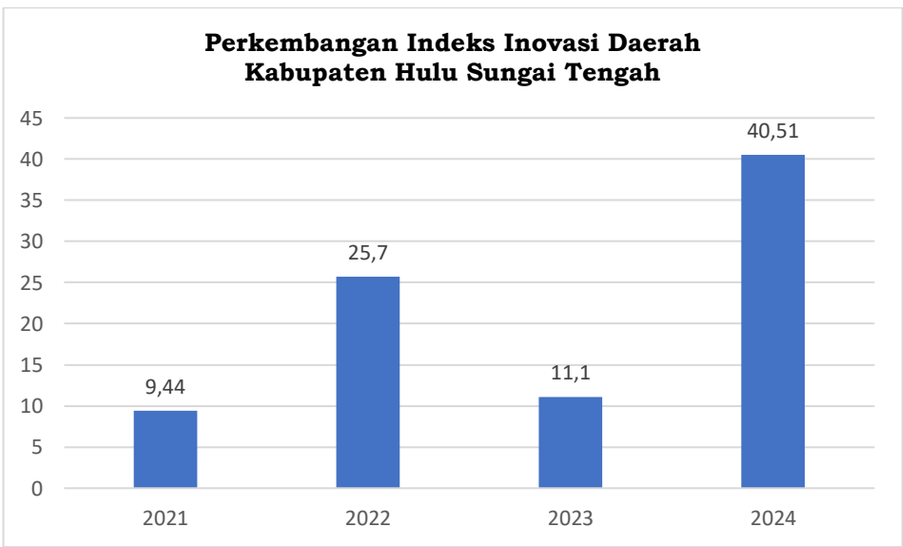
Berdasarkan data Kabupaten Hulu Sungai Tengah, TPAK selama periode 2020–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 71,15 persen, kemudian menurun menjadi 70,20 persen pada tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2022 hingga mencapai 67,63 persen. Pada tahun 2023, nilai TPAK meningkat menjadi 71,97 persen,

melampaui capaian awal tahun 2020. Secara keseluruhan, tren TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama empat tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi dengan arah peningkatan pada tahun terakhir periode pengamatan.

E. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan dan menerapkan berbagai inovasi, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penilaian ini umumnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui ajang Innovative Government Award (IGA), yang menilai aspek kebaruan, kemudahan, peningkatan kualitas, dan kebermanfaatan dari inovasi yang dijalankan. Indeks ini penting karena dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Gambar 2. 40 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Dokumen Keputusan Kemendagri, 2025

Tabel 2. 28 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Predikat Tahun 2021-2024

Tahun	Capaian	Predikat
2021	9.44	Kurang Inovatif
2022	25.7	Kurang Inovatif
2023	11.1	Kurang Inovatif
2024	40.51	Inovatif

Sumber : Diolah dari Dokumen Keputusan Kemendagri, 2025

Berdasarkan data capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penerapan indikator ini terbilang baru, dan hasil penilaiannya selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 50 dengan predikat Kurang Inovatif. Tahun 2021 terjadi perubahan metode penghitungan yang menghasilkan nilai 9,44, diikuti kenaikan pada 2022 menjadi 25,7, namun kembali turun di 2023 menjadi 11,1. Pergerakan fluktuatif ini menunjukkan bahwa inovasi di daerah belum berjalan secara konsisten pada periode awal penerapan indikator. Meski demikian, tahun 2024 mencatat capaian yang cukup membanggakan, yakni 40,51 dengan predikat Inovatif, yang menandai adanya kemajuan signifikan dalam upaya pengembangan inovasi daerah. Perlu dicatat bahwa ambang batas penilaian untuk setiap predikat pada Indeks Inovasi Daerah dapat mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, sehingga perubahan nilai tidak selalu sepenuhnya bersifat linier terhadap peringkat predikat yang dihasilkan. Kenaikan ini tetap dapat diartikan sebagai hasil dari komitmen dan strategi yang lebih terarah dalam mendorong perangkat daerah berinovasi, memperbaiki sistem pelayanan, dan meningkatkan kualitas program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

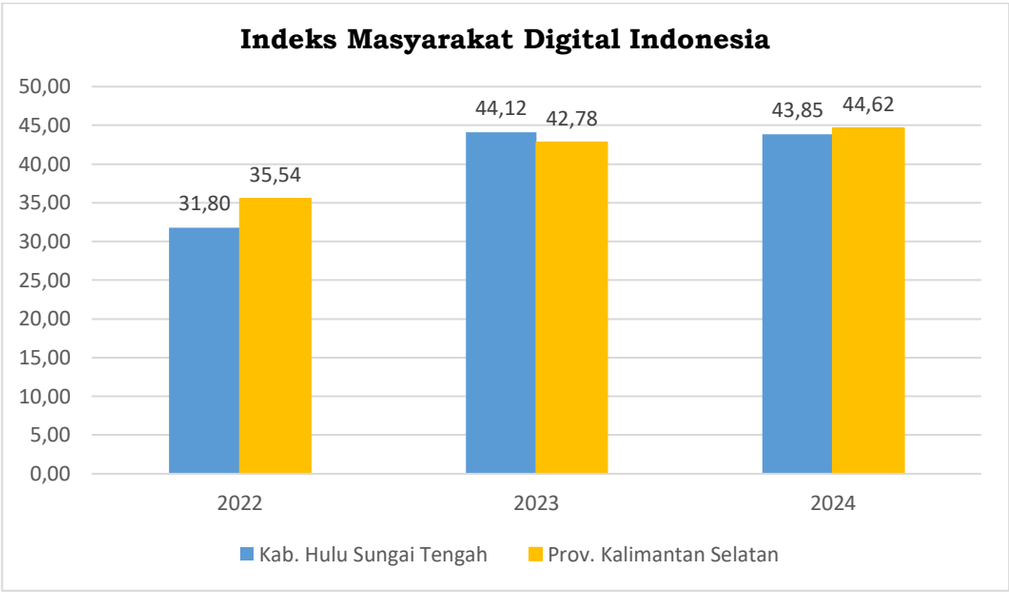
2.1.3.3 Transformasi Digital

A. Indeks Masyarakat Digital

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tingkat

pekerjaannya. Realisasi Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 41 Capaian IMDI Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : Portal IMDI Komdigi, 2025

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan pola peningkatan dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2022, nilai IMDI tercatat sebesar 31,80, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 44,12 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai IMDI mengalami sedikit penurunan menjadi 43,85, namun masih berada di atas capaian tahun awal pengukuran.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah rata-rata provinsi pada tahun 2022 (31,80 dibanding 35,54), kemudian melampaui capaian provinsi pada tahun 2023 (44,12 dibanding 42,78), dan kembali sedikit di bawah nilai provinsi pada tahun 2024 (43,85 dibanding 44,62).

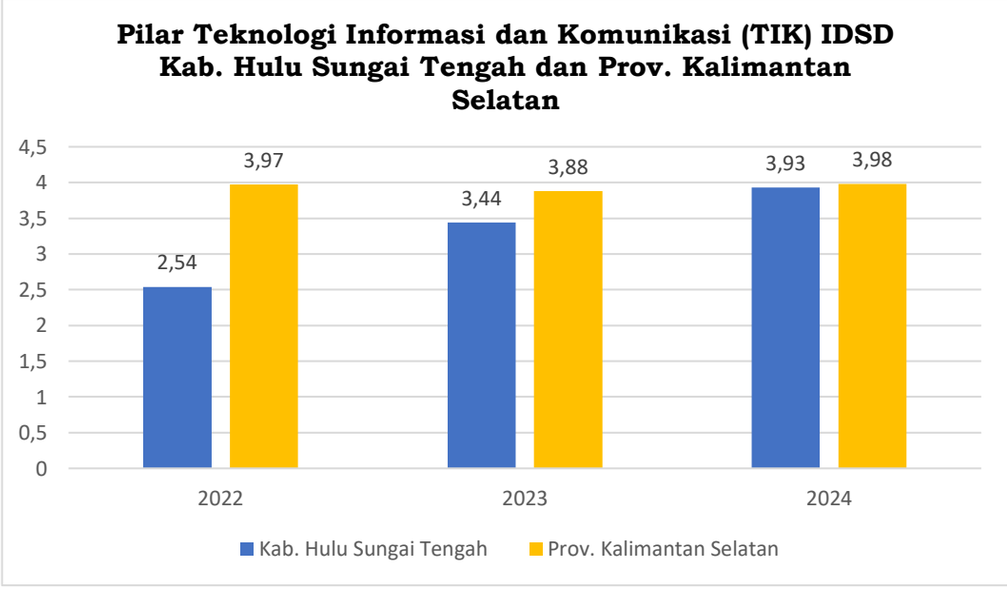
B. Pilar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) IDSD

Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu komponen dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menggambarkan tingkat

pemanfaatan teknologi digital di suatu wilayah. Pilar ini mencakup aspek penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat.

Pengukuran pilar ini bertujuan untuk menilai sejauh mana daerah telah mengintegrasikan teknologi digital dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan akses terhadap layanan publik. Data capaian Pilar Adopsi TIK Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut :

Gambar 2. 42 Perbandiingan Perkembangan Pilar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) IDSD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : Portal IDSD Brin, 2025

Capaian Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, nilai pilar tercatat sebesar 2,54, kemudian meningkat menjadi 3,44 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 3,93 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah rata-rata provinsi pada tahun 2022 (2,54 dibanding 3,97) dan tahun 2023 (3,44 dibanding 3,88). Pada tahun 2024, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 3,93, mendekati capaian provinsi sebesar 3,98.

C. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan jangkauan layanan komunikasi, baik melalui jaringan seluler maupun jaringan data, di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana akses masyarakat terhadap infrastruktur telekomunikasi dapat terpenuhi sebagai bagian dari layanan dasar publik.

Pengukuran cakupan layanan telekomunikasi memberikan gambaran mengenai distribusi infrastruktur komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk wilayah yang telah terlayani dan yang masih terbatas jaringannya.

Capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021 cakupan tercatat 81,02 persen, kemudian naik menjadi 87,5 persen pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 90,06 persen pada 2023. Hal ini menandakan semakin meratanya infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten, meskipun data untuk tahun 2024 belum tersedia.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan masyarakat terhadap jaringan komunikasi digital di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana rumah tangga telah memiliki atau menggunakan layanan internet, baik melalui jaringan tetap maupun seluler, untuk mendukung kegiatan komunikasi, informasi, dan ekonomi digital.

Pengukuran indikator ini penting untuk mengetahui tingkat pemerataan akses teknologi informasi di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari infrastruktur digital dasar. Data capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 tercatat sebesar 83,11 persen, meningkat menjadi 87,21 persen pada 2022, dan kembali naik menjadi 88,45 persen pada 2023.

Sama seperti layanan telekomunikasi, data tahun 2024 belum tersedia.

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK dan ADHB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan total nilai investasi pada aset tetap baru seperti bangunan, mesin, peralatan, infrastruktur, dan sarana produksi lainnya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, baik oleh sektor publik maupun sektor swasta. Indikator ini mencerminkan tingkat investasi fisik di suatu daerah dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar potensi peningkatan kapasitas produksi di masa depan. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Tengah, peningkatan PMTB dapat mencerminkan pembangunan infrastruktur, pengembangan fasilitas industri, dan investasi swasta yang signifikan, yang berperan memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat integrasi ekonomi daerah.

Tabel 2. 30 Capaian Pembentukan Modal Tetap bruto (ADHK dan ADHB) Tahun 2020-2024

PDRB ADHK (Miliar Rp)	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.382.41	1393.06	1459.12	1542.97	1.606,00
a. Bangunan	841.86	853.12	883.36	927.75	977.77
b. Non-Bangunan	540.55	540.55	575.76	615.22	628.23
PDRB ADHB (Miliar Rp)					
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2149.33	2180.85	2415.03	2666.79	2838.14
a. Bangunan	1231.55	1253.4	1355.18	1467.98	1564.49
b. Non-Bangunan	917.78	931.45	1059.85	1198.81	1273.65

Sumber : Publikasi BPS, 2025

Berdasarkan PDRB ADHK, total PMTB meningkat dari Rp1.382,41 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.606 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan pada kedua komponen, yaitu bangunan dan non-bangunan. Komponen bangunan, yang mendominasi struktur PMTB, naik dari Rp841,86 miliar pada 2020 menjadi Rp977,77 miliar pada 2024. Sementara itu, komponen non-bangunan juga mengalami peningkatan dari Rp540,55 miliar pada 2020 menjadi Rp628,23 miliar pada 2024. Peningkatan ini

menunjukkan adanya pergerakan positif dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana produksi yang lebih berkelanjutan.

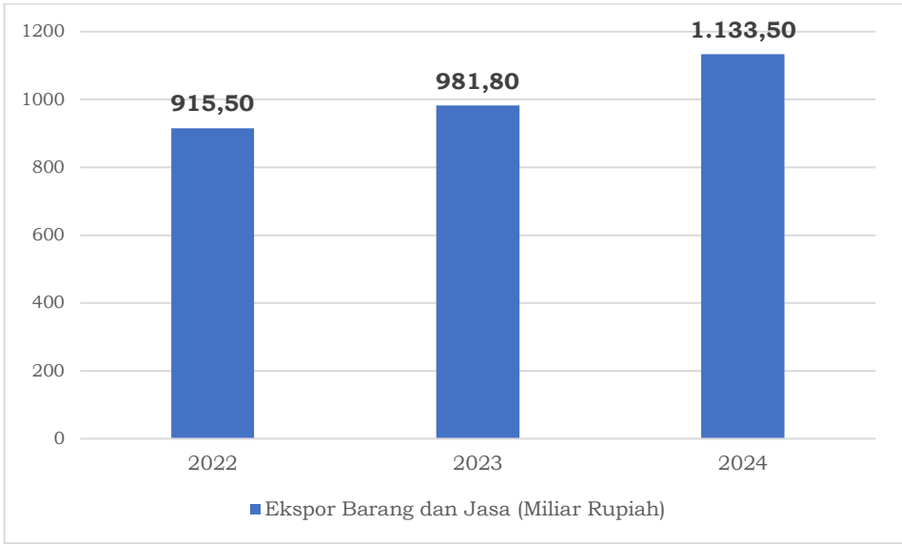
Pada sisi PDRB ADHB, capaian PMTB mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan. Nilainya naik dari Rp2.149,33 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.838,14 miliar pada tahun 2024. Komponen bangunan tetap menjadi penyumbang terbesar, meningkat dari Rp1.231,55 miliar pada 2020 menjadi Rp1.564,49 miliar pada 2024. Demikian pula, komponen non-bangunan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp917,78 miliar pada 2020 menjadi Rp1.273,65 miliar pada 2024.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja sektor perdagangan luar daerah dan luar negeri, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dipasarkan ke luar daerah atau ke pasar internasional.

Pengukuran ekspor barang dan jasa menjadi bagian penting dalam menilai tingkat keterbukaan ekonomi daerah dan sejauh mana kegiatan produksi lokal berperan dalam rantai pasok regional maupun nasional. Data capaian ekspor barang dan jasa Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut sebagai bagian dari analisis integrasi ekonomi domestik dan global. Capaian Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. 43 Capaian Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

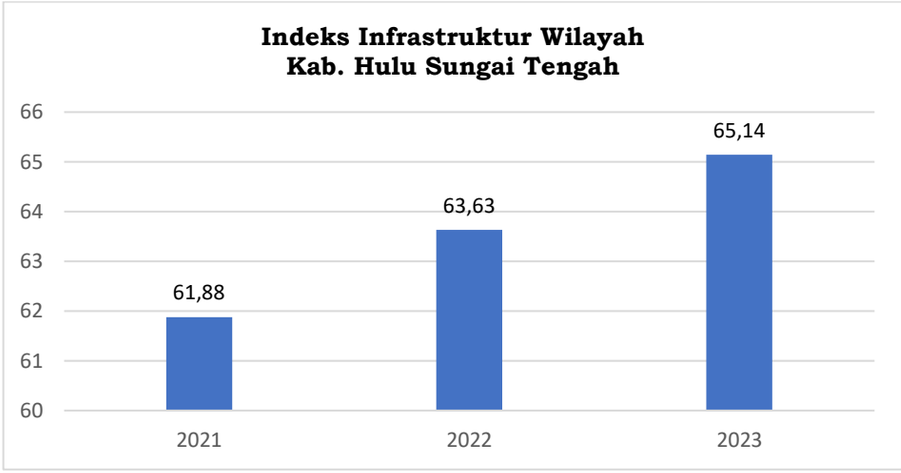
Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan kenaikan bertahap dan konsisten selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data capaian, nilai ekspor pada tahun 2022 sebesar Rp915,5 miliar, meningkat menjadi Rp981,8 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp1.133,5 miliar pada tahun 2024. Secara nominal, dalam kurun waktu dua tahun, ekspor HST bertambah sebesar Rp218,0 miliar, atau meningkat 23,8% dibanding tahun 2022. Laju pertumbuhan tahunan menunjukkan peningkatan 7,2% dari 2022 ke 2023, dan 15,4% dari 2023 ke 2024.

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks Infrastruktur Wilayah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan wilayah dalam menyediakan akses terhadap layanan publik, transportasi, energi, air bersih, serta sarana penunjang lainnya yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 44 Perkembangan Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2023



Sumber : Bidang Ekoinfra Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nilai Indeks Infrastruktur Wilayah menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama periode 2021–2023. Pada tahun 2021 indeks tercatat sebesar 61,88, kemudian naik menjadi 63,63 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 65,14 pada tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap terhadap kondisi dan ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut.

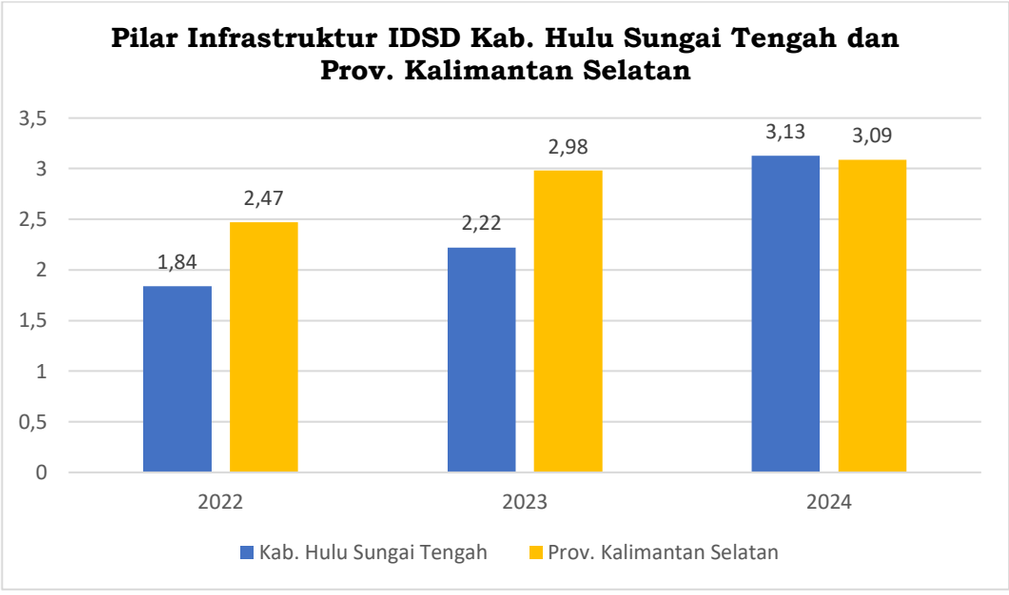
Namun demikian, perlu dicatat bahwa mulai tahun 2025, metode perhitungan indikator ini mengalami perubahan formula dan penyesuaian variabel sesuai dengan kebijakan daerah, sehingga hasil pengukuran pada periode selanjutnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung.

B. Pilar Infrastruktur IDSD

Pilar Infrastruktur merupakan komponen penting dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menggambarkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Pilar ini mencakup infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, air, sanitasi, dan komunikasi.

Melalui pengukuran pilar ini, dapat dilihat kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan daya saing wilayah. Data capaian Pilar Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut :

Gambar 2. 45 Perbandingan Perkembangan Pilar Infrastruktur IDSD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024



Sumber : Portal IDSD Brin, 2025

Capaian Pilar Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Nilai pilar naik dari 1,84 pada tahun 2022 menjadi 2,22 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 3,13 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di bawah capaian provinsi pada tahun 2022 (1,84 dibanding 2,47) dan tahun 2023 (2,22 dibanding 2,98). Namun pada tahun 2024, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (3,13) sedikit melampaui rata-rata provinsi (3,09).

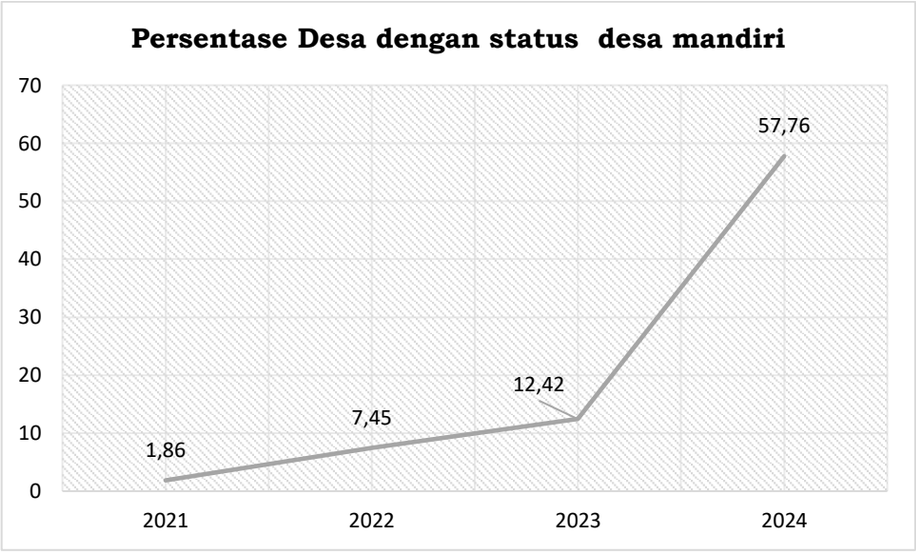
C. Persentase Desa dengan Status Mandiri

Persentase Desa dengan Status Mandiri merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini digunakan untuk menilai proporsi desa yang telah mencapai kategori mandiri, yaitu desa dengan kapasitas kelembagaan dan ekonomi yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini memberikan gambaran tentang perkembangan tingkat kemandirian wilayah perdesaan di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekaligus menunjukkan sebaran capaian pembangunan desa berdasarkan klasifikasi IDM. Data capaian Persentase Desa dengan Status Mandiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut.

Gambar 2. 46 Persentase Desa dengan Status Mandiri Tahun 2021 sd 2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Capaian Persentase Desa dengan Status Mandiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, persentase desa mandiri tercatat sebesar 1,86 persen, kemudian meningkat menjadi 7,45 persen pada tahun 2022. Nilai ini kembali naik pada tahun 2023 menjadi 12,42 persen, dan mengalami lonjakan pada tahun 2024 hingga mencapai 57,76 persen.

D. Persentase Rumah Layak Huni dan Permukiman yang Layak

Persentase Rumah Layak Huni dan Permukiman yang Layak merupakan indikator yang menggambarkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan kondisi memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan lingkungan, serta akses terhadap prasarana dasar permukiman. Indikator ini juga mencerminkan tingkat ketersediaan sarana pendukung permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan sistem drainase.

Pengukuran indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data capaian Persentase Rumah Layak Huni dan Permukiman yang Layak Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut :

Tabel 2. 29 Persentase Rumah Layak Huni dan Permukiman yang Layak

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni	77.62	75.7	81.23	80.77
Persentase Permukiman yang Layak	73.62	75.88	82.07	82.88

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Capaian Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, persentase rumah layak huni tercatat sebesar 77,62 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 75,70 persen pada tahun 2022. Nilai tersebut kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 81,23 persen, dan sedikit menurun menjadi 80,77 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, Persentase Permukiman yang Layak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai indikator ini naik dari 73,62 persen pada tahun 2021 menjadi 75,88 persen pada tahun 2022, meningkat lagi menjadi 82,07 persen pada tahun 2023, dan mencapai 82,88 persen pada tahun 2024.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah daerah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan fiskal daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada melalui penerimaan pajak.

Pengukuran rasio ini memberikan gambaran mengenai perbandingan antara besaran pajak daerah yang berhasil dihimpun dengan total PDRB, sehingga dapat diketahui sejauh mana kapasitas daerah dalam menghimpun pendapatan asli daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi di wilayahnya. Data capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut.

Tabel 2. 33 Capaian Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	4.833	4.978	5.174	5.386	5.653
Pendapatan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	11,11	11,57	15,25	17,02	16,68
Rasio Pajak Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,23	0,23	0,29	0,32	0,30

Sumber : BPPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan dengan sedikit fluktuasi pada akhir periode. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio tercatat sebesar 0,23 persen, kemudian meningkat menjadi 0,29 persen pada tahun 2022 dan mencapai nilai tertinggi 0,32 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio tersebut sedikit menurun menjadi 0,30 persen.

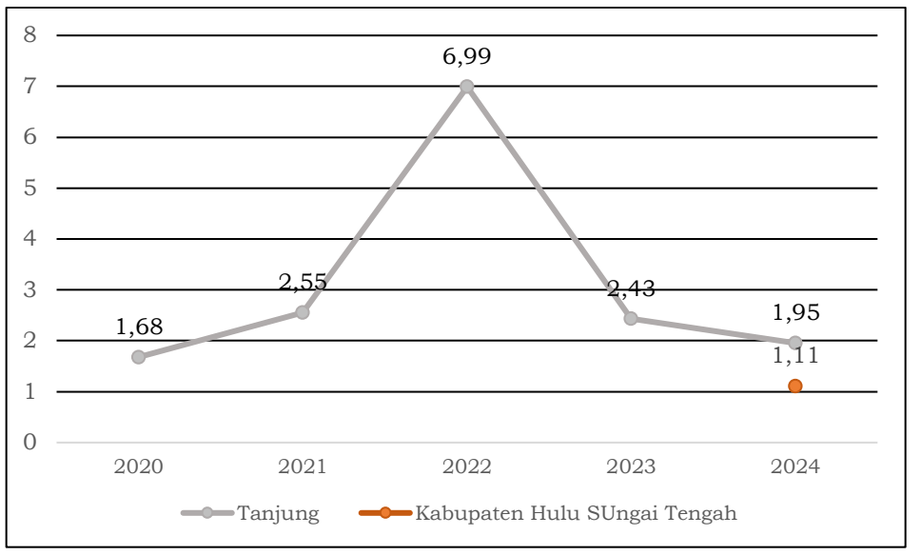
B. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada

akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Gambar 2. 47 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kalimantan Selatan, 2025

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelum tahun 2024 masih merujuk pada ukuran inflasi di Kota Tanjung. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pengukuran inflasi secara mandiri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, mulai tahun 2024, pengukuran inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilakukan secara tersendiri. Dengan demikian, data inflasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perekonomian di wilayah tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

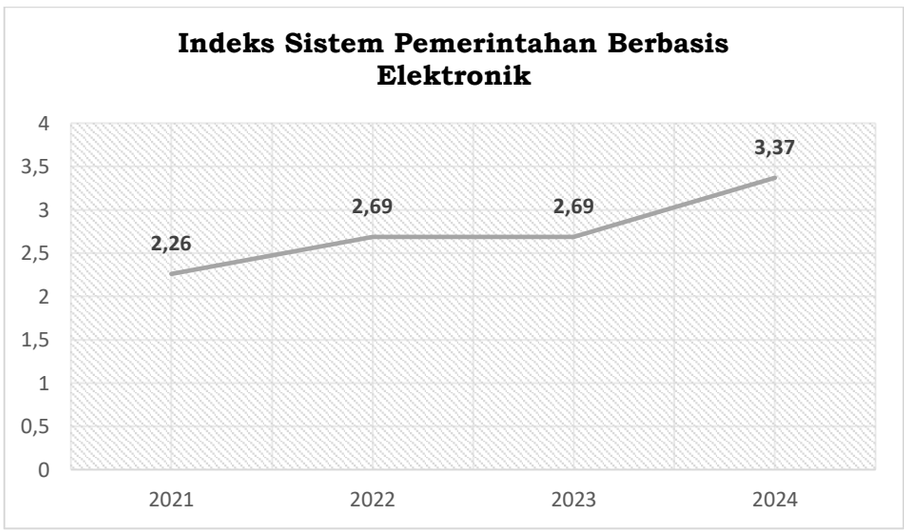
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup aspek tata kelola, kebijakan, manajemen layanan, dan pemanfaatan infrastruktur digital yang mendukung proses administrasi pemerintahan secara terpadu.

Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana instansi pemerintah daerah telah mengimplementasikan prinsip pemerintahan digital dalam mendukung efektivitas layanan publik dan kinerja birokrasi. Data capaian Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2. 48 Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024

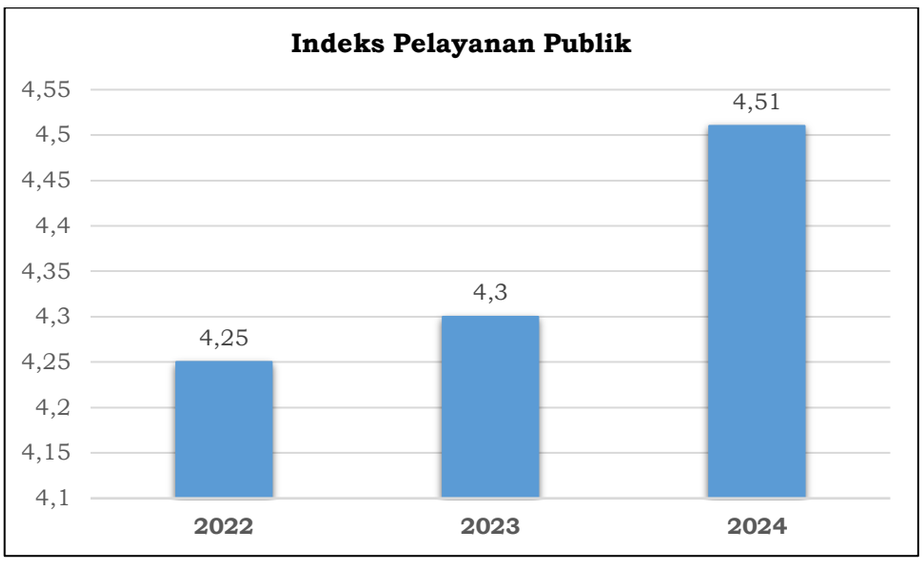


Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai SPBE tercatat sebesar 2,26, kemudian meningkat menjadi 2,69 pada tahun 2022 dan bertahan pada nilai yang sama di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai SPBE mengalami kenaikan menjadi 3,37.

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti standar pelayanan, profesionalitas pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, sistem informasi pelayanan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 49 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



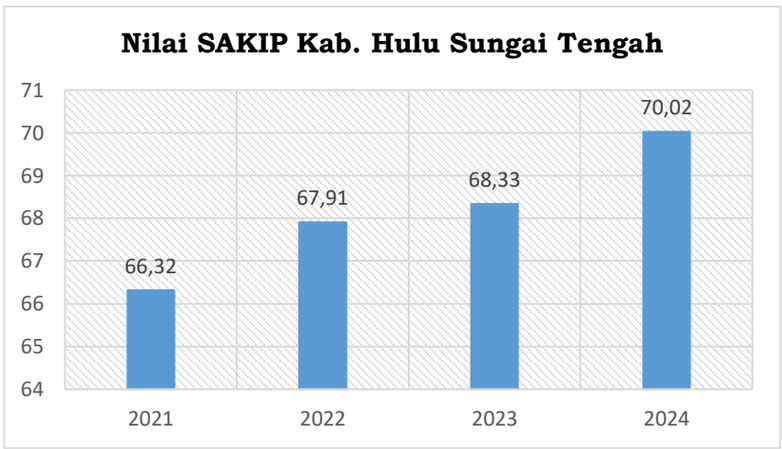
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 4,25, kemudian naik menjadi 4,30 pada tahun 2023, dan kembali meningkat signifikan hingga mencapai 4,51 pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, baik dari aspek standar pelayanan, keterbukaan informasi, maupun responsivitas aparatur.

C. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini

mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Realisasi nilai SAKIP selama tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 50 Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 nilai SAKIP tercatat sebesar 66,32, kemudian meningkat menjadi 67,91 pada 2022, dan naik lagi menjadi 68,33 pada 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 70,02.

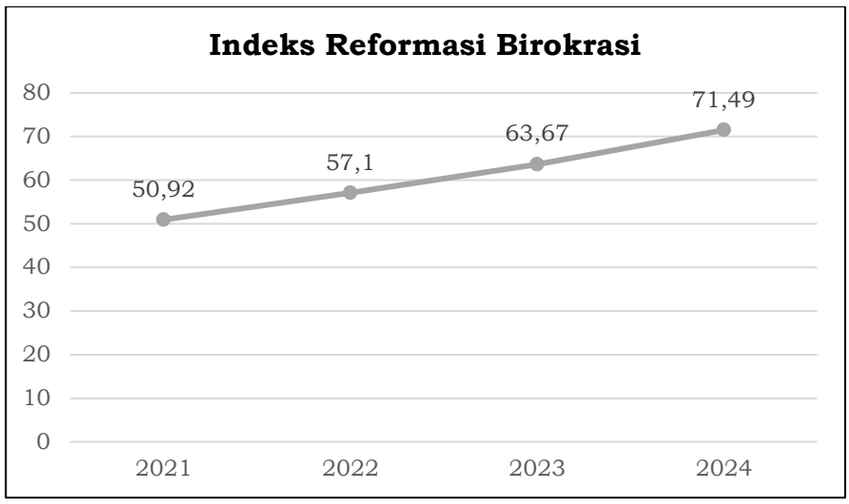
D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah melalui penilaian terhadap berbagai komponen, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penguatan tata laksana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai reformasi birokrasi mencerminkan tingkat kematangan instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan berbasis kinerja dan integritas. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai

Tengah selama periode pengamatan dapat dilihat pada bagian berikut :

Gambar 2. 51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 50,92, kemudian meningkat menjadi 57,10 pada tahun 2022. Kenaikan berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 63,67, dan pada tahun 2024 kembali naik signifikan hingga mencapai 71,49.

Capaian tahun 2024 ini menegaskan adanya kemajuan nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek transparansi, efisiensi, serta penguatan integritas aparatur pemerintah daerah.

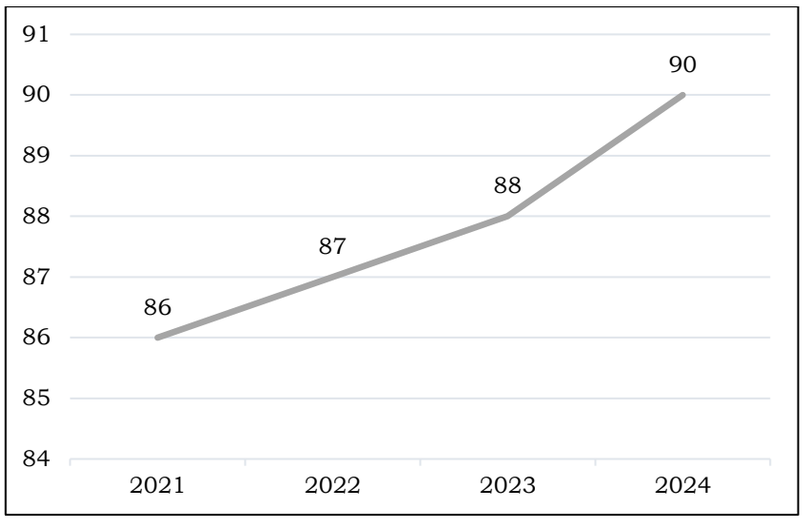
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menggambarkan tingkat pelaksanaan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Capaian persentase penegakan Perda dan

Perkada selama tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 52 Persentase Perda dan Perkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu 2021–2024. Pada tahun 2021 tingkat penegakan tercatat sebesar 86 persen, kemudian naik menjadi 87 persen pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan capaian 88 persen, dan pada tahun 2024 meningkat lebih signifikan hingga mencapai 90 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi, sekaligus menggambarkan semakin efektifnya aparat dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

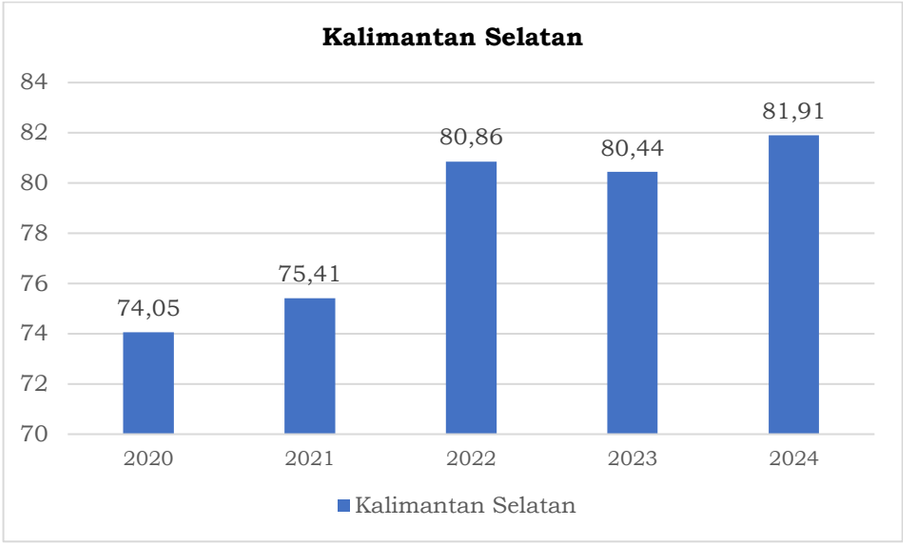
B. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Melalui pengukuran IDI, dapat diketahui sejauh mana nilai-nilai demokrasi dijalankan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah. Nilai IDI juga menjadi acuan dalam menilai konsistensi penerapan prinsip-prinsip partisipasi, representasi, dan akuntabilitas publik. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode pengamatan disajikan pada bagian berikut :

Gambar 2. 53 Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Selatan menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan. Nilai indeks tercatat sebesar 74,05 pada tahun 2020, meningkat menjadi 75,41 pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi 80,86 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan tipis menjadi 80,44, namun kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 81,91.

C. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban, dan keindahan lingkungan di wilayah daerah. Indikator ini mencakup proporsi kasus pelanggaran yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan

dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam periode tertentu.

Pengukuran indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan terkait ketertiban umum serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penegakan aturan di bidang K3. Data capaian Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada bagian berikut.

Tabel 2. 34 Capaian Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	100	100	100

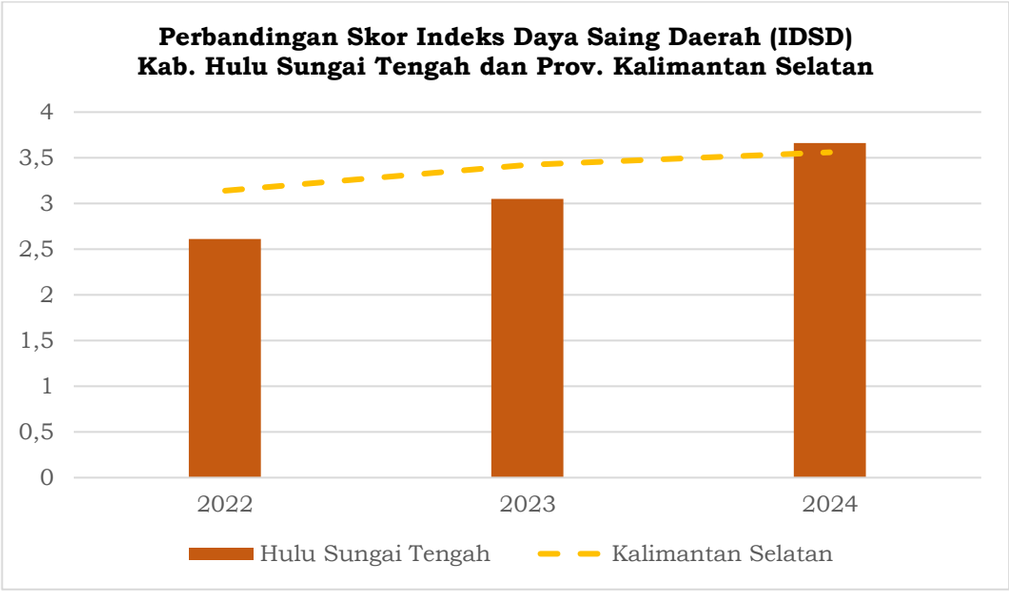
Sumber : DPMPTSP-TK Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) pada periode 2020–2023 menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya.

D. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas suatu daerah dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan potensi ekonomi, serta menciptakan iklim pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penyusunan IDSD mengacu pada empat komponen utama, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi, yang selanjutnya diturunkan menjadi 12 pilar, 18 dimensi, dan 64 indikator. Adapun capaian IDSD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 54 Perbandingan Capaian Skor IDSD
Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2024



Sumber : Diolah Berdasarkan Publikasi BRIN pada Buku IDSD tahun 2022-2024, hasil olahan 2025.

Selama periode 2022–2024, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai IDSD naik dari 2,61 pada tahun 2022, menjadi 3,05 pada tahun 2023, dan mencapai 3,66 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, IDSD Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlihatkan perkembangan yang meningkat secara relatif terhadap rata-rata provinsi. Pada tahun 2022, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 2,61 masih berada di bawah nilai provinsi 3,14. Pada tahun 2023, selisih tersebut menurun dengan capaian 3,05 dibandingkan 3,42 di tingkat provinsi. Pada tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat nilai 3,66, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 3,56.

2.1.4.3 Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

Pada subbab ini memuat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Capaian pembangunan yang disajikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai tahun 2021 sampai dengan 2024.

Bagian ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode tahun 2021 hingga 2024. Analisis disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing urusan pemerintahan, yang mencerminkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2021–2026.

Data capaian yang digunakan bersumber dari hasil pengukuran kinerja perangkat daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta hasil evaluasi pembangunan daerah. Melalui penyajian ini, dapat terlihat perkembangan capaian dari setiap urusan pemerintahan, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang.

Secara umum, capaian indikator pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2021–2024 menunjukkan pola peningkatan pada sebagian besar indikator, dengan beberapa indikator lain yang berfluktuasi namun cenderung stabil.

Pada aspek geografi dan demografi, Indeks Ketahanan Pangan sedikit menurun, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat konsisten setiap tahun.

Aspek kesejahteraan masyarakat memperlihatkan tren positif dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan IPM dan Usia Harapan Hidup. Rata-rata dan harapan lama sekolah naik perlahan, sementara angka literasi dan numerasi meningkat signifikan. Rasio Gini berfluktuasi di kisaran 0,22–0,33, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan kestabilan dengan arah peningkatan.

Pada aspek daya saing daerah, Indeks Inovasi Daerah meningkat kembali setelah penurunan pada 2023, dan Persentase Desa Mandiri tumbuh tajam hingga 57,76% pada 2024.

Aspek pelayanan umum menunjukkan kemajuan, terutama pada Indeks SPBE yang naik dari 2,46 menjadi 3,37 dan capaian pengobatan tuberkulosis yang meningkat.

Dalam indikator urusan pemerintahan, sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan perbaikan bertahap, sektor pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman mengalami peningkatan cakupan layanan, sedangkan sektor sosial dan tenaga kerja menunjukkan perbaikan pada partisipasi dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa urusan lainnya, seperti pangan, lingkungan hidup, pengendalian penduduk, dan komunikasi informatika, menunjukkan tren naik, sementara urusan perencanaan, kepegawaian, dan pengawasan mencatat peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan hingga 2024.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan pemerintahan daerah selama 2021–2024 memperlihatkan arah peningkatan yang konsisten dan terukur, mencerminkan kemajuan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Lebih rinci mengenai capaian setiap IKK tahun 2020-2024 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 30 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,86	79,6	79,06	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	63,81	67,33	69,59	71,67
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Tingkat Kemiskinan	%	6,18	5,92	5,84	5,81
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,76	3,35	3,26	3,2
3	Rasio Gini	Indeks	0,331	0,228	0,225	0,251
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,67	72,32	72,76	73,33
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,66	72	72,33	72,6
6	Indeks Keluarga Sehat	Angka				

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	9,44	9,9	10,2	9,6
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,01	8,28	8,29	8,35
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,22	12,24	12,31
10	Angka Numerasi	Angka	44,25	50,74	59,39	64,46
11	Angka Literasi	Angka	49,41	56,11	64,92	69,09
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	70	75	70	60
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)					
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,68	96,66	96,2	96,4
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	28	32	37	39
16	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	201	79,1	171,2	126,3
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,2	67.63	71,97	74,53
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks		3,64	3,67	3.8
19	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan	%	6	7	9,16	9
20	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%				
21	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99	99	99	99
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan	%				
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,2	67.63	71,97	74,53
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	32	36	11,1	41,7
5	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB				
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks				
7	Persentase Desa Mandiri	%	1,86	7,45	12,42	57,76
8	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp				
9	Nilai Tukar Petani		110,8	105,88		

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
10	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp				
11	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	%				
12	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks				
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,46	2,69	2,69	3,37
2	Indeks Integritas Nasional	Indeks				
3	Persentase Capaian Aksi HAM	%				
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka				
5	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%				
6	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	43,3	77,2	71,6	76,8
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	Pendidikan					
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,22	12,24	12,31
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,01	8,28	8,29	8,35
	Kesehatan					
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,66	72	72,33	72,6
2	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian	15,6	18,7	17,7	10,4
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	9,44	9,9	10,2	9,6
4	Angka Kesakitan	%	22,2	14,4	11,4	11
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	67,72	68,28	68,28	69,55
2	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	37,44	38,23	38,96	39,38
	Perumahan dan Kawasan Permukiman					

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah layak huni	%	77,62	75,7	81,23	80,77
2	Persentase permukiman yang layak	%	73,62	75,88	82,07	82,88
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	menit	23	15	15	15
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90	90	85
3	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten yang ditangani	%	82	86	90	100
	Sosial					
1	Rasio Gini	Indeks	0,331	0,228	0,225	0,251
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,18	5,92	5,84	5,81
3	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial	%	85	87	89	89
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,533	0,749	0,63	0,745
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,086	0,147	0,144	0,141
	Tenaga Kerja					
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,76	3,35	3,26	3,2
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,2	67.63	71,97	74,53
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,68	96,66	96,2	96,4
	Pangan					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,86	79,6	79,06	
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	724	736	685	739
	Pertanahan					
1	Persentase pertanahan yang termanfaatkan	%	N/A	N/A	N/A	95
2	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	N/A	N/A	N/A	31,18
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Indeks	63,81	67,33	69,59	71,67
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	59	57.5	57,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,13	90,51	93.46	98,33
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Kependudukan	%	N/A	N/A	88,9	91,2
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Desa dengan Status Desa Mandiri	%	1,86	7,45	12,42	57,76
2	Persentase BUM Desa dengan Kategori Berkembang	%	0	6,21	9,94	11,18
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,46	2,32	2,28	2,28
	Perhubungan					
1	V/C Ratio	Nilai	0,35	0,34	0,34	0,39
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	N/A	N/A	N/A	0,62
	Komunikasi dan Informatika					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,46	2,69	2,69	3,37
	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase koperasi berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	67,5
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	N/A	N/A	N/A	13,44
	Penanaman Modal					
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	60,301,760,000	49,206,380,000	57,834,600,000	185,941,394,488
	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	28	32	37	39
2	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan (Wirausaha Muda dan Pemuda Pelopor)	%	3,5	3	3,09	4,3
3	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan	%	6	7	9,16	9
	Statistik					
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik	%	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah					
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
	Persandian					
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	indeks	246	258	316	332
	Kebudayaan					
1	Pewarisan Kebudayaan	Angka	N/A	N/A	N/A	56,4
2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Nilai	N/A	N/A	N/A	57,4
3	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	N/A	N/A	N/A	55,4
	Perpustakaan					
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	65	70	70	74
	Kearsipan					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK)	Indeks	N/A	N/A	N/A	50,62
2	Nilai Laporan Audit Kearsipan External (LAKE)	Angka	60	60	60	50,62
3	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Angka	55	55	50	52,18
	Pertanian					
1	Jumlah Produksi Padi	Ton	208.345	192.002	193.795	198.395
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	6.381	5.174	5.201	5.461
3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	N/A	N/A	88	54
4	Jumlah Produksi Cabe Besar	Ton	570	640	643,1	1.423
5	Jumlah Produksi Cabe Rawit	Ton	615	804	807,6	1.095
6	Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	11,3	31,7	39,7	176
7	Jumlah Produksi Jeruk	Ton	11.189,90	11.138	11.232,4	11.236
8	Jumlah Produksi Karet	Ton	20.065	20.097	19.74	19.87
9	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	4.389	4.391	4.65	4.79
10	Jumlah Produksi Kopi	Ton	106	108	260	264
11	Jumlah Produksi Lada	Ton	5	5	6	8
12	Jumlah Produksi Daging	Ton	2.612.124	2.691.533	2.735.162	2.842.530
13	Jumlah Produksi Telur	Ton	5.795.527	5.957.802	6.092.161	6.309.000
	Pariwisata					
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha	%	2,54	7,08	9,43	6,79

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Akomodasi, Makanan dan Minuman					
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Pariwisata	%	-61	609	6	-2
	Kelautan dan Perikanan					
1	Angka Konsumsi Ikan	Angka	51,55	52,11	58,08	59,21
2	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	10910,26	11021,94	11130752	11298,11
	Perdagangan					
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	4,07
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap total PDRB	%	3,77	3,9	4	4,02
	Perindustrian					
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	N/A	N/A	N/A	3,44
2	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	%	N/A	N/A	N/A	6,33
	Perencanaan Pembangunan					
1	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	8,7	19,3	38,9	58,7
2	Indeks Perencanaan	Angka	99	99,99	100	96,75
3	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Angka	0	10,91	10,76	11
	Keuangan					
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	N/A	3,64	3,67	3.8
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
1	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara	Indeks	60	72	76	80
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	32	36	11,1	41,7
	Pengawasan					
1	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,860	8,734	2,883	8,941
2	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	20	2,24	30	30
3	Nilai IEPK	Nilai		2,667	3,02	30
	Sekretariat DPRD					

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu dan sasaran	%	87,5	72,9	81,2	70,6
	Sekretariat Daerah					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,92	57,1	63,67	63,67
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	45	69,29	78,57	80
3	Nilai SAKIP	Angka	66,32	67,91	68,33	70,02
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0	4,25	4,3	4,35
	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase Potensi ATHG/Konflik Kehidupan Bermasyarakat yang dapat Ditangani	%	100	100	100	100
2	Persentase Potensi ATHG/Konflik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dapat Ditangani	%	100	100	100	100

Sumber : Diolah dari dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

2.1.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Pendidikan, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	63,93	75,2	89,25	90	98,99

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,37	35,48	33,32	24,61	18,62
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	61,06	97,8	93,51	92,53	74,9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Kesehatan, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3769	3868	3648	3339	3.155
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3856	3867	3713	3520	3.172
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3911	3745	3645	3398	3.123
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15582	18399	18993	18449	20.787
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10055	20296	7998	34191	34.611
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	76436	118531	146942	146752	202.511

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	14395	17756	25196	30408	31.456
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19029	65946	76967	85822	13.903
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1322	2513	2887	3213	3.104
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	338	404	467	519	489
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1220	1402	2558	3146	4.421
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4737	5756	7326	8699	7.337

2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Pekerjaan Umum, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 33 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan pokok	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	%	78,73	79,13	79,63	80,18	47,72

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	air minum sehari - hari	Kebutuhan pokok air minum sehari - hari						
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah Domestik	%	54,48	59,87	66,32	6,37	7,75

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024

2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Perumahan Rakyat, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	%	100	0	17,09	94,74	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah bupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	100

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024

2.1.5.5 SPM Bidang Tramtibunlinmas

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Orang	32	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1543	56000	59000	92205	156575
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1543	1758	1703	345	595
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	27	14907	7117	11167	160792
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	53	50	0,8	0	43

Sumber : Satpol PP Damkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.1.5.6 SPM Bidang Sosial

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2020 s/d 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang

Sosial, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Capaian Indikator Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10,17	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0	0	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	14,59	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	100	60	60	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	44,23	100	100	100	71.42

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam menilai kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keuangan daerah mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran, efektivitas belanja, serta keseimbangan antara pendapatan dan pembiayaan. Dalam periode 2020-2024, dinamika keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pembangunan prioritas.

2.2.1 REALISASI APBD

Realisasi APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal untuk mendukung pembangunan. Kinerja realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta kebijakan fiskal yang diterapkan. Evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi dasar dalam perencanaan anggaran yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah. Analisis terhadap tren pendapatan daerah memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal serta ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal. Dengan memahami pola pertumbuhan pendapatan, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi optimalisasi penerimaan guna meningkatkan kemandirian fiskal. Realisasi pendapatan daerah beberapa tahun kebelakang secara lebih rinci dapat dilihat pada ***Tabel 2. 37***

Tabel 2. 37 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 - 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					RATA-RATA
	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN	**1.175.940.490.493,69**	**1.112.074.210.230,13**	**1.345.630.259.510,64**	**1.611.181.292.311,05**	**1.797.379.975.577,00**	**8,19%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**149.879.324.466,69**	**124.333.322.210,76**	**192.369.966.822,64**	**260.946.238.703,05**	**249.509.019.843,00**	**20,86%**
Pendapatan Pajak Daerah	11.114.134.812,80	11.571.389.664,95	15.254.672.390,30	17.025.906.956,73	16.681.812.765,00	5,50%
Pendapatan Retribusi Daerah	9.868.450.550,00	10.508.734.080,00	13.960.318.668,00	13.229.698.533,00	12.025.534.082,00	7,76%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.841.522.022,00	6.145.710.709,00	6.775.056.242,00	7.052.993.989,00	9.137.692.478,00	10,63%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.055.217.081,89	96.107.487.756,81	156.379.919.522,34	223.637.639.224,32	211.663.980.517,67	26,80%
PENDAPATAN TRANSFER	**863.088.541.706,00**	**943.881.426.370,00**	**1.137.791.122.413,00**	**1.349.743.152.408,00**	**1.534.786.996.202,00**	**9,31%**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	*785.343.177.342,00*	*720.406.593.177,00*	*894.671.860.550,00*	*1.092.873.714.686,00*	*1.265.429.404.311,00*	8,27%
Dana Bagi Hasil Pajak	13.003.033.948,00	12.744.499.509,00	279.073.198.448,00	438.769.726.442,00	18.429.579.000,00	345,87%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	120.398.507.617,00	86.212.112.600,00	478.160.029.000,00	495.099.857.000,00	490.839.005.713,00	72,04%
Dana Alokasi Umum	485.837.290.000,00	478.160.029.000,00	32.522.573.535,00	42.447.638.277,00	546.064.341.637,00	185,99%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	166.104.345.777,00	143.289.952.068,00	104.916.059.567,00	116.556.492.967,00	210.096.477.961,00	8,26%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	*9.884.370.000,00*	*157.249.168.000,00*	*128.668.007.000,00*	*132.765.360.000,00*	*140.711.748.200,00*	246,98%
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	9.884.370.000,00	157.249.168.000,00	128.668.007.000,00	132.765.360.000,00	140.711.748.200,00	246,98%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	*67.860.994.364,00*	*66.225.665.193,00*	*114.451.254.863,00*	*124.104.077.722,00*	*128.645.843.691,00*	15,30%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	67.860.994.364,00	66.225.665.193,00	114.451.254.863,00	124.104.077.722,00	128.645.843.691,00	15,30%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**162.972.624.321,00**	**43.859.461.649,37**	**15.469.170.275,00**	**491.901.200,00**	**13.083.959.532,00**	**390,84%**
Pendapatan Hibah	162.972.624.321,00	9.093.486.516,00	15.469.170.275,00	491.901.200,00	-	61,33%
Pendapatan Lainnya	-	34.765.975.133,37	-	-	13.083.959.532,00	0,00%

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Secara umum, total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,19% per tahun. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 20,86%, didorong terutama oleh peningkatan pada kategori lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer juga mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 9,31%, dengan pertumbuhan signifikan terutama pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah. Di sisi lain, kategori lain-lain pendapatan yang sah bersifat fluktuatif dan tidak berkelanjutan, dengan puncaknya pada tahun 2020 karena adanya hibah dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, data dalam tabel ini menggambarkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, meskipun kontribusi PAD menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah mencerminkan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer. Evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan daerah.Realisasi belanja daerah beberapa tahun kebelakang secara lebih rinci dapat dilihat pada

Tabel 2. 38 Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 - 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					RATA-RATA
	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	%
BELANJA	1.153.936.967.252,97	1.162.809.816.957,32	1.222.034.891.472,57	1.442.520.425.181,20	1.857.618.421.917,05	9,19%
BELANJA OPERASI	796.728.251.476,50	866.434.315.847,03	921.619.107.340,25	1.095.408.082.095,33	1.210.683.466.476,00	10,78%
BELANJA MODAL	110.437.457.261,47	100.475.370.440,29	98.997.565.453,32	136.457.237.868,87	412.885.248.071,05	32,32%
BELANJA TAK TERDUGA	52.819.164.468,00	4.084.754.820,00	890.875.358,00	695.019.217,00	593.586.332,00	353,67%
BELANJA TRANSFER	193.952.094.047,00	191.815.375.850,00	200.527.343.321,00	209.960.086.000,00	233.456.121.038,00	4,68%

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Struktur belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif, dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,19% per tahun. Komponen belanja operasi mendominasi total belanja daerah dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,78% per tahun, mencerminkan peningkatan kebutuhan rutin pemerintah daerah dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja modal tumbuh paling signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,32% per tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap, terutama pada Tahun 2024. Sementara itu, belanja tak terduga mengalami fluktuasi tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 353,67%, disebabkan oleh perubahan alokasi yang sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat atau tidak terduga. Di sisi lain, belanja transfer mengalami pertumbuhan yang lebih stabil sebesar 4,68%, yang mencerminkan konsistensi dukungan keuangan kepada pemerintah desa dan pihak penerima lainnya.

Berdasarkan tingkat realisasi belanja daerah dibandingkan anggaran digunakan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran dan efektifitas dalam melakukan penganggaran. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 39 Proporsi Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					RATA-RATA
	2020	2021	2022	2023	2024	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
BELANJA	**88,96**	**87,92**	**87,89**	**92,93**	**89,43**	**89,19**
BELANJA OPERASI	**87,91**	**88,77**	**88,03**	**92,97**	**91,96**	**89,56**
Belanja Pegawai	86,73	92,33	91,69	89,82	95,79	91,03
Belanja Barang dan Jasa	90,32	84,47	85,4	95,7	88,97	88,11
Belanja Subsidi	-	-	-	0,75	22,78	11,77
Belanja Hibah	93,51	91,08	64,35	99	94,31	88,84
Belanja Bantuan Sosial	37,03	56,11	99,3	91,05	84,84	76,33
BELANJA MODAL	**87,45**	**67,56**	**70,74**	**92,35**	**88,8**	**81,29**
BELANJA TAK TERDUGA	**76,98**	**73,63**	**32,16**	**6,26**	**1,04**	**44,74**
BELANJA TRANSFER	**99,02**	**99,78**	**99,91**	**97,63**	**97,81**	**99,01**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data realisasi belanja daerah dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum terdapat fluktuasi dalam capaian belanja dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan di tahun 2024. Rata-rata realisasi belanja dalam lima tahun terakhir berada pada 89,19%, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 92,93%, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 87,89%.

Belanja operasi sebagai komponen terbesar menunjukkan tren relatif stabil dengan rata-rata 89,56%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 92,97%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 87,91%. Dalam komponen belanja operasi, belanja pegawai mengalami tren meningkat dengan rata-rata 91,03%, sedangkan belanja barang dan jasa cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 95,7%. Belanja hibah sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, belanja bantuan sosial menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun namun masih berada pada tingkat yang cukup tinggi.

Belanja modal mengalami fluktuasi cukup besar dengan capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 67,56% dan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 92,35%. Rata-rata capaian belanja modal selama lima tahun terakhir berada pada 81,29%.

Belanja tak terduga menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dari 76,98% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,04% pada tahun 2024, dengan rata-rata 44,74%.

Sementara itu, belanja transfer relatif stabil dengan rata-rata 99,01%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 99,91%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 97,63%, namun secara umum masih berada pada tingkat yang sangat tinggi.

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah berperan dalam menutup defisit anggaran serta mendukung kebutuhan investasi pembangunan.

Sumber pembiayaan daerah meliputi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, serta penyertaan modal. Analisis pembiayaan daerah penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan fiskal serta keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Berikut realisasi pembiayaan daerah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 40 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	
PEMBIAYAAN					**366.478.269.202**	
PENERIMAAN DAERAH	**139.388.754.641**	**161.336.600.836**	**109.225.220.394**	**232.823.140.932**	**366.478.269.202**	**194,46%**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	139.388.754.641	161.336.600.836	109.217.651.300	232.820.588.432	366.477.908.066	**194,45%**
Penarikan Penyertaan Modal	-	-	7.569.094	2.552.500	361.136	**-8,69%**
PENGELUARAN DAERAH	**-**	**-**	**-**	**35.000.000.000**	**-**	**0,00%**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	35.000.000.000	-	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	**139.388.754.641**	**161.336.600.836**	**109.225.220.394**	**197.823.140.932**	**366.478.269.202**	**193,76%**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan laporan yang mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Komponen utama dalam neraca daerah mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas daerah. Analisis terhadap neraca daerah bertujuan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 41 Rasio Liquiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Liquiditas (*Current Ratio*)	4,169	2,438	4,884	14,615	6,780
Rasio Liquiditas (*Quick Ratio*)	3,897	2,203	4,567	13,929	6,424
Rasio Solvabilitas (Aset)	0,024	0,035	0,027	0,011	0,028
Rasio Solvabilitas (Modal)	0,025	0,036	0,028	0,011	0,028
Rasio Aktivitas (Rata-Rata Umur Piutang)	1,07	-1,37	-1,8	3,4	2,96
Rasio Aktivitas (Rata-Rata Umur Persediaan)	-66,85	-32,26	-28,08	5,51	160,875

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data rasio keuangan dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator utama, terutama pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas.

Rasio likuiditas yang diukur melalui Current Ratio dan Quick Ratio menunjukkan pola fluktuatif selama lima tahun terakhir. Current Ratio mengalami penurunan dari 4,169 pada tahun 2020 menjadi 2,438 pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 4,884 pada 2022 dan mencapai puncaknya di 14,615 pada 2023 sebelum menurun menjadi 6,78 pada 2024. Tren yang serupa juga terlihat pada Quick Ratio, yang menurun pada 2021, meningkat kembali pada 2022, mencapai angka tertinggi di 13,929 pada 2023, dan turun menjadi 6,424 pada 2024.

Rasio solvabilitas yang mencerminkan kemampuan aset dan modal dalam memenuhi kewajiban jangka panjang relatif stabil

dengan sedikit variasi. Rasio Solvabilitas terhadap Aset berada di angka 0,024 pada tahun 2020, meningkat ke 0,035 pada 2021, dan mengalami sedikit penurunan hingga 0,011 pada 2023 sebelum kembali naik menjadi 0,028 pada 2024. Rasio Solvabilitas terhadap Modal menunjukkan pola serupa dengan fluktuasi kecil, dengan angka tertinggi 0,036 pada 2021 dan angka terendah 0,011 pada 2023.

Rasio aktivitas menunjukkan tren yang lebih berfluktuasi dibandingkan rasio lainnya. Rata-rata umur piutang mengalami perubahan dari 1,07 pada 2020 menjadi negatif pada 2021 dan 2022 (-1,37 dan -1,8), lalu kembali positif pada 2023 sebesar 3,4 dan sedikit menurun menjadi 2,96 pada 2024.

Sementara itu, rata-rata umur persediaan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2022, nilai rasio ini negatif, dengan angka -66,85 pada 2020, -32,26 pada 2021, dan -28,08 pada 2022. Namun, pada 2023, angka ini berbalik positif menjadi 5,51 dan melonjak tajam ke 160,875 pada 2024, menunjukkan perubahan yang drastis dalam perputaran persediaan.

Berikut pada Tabel 2. 42 disajikan neraca keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 beserta rata-rata pertumbuhannya.

Tabel 2. 42 Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas dan Setara Kas						
4	Kas di Kas Daerah	115.695.931.190,14	94.076.193.374,61	230.538.352.080,75	356.646.429.470,63	296.746.820.536,31	0,41
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	3.675.000,00	79.029.658,00	-	5,13
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	38.926.695.432,00	14.003.608.325,75	931.356.789,68	1.291.587.447,65	418.615.493,64	!(0,47!)
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.645.752.852,80	1.817.932.100,80	699.797.702,80	7.807.012.471,80	8.736.606.332,80	2,34
9	Kas Dana BOS	4.123.898.407,00	703.260.307,59	647.406.858,59	659.949.013,59	337.780.557,59	!(0,34!)
10	Kas Lainnya	270,00	-	-	-	-	0,00
11	Setara Kas	-	-	-	-	-	0,00
12	**Jumlah Kas (4 s/d 11)**	**161.392.278.151,94**	**110.600.994.108,56**	**232.820.588.431,82**	**366.484.008.061,67**	**306.239.822.920,34**	**0,30**
13	Piutang						
14	Piutang Pajak	4.993.510.059,00	5.523.819.971,00	6.000.310.076,50	6.472.398.679,00	7.024.609.258,00	0,09
15	Penyisihan Piutang Pajak	(3.544.344.558,73)	(3.896.960.087,80)	(4.284.747.664,47)	(4.713.934.778,41)	(5.130.379.457,26)	0,10
16	**Piutang Pajak Netto**	**1.449.165.500,27**	**1.626.859.883,20**	**1.715.562.412,03**	**1.758.463.900,67**	**1.894.229.800,74**	**0,07**
17	Piutang Retribusi	1.321.577.783,00	1.773.890.283,00	2.052.756.283,00	2.643.016.283,00	3.159.702.783,00	0,25
18	Penyisihan Piutang Retribusi	(862.251.558,00)	(1.291.563.843,00)	(1.629.855.470,50)	(2.169.783.483,00)	(2.712.837.350,50)	0,34
19	**Piutang Retribusi Netto**	**459.326.225,00**	**482.326.440,00**	**422.900.812,50**	**473.232.800,00**	**446.865.432,50**	**!(0,001)**
20	Piutang Lain-lain PAD yang sah	7.328.599.334,00	17.590.831.549,00	12.783.948.384,01	213.102.272,00	3.979.999.325,00	4,46
21	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(180.432.675,16)	(178.475.437,37)	(161.963.597,99)	(1.208.011,36)	(20.642.496,63)	3,75
22	**Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto**	**7.148.166.658,84**	**17.412.356.111,63**	**12.621.984.786,02**	**211.894.260,64**	**3.959.356.828,37**	**4,47**
23	Piutang Transfer Antar Daerah	23.734.715.357,00	32.802.137.476,93	36.105.251.407,96	35.748.156.221,38	34.331.460.697,00	0,11
24	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	0,00
25	**Piutang Transfer Antar Daerah Netto**	**23.734.715.357,00**	**32.802.137.476,93**	**36.105.251.407,96**	**35.748.156.221,38**	**34.331.460.697,00**	0,11
26	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10.707.576.170,00	-	12.406.041.033,00	4.569,00	215.324.003.000,00	11.781.789,99
27	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	0,00
28	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto**	**10.707.576.170,00**	-	**12.406.041.033,00**	**4.569,00**	**215.324.003.000,00**	**11.781.789,99**
29	Piutang Lain-Lain	-	-	-	-	-	0,00
30	Penyisihan Piutang Lain-Lain	-	-	-	-	-	0,00
31	**Piutang Lain-Lain Netto**	-	-	-	-	-	**0,00**
32	**Jumlah Piutang Netto (16 + 19 + 22 + 25 + 28 + 31)**	**43.498.949.911,11**	**52.323.679.911,76**	**63.271.740.451,51**	**38.191.751.751,61**	**255.955.915.758,61**	**1,43**
33	Beban Dibayar Dimuka	43.330.237,50	46.813.187,50	47.112.250,00	48.224.750,00	48.224.750,00	0,03
34	Persediaan	14.291.108.756,18	17.359.666.819,44	20.516.100.101,70	19.914.435.371,38	31.237.370.265,91	0,23
35	**Jumlah Aset Lancar (12 + 32 + 33 + 34)**	**219.225.667.056,73**	**180.331.154.027,26**	**316.655.541.235,03**	**424.638.419.934,66**	**593.481.333.694,86**	**0,33**
36	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
37	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	0,00
38	Investasi Dana Bergulir	298.107.500,00	298.107.500,00	290.538.406,00	287.985.906,00	287.624.770,00	!(0,01!)
39	Penyisihan Dana Bergulir	(298.107.500,00)	(298.107.500,00)	(290.538.406,00)	(287.985.906,00)	(287.624.770,00)	!(0,01!)
40	**Jumlah Investasi Non Permanen (38 - 39)**	-	-	-	-	-	**0,00**
41	Investasi Permanen						
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	139.036.394.410,62	137.109.879.990,69	140.327.435.774,25	182.549.058.153,36	188.244.702.782,31	0,09
43	Jumlah Investasi Permanen	139.036.394.410,62	137.109.879.990,69	140.327.435.774,25	182.549.058.153,36	188.244.702.782,31	0,09
44	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (40 + 43)**	**139.036.394.410,62**	**137.109.879.990,69**	**140.327.435.774,25**	**182.549.058.153,36**	**188.244.702.782,31**	0,09
45	**ASET TETAP**						
46	Tanah	305.991.261.874,38	309.537.334.121,38	331.755.018.787,38	338.923.823.580,38	342.000.866.180,38	0,03
47	Peralatan dan Mesin	454.580.665.682,76	483.115.371.572,08	522.737.665.956,71	579.521.530.414,71	711.995.526.270,71	0,12
48	Gedung Dan Bangunan	929.617.601.582,39	954.618.861.432,96	974.494.099.434,65	1.008.546.044.027,11	1.101.695.090.697,07	0,04
49	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.837.907.768.283,96	1.882.900.985.851,96	1.908.528.961.935,96	1.950.971.334.039,96	2.043.748.827.015,47	0,03
50	Aset Tetap Lainnya	37.753.462.656,30	38.912.667.003,82	41.733.619.714,82	44.443.211.405,82	47.757.685.311,82	0,06
51	Konstruksi dalam Pengerjaan	28.000.255.201,44	35.391.889.664,44	31.085.981.048,44	37.069.315.287,02	149.138.947.404,02	0,84
52	Akumulasi Penyusutan	(1.784.004.757.569,40)	(1.923.889.328.374,76)	(2.030.155.880.736,03)	(2.126.875.720.587,95)	(2.238.990.883.226,78)	0,06
53	**Jumlah Aset tetap (46 s/d 52)**	**1.809.846.257.711,83**	**1.780.587.781.271,88**	**1.780.179.466.141,93**	**1.832.599.538.167,05**	**2.157.346.059.652,69**	0,05
54	**ASET LAINNYA**						
55	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00	0,00
56	Aset Tidak Berwujud	3.262.500.666,90	3.494.584.666,90	3.777.158.784,90	4.150.813.784,90	4.150.813.784,90	0,06
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.702.729.645,90)	(2.994.959.578,90)	(3.247.708.543,90)	(3.415.452.122,90)	(3.493.344.746,90)	0,07
58	Aset Tidak Berwujud Netto (56 - 57)	559.771.021,00	499.625.088,00	529.450.241,00	735.361.662,00	657.469.038,00	0,06
59	Aset Lain-lain	19.206.828.860,10	19.123.339.516,10	160.892.585.918,10	19.380.972.476,10	19.380.972.476,10	1,63
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	0,00
61	Aset Lain-Lain Netto (59 - 60)	19.206.828.860,10	19.123.339.516,10	160.892.585.918,10	19.380.972.476,10	19.380.972.476,10	1,63
62	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	218.909.242.000,00	220.286.987.287,00	0,25
63	**Jumlah Aset Lainnya (55 + 58 + 61 + 62)**	**21.238.291.945,10**	**21.094.656.668,10**	**162.893.728.223,10**	**240.497.268.202,10**	**241.797.120.865,10**	1,80
64	**TOTAL ASET (35 + 44 + 53 + 63)**	**2.189.346.611.124,28**	**2.119.123.471.957,93**	**2.400.056.171.374,31**	**2.680.284.284.457,17**	**3.180.869.216.994,96**	0,10
65	**KEWAJIBAN**						
66	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
67	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	0,00
68	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	42.704.477,00	47.860.642,08	52.802.823,50	61.417.525,75	89.348.117,03	0,21
70	Utang Belanja	18.146.978.433,55	27.899.858.686,85	22.894.677.291,00	16.531.524.760,00	87.439.826.180,97	1,09
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	34.398.779.742,13	46.026.173.476,00	41.894.143.026,00	12.462.659.788,00	-	!(0,36!)
72	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 71)**	**52.588.462.652,68**	**73.973.892.804,93**	**64.841.623.140,50**	**29.055.602.073,75**	**87.529.174.298,00**	**0,44**
73	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-	**0,00**
74	TOTAL KEWAJIBAN (72 + 73)	**52.588.462.652,68**	**73.973.892.804,93**	**64.841.623.140,50**	**29.055.602.073,75**	**87.529.174.298,00**	**0,44**
75	EKUITAS	**2.136.758.148.471,60**	**2.045.149.579.153,19**	**2.335.214.548.233,81**	**2.651.228.682.383,42**	**3.093.340.042.696,96**	**0,10**
76	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74 + 75)	**2.189.346.611.124,28**	**2.119.123.471.958,12**	**2.400.056.171.374,31**	**2.680.284.284.457,17**	**3.180.869.216.994,96**	**0,10**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah selama 5 tahun mendatang. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026-2030

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	**2,096,666,639,940**	**2,249,810,477,395**	**2,411,119,081,968**	**2,581,331,052,367**	**2,740,238,268,156**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**290,193,072,275**	**320,665,179,744**	**354,416,645,983**	**391,810,860,653**	**433,252,875,617**
Pendapatan Pajak Daerah	30,378,384,000	34,935,141,600	40,175,412,840	46,201,724,766	53,131,983,481
Pendapatan Retribusi Daerah	18,158,428,157	20,179,993,412	22,426,618,131	24,923,358,026	27,698,058,248
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,601,416,060	9,189,716,268	9,818,253,702	10,489,780,420	11,207,236,703
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	233,054,844,058	256,360,328,464	281,996,361,310	310,195,997,441	341,215,597,185
PENDAPATAN TRANSFER	**1,806,473,567,665**	**1,929,145,297,651**	**2,056,702,435,985**	**2,189,520,191,713**	**2,306,985,392,539**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	*1,438,837,553,000*	*1,534,691,847,964*	*1,633,066,095,867*	*1,734,109,018,176*	*1,837,979,044,813*
Dana Bagi Hasil Pajak	45,447,638,277	49,992,402,105	54,991,642,315	60,490,806,547	66,539,887,201
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	709,634,129,756	745,115,836,244	782,371,628,056	821,490,209,459	862,564,719,932
Dana Alokasi Umum	567,199,292,000	617,199,292,000	667,199,292,000	717,199,292,000	767,199,292,000
Dana Alokasi Khusus (DAK)	116,556,492,967	122,384,317,615	128,503,533,496	134,928,710,171	141,675,145,679
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	*145,838,217,665*	*150,475,872,987*	*155,261,005,748*	*160,198,305,730*	*144,272,193,139*
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	145,838,217,665	150,475,872,987	155,261,005,748	160,198,305,730	144,272,193,139
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	*221,797,797,000*	*243,977,576,700*	*268,375,334,370*	*295,212,867,807*	*324,734,154,588*
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	221,797,797,000	243,977,576,700	268,375,334,370	295,212,867,807	324,734,154,588
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0
BELANJA	**2,569,348,254,680**	**2,969,145,267,783**	**3,061,087,390,276**	**3,136,741,713,983**	**3,271,712,896,647**
BELANJA OPERASI	**1,590,557,638,265**	**1,671,446,426,616**	**1,674,069,697,602**	**1,655,658,448,934**	**1,683,033,631,396**
BELANJA MODAL	**737,135,304,559**	**1,047,199,871,055**	**1,127,259,321,023**	**1,211,623,430,094**	**1,330,067,595,946**
BELANJA TAK TERDUGA	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**
Belanja Tak Terduga	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
BELANJA TRANSFER	**221,655,311,856**	**230,498,970,113**	**239,758,371,651**	**249,459,834,955**	**238,611,669,305**
BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	**4,853,681,216**	**5,511,513,501**	**6,260,203,097**	**7,112,508,279**	**8,083,004,173**
Bagi Hasil Pajak Daerah	3,037,838,400	3,493,514,160	4,017,541,284	4,620,172,477	5,313,198,348
Bagi Hasil Retribusi	1,815,842,816	2,017,999,341	2,242,661,813	2,492,335,803	2,769,805,825
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**216,801,630,641**	**224,987,456,611**	**233,498,168,554**	**242,347,326,676**	**230,528,665,132**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	216,801,630,641	224,987,456,611	233,498,168,554	242,347,326,676	230,528,665,132
Transfer Bantuan Keungan Lainnya	0	0	0	0	0
SURPLUS / DEFISIT	**(472,681,614,740)**	**(719,334,790,388)**	**(649,968,308,308)**	**(555,410,661,616)**	**(531,474,628,491)**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	**517,681,614,740**	**719,334,790,388**	**699,968,308,308**	**605,410,661,616**	**531,474,628,491**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	**517,681,614,740**	**719,334,790,388**	**699,968,308,308**	**605,410,661,616**	**531,474,628,491**

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Penarikan Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
PENGELUARAN DAERAH	**45,000,000,000**	**-**	**50,000,000,000**	**50,000,000,000**	**-**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45,000,000,000	-	50,000,000,000	50,000,000,000	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**472,681,614,740**	**719,334,790,388**	**649,968,308,308**	**555,410,661,616**	**531,474,628,491**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (56 + 66)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

2.2.2.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam menghitung kapasitas rill keuangan daerah diperlukan proyeksi perhitungan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dapat dilihat pada ***Tabel 2. 44*** Adapun Perhitungan Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat ***Tabel 2. 45*** dan ***Tabel 2. 46***

Tabel 2. 44 Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 - 2030

URAIAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
A. BELANJA	**986,571,448,335**	**1,010,891,925,775**	**1,035,949,935,024**	**1,061,778,876,570**	**1,067,394,314,821**
Belanja Pegawai + Operasional	764,916,136,479	780,392,955,662	796,191,563,373	812,319,041,615	828,782,645,516
Bagi Hasil Pajak Daerah	3,037,838,400	3,493,514,160	4,017,541,284	4,620,172,477	5,313,198,348
Bagi Hasil Retribusi	1,815,842,816	2,017,999,341	2,242,661,813	2,492,335,803	2,769,805,825
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	216,801,630,641	224,987,456,611	233,498,168,554	242,347,326,676	230,528,665,132
B. PEMBIAYAAN PENGELUARAN	**45,000,000,000**	-	**50,000,000,000**	**50,000,000,000**	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	**45,000,000,000**	-	50,000,000,000	50,000,000,000	-
TOTAL	**1,031,571,448,335**	**1,010,891,925,775**	**1,085,949,935,024**	**1,111,778,876,570**	**1,067,394,314,821**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti terlihat pada Tabel 2.70, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi pada periode 2020 hingga 2023 masih berada di atas ambang batas mandatory spending yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- Tahun 2020: 38,89%
- Tahun 2021: 43,33%
- Tahun 2022: 38,81%
- Tahun 2023: 33,42%

Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan signifikan proporsi belanja pegawai yang hanya mencapai 28,53%, atau berada di bawah ambang batas ketentuan mandatory spending sebesar 30%. Meskipun secara nominal belanja pegawai meningkat dari Rp448,7 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp529,8 miliar pada Tahun 2024, persentasenya terhadap total belanja operasi mengalami penurunan akibat meningkatnya komponen belanja operasi lainnya, terutama belanja barang dan jasa yang melonjak tajam dari Rp287,7 miliar menjadi Rp597,2 miliar pada periode yang sama. Selain itu, penurunan proporsi belanja pegawai ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya jumlah pegawai aktif akibat gelombang pensiun yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengadaan pegawai baru, serta penyesuaian atau rasionalisasi tunjangan dan honorarium sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah, yang secara keseluruhan turut menyebabkan penurunan komposisi belanja pegawai dalam total belanja operasi secara persentase.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap berkomitmen untuk memenuhi ketentuan mandatory spending tersebut mulai tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam proyeksi belanja operasi pada tahun 2026 hingga 2030 yang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

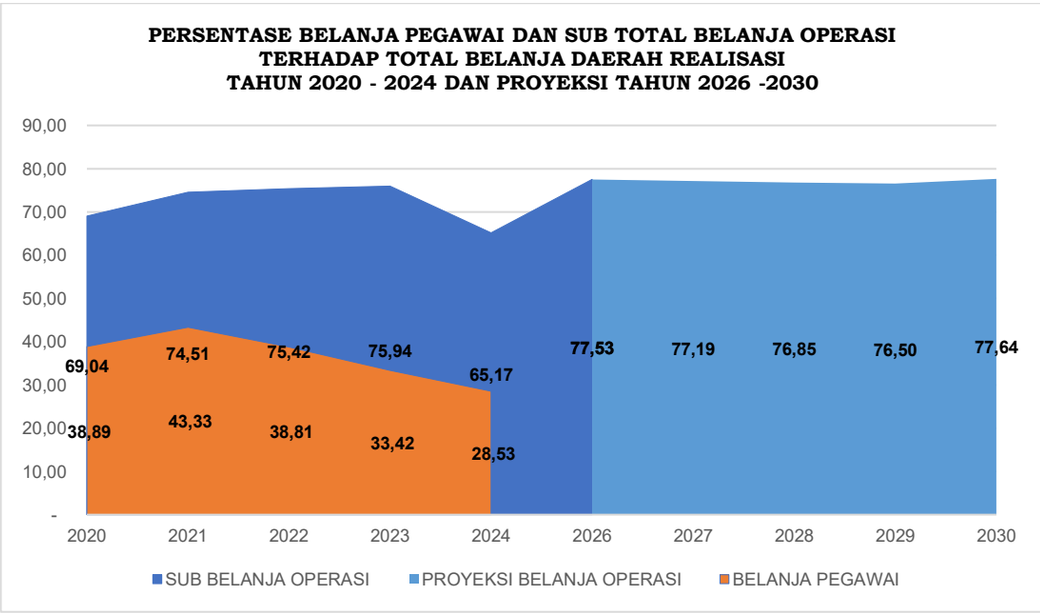
- Tahun 2026: Rp764,9 miliar
- Tahun 2027: Rp780,4 miliar
- Tahun 2028: Rp796,2 miliar
- Tahun 2029: Rp812,3 miliar
- Tahun 2030: Rp828,8 miliar

Meskipun terdapat fluktuasi akibat dinamika fiskal dan kebutuhan belanja lainnya, nilai belanja operasi secara absolut pada periode 2026–2030 tetap berada pada kisaran yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat kembali. Nilai

tersebut setara, bahkan dalam beberapa tahun melebihi, realisasi belanja operasi pada periode 2020–2023, yaitu saat proporsi belanja pegawai masih berada di atas ambang batas mandatory spending sebesar 30%. Pemenuhan kembali target mandatory spending belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja operasi mulai Tahun 2026 diperkirakan dapat kembali tercapai, seiring dengan stabilnya kondisi fiskal daerah dan didukung oleh beberapa faktor, antara lain penambahan formasi ASN baru, peningkatan belanja pegawai secara nominal, penguatan sistem pengelolaan kepegawaian termasuk perbaikan sistem remunerasi dan reformasi birokrasi, serta efisiensi belanja non-pegawai sehingga berdampak pada persentase lebih besar bagi ruang fiskal belanja pegawai.

Adapun gambaran persentase belanja pegawai Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 55 Persentase Belanja Pegawai Dan Sub Total Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Realisasi Tahun 2020 - 2024 Dan Proyeksi Tahun 2026 -2030



Sumber: Diolah dari data TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Untuk mengukur kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri, diperlukan analisis terhadap kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil ini mencerminkan besaran kemampuan pendapatan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh daerah setelah dikurangi

kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat dan tetap. Analisis ini menjadi penting dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah serta menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas pembangunan. Adapun perhitungan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 45 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN	**2,096,666,639,940.00**	**2,249,810,477,394.65**	**2,411,119,081,968.46**	**2,581,331,052,366.60**	**2,740,238,268,156.47**
PEMBIAYAAN	**517,681,614,740**	**719,334,790,388**	**699,968,308,308**	**605,410,661,616**	**531,474,628,491**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	517,681,614,740	719,334,790,388	699,968,308,308	605,410,661,616	531,474,628,491
Penarikan Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**2,614,348,254,680.00**	**2,969,145,267,783.00**	**3,111,087,390,276.00**	**3,186,741,713,983.00**	**3,271,712,896,647.00**
Dikurangi :					
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1,031,571,448,335.30	1,010,891,925,774.58	1,085,949,935,023.70	1,111,778,876,570.08	1,067,394,314,821.06
Pengeluaran Pembiayaan	45,000,000,000.00	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN	**1,537,776,806,344.70**	**1,958,253,342,008.42**	**1,975,137,455,252.30**	**2,074,962,837,412.92**	**2,204,318,581,825.94**

Sumber: TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Tabel 2. 46 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**1,537,776,806,344.70**	**1,958,253,342,008.42**	**1,975,137,455,252.30**	**2,074,962,837,412.92**	**2,204,318,581,825.94**
Prioritas I	1,076,443,764,441.29	1,370,777,339,405.89	1,382,596,218,676.61	1,452,473,986,189.04	1,543,023,007,278.16
Prioritas II	461,333,041,903.41	587,476,002,602.53	592,541,236,575.69	622,488,851,223.88	661,295,574,547.78

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

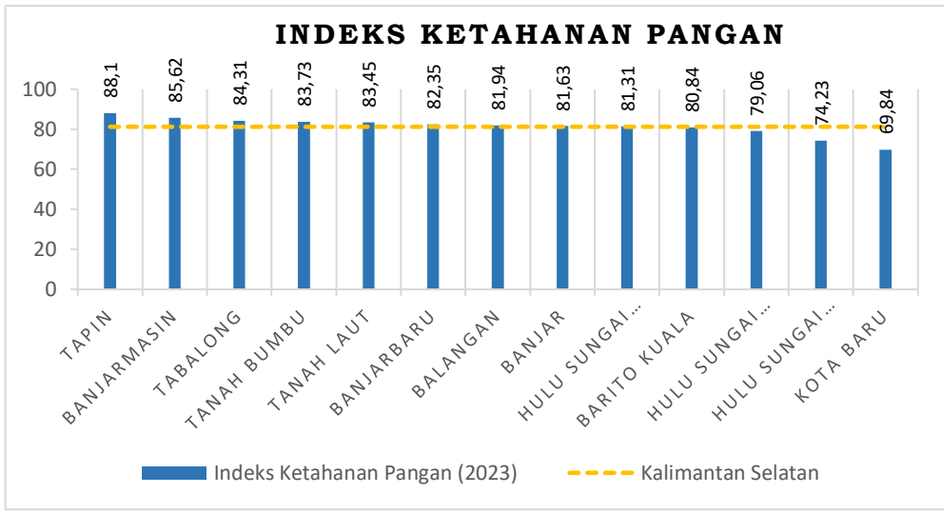
Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan dalam periode 2020 - 2024, maka permasalahan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

A. Belum optimalnya ketahanan pangan

Pada tahun 2023, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar 79,06 dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang dengan nilai indeks 81,26. Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota lainnya, posisi HST berada di peringkat ke-11, di bawah Kabupaten Barito Kuala 80,84 dan di atas Kabupaten Hulu Sungai Utara 74,23. Nilai ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di HST masih lebih rendah dibanding kabupaten Tapin 88,1 yang memiliki capaian tertinggi, dan juga lebih rendah dibanding Kota Banjarmasin 85,62 serta Tabalong 84,31.

Gambar 2. 56 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

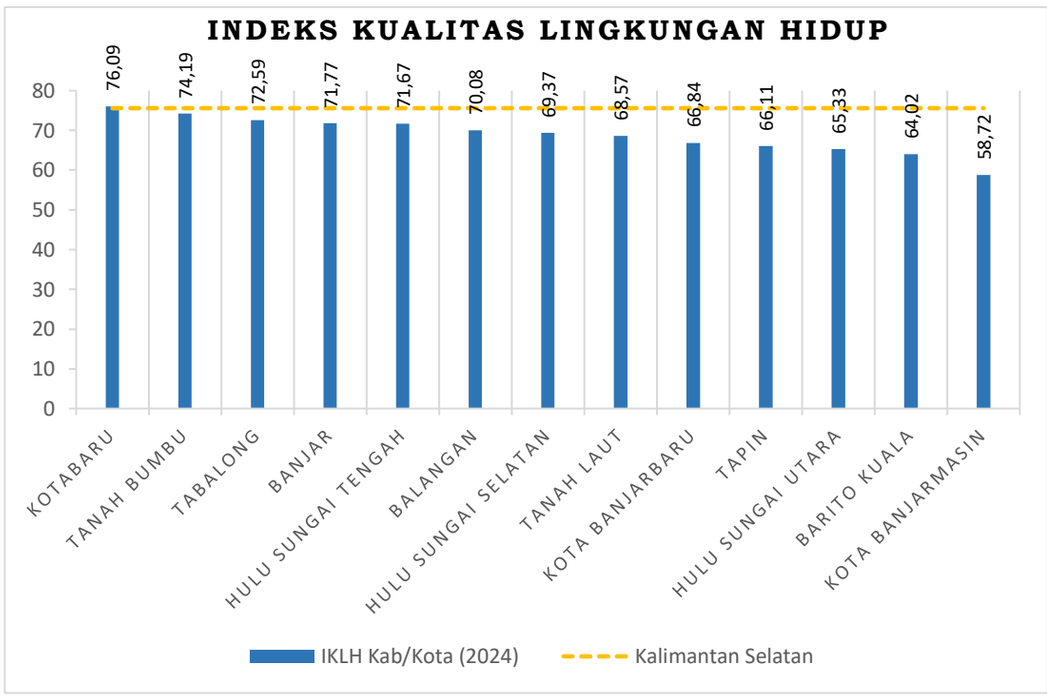
Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan HST berada pada kategori sedang, namun belum mencapai tingkat ketahanan optimal sebagaimana beberapa daerah dengan sistem pangan kuat di Kalimantan Selatan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa dimensi

ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan di HST masih memerlukan penguatan, agar tidak terus berada di bawah rata-rata provinsi.

B. Kualitas lingkungan hidup belum maksimal

Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 71,63, sedangkan Kalimantan Selatan berada pada Poin 75,59. Dengan capaian tersebut, HST menempati posisi ke 5 di antara kabupaten/kota lain di provinsi ini. Kabupaten dengan nilai tertinggi adalah Kotabaru (76,09), diikuti Tanah Bumbu (74,19), sedangkan nilai terendah tercatat pada Kota Banjarmasin (58,72).

Gambar 2. 57 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024



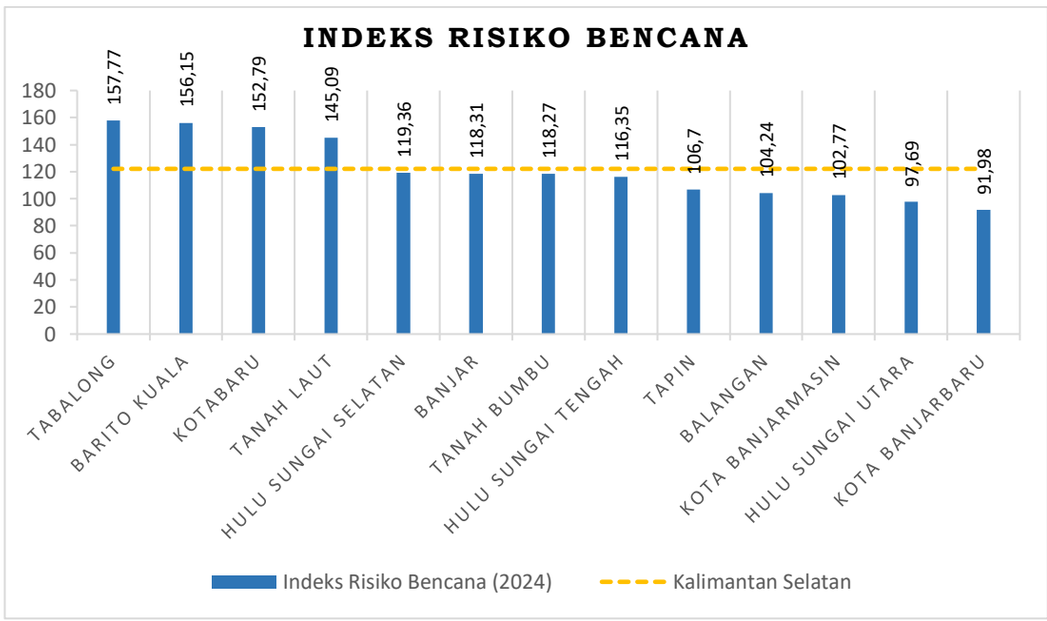
Sumber : RPJMD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di HST masih relatif stabil namun belum unggul, karena masih berada di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, posisi HST lebih baik dibanding Tapin (66,11), Hulu Sungai Utara (65,33), dan Barito Kuala (64,02), yang berarti bahwa kondisi ekologis HST masih terjaga dalam tingkat moderat.

C. Resilensi terhadap bencana masih rendah

Indeks Risiko Bencana tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat nilai 116,35, di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 122.11. Nilai ini menempatkan HST pada kategori risiko sedang yang mendekati ke arah risiko tinggi, serta peringkat ke-6 terendah dari 13 kabupaten/kota. Daerah dengan nilai risiko tertinggi adalah Tabalong (157,77), sedangkan yang terendah adalah Kota Banjarbaru (91,98).

Gambar 2. 58 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Portal INARISK BNPB, 2025

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko bencana di HST masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten/ kota lainnya, walaupun tidak termasuk daerah paling rawan di Kalimantan Selatan. Kondisi kerentanan wilayah HST terhadap bencana masih perlu mendapat perhatian dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana daerah.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

A. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan utama pada aspek kesejahteraan ekonomi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang masih rendah. Hal ini terlihat dari PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 baru mencapai Rp 34,85 juta, berada di bawah PDRB per kapita prov. Kalimantan Selatan yang sudah mencapaiRp 67,12 juta dan berada pada urutan ke 3 terendah dibandingkan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari . Dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Hal ini terlihat dari PDRB dan PDRB per kapita.PDRB atas harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baru mencapai Rp 9.366 milyar masih kecil dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari permasalahan utama tersebut, maka ada beberapa penyebab yang menjadi permasalahan pokok daerah yaitu :

1). Sumber daya ekonomi wilayah yang belum berkembang maksimal.

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) hingga tahun 2024 masih menunjukkan dominasi sektor primer, terutama dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,18% terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp9.366,02 miliar. Nilai ini meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp8.594,04 miliar, namun kontribusi HST terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Rp286.818,87 miliar pada 2024) masih kecil sekitar 3,3% dan merupakan urutan ke-2 terendah dari 13 kabupaten/kota di provinsi.

Sektor-sektor ekonomi potensial lainnya seperti konstruksi (8,68%), perdagangan besar dan eceran (12,68%), transportasi dan pergudangan (5,44%), serta akomodasi dan penyediaan makan minum (4,02%) memang menunjukkan peningkatan kontribusi dibandingkan 2020, namun belum cukup signifikan untuk mendorong transformasi struktural ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis ekonomi HST masih bergantung pada aktivitas pertanian

tradisional, sementara sektor sekunder dan tersier masih dalam tahap awal pengembangan.

Sebagai daerah agraris, hasil-hasil pertanian HST belum memiliki daya saing tinggi karena produksi masih bersifat musiman dan belum berorientasi pasar. Pola tanam padi, misalnya, masih terkonsentrasi pada satu kali panen utama per tahun di sekitar bulan April, yang menyebabkan fluktuasi pasokan dan harga bahan pangan. Ketersediaan bahan baku industri pengolahan berbasis pertanian pun belum stabil, sehingga nilai tambah di sektor hilir relatif rendah.

Selain itu, investasi yang masuk ke HST masih terbatas, terutama pada sektor-sektor produktif non-pertanian. Keterbatasan infrastruktur ekonomi, kapasitas SDM, serta belum terpetakannya potensi unggulan desa secara terintegrasi menjadi faktor penghambat pengembangan sumber daya ekonomi daerah.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka HST pada 2024 tercatat sebesar 3,2%, angka kemiskinan masih relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kesempatan kerja dan produktivitas. Rendahnya produktivitas pekerja dan masih banyaknya kelompok setengah menganggur dengan jam kerja di bawah standar mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi yang berjalan belum memberikan pendapatan yang cukup untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Dengan demikian, permasalahan utama sumber daya ekonomi HST adalah belum berkembangnya sektor-sektor potensial di luar pertanian serta rendahnya kapasitas nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang ada, yang berdampak pada terbatasnya peluang kerja produktif dan rendahnya kontribusi daerah terhadap perekonomian provinsi.

2). Laju pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan daerah. Selama

periode 2020–2024, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren pemulihan yang positif setelah sempat terkontraksi akibat pandemi COVID-19, namun laju pertumbuhannya masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi daerah ini bergerak dari –1,01 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 3,01 persen pada 2021, 3,92 persen pada 2022, 4,11 persen pada 2023, dan mencapai 4,95 persen pada 2024. Meskipun tren pertumbuhan cenderung naik, capaian ini masih di bawah potensi ekonomi daerah yang pada periode sebelum pandemi pernah tumbuh di atas 6 persen.

Lambannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belum optimalnya laju pertumbuhan lapangan usaha basis ekonomi daerah, yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB tumbuh relatif lambat, rata-rata hanya 1,8 persen per tahun selama periode 2020–2024. Meskipun meningkat dari –0,26 persen pada 2020 menjadi 3,7 persen pada 2024, laju ini masih menunjukkan perlambatan dibandingkan dekade sebelumnya.

Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, sempat tumbuh 4,46 persen pada 2022, namun melambat menjadi 0,57 persen pada 2023 dan baru kembali naik ke 3,44 persen pada 2024. Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, sektor ini juga cenderung stagnan, menandakan bahwa industrialisasi berbasis potensi lokal belum berkembang secara signifikan.

Dari baseline ekonomi yang terjadi selama ini, hanya lapangan usaha perdagangan dan jasa yang menunjukkan pertumbuhan tinggi sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 4,07 persen pada 2024, sedangkan transportasi dan pergudangan tumbuh 5,72 persen, dan penyediaan akomodasi serta makan minum meningkat tajam hingga 6,79

persen. Sektor konstruksi juga tumbuh kuat, yakni 6,03 persen pada 2024, mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan fisik dan infrastruktur.

Beberapa lapangan usaha lain seperti pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan menunjukkan pertumbuhan tinggi di atas 6 persen, tetapi kontribusinya terhadap total PDRB masih relatif kecil. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan cepat pada sektor-sektor sekunder dan tersier belum cukup besar untuk mendorong akselerasi ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor-sektor berproduktivitas rendah, sementara transformasi menuju sektor bernilai tambah tinggi berjalan lambat. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi terus menurun. Di sisi lain, sektor-sektor yang tumbuh tinggi seperti perdagangan, jasa, dan konstruksi belum mampu menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, meskipun arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pemulihan yang positif, laju pertumbuhannya belum mencapai tingkat optimal karena masih terbatasnya diversifikasi ekonomi, rendahnya nilai tambah sektor basis, serta belum kuatnya daya saing sektor-sektor produktif daerah.

3). Kemiskinan yang masih besar

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun telah mengalami sedikit penurunan dalam empat tahun terakhir, secara umum, jumlah penduduk miskin di Hulu Sungai Tengah relatif tidak mengalami penurunan berarti, yaitu sebesar 15.470 jiwa pada 2020 menjadi 16.027 jiwa pada 2024. Angka ini menunjukkan tren

stagnasi, di mana penurunan kemiskinan berlangsung sangat lambat meskipun pertumbuhan ekonomi daerah terus membaik. Kondisi tersebut juga sejalan dengan persentase penduduk miskin (P0) yang hanya turun tipis dari 5,64 persen pada 2020 menjadi 5,81 persen pada 2024, menempatkan HST sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Selatan bersama Hulu Sungai Utara dan Tabalong, serta lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 4,11 persen.

Dari sisi kedalaman kemiskinan (P1), nilai sebesar 0,745 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh dari garis kemiskinan. Nilai ini juga berada di atas rata-rata provinsi (0,571) dan memperlihatkan bahwa penduduk miskin di HST memerlukan peningkatan pendapatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

Sementara itu, keparahan kemiskinan (P2) yang mencapai 0,141 pada 2024 menandakan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin masih cukup tinggi. Artinya, terdapat perbedaan kesejahteraan yang mencolok di dalam kelompok miskin itu sendiri, di mana sebagian kecil kelompok miskin ekstrem memiliki tingkat pengeluaran yang jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh peningkatan garis kemiskinan (GK) yang naik dari Rp417.778 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp513.950 pada 2024. Kenaikan sebesar 23 persen ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok, yang menekan daya beli masyarakat miskin. Meskipun tingkat harga di HST masih lebih rendah dibanding wilayah perkotaan seperti Banjarmasin atau Banjarbaru, daya beli masyarakat miskin di HST belum cukup kuat untuk menyesuaikan diri terhadap kenaikan kebutuhan dasar.

B. Kesejahteraan Sosial

Pada aspek kesejahteraan sosial, permasalahan utamaadalah kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah belum tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mencapai 73,33 tetapi masih lebih rendah dari capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 75.19. Belum tingginya kualitas sumberdaya manusia disebabkan oleh faktor :

1). Derajat pendidikan masyarakat yang belum tinggi

Derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini tergambar dari dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencerminkan tingkat pendidikan aktual dan potensi lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk.

Tabel 2. 47 Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota + Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
KALIMANTAN SELATAN	12,68	12,81	12,82	12,86	12,87
TANAH LAUT	12,01	12,31	12,32	12,41	12,43
KOTABARU	11,93	11,95	12,06	12,07	12,08
BANJAR	12,44	12,73	13,02	13,03	13,04
BARITO KUALA	12,39	12,4	12,54	12,55	12,56
TAPIN	11,94	11,95	12,04	12,33	12,34
HULU SUNGAI SELATAN	12,17	12,38	12,4	12,46	12,48
HULU SUNGAI TENGAH	12,2	12,21	12,22	12,24	12,31
HULU SUNGAI UTARA	12,91	12,92	12,93	13,19	13,21
TABALONG	12,72	12,89	12,9	12,91	12,92
TANAH BUMBU	12,37	12,48	12,49	12,6	12,61
BALANGAN	12,46	12,47	12,61	12,82	13,09
KOTA BANJARMASIN	13,93	13,94	13,95	13,97	14,01
KOTA BANJAR BARU	14,81	14,82	14,83	14,85	14,86

Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Tabel 2. 48 Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota + Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
KALIMANTAN SELATAN	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62
TANAH LAUT	7,88	7,89	7,9	7,92	7,94
KOTABARU	7,43	7,46	7,47	7,55	7,56
BANJAR	7,35	7,52	7,71	7,94	7,95
BARITO KUALA	7,34	7,55	7,63	7,74	7,92
TAPIN	7,76	7,77	7,95	8,05	8,15
HULU SUNGAI SELATAN	7,75	7,76	7,79	7,86	8,09
HULU SUNGAI TENGAH	8	8,01	8,28	8,29	8,35
HULU SUNGAI UTARA	7,53	7,75	7,76	7,77	7,78
TABALONG	9,1	9,11	9,12	9,14	9,15
TANAH BUMBU	7,96	7,97	8,25	8,3	8,43
BALANGAN	7,55	7,69	7,85	8,03	8,13
KOTA BANJARMASIN	9,95	10,2	10,21	10,24	10,35
KOTA BANJAR BARU	10,95	10,96	10,98	10,99	11

Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 8,35 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan kelas VIII SMP atau belum menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,62 tahun, dan juga tertinggal dari beberapa kabupaten lain seperti Tabalong (9,15 tahun) dan Kota Banjarbaru (11 tahun) yang telah melampaui batas wajib belajar. Capaian ini relatif tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan yang berjalan lambat dalam penyelesaian pendidikan menengah pertama di masyarakat.

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah masyarakat Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 mencapai 12,31 tahun, yang berarti anak-anak usia sekolah memiliki peluang menempuh pendidikan hingga setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau kuliah selama satu tahun (setingkat Diploma 1). Namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 12,87 tahun, serta tertinggal dari beberapa daerah lain seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara (13,21 tahun) dan Kota Banjarbaru (14,86 tahun).

Kondisi tersebut tercermin dari angka partisipasi sekolah yang belum sepenuhnya merata. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah usia 7–12 tahun telah mencapai 99,53 persen, namun menurun pada kelompok usia 13–15 tahun menjadi 90,79 persen, dan semakin rendah pada kelompok usia 16–18 tahun (66,74 persen) serta usia 19–23 tahun (15,57 persen). Artinya, masih terdapat ribuan anak usia sekolah di Hulu Sungai Tengah yang tidak atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dari sisi mutu layanan, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian tahun 2023 menunjukkan skor literasi sebesar 62,6 dan numerasi sebesar 42,33, yang menggambarkan bahwa

kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung siswa masih di bawah standar yang diharapkan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan lanjutan.

2). Derajat kesehatan masyarakat yang belum tinggi.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun secara umum masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tahun 2024, Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Hulu Sungai Tengah mencapai 72,60 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 71,46 tahun, tetapi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 74,18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan capaian provinsi.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh akses terhadap layanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.Pada aspek akses layanan, proporsi persalinan di fasilitas kesehatan mengalami penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir. Jika pada tahun 2021 cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 94,48 persen, maka pada tahun 2024 angkanya turun menjadi hanya 66,29 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil masih melahirkan di luar fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, baik karena keterbatasan akses, ketersediaan tenaga medis, maupun faktor sosial dan budaya.

Pada aspek mutu layanan kesehatan, capaian indikator kesehatan ibu dan anak menunjukkan kemajuan yang belum stabil. Angka Kematian Ibu (AKI) di Hulu Sungai Tengah menurun signifikan dari 428 per 100.000 kelahiran pada 2020 menjadi 126,34 per 100.000 kelahiran pada 2024. Meski terjadi perbaikan besar, angka ini masih tergolong tinggi dan

memerlukan penguatan kualitas pelayanan maternal di tingkat puskesmas dan rumah sakit.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga menunjukkan perbaikan cukup berarti. Setelah sempat meningkat hingga 17,7 per 1.000 kelahiran pada 2023, angkanya turun menjadi 10,4 per 1.000 kelahiran pada 2024. Tren yang sama terjadi pada Angka Kematian Balita (AKABA) yang juga turun ke 10,4 per 1.000 kelahiran pada tahun yang sama. Kendati demikian, capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan, di mana AKB berada di kisaran 10 per 1.000 kelahiran hidup.

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Secara umum, tingkat daya saing Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Nilai Indeks Daya Saing Daerah meningkat dari 2,61 pada 2022, menjadi 3,05 pada 2023, dan mencapai 3,66 pada 2024. Meskipun terjadi kenaikan 1,05 poin dalam dua tahun, terdapat beberapa pilar yang nilainya masih di bawah provinsi

A. Kemampuan ekonomi daerah yang belum besar

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten namun masih berada sedikit di bawah capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah Pilar 4, nilai HST naik dari 2,36 pada tahun 2022, menjadi 3,36 pada 2023, dan 3,96 pada 2024. Sementara itu, capaian provinsi pada periode yang sama tercatat sebesar 3,09 (2022), 3,47 (2023), dan 4,12 (2024). Artinya, meskipun terjadi peningkatan sebesar 1,60 poin di HST, selisih capaian dengan provinsi masih sekitar 0,16 poin pada tahun 2024.

B. Penyediaan infrastruktur yang belum memadai dan mantap

Pada Pilar Infrastruktur, capaian HST mengalami kenaikan yang cukup stabil: 1,84 (2022), 2,22 (2023), dan 3,13 (2024). Peningkatan sebesar 1,29 poin dalam dua tahun ini

bahkan sedikit melampaui rata-rata provinsi (3,09). Meski begitu.

C. Sistem keuangan yang masih kecil

Nilai Pilar 9 meningkat dari 1,90 (2022) menjadi 1,03 (2023) dan kembali naik menjadi 1,89 (2024). Walau telah kembali ke level mendekati awal, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi (2,80). Angka yang relatif rendah ini menggambarkan bahwa aktivitas keuangan daerah, baik dalam skala lembaga maupun masyarakat, masih terbatas secara nominal.

Perbandingan antar tahun menunjukkan fluktuasi tajam, di mana kenaikan 0,86 poin pada 2024 belum sepenuhnya menutup penurunan tajam tahun sebelumnya.

D. Dinamisme bisnis yang masih rendah

Pilar 11 menunjukkan lonjakan paling besar dibanding pilar lain. Pada 2022 nilainya 5,00, menurun menjadi 2,50 pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 4,86 pada 2024. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi (2,63), maka nilai HST lebih tinggi 2,23 poin, menjadikannya salah satu pilar dengan kinerja terbaik.

E. Kapabilitas inovasi yang masih rendah

Nilai Pilar 12 HST meningkat dari 0,62 pada 2022 menjadi 1,35 pada 2023, dan 1,56 pada 2024. Meskipun tren kenaikannya positif, nilainya terpaut cukup jauh dari rata-rata provinsi (3,11) dan menjadi pilar dengan nilai terendah di antara semua aspek daya saing daerah. Secara data, peningkatan sebesar 0,21 poin dalam satu tahun terakhir belum cukup untuk mengejar ketertinggalan. Angka ini mengindikasikan bahwa kapabilitas inovasi di HST masih berada pada tahap awal pengembangan.

F. Kualitas sumberdaya manusia yang belum tinggi

Pada Pilar 6, nilai HST meningkat dari 3,16 (2022) menjadi 3,33 (2023) dan 3,99 (2024). Capaian ini sedikit di bawah provinsi (4,23), namun menempatkan HST dalam kelompok pilar kuat menengah.

2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan daerah pada aspek pelayanan umum terkait dengan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.Secara umum permasalahan pelaksanaan urusan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1). Pendidikan

- Belum optimalnya pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.
- Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan
- Belum meratanya sebaran dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- Belum optimal dan meratanya kemampuan manajerial pelayanan pendidikan
- Masih rendahnya budaya literasi
- Masih rendahnya minat dan partisipasi santri Pondok Pesantren dalam mengikuti pendidikan kesetaraan.
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
- Masih adanya anak yang tidak sekolah.
- Semakin meningkatnya biaya pendidikan

2). Kesehatan

- Belum optimalnya pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- Belum meratanya sebaran dan kompetensi tenaga kesehatan.
- Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan yang standart.
- Semakin meningkatnya biaya kesehatan
- Masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Konektivitas jalan belum 100 %.
- Belum tingginya kondisi jalan yang mantap
- Belum tingginya fasilitas kelengkapan jalan
- Belum tingginya infrastruktur irigasi kondisi baik
- Belum optimalnya akses sanitasi yang layak dan aman
- Belum optimalnya akses air minum
- Belum optimalnya regulasi penataan ruang
- Belum optimalnya kepatuhan terhadap regulasi penataan ruang

4). Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya penataan kawasan perumahan
- Masih adanya kawasan permukiman kumuh
- Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni

5). Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Belum optimalnya pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- Belum optimalnya mitigasi trantibum dan bencana
- Masih seringnya kejadian kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

6). Sosial

- Belum optimalnya pencapaian SPM bidang sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan sosial
- Tingginya PPKS di daerah

B. Urusan Wajib Non Pelayanan dasar

1). Tenaga Kerja

- Masih rendahnya kompetensi pencari kerja
- Terbatasnya peluang penempatan kerja

- Belum optimalnya implementasi hubungan industrial

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender
- Masih cukup tinggi ketimpangan gender

3). Pangan

- Belum optimalnya kontinyuitas ketersediaan dan keterjangkauan pangan
- Pola pangan harapan yang belum ideal
- Masih rendahnya kesadaran keamanan pangan
- Semakin tingginya potensi kerawanan pangan akibat perubahan iklim

4). Pertanahan

- Belum optimalnya tata kelola pertanahan
- Belum optimalnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan bencana

5). Lingkungan Hidup

- Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan
- Semakin menurunnya tutupan lahan
- Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha dan kegiatan lingkungan

6). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kependudukan

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
- Masih banyak desa yang masuk dalam kategori berkembang dan tertinggal
- Belum berkembangnya kawasan perdesaan

8). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum tingginya kualitas keluarga
- Rendahnya kepesertaan KB jangka panjang
- Tingginya prevalensi stunting

9). Perhubungan

- Belum optimalnya sarana dan prasarana keselamatan berlalu lintas

10). Komunikasi dan Informatika

- Masih rendahnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik
- Belum optimalnya kualitas informasi pembangunan

11). Koperasi dan UKM

- Kecilnya peran koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah

12). Penanaman Modal

- Masih rendahnya iklim usaha dan investasi

13). Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya peran kepemudaan dalam pembangunan
- Masih rendahnya budaya olahraga masyarakat
- Masih rendahnya prestasi olahraga daerah

14). Statistik

- Belum optimalnya satu data kabupaten

15). Persandian

- Belum optimalnya keamanan digitalisasi pemerintahan

16). Kebudayaan

- Masih kurangnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap seni budaya daerah.
- Belum optimalnya kreativitas pelaku seni budaya dalam adaptasi perkembangan zaman
- Belum berkembangya budaya masyarakat maju

17). Perpustakaan

- Belum tingginya literasi masyarakat
- Terbatasnya layanan perpustakaan

18). Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola kearsipan daerah

C. Urusan Pilihan

1). Kelautan dan Perikanan

- Rendahnya produksi ikan
- Masih rendahnya kompetensi kelompok budidaya perikanan
- Tingginya ancaman kerusakan sumberdaya perairan umum

2). Pariwisata

- Masih rendahnya daya saing wisata daerah
- Masih rendahnya kunjungan wisata
- Belum berkembangnya usaha wisata

3). Pertanian

- Belum optimalnya produksi pertanian
- Rendahnya nilai tukar petani

4). Perdagangan

- Belum optimalnya kontribusi perdagangan dalam ekonomi daerah

- Fluktuatifnya harga konsumen

5). Perindustrian

- Rendahnya kontribusi industri pengolahan terhadap ekonomi daerah

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1). Perencanaan

- Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

2). Keuangan

- Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah
- Belum optimalnya tata kelola barang daerah
- Belum tingginya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah

3). Kepegawaian

- Belum optimalnya tata kelola kepegawaian daerah

4). Pendidikan dan Pelatihan

- Belum optimalnyakompetensi dan profesionalisme ASN

5). Penelitian dan Pengembangan

- Rendahnya inovasi daerah dan perlindungan hak kekayaan intelektual
- Kurangnya dukungan kajian ilmiah dalam penyusunan perencanaan

E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah
- Belum tingginya implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah

G. Unsur Kewilayahan

- Belum optimalnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan

H. Unsur Pemerintahan Umum

- Semakin meningkatnya ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme
- Semakin meningkatnya kasus penyelahgunaan NAPZA

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian dari rencana pembangunan tentang pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.Sedangkan, Isu-isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (sustainability) pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun mendatang.

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi pembangunan sangat tergantung dari arah kebijakan pembangunan yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan sasaran pokok pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan

persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan, baik internasional, nasional hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun, jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, hal sebaliknya akan terjadi, yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakanpembangunan agar pencapaian visi, misi dan sasaran pokokpembangunan daerah lebih terstruktur, tepat dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

2.3.2.1 Telaah Isu Global

A. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDG's)

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan dokumen yang menjadi acuan pembangunan secara internasional sebagai kelanjutan dari konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Para pemimpin negara anggota PBB mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. SDG's melihat kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang

berlebihan sebagai isu-isu global yang perlu ditangani oleh semua negara ke depan.

Gambar 2. 59 Tujuan Pembanguan Berkelanjutan



B. Perubahan iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi dan kehilangan sumberdaya hayati akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari.Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk sebagai akibat dari ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, longsor dan lain sebagainya.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming ini. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

C. Ekonomi Hijau

Dengan terjadinya perubahan iklim, menyebabkan terjadinya tren ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi untuk mengurangi perubahan iklim.

Pelaksanaan pembangunan yang lebih memperhatikan lingkungan serta penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global pada masa yang akan datang.

D. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Hal ini mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi ini, Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disamping itu perkembangan teknologi juga menuntut kesiapan adaptasi dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir. Oleh karena itu masyarakat perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan

teknologisecara optimal dan mampu meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi bisnis yang mendorong peningkatan produktivitas dan pasar usaha. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi sektor industri dengan percepatan otomasi, mempengaruhi sektor pendidikan melalui inovasi pengajaran dan pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu.Perkembangan teknologi juga menyebabkan beberapa pekerjaan tergantikan oleh teknologi, pola kerja konvensional akan semakin berubah menjadi“work from anywhere’ menjadi tantangan bagi perkantoran konvensional, serta memperbaiki proses tata kelola.

E. Persaingan Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam baik energi, air, dan pangan akan terus meningkat pada masa yang akan datang.Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi akan menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetensi dan persaingan di berbagai wilayah.

Kelangkaan sumber energi fosil juga menyebabkan terjadi persaingan dalam penggunaannya. Dengan keterbatasan sumber energi dan adanya isu perubahan iklim maka akan mendorong negara-negara untuk mencari dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Ke depan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber utama energi dunia, menggantikan sumber energi fosil yang semakin habis.

F. Persaingan Ekonomi

Ekonomi dunia akan semakin berkembang dan diproyeksikanterjadi peningkatan peranan negara berkembang dengan pusat ekonomi bergeser ke Asia dan Afrika.Perdagangan global akan dipengaruhi oleh kecepatan perubahan teknologi dan digitalisasi. Kerjasama kawasan juga akan menciptakan hub perdagangan strategis baru. Perubahan demografi dan struktur ekonomi global juga akan mempengaruhi kebijakan fiskal global.Perkembangan

teknologi digital juga menyebabkan disrupsi pada jasa keuangan seperti munculnya mata uang digital, bank digital serta hilangnya beberapa pekerjaan di sektor keuangan.

Perkembangan ekonomi dunia juga akan meningkatkan kelas menengah dunia.Tumbuhnya kelas menengah baru dunia akan menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus tantangan pada aspek sosial dan politik. Tumbuhnya kelas menengah akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru, kebutuhan konsumsi yang lebih beragam dan gaya hidup baru.

2.3.2.2 Telaah Isu dan Kebijakan Nasional

A. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan agar selaras dengan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN tersebut menjadi pedoman strategis nasional yang menekankan lima sasaran utama pembangunan nasional, yaitu peningkatan pendapatan per kapita menuju negara maju, penghapusan kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan posisi Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi menuju *net zero emission*.

Tabel 2. 49 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
01 – Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju	01 – Pertumbuhan ekonomi	persen	5,05	5,3	8
	02 – GNI Per Kapita	USD	4.870 (2023)	5.410	8.000
	03 – Kontribusi PDB Maritim	persen	7,9 (2022)	8,1	9,1
	04 – Kontribusi PDB manufaktur	persen	18,67 (2023)	20,8	21,9
02 – Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	01 – Tingkat kemiskinan	persen	9,03	7,0 – 8,0	4,5 – 5,0
	02 – Rasio gini	-	0,379	0,378 – 0,382	0,372 – 0,375
	03 – Kontribusi PDRB KTI	persen	20,9 (2023)	21,4	22,4
03 – Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	01 – Global Power Index	peringkat	34 (2023)	33	29
04 – Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	01 – Indeks Modal Manusia	-	0,54 (2020)	0,56	0,59
05 – Intensitas Emisi GRK Menurun	01 – Penurunan intensitas emisi GRK	persen	34,09 (2022)	35,53	45,17

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Menuju Net Zero Emission	02 – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	72,54 (2023)	76,49	77,2

Sumber : Perpres No 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Selaras dengan arah pembangunan nasional tersebut, beberapa isu dan kebijakan strategis nasional yang relevan bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Peningkatan Pendapatan Per Kapita Menuju Negara Maju**

   RPJMN menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8% pada tahun 2029 dengan GNI per kapita mencapai 8.000 USD. Arah kebijakan nasional menekankan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi maritim, peningkatan produktivitas pertanian, serta percepatan pengembangan industri manufaktur.

   Bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini berarti perlunya penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan nilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta peningkatan konektivitas rantai pasok menuju wilayah koridor ekonomi Kalimantan Selatan.

2) **Penghapusan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan**

   Pemerintah pusat menargetkan tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 4,5–5% dengan rasio gini mencapai 0,372–0,375 pada akhir periode 2029. Kebijakan nasional menitikberatkan pada perluasan lapangan kerja, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu menyesuaikan arah kebijakan dengan fokus pada pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi dana desa, serta peningkatan UMKM dan

koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif.

3) **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Sasaran nasional diarahkan untuk meningkatkan *Human Capital Index* dari 0,54 menjadi 0,59 pada tahun 2029. Fokus kebijakan nasional meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, penguatan sistem kesehatan, serta peningkatan literasi digital dan inovasi daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah berperan memperkuat pendidikan berbasis keterampilan kerja, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, dan pembinaan SDM sektor pertanian serta pariwisata berbasis Meratus.

4) **Penguatan Kepemimpinan dan Pengaruh Internasional Indonesia**

Sasaran *Global Power Index* meningkat dari peringkat 34 menjadi 29 pada tahun 2029. Walaupun berfokus pada kebijakan nasional, daerah didorong untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, stabilitas sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat mengambil peran melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan sosial di tingkat lokal.

5) **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pemerintah pusat menargetkan penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 45,17% (2029), serta peningkatan *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)* dari 72,54 menjadi 77,20. Arah kebijakan nasional menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penguatan ketahanan bencana, dan percepatan transisi energi hijau. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah penyangga ekosistem Pegunungan Meratus perlu

memperkuat program rehabilitasi hutan, konservasi DAS, pengurangan risiko bencana banjir dan longsor, serta pengelolaan sampah dan limbah berbasis masyarakat.

B. Telaah Ibu Kota Nusantara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kebijakan ini menandai perubahan orientasi pembangunan Indonesia dari yang selama ini berpusat di Pulau Jawa menuju pola pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Nusantara.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Melalui Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah berupaya menciptakan pusat gravitasi ekonomi baru di luar Pulau Jawa**,** sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan dan kawasan timur Indonesia.

Visi pembangunan IKN adalah mewujudkan “Kota Dunia untuk semua”, yang menempatkan IKN sebagai:

1) Kota berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rendah karbon, dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya;
2) Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, melalui pengembangan inovasi, teknologi, dan peluang ekonomi hijau; serta
3) Simbol identitas nasional, yang merepresentasikan nilai-nilai kebhinekaan dan keadaban bangsa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dan pengelolaan IKN akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diberi kewenangan khusus untuk merancang, membangun, dan mengelola wilayah IKN serta wilayah mitra di sekitarnya. Wilayah mitra tersebut mencakup daerah-daerah di Pulau Kalimantan yang memiliki keterkaitan langsung dengan rantai

pasok ekonomi, logistik, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup terhadap kawasan IKN.

Bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keberadaan IKN memiliki implikasi strategis sekaligus peluang untuk memperkuat peran daerah dalam jaringan ekonomi. HST berpotensi menjadi daerah penyangga sektor pangan dan produk olahan pertanian untuk mendukung kebutuhan wilayah metropolitan baru tersebut. Posisi HST di jalur koridor wilayah yang menghubungkan daerah penyangga dengan pusat pertumbuhan utama (*hinterland*) Kalimantan Selatan menjadikannya bagian dari sistem logistik dan konektivitas yang menghubungkan klaster Banjarbakula dan klaster saijaan bersujud dengan IKN.

Selain itu, pembangunan IKN akan mendorong peningkatan mobilitas barang, jasa, dan manusia, sehingga memacu kebutuhan pengembangan infrastruktur jalan produksi, pasar desa, dan jaringan transportasi regional yang lebih baik di wilayah Hulu Sungai Tengah. Keterbukaan akses ekonomi ini juga diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya klaster industri kecil dan menengah berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari rantai pasok komoditas regional Kalimantan.

Dari sisi lingkungan hidup, pengembangan IKN yang berkonsep kota hijau dan berkelanjutan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menekankan konservasi kawasan Pegunungan Meratus, pelestarian sumber daya air, serta pengendalian alih fungsi lahan.

2.3.2.3 Telaah Isu dan Kebijakan Provinsi

A. Telaah RTRW Prov. Kalimantan Selatan

Kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

1) pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah Barat dengan

wilayah tengah dan antara wilayah Timur dengan wilayah Tenggara Daerah;

2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
3) peningkatan perlindungan Kawasan Lindung;
4) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung;
5) perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya;
6) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7) peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
8) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
9) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi atas kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah terdiri atas :

1) meningkatkan keterkaitan, peran dan fungsi Kota Rawa sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Rawa dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya terutama pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
2) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan Utara wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh infrastruktur perkotaan;

3) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada koridor alur Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Martapura;
4) mengendalikan perkembangan kota yang langsung berhubungan dengan kawasan pesisir laut dan kawasan bantaran sungai ; dan
5) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi atas kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terdiri atas :

1) meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, transportasi sungai termasuk anjir, transportasi laut, dan transportasi udara;
2) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah;
3) meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah;
4) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi atas kebijakan peningkatan Kawasan Lindung, terdiri atas:

1) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2) menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
3) mewujudkan Kawasan Lindung dalam satu wilayah provinsi dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

4) mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi Kawasan Lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
5) melakukan penuntasan tata batas Kawasan Lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
6) mengelola Kawasan Lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta Masyarakat sekitarnya.

Strategi atas kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia meliputi :

1) melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan illegal dalam Kawasan Lindung;
2) menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi Kawasan Lindung;
3) memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
4) mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

Strategi atas kebijakan pewujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya terdiri atas :

1) menetapkan Kawasan Budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
3) membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi

budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya meliputi :

1) mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;
2) mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
3) mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;
4) membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
5) membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
6) mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
7) mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan hutan lindung meliputi :

1) menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
2) mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar

Kawasan Strategis Provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

3) memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;
4) merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;
5) melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem Kawasan Lindung; dan
6) mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian Kawasan Lindung.

Strategi atas kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah meliputi:

1) menetapkan Kawasan Strategis Provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
2) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
3) mengembangkan pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
4) membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
5) mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

6) mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
7) mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :

1) menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan Kawasan Strategis Nasional dengan budidaya terbangun; dan
4) turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang wilayah provinsi Kalimantan Selatan meliputi sistem perkotaan nasionaldan sistem perkotaan provinsi. Sitem perkotaan nasional meliputi:

1) PKN berada di Kota Banjarmasin; dan
2) PKW berada di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, perkotaan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, perkotaan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dan perkotaan Kotabaru Kabupaten Kotabaru.

Sistem perkotaan meliputi : Kota Banjarbaru; Perkotaan Rantau di Kabupaten Tapin; Perkotaan Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Perkotaan Paringin di Kabupaten Balangan; Perkotaan Tanjung di Kabupaten Tabalong; Perkotaan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut; dan Perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

PKNp dan PKWp meliputi:

1) PKNp di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru;
2) PKWp di perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

B. Telaah RPJPD Prov. Kalimantan Selatan 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2045 adalah “Kalimantan Selatan Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Menuju Baabussalam” .Visi tersebut memiliki makna dalam 20 tahun ke depan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi gerbang logistik dari dan ke pusat logistik di IKN. Posisi strategis Kalimantan Selatan yakni pintu gerbang IKN diharapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan glob---al di selatan pulau Kalimantan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Adapun sasaran visi tersebut adalah :

Tabel 2. 50 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2045

NO	SASARAN VISI	BASELINE 2025	SASARAN 2045
1	**Peningkatan Pendapatan per Kapita**		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	69,59-71,96	267,12-495,63
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	28,97-33,63	68,58-80,23
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,68-12,46	17,33-24,08
2	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,44-3,94	0,07-0,32
	b. Rasio gini (Indeks)	0,307-0,312	0,215 0,281
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,32	1,59
3	**Peningkatan Kepemimpinan dan Pengaruh Derah di Tingkat Nasional**		
	Indeks Daya Saing Daerah	3,19 (2022)	4,36
4	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		
	Indeks Modal Manusia	0,55	0,70
5	**Penurunan emisi GRK Menuju net zero emission**		
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	75,97	95,85

Sumber : Dokumen RPJPD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, 2025

Adapun misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1) Mewujudkan Transformasi Sosial
2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3) Mewujudkan transformasi tata kelola
4) Mewujudkan Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6) Mewujudkan pembangunan kewilayahanyang merata dan berkeadilan
7) Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8) Mewujudkan kesinambungan lingkungan.

Kebijakan pembangunan RPJPD tahap I (2025-2029) Kalimantan Selatan temanya adalah “Penguatan Fondasi Transformasi”. Adapun arah kebijakan dan target indikator utama berdasarkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 51 arah kebijakan pembangunan RPJPD Kalimantan Selatan tahap I (2025-2029)

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
		2	Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
		3	Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan
		4	Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis
		5	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
		6	Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
		7	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
		8	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
		9	Peningkatan akses dan Kualitas pendidikanvokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertambangan, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment
		10	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK
		11	Peningkatan upaya Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
		12	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan,dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
		13	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosck) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
		14	Perencanaan,penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		15	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		16	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
		17	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal
		18	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		19	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan
		20	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	1	Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing
		2	Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
		3	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
		4	Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia.
		5	Pengembangan basis sektor- sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan
		6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan,dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
		7	Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif
		8	Peningkatan rantai nilai domestik Kalimantan Selatan untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik
		9	Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school- to-work

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		10	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
		11	Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan.
		12	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon Terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan
		13	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		14	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		15	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
		16	Peningkatan produktivitas BUMD
		17	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
		18	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
		19	Pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
		2	Peningkatan partisipasimasyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		3	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
		4	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
		5	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		6	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		7	Penguatan integritas partai politik
		8	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK " dengan pemanfaatan teknologi informasi
4	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi Perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		3	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
		2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		3	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya
		4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
		5	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
		6	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan
		7	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi
		8	Peningkatan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
		9	Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di kawasan Pegunungan Meratus
		10	Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
		11	Peningkatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa *(home range)*
		12	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		13	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		14	Pengembangan solusi berbasis alam *(natural based solution)* untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
		15	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		16	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		17	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		18	Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, Kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		19	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		20	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
		22	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	1	Fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut
		2	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria
		3	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
		4	Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat-pusat kota
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1	Pengembangan pelabuhan- pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)
		2	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
		3	Penyelesaian jalan Trans Kalimantan dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		4	Koordinasi Pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah
		5	Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
		6	Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin Serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya
		7	Peningkatan pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan
		8	Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
		9	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.
		10	Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi yang tersedia.
		11	Pengembangan grid skala kecil terisolasi *(isolated mini grid)* untuk memperluas penyediaan layanan listrik yang lebih berkualitas dan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik
		12	Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Kalimantan Selatan maupun antarpulau.
		13	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok serta kawasan industri dan pertambangan
		14	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
		15	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, mcnciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill*
		16	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
		17	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
		18	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
		19	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.

NO.	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		20	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
		21	Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk mencapai 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).
		22	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
		23	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
		24	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
		25	Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
8	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	1	Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
		4	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		5	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
		6	Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD
		7	Pengembangan pembiayaan inovatif

Sumber : RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2. 52 Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Baseline	Target
MISI 1: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL	1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,17	79,06
					2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
						a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	136	18
						b) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5
					3	Penanganan Tuberkulosis:		
						a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	100
						b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	100
					4	Cakupan kepesertaan jaminan	89,09	99,5
			2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:		
						a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
						i) Literasi Membaca	16,78-18,78	77,35 79,35
						ii) Numerasi	0,00-2,00	61,50-63,50
						b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
						i) Literasi Membaca	38,52-40,52	76,39-78,39
						ii) Numerasi	18,36-20,36	59,74-61,74
						c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,26-9,27	11,74-11,77
						d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,08	14,46-14,51
					6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,5	10,50-1 1,72

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Baseline	Target
					7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,75	75,00
			3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,44 - 3,94	0,07-0,32
					9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	22,36	83,15
					10	Persentase Penyandang Disabilitas	26	60
MISI 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI	2	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,68- 12,46	17,33 - 24,08
					12	Pengembangan Pariwisata		
						a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,12 - 2,37	3,61
						b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	12,1	30,25
					13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,20	9,94-10,97
					14	Produktivitas U M KM, Koperasi, BUMD:		
						a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,73	16,27 - 17,78
						b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,83	5,96 - 7,00
						c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,57	4,67 - 5,37
						d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	5,19 - 6,50
						e) *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	0,68	5,54
					15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,25	1,7-2,7
					16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,11	71,3
					17	Indeks Inovasi Daerah*	49,42	82,36-90,93
			5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:		
						a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	40,35 - 40,74	42,78 - 43,65
						b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,00	57 - 68,00

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Baseline	Target
			6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9	7,5
			7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,28	4,78
					21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,2	16,1
					22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	77,74	114,0
MISI 6: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN	3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:		
						a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	0,40 WM Banjarmasin (terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)	0,57-0,62 WM Banjarmasin (terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)
						b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	73,00	100
						c) Persentase Desa Mandiri (%)	19,45	94,28
MISI 3: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	70,00

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Baseline	Target
MISI 8: MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN	5	Meningkatnya capaian pembangunan			25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	5,00
					26	Indeks Pelayanan Publik	4,53	5,00
					27	Indeks Integritas Nasional	76,36	91,99
MISI 4: MEWUJUDKAN KEAMANAN DAERAH YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	6	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Persentase PERDA dan Perkada yang ditegakkan*	*Target akan ditentukan kemudian*	
					29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,62	82
					30	Indeks Demokrasi Indonesia	81,11 - 84,37	88,46-90,69
			11	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4	1,7
					32	Tingkat Inflasi (%)	3,3-4,1	1,1-3,3
					33	Pendalaman/Intcrmediasi Sektor Keuangan:		
						a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	31,62	57,78 - 66,50
						b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,14	0,26 - 0,30
						c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.748,17	7.701,93 - 9.686,51
						d) Total Kredit/PDRB (%)	23,5	51,78 - 61,20
					34	Inklusi Keuangan (%)	87,98	98,41
			12	Kepemimpinan daerah di tingkat nasional	35	Indeks Daya Saing Daerah*	3,19 (2022)	4,36
					36	Indeks Reformasi Birokrasi*	69,49	81,08-87,35
MISI 5: MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	7	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,89 - 58,91	71,42 - 72,26
					38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	81,23 - 81,56
			14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69	73,97 - 74,04
					40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,48	0,23 - 0,22

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan (IUP)		Baseline	Target
				Masyarakat Inklusif				
			15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,22	0,39
					42	Kualitas Lingkungan Hidup:		
						a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,88	76,51
						b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	14,00	50,00
						c) Pengelolaan Sampah		
						- Timbulan Sampah Terolah difasilitas Pengolahan Sampah (%)	9,2	26,2
						- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	61,85	81,85
			16	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	43	Indeks Risiko Bencana (IRB)	128,81	104,98 - 84,62
					44	Persentase Penurunan Emisi GRK (%):		
						a. Kumulatif	15,61	33,76
						b. Tahunan	22,95	69,16
MISI 7: MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN	8	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah terutama untuk mendukung Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	17	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	45	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
						a) Ketahanan Energi:		
						- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	830	1.94
						- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp m i Iya r)*	170	200
						b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	3,81	0,92
						c) Ketahanan Air		
						- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,504	1,254
						- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	53,77	70

Sumber : RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

C. Telahaan RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 menekankan penguatan transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan berbasis potensi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pedoman sinkronisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) agar selaras dalam pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan provinsi yang relevan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah sebagai berikut :

1) Pengembangan Kawasan dan Sektor Unggulan serta Peningkatan Pelayanan Dasar dan Ekonomi Rakyat

RPJMD Provinsi menempatkan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata sebagai pilar utama perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Hulu Sungai Tengah yang memiliki potensi pertanian lahan basah dan dataran tinggi meratus.

- Pengembangan pertanian dan perkebunan terpadu diarahkan pada pertanian ramah lingkungan dan organik di dataran tinggi serta integrasi pertanian–perikanan–peternakan di lahan potensial. Kabupaten HST dapat mengadaptasi kebijakan ini melalui revitalisasi jaringan irigasi, perbaikan infrastruktur pertanian, dan penguatan sistem produksi organik desa.
- Hilirisasi dan diversifikasi produk lokal menjadi strategi peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan peternakan. HST berpotensi mengembangkan industri rumah tangga dan pengolahan pascapanen, seperti produk beras kemasan, cabai olahan, pupuk organik, abon, serta daging asap khas daerah.

- Pengembangan pariwisata alam dan ekowisata difokuskan pada Pegunungan Meratus sebagai destinasi nasional. Arah ini selaras dengan prioritas HST dalam pengembangan wisata alam, wisata sungai, dan wisata berbasis masyarakat, termasuk fasilitasi homestay, kuliner lokal, dan pelatihan pemandu wisata.
- Penguatan UMKM dan koperasi desa didorong melalui pendampingan kewirausahaan, pelatihan pemasaran digital, dan fasilitasi pembiayaan melalui KUR, koperasi, dan BUMDes. Hal ini dapat dikembangkan di HST melalui kolaborasi lintas desa dan promosi produk lokal lewat festival budaya dan pasar digital.
- Peningkatan infrastruktur ekonomi dan aksesibilitas menjadi fokus strategis, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan produksi, pasar desa, serta fasilitas logistik lokal. Kebijakan provinsi juga menekankan peningkatan akses internet dan transportasi di wilayah terpencil, yang relevan untuk memperkuat konektivitas antardesa dan kawasan agropolitan di HST.
- Penyediaan layanan dasar perdesaan—terutama kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi—menjadi arah penting untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan.

2) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pelayanan Publik

Pembangunan manusia menjadi salah satu pilar utama RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Arah kebijakan ini meliputi peningkatan kualitas SDM lokal dan pendidikan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja produktif, inovatif, dan berdaya saing. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menyesuaikan

melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, dan pengolahan produk lokal, serta memperluas kerja sama dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan SDM siap kerja di sektor unggulan daerah.

Dalam aspek tata kelola, sinergi dengan provinsi diarahkan pada penguatan digitalisasi pelayanan publik, transparansi tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas aparatur.

3) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana

Kalimantan Selatan menghadapi tantangan ekologis akibat degradasi lahan, banjir, dan potensi longsor di kawasan Meratus. Karena itu, RPJMD Provinsi menekankan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

- Perlindungan kawasan hutan Meratus menjadi prioritas utama, mencakup reboisasi, rehabilitasi hutan, serta edukasi konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Bagi HST, langkah ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi program penghijauan desa, sekolah alam, dan pemulihan tutupan vegetasi di daerah tangkapan air.
- Penguatan sistem mitigasi bencana dilakukan melalui pengembangan sistem peringatan dini banjir dan longsor berbasis masyarakat serta pembangunan infrastruktur bendungan dan pengendalian banjir.
- Pengelolaan sampah terpadu ditekankan melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah mandiri, dan pengolahan sampah organik secara efektif.
- Pengendalian alih fungsi lahan diarahkan agar setiap kegiatan pembangunan tetap

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk konservasi lahan pertanian produktif dan kawasan lindung.

2.3.2.4 Telaah Isu dan Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

A. Telaah RTRW Kab. Hulu Sungai Tengah

Amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang RTRW kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016 – 2036, memuat tentang kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:

1) pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu;
2) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
3) pengembangan kawasan wisata alam dan buatan dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4) pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5) pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam;
6) pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan; dan
7) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Adapun strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu dengan strategi meliputi:
   a. mengembangkan ketersediaan infrastruktur penunjang dan pelayanan sub-terminal agribisnis pada kawasan agropolitan;

b. mengembangkan lumbung desa modern;
c. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
d. mempertahankan luas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten;
e. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
f. mengembangkan irigasi pertanian;
g. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
h. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering;
i. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
j. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
k. meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan dan perikanan;
l. mengembangkan sentra peternakan; dan
m. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
c. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
d. meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
e. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri dan pergudangan;

f. mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri; dan
g. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
h. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
i. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan dan jasa

3) Pengembangan wisata alam dan buatan dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestraian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi:
   a. mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam serta wisata buatan;
   b. mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata;
   c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
   d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
   e. mengadakan dan memperbanyak event festival wisata dan gelar seni budaya; dan
   f. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal (local indigenous).
4) Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi:
   a. meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
   b. meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Capacity Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

c. mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
d. mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
e. memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.

5) Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
   a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
   b. mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
   c. mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung;
   d. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan;
   e. meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;
   f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam;
   g. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
   h. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar instansi terkait; dan
   i. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.

6) Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi:
    a. menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    b. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk;
    c. membuka kawasan pusat pertumbuhan di setiap pusat kegiatan; dan
    d. memeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan saranaprasarana dan infrastruktur di kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
    a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
    b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
    c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang wilayah untuk sistem perkotaan terdiri atas :

1) PKWp dengan lokasi berada di Perkotaan Barabai.
2) PKL dengan lokasi meliputi perkotaan Birayang di Kecamatan Batang Alai Selatan dan perkotaan Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan.

3) PKLp dengan lokasi meliputi: 1. Perkotaan Pagat di Kecamatan Batu Benawa
4) PPK dengan lokasi meliputi: perkotaan Pandawan di Kecamatan Pandawan, perkotaan Haruyan di Kecamatan Haruyan, perkotaan Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara, perkotaan Ilung di Kecamatan Batang Alai Utara, perkotaan Hantakan di Kecamatan Hantakan, perkotaan Tandilang di Kecamatan Batang Alai Timur, dan perkotaan Limpasu di Kecamatan Limpasu.

Rencana struktur ruang sistem perdesaan berupa PPL meliputi :

1) Kecamatan Pandawan ditetapkan di Desa Kambat Utara danDesa Mahang Sungai Hanyar
2) Kecamatan Batang Alai Selatan ditetapkan di Desa Anduhum;
3) Kecamatan Haruyan ditetapkan di Desa Mangunang dan Desa Batu Panggung.
4) Kecamatan Batang Alai Utara ditetapkan di Desa Telang danDesa Semanggi Seberang
5) Kecamatan Hantakan ditetapkan di Desa Murung B
6) Kecamatan Limpasu ditetapkan di Desa Abung
7) Kecamatan Batang Alai Timur ditetapkan di Desa Hinas Kiri dan Desa Nateh.
8) Kecamatan Batu Benawa ditetapkan di Desa Kalibaru danDesa Baru.
9) Kecamatan Labuan Amas Utara ditetapkan di Desa Sungai Buluh, Desa Pamangkih dan Desa Banua Kupang.
10) Kecamatan Labuan Amas Selatan ditetapkan di Desa Murung Ta'al; dan Desa Tabudarat Hilir.

Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

B. Telaah RPJPD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

"KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PUSAT JASA DAN LOGISTIK YANG SEJAHTERA, UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Dari visi tersebut terdapat lima elemen utama yaitu aspek PUSAT JASA DAN LOGISTIK, aspek SEJAHTERA, aspek UNGGUL, aspek MAJU dan aspek BERKELANJUTAN. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1) **PUSAT JASA DAN LOGISTIK**, memiliki makna bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai wilayah strategis yang berada di poros Kalimantan Selatan untuk dapat berperan menjadi pusat penyedia jasa dan logistik. Dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun kedepan, Hulu Sungai Tengah dapat berperan strategis menjadi sentra penghubung/hub distribusi logistik serta sentra jasa lainnya dan sentra logistik hasil hilirisasi industri sumber daya lokal baik dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari klaster Banua Anam, Kalimantan Selatan dan Nasional sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai pusat jasa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu berperan strategis dalam penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya. Sebagai pusat logistik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu berperan strategis sebagai pusat penyimpanan/transit barang, distribusi dan transportasi, pengelola informasi, dan penyedia barang dari hilirisasi industri sumber daya lokal. Dalam konsep pengembangan wilayah ini, dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyediakan infrastruktur

konektivitas dan aksesibilitas, kawasan penyimpanan/transit barang modern, pengembangan industri, regulasi dan kemudahan perizinan, kesiapan sumber daya manusia yang unggul, dan iklim investasi yang kondusif.

2) **SEJAHTERA,** Pembangunan yang dapat mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman.Pembangunan yang dilakukanberpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan, hak, dan kepentingan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosial.Sejahtera juga mengacu pada pembangunan yangmenghormati martabat, kebebasan, dan keadilan sosial bagi semua orang, serta mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Sejahtera adalah kondisi dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan pendapatan masyarakat yang setara dengan golongan ekonomi menengah. Indikator pencapaian pokok visi Sejahtera adalah PDRB Per Kapita, ketimpangan pendapatan yang rendah dan Angka Kemiskinan menuju Nol persen pada tahun 2045.

3) **UNGGUL** yaitu suatu kondisi yang lebih baik, lebih kuat, cakap dari yang lain-lain. Unggul adalah suatu

kondisi yang menunjukkan kelebihan atau kemenangan atas yang lain. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menciptakan suatu kondisi daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari daerah sekitar yang ditandai dengan meningkatknya daya saing sumberdaya manusia, sarana Infrastruktur wilayah dan pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Unggul juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi serta memperluas kerjasama-kerjasama baik regional, nasional maupun internasional.Hal ini ditandai dengan Indeks Daya Saing Daerah dan indikator IPM yang masuk kategori sangat tinggi, dengan sarana prasarana wilayah yang mampu mendorong perwujudan sebagai pusat kegiatan wilayah sekitarnya khususnya klaster banua anam, pelayanan umum yang tinggi serta terjalinnya kerjasama-kerjasama nasional dan internasional.

4) **MAJU** adalah kondisi dimana selalu terjadi peningkatan, perkembangan atau bergerak dinamis ke arah yang lebih baik baik, lebih tinggi, lebih sejahtera, lebih unggul. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahanke arah peningkatan yang lebih baikdari kehidupan sosial ekonomi masyarakat,kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh daninovatif. Hal ini ditandai dengan perekonomian

yang selalu tumbuh positif, PDRB daerah yang semakin besar dan kuat serta berkelanjutan.

5) **BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.Berkelanjutan juga berarti mampu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan elemen mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup untuk keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam dan memiliki daya tahan terhadap ancaman bencana secara berkesinambungan antar periode pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup serta keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan.

Tabel 2. 53 Penjelasan Perumusan Visi RPJPD 2025-2045

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pusat Jasa dan Logistik Yang Sejahtera, Unggul, Maju dan Berkelanjutan (HST SELAMAT)	**Pusat Jasa dan Logistik**	Kondisi 20 (duapuluh) tahun kedepan, Hulu Sungai Tengah mampu berperan strategis menjadi sentra penghubung/hub distribusi logistik serta sentra jasa lainnya dan sentra logistik hasil hilirisasi industri sumber daya lokal di klaster Banua Anam, Kalimantan Selatan dan Nasional sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.
	Sejahtera	Keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman.Pembangunan yang dilakukanberpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang mengutamakan hak, dan kepentingan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Sejahtera juga mengacu pada pembangunan yangmenghormati martabat, kebebasan, dan keadilan sosial bagi semua orang, serta mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Indikator pencapaian pokok visi ini adalah indeks Ketimpangan Pendapatan (indeks Gini) yang rendah dan Angka Kemiskinan Nol persen
	Unggul	Suatu kondisi daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari daerah sekitar yang ditandai dengan meningkatknya daya saing sumberdaya manusia, sarana Infrastruktur wilayah dan pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Indikator pencapaian ini adalah indeks pembangunan manusia masuk kategori sangat tinggi, infrastruktur yang mampu menjadi pusat kegiatan wilayah klaster banua anam dan Prov. Kalsel serta peayanan publik yang tinggi
	Maju	Kondisi dimana selalu terjadi peningkatan, perkembangan atau bergerak dinamis ke arah yang lebih baik baik, lebih tinggi, lebih sejahtera, lebih unggul. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahanke arah peningkatan yang lebih baikdari kehidupan sosial ekonomi masyarakat,kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh daninovatif. Hal ini ditandai dengan perekonomian yang selalu tumbuh positif, PDRB daerah yang semakin besar dan kuat serta berkelanjutan
	Berkelanjutan	Kondisi dimana pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup untuk keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam dan memiliki

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
		daya tahan terhadap ancaman bencana secara berkesinambungan antar periode pembangunan dalam jangka panjang. Indikator pencapaian ini adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang tinggi, indeks risiko bencana yang rendah serta kesinambungan pembangunan.

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai akronim **"HST SELAMAT"** Adapun penjabaran akronim ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 54 Penjabaran Akronim HST Selamat

KATA	KETERANGAN
HST	merujuk sebagai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
SELAMAT	merujuk kepada akronim dari Sejahtera, Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

SELAMAT juga menggambarkan do'a, harapan akan tercapainya suatu cita-cita, harapan terbebas dari gangguan, keadaan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan.Dengan demikian akronim ini menggambarkan visi dan spirit Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan menjadi pedoman dan arah pembangunan selama 20 tahunke depan.

Terwujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pusat Jasa dan Logistik Yang Sejahtera, Unggul, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam 5 sasaran visi yaitu:

1) Meningkatnya PDRB per kapita
2) Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan
3) Meningkatnya daya saing daerah dengan peranan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lebih besar di Prov. Kalsel dan pada klaster Banua Anam menuju pusat kegiatan wilayah, pusat jasa dan logistik.
4) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia
5) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran visi pertama meningkatnya PDRB per kapita di dorong oleh adanya peningkatan kontribusi dan pertumbuhan lapangan-lapangan usaha baseline ekonomi khususnya

industri pengolahan, jasa dan perdagangan serta pertanian dan lapangan usaha yang potensial berbasis inovasi dengan lapangan pekerjaan yang layak yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sasaran visi kedua, menurunnya kemiskinan dan ketimpangan di dorong oleh semakin meningkatnyaperekonomian daerah, kesempatan kerja dan peningkatan PDRB per kapita, sehingga berdampak pada semakin berkurangnya kemiskinandan ketimpangan pendapatan.

Sasaran visi ketiga, meningkatnya daya saing daerah di dorong oleh kemajuan-kemajuan yang diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga tercipta penguatan institusi, semakin lengkapnya infrastruktur, semakin stabilnya ekonomi makro daerah, meningkatnya kompetensi sumberdaya tenaga kerja dan sumber daya manusia, semakin dinamisnya dan semakin besarnya pasar, semakin berkembangnya sistem keuangan serta inovasi-inovasi.

Sasaran visi keempat meningkatnya daya saing sumberdaya manusia yang didorong melalui peningkatan pendidikan secara merata, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi dan kreatifitas serta kesehatan yang berkualitas.

Sasaran visi kelima meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup untuk keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau.

Adapun target indikator sasaran visi jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2045

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2045
Meningkatnya PDRB per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	35,90	49,75	Rp 180 – 200
	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB (%)	14,39	14,75	19,5 - 20,5
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,30	4,6	0,13 - 0,32

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2045
Menurunnya Kemiskinandan ketimpangan	Rasio Gini (indeks)	0,224 - 0,212	0,225	0,190 - 0,170
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,61	3,45	2,83
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	5,75	6,65
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya saing Daerah	2,61	3,5	5,00
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,54	74,5	85,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,33	74,03	75

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

Berdasarkan Visi di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, sebagaimana diuraikan pada sebagai berikut :

Tabel 2. 56 Penjelasan Misi RPJPD Kab. Hulu Sungai Tengah 2025-2045

MISI RPJPD		PENJELASAN
1	Mewujudkan transformasi sosial masyarakat	Misi ini mencakup upaya mewujudkan transformasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.Peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, unggul dan berdaya saingsecara nasional maupun global.
2	Mewujudkan transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif	Misi ini mencakup upaya mengembangkan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal yang produktif seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) dan bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan jasa produk unggulan daerah. Transformasi perekonomian diarahkan dengan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi, dan penggunaan iptek serta transformasi digital. Pengembangan perekonomian daerah selain memperhatikan baseline ekonomi yang sudah berkembang di masyarakat, tetapi perlu juga memperhatikan pengembangan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masyarakat. Pengembangan sektor ekonomi primer, skunder dan tersier harus berjalan secara sinergi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Mengembangkan ekonomi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi regional,nasional dan global serta tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan.
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Transformasi Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan dengan membentuk tata kelola birokrasi yang efisein dan efektifdengan membangun regulasi dan tata kelola yang ber “akhlak”, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Transformasi Tata kelola pemerintahan juga dilakukan dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia.
4	Memperkuat Kolaborasi Stabilitas Daerah	Misi ini mencakup upaya untuk menjaga stabilitas daerah dengan meningkatkan kolaborasi dari semua unsur yang ada di daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, politik,dan kantrantibum.
5	Memperkuat Ketahanan Ekologi	Misi ini mencakup upaya memperkuat ketangguhan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Melalui misi ini juga

MISI RPJPD		PENJELASAN
	dan kesejahteraan sosial masyarakat	peningkatan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.Ketahanan Ekologi juga menggambarkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpartisipasi optimal dalam pembangunan.Ketahanan ekologi dan bencana diwujudkan melalui Pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan, Pemanfaatan energi terbarukan, Pengurangan emisi karbon, serta mengurangi risiko dan mitigasi bencana. Pada misi ini juga mencakup upaya mengembangkan kesejahteraan secara sosial dengan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang berbudaya. Pembangunan yang dapat menyeimbangkan hubungan sosial dan budaya dan partisipasi dalam pembangunan. Misi ini diwujudkan dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, supremasi hukum dan keamanan ketentraman dan ketertiban umum daerah Melalui misi ini terjadi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengembangan dan penguatan Kebudayaan lokal, Menjaga kerukunan umat beragama, peningkatan pelaksanaan demokrasi dan kesetaraan gender.
6	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Misi ini mencakup upaya mengembangkan Daya Saing Daerah melalui peningkatanproduktivitas daerah.Peningkatan produktivitas daerah diwujudkan denganmeningkatkan inovasi, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif menuju pelayanan ekonomi regional,mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia trans Kalimantan. Pengembangan produktivitas daerah juga diwujudkan untuk mengembangkan ekonomi daerah yang dapat melayani kawasan regional dengan didukung infrastruktur ekonomi skala regional khususnya klaster pertumbuhan banua anam dan berperan aktif dalam distribusi barang jasa di Prov. Kalsel dan mendukung ibu kota nusantara.
7	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kualitas, pemerataan dan keadilan pembangunan serta keberlanjutan.Misi ini mencakup peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, ekonomi dan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan baik skala domestik maupun regional yang mampu mendukung Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik, serta perwujudan sejahtera, unggul dan maju.
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Misi ini mencakup kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan yang menjamin terjadinya konsistensi efektifitas pembangunan,kesinambungan pembangunan antar periode dan kesinambungan pendanaan pembangunan.

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

Tahapan I (Periode Tahun 2025 -2029) merupakan periode perkuatan fondasi. Periode ini dititikberatkan pada perkuatan fondasi dari transformasi sosial masyarakat, transformasi perekonomian daerah yang inklusif, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, kolaborasi stabilitas daerah, ketahanan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat, daya saing daerah, infrastruktur kewilayahan serta kesinambungan pembangunan. Arah kebijakan RPJPD pada tahapan I (Periode Tahun 2025 -2029) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 57 Arah Kebijakan Tahapan I (2025-2029) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

VISI 2025-2045	MISI	No	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I (2025-2029) : PERKUATAN FONDASI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PUSAT JASA DAN LOGISTIK YANG SEJAHTERA, UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan transformasi sosial masyarakat	1	Perluasan upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.
		2	Penguatan upaya pencegahan dan penanganan stunting.
		3	Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga medis dan kesehatan.
		4	Penguatan mutu layanan kesehatan masyarakat dan lanjutan.
		5	Perkuatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
		6	Peningkatan rata-rata lama sekolah.
		7	Peningkatan mutu pendidikan.
		8	Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas.
		9	Peningkatan akses dan fasilitasi pengembangan pendidikan lanjutan dan tinggi serta vokasi di daerah.
		10	Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang adaptif dan modern.
		11	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum yang relevan, inovatif, berorientasi pada karakter dan kompetensi.
		12	Pengembangan talenta dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi.
		13	Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
		14	Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas.
		15	Mengembangkan jejaring kerjasama satuan pendidikan regional, nasional, dan internasional.
		16	Penguatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
		17	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang adaptif.
		18	Pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial.
		19	Mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan perlindungan dari kekerasan, perkawinan anak, dan perdagangan orang.
	Mewujudkan transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif	1	Penguatan fondasi sektor unggulan daerah
		2	Penguatan produksi dan produktivitas komoditas prioritas
		3	Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah
		4	Modernisasi pertanian agar lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal
		5	Pengembangan Industri Pengolahan yang produktif, Koperasi dan UMKM yang lebih kompetitif, bernilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan serta peluang ekonomi yang lebih luas
		6	Penguatan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, industri kreatif serta pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi baru
		7	Peningkatan penerapan ilmu dan teknologi serta inovasi pada semua sektor ekonomi
		8	Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi
		9	Meningkatkan investasi dalam sektor unggulan daerah dengan menyediakan insentif, memberikan bantuan teknis, dan memfasilitasi

VISI 2025-2045	MISI	No	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I (2025-2029) : PERKUATAN FONDASI
			kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan
		10	Penguatan kualitas produksi dan perluasan jangkauan pasar sektor unggulan daerah
		11	Memperkuat kompetensi teknis, manajerial dan keterampilan serta kewirausahaan
		12	Mengembangkan ekosistem bisnis yang kondusif dan memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga keuangan dan pemerintah
		13	Peningkatan kontribusi BUMD dalam perekonomian daerah
		14	Penguatan pengembangan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berbasis pada efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dan bernilai tambah
		15	Perkuatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan inklusif
		16	Perkuatan penerapan ekonomi hijau dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon
		17	Penguatan fondasi pengembangan Geopark Meratus
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahaan yang baik	1	Optimasi regulasi daerah
		2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		3	Mendorong Penguatan pelayanan umum dan publik serta digitalisasi pelayanan
		4	Mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
		5	Pengembangan smart government untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		6	Pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dan pemanfaatan teknologi informasi
		7	Implementasi budaya birokrasi ber- AKHLAK
	Memperkuat Kolaborasi Stabilitas Daerah	1	Perkuatan kantrantibum
		2	Perkuatan nasionalisme dan moderasi beragama
		3	Peningkatan pengendalian inflasi daerah
		4	Peningkatan stabilitas makro ekonomi daerah
		5	Menumbuhkan budaya taat hukum di masyarakat
	Memperkuat Ketahanan Ekologi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle dan replant
		2	Penguatan pencegahan pencemaran lingkungan
		3	Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan
		4	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		5	Penguatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
		6	Peningkatan Sosialisasi, edukasi, informasi pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana
		7	Meningkatkan kualitas perencanaan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko bencana
		8	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respon terhadap bencana serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		9	Pemenuhan lingkungan sosial budaya yang kondusif dan berkeadilan untuk terciptanya

VISI 2025-2045	MISI	No	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I (2025-2029) : PERKUATAN FONDASI
			kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis
		10	Penanaman harmoni dalam keberagaman sosial budaya
		11	Mendorong perubahan sosial budaya yang positif
		12	Pengembangan budaya lokal dan non lokal yang positif
		13	Mendorong Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		14	Mendorong Peningkatan pemberdayaan pemuda dan perempuan
		15	Mendorong pengarusutamaan gender
		16	Mendorong pemberdayaan masyarakat
		17	Mendorong Peningkatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal
	Meningkatkan Daya Saing Daerah	1	Mendorong Peningkatan daya saing daerah, dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menawarkan barang dan jasa yang berkualitas, berinovasi, dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. dengan penyediaan infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat iklim usaha, dan pemanfaatan potensi lokal
		2	Mendorong Peningkatan kewirausahaan, dengan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha yang berorientasi pada peluang, inovasi, dan nilai tambah, diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemandirian daerah
		3	Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/Kalimantan
		4	Mengembangkan Hilirisasi sektor unggulan daerah
		5	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru dengan berbagai pengembangan inovasi
		6	Mendorong perwujudan rantai nilai domestik mendukung rantai nilai regional dan nasional
		7	Peningkatan produktivitas BUMD
		8	Mendorong fasilitasi dan kebijakan berusaha yang kondusif
		9	Peningkatan penerapan ilmu dan teknologi serta inovasi pada semua sektor ekonomi
		10	Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi
	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1	Mendorong Pemenuhan infrastruktur dasar
		2	Mendorong Pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi
		3	Pembangunan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan
		4	Mendorong penyediaan layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang berkualitas untuk energi, jaringan listrik, teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, serta perumahan
		5	Mendorong konektivitas intra dan antar wilayah transportasi, ketenagalistrikan, informasi dan komunikasi
	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	1	Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodesasi dokumen perencanaan
		2	Peningkatan Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan tata ruang
		3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		4	Peningkatan penerapan manajemen kinerja berbasis risiko

VISI 2025-2045	MISI	No	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I (2025-2029) : PERKUATAN FONDASI
		5	Peningkatan tata kelola data pembangunan
		6	Peningkatan koordinasi, integrasi, efektifitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		7	Pengembangan pendanaan pembangunan

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

Adapun sasaran pokok, arah pembangunandan target indikator utama pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 58 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Target Indikator Utama Pembangunan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2029	Target 2045	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, unggul dan berdaya saing	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74.2	74,45	75.18	79.1	
2			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	136	130,10	112.40	18	
3			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12.5	12,13	11.00	5	
4			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	91,45	92.80	100	
5			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	91,45	92.80	100	
6			Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	89.09	91,69	99.5	99.5	
7		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	17.78	20,81	29.89	78.35	
8			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	1	4,08	13.30	62.5	
9			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	39.52	41,41	47.09	77.39	
10			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada	19.36	21,43	27.64	60.74	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2029	Target 2045	Keterangan
			asesmen tingkat nasional untuk numerasi					
11			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.27	9,39	9.76	11.76	
12			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.1	13,17	13.38	14.49	
13			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10.5	10,53	10.62	11.11	
14			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61.8	62,46	64.44	75	
15		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	5.3	5,13	4.6	0.32	
16			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	34.57	35,73	39.19	57.67	
17			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal (%)	26	27,70	32.80	60	
18	Mengembangkan Perekonomian Daerah bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4.13	4,19	4.36	5.28	
19			Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel)/Orang	311713	347184,50	453599.00	1021143	
20			Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	99.3	99,31	99.34	99.5	
21			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)			-	-	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2029	Target 2045	Keterangan
22		Penerapan Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah			-	-	
23		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	-		-	-	
24			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31	33,42	40.66	79.3	
25			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-		-	-	
26		Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Provinsi	3.61		3.45	2.83	
27			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72.98	75,10	81.47	100.00	
28			Persentase Desa Mandiri (%)	14.69	18,68	30.65	94.53	
29	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	42.9	44,20	48.10	68.9	
30			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.5	3,58	3.80	5	
31			Indeks Pelayanan Publik	76.36	77,14	79.49	91.99	
32			Indeks Integritas Nasional	-		-	-	
33	Meningkatnya stabilitas daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah			-	-	
34			Indeks Pembangunan Hukum			-	-	
35			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	64.6	65,47	68.08	82	
36			Indeks Demokrasi Indonesia			-	-	
37		Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	3.03	3,07	3.17	3.75	
38			Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-4	2-4	2-3	
39			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)			-	-	
40			Aset Dana Pensiun/PDB (%)			-	-	
41			Total Kredit/PDRB (%)			-	-	
42			Inklusi Keuangan (%)			-	-	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2029	Target 2045	Keterangan
43	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	21.00	23,45	30.80	70	
44			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.37	73,54	74.03	76.68	
45			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6.37	7,37	10.37	26.37	
46			Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0.9	5,36	18.72	90	
47			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	93	93,50	95.00	100.00	
48		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	128.81	127,11	122.01	94.8	
49			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : Kumulatif	75.97	76,96	79.95	95.85	
50			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : Tahunan	-		-	-	
51	Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan berbudaya masyarakat maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58.9	59,55	61.49	71.84	
52			Indeks Kerukunan Umat Beragama			-	-	
53		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69.01	69,26	70.01	74.01	
54			Indeks Ketimpangan Gender	0.48	0,47	0.43	0.23	
55	Meningkatnya produktivitas daerah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	14.39	14,48	14.75	20.00	
56			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	99.85	99,85	99.85	99.85	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2029	Target 2045	Keterangan
57			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/kota (%)	10.83	11,79	14.66	30	
58			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)			-	-	
59			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)			-	-	
60			Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1	1,08	1.30	2.5	
61			Tingkat Pengangguran Terbuka	2.80	2,79	2.77	2.63	
62			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60.39	61,20	63.63	76.57	
63			Indeks Inovasi Daerah	49.40	54,55	70	86.65	
64		Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi (IPTIK)	5.75	5,88	6.21	7.23	
65	Meningkatnya mutu layanan sarana prasarana yang merata dan berkelanjutan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita	478.61	632,46	1094	1300	
66			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)			-	-	
67			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3.3	3,31	3.34	3.5	
68			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20	32,50	70	100	

Sumber : RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045

C. Telaah Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026

Telaah terhadap pelaksanaan dan capaian RPJMD periode Tahun 2021–2026 bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan daerah, mengidentifikasi permasalahan strategis yang masih dihadapi, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Evaluasi capaian RPJMD 2021–2026 dilaksanakan melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi IKU menjadi dasar penting dalam merumuskan *lesson learned* atau pembelajaran kebijakan yang relevan untuk memperkuat perencanaan pembangunan ke depan. Melalui analisis capaian ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dilanjutkan, serta menemukan tantangan dan kesenjangan yang memerlukan perbaikan kebijakan dan strategi baru pada RPJMD 2025–2029. Adapun capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir (2026)	Capaian Tahun Data Terakhir		Dibandingkan kondisi akhir Tahun 2026	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		Nilai Deviasi	% Deviasi	Nilai Deviasi	% Deviasi
Jumlah kasus konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indeks Reformasi Birokrasi	50,93	52	52	56	56	61	61	63	71,49	71	8,49	13,48	0,49	0,69
Indeks Pembangunan Manusia	68,84	69,40	71,67	70,00	72,32	70,60	72,76	71.2	73,33	72,5	2,13	2,99	0,83	1,14
PDRB per kapita (Rp juta)	27.27	28.00	28.34	29.00	30.15	30.00	32.30	31.25	34,74	34,00	3,49	11,17	0,74	2,18
Jumlah kasus konflik agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Angka kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	< 10	< 10	6,7	< 9,5	8,87	< 9	10,1	< 8,5	3,56	< 7,5	4,94	58,12	3,94	52,53
Jumlah kasus konflik sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Indeks Profesionalisme ASN	42,5	48		53		58		62	76,16	67	14,16	22,84	9,16	13,67
Indeks kepuasan Masyarakat	80,67	81		82		83	84,11	84	86,18	86	2,18	2,60	0,18	0,21
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,10	3,25		3,50		3,75		4	3,5	4,35	-0,5	-12,50	-0,85	-19,54
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0	0,00	0	0,00
Nilai AKIP	66,17	68,60	83,83	71,10	77,94	73,50	83,35	75	70,02	80,25	-4,98	-6,64	-10,23	-12,75
Indeks Pendidikan	60,55	61,78		62		63	61,63	64	62,03	67	-1,97	-3,08	-4,97	-7,42
Rata-rata Lama Sekolah	8	8,13	8,01	8,26	8,28	8,39	8,29	8.52	8,35	8,78	-0,17	-2,00	-0,43	-4,90
Usia Harapan Sekolah	12,20	12,32	12,21	12,44	12,22	12,56	12,24	12.68	12,31	12,92	-0,37	-2,92	-0,61	-4,72
Indeks Kesehatan	76,68	77,16		77,67		78,33	87,21	78.83	87,67	80	8,84	11,21	7,67	9,59
Usia Harapan Hidup	66,01	66,51	71,66	66,71	72	67,01	72,33	67.21	72,6	67,71	5,39	8,02	4,89	7,22
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	96,50	97,5	96.68	97,7	96.66	97,9	96,51	98.1	96,07	98,5	-2,03	-2,07	-2,43	-2,47
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	40		41		42		43	43	45	0	0,00	-2	-4,44

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir (2026)	Capaian Tahun Data Terakhir		Dibandingkan kondisi akhir Tahun 2026	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		Nilai Deviasi	% Deviasi	Nilai Deviasi	% Deviasi
Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	-1,01	3-Feb	3,01	3,0 -3,5	3,92	4 - 4,5	4,11	5 - 5,5	4,95	6 - 6,5	-0,05	-1,00	-1,05	-17,50
Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Pertanian	-0,27	1-2		2-3		3-4	2,14	4-5	3,7	6 - 6,5	-0,3	-7,50	-2,3	-38,33
Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	-3,53	1-2		2-3		3-4	0,57	4-5	3,44	6,5 -7	-0,56	-14,00	-3,06	-47,08
Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Perdagangan	-3,43	1-2		3-4		5-6	4,7	6,5 - 7,0	4,07	8 - 8,5	-2,43	-37,38	-3,93	-49,13
Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-2,65	1-2		3-4		5-6	9,43	6,5 - 7,0	6,79	8 - 8,5	0,29	4,46	-1,21	-15,13
Inflasi	2,15	3,57	2,43	3,32	5,01	3,07	2,39	2.82	1,11	2,32	1,71	60,64	1,21	52,16
Persentase Penduduk Miskin	5,64	5,5	6,18	5,3	5,92	5,1	5,84	4.9	5,81	4,5	-0,91	-18,57	-1,31	-29,11
Indeks Gini	0,3	0,298	0,331	0,296	0,228	0,294	0,225	0.292	0,251	0,288	0,041	14,04	0,037	12,85
Angka Pengangguran	3,96	3,8	3,76	3,7	3,35	3,6	3,26	3.5	3,2	3,3	0,3	8,57	0,1	3,03
Indeks infrastruktur wilayah	-	55		56		57		58	42,42	60	-15,58	-26,86	-17,58	-29,30
Cakupan pembangunan infrastruktur dasar	85,71	88,54		90,25		92,75		95	53,65	100	-41,35	-43,53	-46,35	-46,35
Persentase infrastruktur kawasan pertumbuhan	-	0,0		10		20		40	16,25	75	-23,75	-59,38	-58,75	-78,33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,65	63,9	65,3	64,37	67,33	64,78	69.6	65.16	71,67	65,8	6,51	9,99	5,87	8,92
Indeks resiko bencana daerah	140,40	140,40	133,87	140,35	125,74	140,30	125,74	140.2	125,74	140	14,46	10,31	14,26	10,19

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RPJMD 2021-2026

Secara umum, capaian indikator kinerja utama menunjukkan kecenderungan positif dengan mayoritas indikator mencapai atau melampaui target. Sejumlah indikator menunjukkan deviasi positif atau capaian di atas 100 persen dari target yang ditetapkan hingga tahun 2026. Kelompok ini mencakup antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kesehatan, Usia Harapan Hidup, Inflasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana Daerah. Nilai-nilai tersebut menggambarkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode dan menunjukkan bahwa sasaran yang direncanakan berhasil terlampaui.

Beberapa indikator lainnya memperlihatkan pencapaian mendekati target dengan deviasi kecil di bawah 100 persen. Indikator dalam kelompok ini antara lain Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Sekolah, Indeks Gini, Angka Pengangguran, serta Persentase Penduduk Miskin. Meskipun terdapat variasi tahunan, kecenderungan keseluruhan tetap menunjukkan arah perbaikan atau kestabilan, dan capaian akhir periode tidak jauh dari target yang direncanakan.

Di sisi lain, terdapat kelompok indikator dengan deviasi negatif yang relatif besar, menandakan capaian belum sesuai target hingga akhir periode. Indikator yang termasuk di dalamnya adalah Nilai AKIP, Indeks Infrastruktur Wilayah, Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar, serta Persentase Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan. Keempat indikator ini memperlihatkan tren menurun menjelang akhir periode atau tidak mencapai target kenaikan yang diharapkan.

Sementara itu, indikator yang bersifat stabil tanpa perubahan tren seperti Jumlah Kasus Konflik SARA, Konflik Agama, dan Konflik Sosial menunjukkan capaian konstan sepanjang periode dengan nilai tetap nol. Pola serupa juga terlihat pada Opini BPK yang menunjukkan kestabilan hasil WTP sejak 2021 hingga akhir periode.

Secara keseluruhan, analisis tren menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan daerah bergerak naik atau stabil dengan capaian yang mendekati maupun melampaui target. Namun, masih terdapat beberapa indikator terkait tata kelola dan infrastruktur yang memperlihatkan deviasi negatif, sehingga secara tren masih memerlukan perhatian untuk mencapai keseimbangan capaian pada seluruh aspek pembangunan hingga akhir periode RPJMD 2021–2026.

D. Telaah KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Tengah 2025-2029

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis pembangunan berkelanjutan daerah. Isu strategis yang tercantum dalam KLHS RPJMD 2025–2029 mencakup:

- Tantangan Geografis dan Aksesibilitas
- Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Dasar
- Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
- Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Fiskal
- Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Penguatan Ekonomi Lokal
- Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- Dinamika Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
- Potensi Pengembangan Wilayah dan Peluang Strategis

Tabel 2. 60 Permasalahan dalam Proyeksi Capaian Indikator TPB "Belum Mencapai Target (SB)

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum Mencapai Target	Dominasi masyarakat bekerja di sektor informal pertanian dengan akses permodalan yang sulit, dukungan sarana dan prasarana terbatas, dipacu harga komoditas yang tidak stabil, tingkat pendidikan petani yang rendah serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca tidak menentu
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Belum Mencapai Target	Dominasi masyarakat bekerja di sektor informal dan belum ada keharusan mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum Mencapai Target	Semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kab. Hulu Sungai Tengah
4	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Belum Mencapai Target	Akses masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan masih terbatas karena faktor geografi, ketakutan masyarakat miskin terhadap efek samping KB, ketergantungan pada anak untuk penunjang ekonomi keluarga, kurangnya akses informasi dan edukasi terkait KB
5	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum Mencapai Target	Ketidakmerataan infrastruktur yang masih terpusat di daerah perkotaan dan kurang pemahaman masyarakat terkait pentingnya air bersih dan sanitasi yang dapat menghambat Upaya perbaikan
6	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Belum Mencapai Target	Kebutuhan sanitasi layak dan berkelanjutan belum menjadi prioritas bagi penduduk miskin
7	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Belum Mencapai Target	Akses pendidikan yang terbatas baik akibat jarak sekolah yang jauh dari permukiman dan fasilitas sekolah kurang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas
8	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Belum Mencapai Target	Belum tercapainya jaringan listrik secara merata ke seluruh desa dan belum menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik
9	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum Mencapai Target	Masyarakat miskin tinggal pada kawasan yang rawan terjadi bencana
10	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, harga pangan yang tinggi

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
11	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, asupan nutrisi tidak memadai, layanan kesehatan tidak memadai, sanitasi yang tidak aman dan layak,
12	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, asupan nutrisi tidak memadai, layanan kesehatan tidak memadai, sanitasi yang tidak aman dan layak,
13	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, asupan nutrisi tidak memadai khususnya zat besi, asam folat, vitamin B12, dan akses kesehatan yang terbatas
14	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, harga pangan yang tinggi, pola konsumsi yang tidak seimbang, kurangnya akses terhadap pangan bergizi, rendahnya kesadaran tentang gizi, dan pasokan pangan tidak menentu akibat perubahan iklim
15	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum Mencapai Target	Dampak perubahan iklim dan serangan hama yang tidak terduga dan Produktivitas rendah karena teknologi pertanian yang masih tradisional yang menyebabkan hasil pertanian tidak optimal sehingga nilai tambah yang dihasilkan per tenaga kerja yang rendah
16	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Belum Mencapai Target	Pandemi COVID 19, keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan, Faktor kemiskinan
17	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Belum Mencapai Target	Pandemi COVID 19, keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan, Faktor kemiskinan
18	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Belum Mencapai Target	Pandemi COVID 19, keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan, Faktor kemiskinan
19	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Belum Mencapai Target	Pandemi COVID 19, keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan, Faktor kemiskinan
20	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan akses layanan kesehatan, kurangnya kesadaran dan edukasi, serta ketersediaan vaksinasi yang tidak merata menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
21	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Belum Mencapai Target	Edukasi terkait HIV kurang memadai, akses layanan kesehatan terbatas, penularan akibat kunjungan seksual ke kota, stigma dan diskriminasi terhadap HIV, rendahnya kesadaran penggunaan alat kontrasepsi
22	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Belum Mencapai Target	Pola makan tidak sehat, faktor kemiskinan, perubahan gaya hidup, penggunaan alkohol dan tembakau
23	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, belum menjadi prioritas kebijakan kesehatan

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
24	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Belum Mencapai Target	Kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, kemisinan dan keterbatasan kesempatan kerja, peredaran narkoba yang tidak terkendali, keterbatasan akses dan rehabilitasi, keterbatasan kegiatan pengembangan potensi individu
25	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Belum Mencapai Target	Akses masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan masih terbatas karena faktor geografi, ketakutan masyarakat miskin terhadap efek samping KB, ketergantungan pada anak untuk penunjang ekonomi keluarga, kurangnya akses informasi dan edukasi terkait KB
26	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Belum Mencapai Target	Akses masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan masih terbatas karena faktor geografi, ketakutan masyarakat miskin terhadap efek samping KB, ketergantungan pada anak untuk penunjang ekonomi keluarga, kurangnya akses informasi dan edukasi terkait KB
27	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Belum Mencapai Target	Faktor beban ekonomi yang meningkat, perubahan gaya hidup yang mengarah ke kehidupan modern, kecenderungan menunda pernikahan, serta akses yang sulit terhadap alat kontrasepsi merupakan beberapa penyebab utama.
28	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum Mencapai Target	Faktor keterbatasan akses pelayanan kesehatan, mahalnya biaya kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya kesadaran, edukasi, dan kualitas layanan yang belum memadai menjadi hambatan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
29	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum Mencapai Target	Akses jual beli rokok yang bebas serta harga rokok yang terjangkau, ditambah dengan kurangnya kesadaran dan edukasi terkait bahaya merokok, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya, menjadi faktor yang mendorong tingginya angka perokok.
30	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Belum Mencapai Target	Akses ke pelosok daerah yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya dan anggaran
31	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Belum Mencapai Target	Akses pendidikan yang terbatas baik akibat jarak sekolah yang jauh dari permukiman dan fasilitas sekolah kurang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas
32	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Belum Mencapai Target	Akses pendidikan yang terbatas baik akibat jarak sekolah yang jauh dari permukiman dan fasilitas sekolah kurang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas
33	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3)	Belum Mencapai Target	Akses pendidikan yang terbatas baik akibat jarak sekolah yang jauh dari permukiman dan fasilitas sekolah kurang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
		SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
34	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Belum Mencapai Target	Dominasi dan ketidaksetaraan gender, budaya kekerasan masih dianggap biasa, Faktor ekonomi, ketidakstabilan hubungan keluarga, kurangnya pendidikan tentang hak asasi dan kekerasan, lemahnya akses terhadap penegakan hukum, tingginya pengaruh alkohol dan narkoba, budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi sebelumnya
35	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Belum Mencapai Target	Dominasi dan ketidaksetaraan gender, budaya kekerasan masih dianggap biasa, Faktor ekonomi, ketidakstabilan hubungan keluarga, kurangnya pendidikan tentang hak asasi dan kekerasan, lemahnya akses terhadap penegakan hukum, tingginya pengaruh alkohol dan narkoba, budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi sebelumnya
36	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Belum Mencapai Target	Dominasi dan ketidaksetaraan gender, budaya kekerasan masih dianggap biasa, Faktor ekonomi, ketidakstabilan hubungan keluarga, kurangnya pendidikan tentang hak asasi dan kekerasan, lemahnya akses terhadap penegakan hukum, tingginya pengaruh alkohol dan narkoba, budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi sebelumnya
37	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, keterbasan sumber air baku yang aman dan layak
38	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, keterbasan sumber air baku yang aman dan layak
39	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, keterbasan sumber air baku yang aman dan layak
40	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Belum Mencapai Target	Faktor kemiskinan, keterbatasan sarana sanitasi yang aman dan layak, kesadaran yang rendah tentang pengaruh BABs,
41	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah	Belum Mencapai Target	Keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan belum menjadi prioritas kebijakan

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
		dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		
42	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Belum Mencapai Target	Belum tersedianya sarana pengelolaan air limbah terpusat
43	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum Mencapai Target	kurangnya kesempatan kerja formal, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, faktor budaya dan tradisi lokal, Pandemi COVID 19, keterbatasan akses ke sumber daya permodalan dan teknologi
44	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Belum Mencapai Target	kurangnya kesempatan kerja formal, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, faktor budaya dan tradisi lokal, Pandemi COVID 19, keterbatasan akses ke sumber daya permodalan dan teknologi
45	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum Mencapai Target	kurangnya investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, persaingan kerja, Pandemi COVID 19, kurangnya lapangan pekerjaan
46	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Belum Mencapai Target	Tingginya biaya operasional, aksesibilitas transportasi, kondisi fisik wilayah, populasi yang sedikit, pergeseran ke perbankan digital, risiko keamanan akibat tinggal kejahatan yang tinggi
47	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Belum Mencapai Target	Tingginya biaya operasional, aksesibilitas transportasi, kondisi fisik wilayah, populasi yang sedikit, pergeseran ke perbankan digital, risiko keamanan akibat tinggal kejahatan yang tinggi
48	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum Mencapai Target	keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kredit, persyaratan yang ketat, risiko usaha yang tinggi, belum memiliki laporan keuangan, fasilitas perbankan yang terbatas, persaingan antar sektor informal
49	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Belum Mencapai Target	belum terdapatnya kawasan industri terpadu di Kab. Hulu Sungai Tengah, investasi yang masuk terbatas, aksesibilitas transportasi untuk mendukung pengembangan industri, akses ke sumber permodalan terbatas
50	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan keterampilan dan pendidikan, serta minimnya dana investasi yang masuk di sektor manufaktur.
51	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Belum Mencapai Target	keterbatasan sumber daya keuangan, prioritas pada sektor lain, kurangnya dukungan sektor/stakeholder lain, kurangya kesadaran akan pentingnya riset terhadap pembangunan daerah
52	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Belum Mencapai Target	Infrastruktur sektor komunikasi yang belum merata disebabkan oleh biaya yang tinggi, regulasi yang rumit yang menghambat perluasan jaringan broadband oleh penyedia layanan, serta rendahnya daya beli masyarakat dan tantangan geografis.
53	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Belum Mencapai Target	Minimnya perlindungan hukum terutama bagi masyarakat miskin, kurangnya pendidikan terkait hak sipil, keterbtasan akses pada proses politik

No	Nomor Indikator	Penjabaran Indikator	Capaian 2030	Permasalahan dalam capaian indikator
54	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Belum Mencapai Target	Perubahan iklim, tingginya kerentanan akibat tingginya angka kemiskinan, perubahan penggunaan lahan
55	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Belum Mencapai Target	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
56	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Belum Mencapai Target	Biaya implementasi yang tinggi, kurangnya insentif, kompleksitas proses implementasi, budaya perusahaan yang tidak mendukung, keterbatasan SDM
57	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Belum Mencapai Target	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan, biaya produksi yang tinggi, kurangnya insentif pemerintah, keterbatasan riset dan inovasi
58	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum Mencapai Target	keterbatasan anggaran, belum menjadi prioritas pembangunan
59	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum Mencapai Target	Faktor ekonomi, minimnya keberadaan aparat keamanan, kekerasan dalam rumah tangga, akses ke senjata yang mudah, kurangnya akses ke layanan sosial
60	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Belum Mencapai Target	Dominasi dan ketidaksetaraan gender, budaya kekerasan masih dianggap biasa, Faktor ekonomi, ketidakstabilan hubungan keluarga, kurangnya pendidikan tentang hak asasi dan kekerasan, lemahnya akses terhadap penegakan hukum, tingginya pengaruh alkohol dan narkoba, budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi sebelumnya
61	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum Mencapai Target	Adanya hambatan struktural, kebijakan pengarusutamaan gender belum maksimal, adanya budaya patriarkal
62	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Belum Mencapai Target	Kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, penggunaan insentif pajak yang berlebihan, serta kinerja ekonomi yang lemah.
63	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Belum Mencapai Target	kurangnya kesadaran wajib pajak, belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha yang menjadi obyek pajak, jumlah investasi terbatas

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029

Berdasarkan pemantauan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hingga tahun 2024, masih terdapat sejumlah tujuan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Adapun 13 tujuan TPB yang belum mencapai target pada tahun 2024 meliputi:

- Tanpa Kemiskinan
- Tanpa Kelaparan
- Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Pendidikan Berkualitas
- Kesetaraan Gender
- Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- Berkurangnya Kesenjangan
- Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
- Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
- Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Ketigabelas tujuan tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya lebih lanjut, baik dari sisi perencanaan program, penganggaran, maupun sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Tabel 2. 61 Proyeksi Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Masing-masing Indikator

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
PILARSOSIAL														
TPB	1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk Dimanapun													
Target TPB	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7–8% (2015: 11,13%)	4,33%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5,99%*	0,01	6,02%	6,06%	6,09%	6,12%	6,16%	6,19%	-1,86%	SB
Target TPB	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua orang, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan													
1.3.1.(a)	porsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	98%	Dinas Kesehatan	100%*	0,12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%	SS
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta)	74,57%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	3,62%*	0,13	4,10%	4,58%	5,06%	5,54%	6,03%	6,51%	-68,06%	SB
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%)	17,12%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	78,29%*	0,01	79,05%	79,81%	80,57%	81,32%	82,08%	82,84%	65,72%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta)	Menurun	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	124.092*	0,66	205.509	286.925	368.342	449.759	531.176	612.592	Meningkat	SB
Target TPB	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta terhadap pelayanan dasar; kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	70%	Dinas Kesehatan	99%*	0,04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,00%	SS
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12–23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%	63%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	95,47%*	0,01	96,18%	96,90%	97,61%	98,33%	99,04%	99,75%	36,75%	SS
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15–49 tahun yang berstatus kawin	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15–49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%	65%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	71,39%*	-0,02	70,16%	68,93%	67,70%	66,47%	65,24%	64,01%	-0,99%	SB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%	100%	Dinas PUPR	83,69%*	0,01	84,91%	86,12%	87,34%	88,56%	89,77%	90,99%	-9,01%	SB
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 90%	90%	Dinas PUPR	67,25%*	0,02	68,28%	69,31%	70,34%	71,36%	72,39%	73,42%	-16,58%	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%)	94,78%	Dinas Pendidikan	100%*	0,01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,22%	SS
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%)	82,20%	Dinas Pendidikan	71,29%*	-0,01	70,31%	69,34%	68,36%	67,39%	66,41%	65,43%	-16,77%	SB
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0–17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%	77,40%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100%*	0,07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22,60%	SS
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	99,66%*	99,63%	99,63%	99,60%	99,57%	99,54%	99,51%	99,48%	-0,52%	SB
Target TPB	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, serta mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.													
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya	0,2	BPBD	0*	-0,44	0	0	0	0	0	0	2	SS
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah)	Meningkat	BPBD	16*	0,18	19	22	24	27	30	33	Meningkat	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	Meningkat	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100%*	0,06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu)	Meningkat	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0(tidak ada bencana sosial)*	N/A	0(tidak ada bencana sosial)	0(tidak ada bencana sosial)	0(tidak ada bencana sosial)	0(tidak ada bencana sosial)	0(tidak ada bencana sosial)	0(tidak ada bencana sosial)	Tidak Terdapat Kasus Bencana Sosial	SS
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	Meningkat	BPBD	13*	0,06	14	15	15	16	17	18	Meningkat	SS
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014: 169,4)	118,6	BPBD	121,89*	-0,02	120,02	118,15	116,28	114,41	112,54	110,67	7,93	SS
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana sebesar 0,10%	0,1	BPBD	2,79*	-0,1	2,52	2,25	1,98	1,71	1,44	1,17	-1,1	SS
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen (2019: 183 dokumen). Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana sebanyak 55 dokumen (2020: 246 dokumen)	Terdapat dokumen pada tingkat Kab/Kota	BPBD	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terdapatdokumen	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
Target TPB	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.													
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif (2019: 15,54%).	Meningkat	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,95%*	0,06	1,00%	1,06%	1,11%	1,17%	1,22%	1,28%	Meningkat	SS
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan terkait efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, keberlanjutan pendanaan, penguatan tata kelola perlindungan sosial, serta peningkatan pemanfaatan anggaran kesehatan.	Meningkat	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	51,85%*	0,06	54,87%	57,89%	60,90%	63,92%	66,94%	69,96%	Meningkat	SS
TPB	2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.													
Target TPB	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7,13%*	E4	7,62%	8,10%	8,59%	9,08%	9,57%	10,05%	-6,45%	SB
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6%)	17%	Dinas Kesehatan	14%*	0,04	14,59%	15,19%	15,78%	16,38%	16,97%	17,56%	-0,56%	SB
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat menjadi 4% (2020: 5,12%)	3,30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5% (2015: 17,4%)	8,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
Target TPB	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai pada tahun 2025 target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek (stunting) dan anak kurus di bawah usia 5 tahun, serta memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dansangatpendek)pada anakdibawahlima tahun/balita.	Menurunnyaprevalensi stunting(pendekdan sangatpendek)padaanak balitamenjadi14%(2019: 27,7%)	10,00%	Dinas Kesehatan	8,86%*	-0,13	8,86%	7,52%	6,18%	4,83%	3,49%	2,15%	10%	SS
2.2.1.(a)	Prevalensistunting(pendek dansangatpendek)pada anakdibawahdua tahun/baduta.	Menurunnyaprevalensi stunting(pendekdan sangatpendek)padaanak dibawahdua tahun/badutapadatahun 2019menjadi28%(2013: 32,9%).	28%	Dinas Kesehatan	0,00%*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28%	SS
2.2.2*	Prevalensimalnutrisi (beratbadan/tinggibadan) anakpadausiakurangdari 5tahun,berdasarkantipe.	Menurunnyaprevalensi wasting(kurusdansangat kurus)padaanakbalita menjadi7%(2019:7,4%)	3,00%	Dinas Kesehatan	12,30%*	0,18	14,45%	16,61%	18,76%	20,92%	23,07%	25,23%	-22,23%	SB
2.2.2.(a)	Prevalensianemiapadaibu hamil.	Menurunnyaprevalensi anemiapadaibuhamil padatahun2019menjadi 28%(2013:37,1%).	28%	Dinas Kesehatan	25,02%*	0,02	25,57%	26,12%	26,67%	27,21%	27,76%	28,31%	-0,31%	SB
2.2.2.(b)	Persentasebayiusia kurangdari6bulanyang mendapatkanASIeksklusif.	Persentasebayiusia kurangdari6bulanyang mendapatASIeksklusif menjadi50%padatahun (2013:38%).	50%	Dinas Kesehatan	100,00%*	0,08	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50%	SS
2.2.2.(c)	Kualitaskonsumsipangan yangdiindikasikanolehskorPolaPanganHarapan (PPH)mencapai;dantingkatkonsumsiikan.	Meningkatnyakualitas konsumsipanganyang diindikasikanolehskor PolaPanganHarapan (PPH)mencapai92,5(2014: 81,8),dantingkatkonsumsi ikanmenjadi54,5 kg/kapita/tahunpada tahun2019(2015:40,9 kg/kapita/tahun).	95,2PolaPangan Harapan 2.1000 kkal/kapita/hari angkakecukupan energi	Dinas Ketahanan Pangandan Perikanan	52,02*	0	52,17	52,33	52,48	52,64	52,79	52,95	-42,25	SB
Target TPB														
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Meningkatnya nilai tambah per tenaga kerja pertanian menjadi Rp 59,9 juta/tenaga kerja/tahun (2020: Rp	######	Dinas Pertanian	########*	0,01	########	########	########	########	########	########	########	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
		55,33 juta/tenaga kerja)												
TPB	3.Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia													
Target TPB	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346)	131	Dinas Kesehatan	170*	0,19	202	235	267	300	332	365	-234	SB
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 91,51%)	95%	Dinas Kesehatan	97,84%*	0,04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%	SS
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85% (2015: 75%)	95%	Dinas Kesehatan	99,48%*	0,05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%	SS
Target TPB	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berupaya menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita hingga 25 per 1.000.													
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Menurun	18,8	Dinas Kesehatan	18*	0,04	19	19	20	21	21	22	-13,8	SB
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup menjadi 10 (2017: 15)	10	Dinas Kesehatan	18,46*	0,05	19,47	20,47	21,48	22,48	23,49	24,5	-14,5	SB
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012–2013: 32)	12	Dinas Kesehatan	18,25*	0,03	18,81	19,38	19,94	20,5	21,07	21,63	-10	SB
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%)	95%	Dinas Kesehatan	85,73%*	0	85,88%	86,02%	86,17%	86,32%	86,47%	86,61%	-8,39%	SB
Target TPB	3.3Padatahun2030,mengakhiriepidemiAIDS,tuberkulosis,malaria,danpenyakittropisyangterabaikan,danmemerangihepatitis,penyakitbersumberair,sertapenyakitmenularlainnya.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
3.3.1.(a)	PrevalensiHIVpada populasidewasa.	Menurunnyaprevalensi HIV padapopulasidewasa tahun2019menjadi<0,5% (2014:0,46%).	0,18	Dinas Kesehatan	0,67%	0,29	0,86%	1,05%	1,25%	1,44%	1,63%	1,82%	-16,18%	SB
3.3.2.(a)	InsidenTuberkulosis(ITB) per100.000penduduk.	Menurunnyaprevalensi Tuberculosis(TB)per 100.000pendudukpada tahun2019menjadi245 (2013:297).	190	Dinas Kesehatan	0	-0,24	0	0	0	0	0	0	190	SS
3.3.3*	KejadianMalariaper1000 orang.	Menurun	Menurun	Dinas Kesehatan	<1%	0	0	0	0	0	0	0	Menurun	SS
3.3.3.(a)	Jumlahkabupaten/kota yangmencapaieliminasi malaria.	Meningkatnyajumlah kabupaten/kotadengan eliminasimalariapada tahun2019menjadi300 (2013:212).	StatusEliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	1	N/A	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	StatusEliminasi Malaria	SS
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kotayang melakukandeteksidini untukinfeksiHepatitis B.	"MenurunnyainsidensiHepatitisBmenjadi1,09% (2019:-)"	1,09%	Dinas Kesehatan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
3.3.5*	Jumlahorangyang memerlukanintervensi terhadappenyakittropis yangterabaikan(Filariasis danKusta).	Menurun	Menurun	Dinas Kesehatan	<1%*	N/A	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	Menurun	SS
3.3.5.(a)	Jumlahprovinsidengan eliminasiKusta.	Meningkatnyajumlah provinsidenganeliminasi kustasebanyak34provinsi padatahun2019(2013:20).	StatusEliminasiKusta	Dinas Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
3.3.5.(b)	Jumlahkabupaten/kota denganeliminasifilariasis (berhasil lolosdalamsurvei penilaiantransmisitahap I).	Meningkatnyajumlah kabupaten/kotadengan eliminasifilariasispada tahun2019menjadi35.	StatusEliminasi Filarisis	Dinas Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	3.4Padatahun2030,mengurangihinggasepertigaangkakematiandiniakibatpenyakittidakmenular,melaluipencegahandanpengobatan,sertameningkatkankesehatanmentaldankesejahteraan.													
3.4.1.(a)	Persentasemerokokpada pendudukumur≤18tahun.	Menurunnyapersentase merokokpadapenduduk usia≤18tahunpadatahun 2019menjadi5,4%(2013: 7,2%).	7,50%	Dinas Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
3.4.1.(b)	Prevalensitekanandarah tinggi.	Menurunnyaprevalensi tekanandarahtinggipada tahun2019menjadi24,3% (2013:25,8%).	34,10%	Dinas Kesehatan	62,35%*	0,36	70,36%	95,68%	100%	100%	100%	100%	-65,90%	SB
3.4.1.(c)	Prevalensiobesitaspada pendudukumur≥18tahun.	Tidakmeningkatnya prevalensiobesitaspada pendudukusia18tahunke ataspadatahun2019 menjadi15,4%(2013: 15,4%).	21,80%	Dinas Kesehatan	N/A	356	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	18,23%	SS
3.4.2*	Angkakematian(insidens rate)akibatbunuhdiri.	Menurun	Menurun	Dinas Kesehatan	0%*	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	SS
3.4.2.(a)	Jumlahkabupaten/kota yangmemilikipuskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatanjiwa.	Meningkatnyajumlah Kabupaten/Kotayang memilikipuskesmasyang menyelenggarakanupaya kesehatanjiwapadatahun 2019menjadi280(2015: 80).	Meningkat	Dinas Kesehatan	0	N/A	0	0	0	0	0	0	Menurun	SB
Target TPB	3.5Memperkuatpencegahandanpengobatanpenyalahgunaanzat,termasukpenyalahgunaannarkotikadanpenggunaanalkoholyangmembahayakan.													
3.5.1.(e)	Prevalensipenyalahgunaan narkoba.	Terkendalinyalaju prevalensipenyalahgunaan narkobapadaakhirtahun 2019menjadiangka0,02% (2015:0,05%).	0,02%	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	51,12%*	-0,02	50,20%	49,27%	48,35%	47,43%	46,50%	45,58%	-44,86%	SB
3.5.2*	Konsumsialkohol(liter per kapita)olehpendudukumur ≥15tahundalamsatutahun terakhir.	Menurun	Menurun	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	0,03	-0,1	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	Menurun	SS
Target TPB	3.7Padatahun2030,menjaminaksesuniversalterhadaplayanankesehatanseksualdanreproduksi,termasukkeluargaberencana,informasidanpendidikan,danintegrasikesehatanreproduksikedalamstrategidanprogramnasional.													
3.7.1*	Proporsiperempuanusia reproduksi(15-49tahun) ataupasangannyayang memilikikebutuhan keluargaberencanadan menggunakanalat kontrasepsimetode modern.	Meningkatnyaangka prevalensipemakaian kontrasepsisuatucara padatahun2019menjadi 66%(2012-2013:61,9%).	64,55%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2,01%*	0	2,01%	2,02%	2,02%	2,03%	2,03%	2,04%	18,85%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
3.7.1.(a)	Angkaprevalensi penggunaanmetode kontrasepsi(CPR)semua carapadaPasanganUsia Subur(PUS)usia15-49 tahunyangberstatus kawin.	Meningkatnyacakupan angkapemakaian kontrasepsisemuacara padaperempuanusia15- 49tahununtuk40% pendudukberpendapatan terbawahpadatahun2019 menjadi65%.	65%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2,01%*	0	2,01%	2,02%	2,02%	2,03%	2,03%	2,04%	-62,96%	SB
3.7.1.(b)	Angkapenggunaanmetode kontrasepsijangkapanjang (MKJP)caramodern.	Meningkatnyaangka prevalensikontrasepsi modern(MCPR)menjadi 63,4%(2017:57,2%).	63,40%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3,71%*	-0,06	3,49%	3,26%	3,04%	2,82%	2,59%	2,37%	-61,03%	**SB**
3.7.2*	Angkakelahiranpada perempuanumur15-19 tahun(AgeSpecificFertility Rate/ASFR).	Menurunnyaangka kelahiranpadaremajausia 15-19tahun(agespecific fertilityrate/ASFR)pada tahun2019menjadi38 (2012-2013:48).	18	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	19,24*	-0,19	15,63	12,02	8,41	4,8	1,19	0	2,37	**SS**
3.7.2.(a)	TotalFertilityRate(TFR).	MenurunnyaTotalFertility Rate(TFR)padatahun2019 menjadi2,28(2012:2,6).	2,1	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2,43*	-0,01	2,41	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	-0,2	**SB**
Target TPB	3.8Mencapaicakupankesehatanuniversal,termasukperlindunganrisikokeuangan,aksesterhadappelayanankesehatandasaryangbaik,danaksesterhadapobat-obatandanvaksindasaryangaman,efektif,berkualitas,danterjangkaubagisemuaorang.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
3.8.1.(a)	Unmetneedpelayanan kesehatan.	Menurunnyaunmeetneed pelayanankesehatanpada tahun2019menjadi9,91% (2012-2013:11,4%).	9,91%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	13,37%*	0,18	15,79%	18,20%	20,62%	23,04%	25,45%	27,87%	-37,78%	**SB**
3.8.2*	Jumlahpendudukyang dicakupasuransikesehatan atausistemkesehatan masyarakatper1000 penduduk.	Meningkatnyacakupan PenerimaBantuanIuran (PBI)JaminanKesehatan Nasionaldari40% pendudukberpendapatan terbawahmenjadi112,9juta penduduk(2020:96,6juta penduduk)	Meningkatnyacakupan penerimabantuan	Dinas Kesehatan	1.093.352*	0,86	2.033.437	2.973.521	3.913.606	4.853.691	5.793.775	6.733.860	Meningkat	**SS**
3.8.2.(a)	CakupanJaminan KesehatanNasional(JKN).	Meningkatnyacakupan JaminanKesehatan Nasional(JKN)padatahun 2019minimal95% (2015:60%).	100,00%	Dinas Kesehatan	100%*	0,23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	SS
Target TPB	3.9Padatahun2030,secarasignifikanmengurangijumlahkematiandankesakitanakibatbahankimiaberbahaya,sertapolusidankontaminasiudara,air,dantanah.													
3.9.3.(a)	Proporsikematianakibat keracunan.	Menurun	Menurun	Dinas Kesehatan	0*	N/A	0	0	0	0	0	0	Menurun	SS
Target TPB	3.aMemperkuatpelaksanaantheFrameworkConventiononTobaccoControlWHOdiseluruhnegarasebagaiangkahyangtepat.													
3.a.1*	Persentasemerokokpada pendudukumur≥15tahun.	Menurunnyapersentase merokokpadapenduduk usia10-18tahunmenjadi 8,7%(2018:9,1%)	8,70%	Dinas Kesehatan	19,56%*	-0,03	18,90%	18,24%	17,58%	16,92%	16,26%	15,60%	-6,90%	SB
Target TPB	3.bMendukungpenelitiandanpengembanganvaksindanobatpenyakitmenulardantidakmenularyangterutama berpengaruhterhadapnegaraberkembang,menyediakanaksesterhadapobatdanvaksindasaryangterjangkau,sesuaitheDohaDeclarationtentangtheTRIPSAgreementandPublicHealth,yang menegaskanhaknegaraberkembanguntukmenggunakansecarapenuhketentuandalamKesepakatanatasAspek-AspekPerdagangandariHakKekayaanIntelektualterkaitkeleluasaanuntukmelindungikeschatanmasyarakat,dankhususnya,menyediakanaksesobatbagisemua.													
3.b.1.(a)	Persentaseketersediaan obatdanvaksindi Puskesmas.	Meningkatnyapersentase imunisasidasarlengkap padaanakusia12-23bulan menjadi90%(2020:70%) Meningkatnyapersentase puskesmasdengan ketersediaanobatesensial menjadi96%(2020:92,12%)	96%	Dinas Kesehatan	100%*	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
Target TPB	3.cMeningkatkansecarasignifikanpembiayaankesehatandanrekrutmen,pengembangan,pelatihan,danretensitenagakesehatandinegaraberkembang,khususnyanegarakurangberkembang,dannegaraberkembangpulaukecil.													
3.c.1*	Kepadatandandistribusi tenagakesehatan.	Meningkatnyapersentase puskesmasdenganjenis tenagakesehatansesuai standarmenjadi83% (2020:39,9%)	83%	Dinas Kesehatan	36,74%*	-0,11	31,32%	29,34%	26,22%	23,43%	20,94%	6,87%	-76%	SB
TPB	4.MenjaminKualitasPendidikanyangInklusifdanMerataserta MeningkatkanKesempatanBelajarSepanjangHayatuntukSemua													
Target TPB	4.1Padatahun2030,menjaminbahwasemuaanakperempuandanlaki-lakimenyelesaikanpendidikandasardanmenengahtanpadipungutbiaya,setara,danberkualitas,yangmengarahpadacapaianpembelajaranyangrelevandanefektif.													
4.1.1*	Proporsianak-anakdan remaja:(a)padakelas4, (b)tingkatakhirSD/kelas 6,(c)tingkatakhir SMP/kelas9yang mencapaistandar kemampuanminimum dalam:(i)membaca,(ii) matematika.	Meningkatnyaproporsi anakdiatasstandar kompetensiminimum dalamtesPISA (programmefor internationalstudent assessment)menjadi 34,1%membacadan 30,9%matematika(2019: 30,1%membacadan28 ,1% matematika)	34,1%membaca 30,9%matematika	Dinas Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
4.1.1.(a)	PersentaseSD/MI berakreditasiminimalB.	Meningkatnyapersentase SD/MIberakreditasi minimalBpadatahun2019 menjadi84,2% (2015:68,7%).	84,20%	Dinas Pendidikan	100%*	0,11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15,80%	SS
4.1.1.(b)	PersentaseSMP/MTs berakreditasiminimalB.	Meningkatnyapersentase SMP/MTsberakreditasi minimalBpadatahun2019 menjadi81%(2015:62,5%).	81%	Dinas Pendidikan	81,27%*	0,03	83,73%	86,20%	88,66%	91,12%	93,58%	96,05%	15,53%	SS
4.1.1.(d)	AngkaPartisipasiKasar (APK)SD/MI/sederajat.	MeningkatnyaAngka PartisipasiKasar(APK) SD/MI/sederajatpada tahun2019menjadi 114,09%(2015:108%).	106,24%	Dinas Pendidikan	108,26%*	0	108,19%	108,12%	108,05%	107,98%	107,91%	107,84%	1,60%	SS
4.1.1.(e)	AngkaPartisipasiKasar (APK)SMP/MTs/sederajat.	MeningkatnyaAPK SMP/MTs/sederajatpada tahun2019menjadi 106,94%(2015: 100,7%).	101,49%	Dinas Pendidikan	74,09%*	-0,02	72,68%	71,27%	69,87%	68,46%	67,05%	65,64%	-35,85%	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
4.1.1.(g)	Rata-ratalamasekolah pendudukumur≥15tahun.	Meningkatnyarata-rata lamasekolahpenduduk usiadiatas15tahunpada tahun2019menjadi8,8 tahun(2015:8,25tahun).	8,8	Dinas Pendidikan	8,59*	0,02	8,75	8,91	9,07	9,23	9,39	9,55	0,75	SS
Target TPB	4.2Padatahun2030,menjaminbahwasemuaanakperempuandanlaki-lakimemilikiaksesterhadapperkembangandanpengasuhananakusiadini,pengasuhan,pendidikanpra-sekolahdasaryangberkualitas,sehinggamerekasiapuntukmenempuhpendidikandasar.													
4.2.2.(a)	AngkaPartisipasiKasar (APK)PendidikanAnak Usia Dini(PAUD).	MeningkatnyaAPKanak yangmengikutiPendidikan AnakUsiaDini(PAUD)pada tahun2019menjadi77,2% (2015:70,06%).	65,51%	Dinas Pendidikan	39,58%*	-0,02	38,92%	38,26%	37,61%	36,95%	36,29%	35,63%	-29,88%	SB
Target TPB	4.4Padatahun2030,meningkatkansecarasignifikanjumlahpemudadanorangdewasayangmemilikiketerampilanyangrelevan,termasukketerampilanteknikdankejuruan,untukpekerjaan,pekerjaanyanglayakdankewirausahaan.													
4.4.1*	Proporsiremajadan dewasadengan keterampilanteknologi informasidankomunikasi (TIK).	Meningkatnyapemanfaatan TeknologiInformasidan Komunikasi(TIK)dalam pembelajaran	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,16*	0,29	100	100	100	100	100	100	Meningkat	SS
Target TPB	4.5Padatahun2030,menghilangkandisparitasgenderdalampendidikan,danmenjaminaksesyangsamauntuksemuatingkatpendidikandanpelatihankejuruan,bagimasyarakatrentantermasukpenyandangcacat,masyarakatpendudukasli,dananak-anakdalamkondisirentan.													
4.5.1*	RasioAngkaPartisipasi Murni(APM) perempuan/laki-lakidi: (1)SD/MI/sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat;	4.1.RasioAngkaPartisipasi Murni(APM) perempuan/laki-lakidi SD/MI/paketAyang setaragenderpadatahun 2019.4.2RasioAPM perempuan/laki-lakidi SMP/MTs/PaketByang setaragenderpadatahun 2019.4.3RasioAPK perempuan/laki-lakidi SMA/SMK/MAyangsetara genderpadatahun2019. 4.4RasioAPK perempuan/laki-lakipada PTdanPTAyangsetara genderpadatahun2019.	99,78% (SD)	Dinas Pendidikan	100% (SD)*	0,01 (SD)	100% (SD)	100% (SD)	100% (SD)	100% (SD)	100% (SD)	100% (SD)	0,22% (SD)	SS
			101,50% (SMP)		71,29% (SMP)*	-0,01 (SMP)	70,31% (SMP)	69,34% (SMP)	68,36% (SMP)	67,39% (SMP)	66,41% (SMP)	65,43% (SMP)	-36,07% (SMP)	SB
Target TPB	4.6Padatahun2030,menjaminbahwasemuaremajadanproporsikelompokdewasatertentu,baiklaki-lakimaupunperempuan,memilikikemampuanliterasidannumerasi.													
4.6.1.(a)	Persentaseangkamelek aksarapendudukumur ≥15 tahun.	Meningkatnyarata-rata angkamelekaksara pendudukusiadiatas15	96,10%	Dinas Pendidikan	98,97%*	0	99,04%	99,11%	99,18%	99,25%	99,32%	99,40%	3,30%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
		tahunpadatahun2019 menjadi96,1%(2015: 95,2%).												
4.6.1.(b)	Persentaseangkamelekaksarapendudukumur 15-24tahundanumur15-59 tahun.	Meningkatnyapersentase angkamelekaksarapendudukusiadewasausia 15-59tahunpadatahun 2019.	Meningkat	Dinas Pendidikan	99,20%*	98,97%	0	99,04%	99,11%	99,18%	99,25%	99,32%	Meningkat	SS
Target TPB	4.aMembangundanmeningkatkanfasilitaspendidikanyangramahanak,ramahpenyandangcacatdangender,sertamenyediakanlingkunganbelajaryangaman,antikekerasan,inklusifdanefektifbagisemua.													
4.a.1*	Proporsisekolahdengan akseske:(a)listrik(b) internetuntuktujuan pengajaran,(c)komputer untuktujuanpengajaran, (d)infrastrukturdan materimemadaibagisiswa disabilitas,(e)airminumlayak,(f)fasilitassanitasi dasarperjeniskelamin,(g) fasilitascucitangan (terdiriair,sanitasi,dan higienisbagisemua (WASH).	Mendorongpemerataan aksesdanwajibbelajar12 tahunsalahsatunya melaluiprogram penyediaansaranadan prasaranapendidikan	Meningkat	Dinas Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	4.cPadatahun2030,secarasignifikanmeningkatkanpasokanguruyangberkualitas,termasukmelaluikerjasamainternasionaldalampelatihangurudinegaraberkembang,terutamanegarakurangberkembang,dannegaraberkembangkepulauankecil.													
4.c.1*	PersentaseguruTK,SD, SMP,SMA,SMK,danPLB yangbersertifikatpendidik.	Meningkatnyapengelolaan danpenempatanpendidik dantenagakependidikan melaluiprogram pendidikanprofesiguru danpeningkatankualifikasi pendidik.	95,84%	Dinas Pendidikan	39,66%*	0,02	40,33%	41,00%	41,66%	42,33%	43,00%	43,67%	Meningkat	SS
TPB	5.MencapaiKesetaraanGenderdanMemberdayakanKaumPerempuan													
Target TPB	5.1Mengakhirisegalabentukdiskriminasiterhadapkaumperempuandimanapun.													
5.1.1*	Jumlahkebijakanyang responsifgender mendukungpemberdayaan perempuan.	Meningkatnyajumlah kebijakanyangresponsif gendermendukung pemberdayaanperempuan padatahun2019 bertambahsebanyak16 (2015: 19).	Meningkat	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1*	N/A	1	1	1	1	1	1	TerdapatKebijakan	**SS**

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
Target TPB	5.2Menghapuskansegalabentukkekerasanterhadapkaumperempuandiruangpublikdanpribadi, termasukperdaganganorangdaneksploitasiseksual,sertaberbagaijeniseksploitasi lainnya.													
5.2.1*	Proporsiperempuan dewasadananak perempuan(umur15-64 tahun)mengalami kekerasan(fisik,seksual, atauemosional)oleh pasanganataumantan pasangandalam12bulan terakhir.	Menurun	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,02%*	0,46	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	Meningkat	SB
5.2.1.(a)	Prevalensikekerasan terhadapanakperempuan.	Menurunnyaprevalensi kasuskekerasanterhadap anakperempuanpada tahun2019(2013:20,48 %).	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,06%*	0,31	0,08%	0,10%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%	Meningkat	SB
5.2.2*	Proporsiperempuan dewasadananak perempuan(umur15-64 tahun)mengalami kekerasanseksualoleh oranglainselainpasangan dalam12bulanterakhir.	Menurun	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,03%*	0,6	0,05%	0,07%	0,08%	0,10%	0,12%	0,14%	Meningkat	SB
5.2.2.(a)	Persentasekorban kekerasanterhadap perempuanyangmendapat layanankomprehensif.	Meningkatnyapersentase kasuskekerasanterhadap perempuanyangmendapat layanankomprehensifpada tahun2019menjadi70 % (2015:50%).	70%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,00%	SS
Target TPB	5.3Menghapuskansemuapraktikberbahaya,sepertiperkawinanusiaanak,perkawinandinidanpaksa,sertasunatperempuan.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
5.3.1*	Proporsiperempuanumur 20-24tahunyang berstatuskawinatau berstatushidupbersama sebelumumur15tahun dan sebelumumur18tahun.	Menurunnyapersentase perempuanumur20-24 tahunyangmenikah sebelum18tahunmenjadi 8,74%(2020:10,35%)	6,94%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,04%*	0,28	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,11%	0,12%	6,82%	SS
5.3.1.(a)	Medianusiakawinpertama perempuanpernahkawin umur25-49tahun.	Meningkatnyamedian usia kawinpertamaperempuan (pendewasaanusiakawin pertama)padatahun2019 menjadi21tahun(2012 : 20,1tahun).	22,4	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
5.3.1.(b)	Angkakelahiranpada perempuanumur15-19 tahun(AgeSpecificFertility Rate/ASFR).	MenurunnyaASFR15-19 tahunpadatahun2019 menjadi38tahun(2012 :48 tahun).	38	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18,88*	-0,2	15,07	11,27	7,46	3,65	0	0	7,5	SS
Target TPB	5.5Menjaminpartisipasipenuhdanefektif,dankesempatanyangsamabagiperempuanuntukmemimpindisemuatingkatpengambilankeputusandalamkehidupanpolitik,ekonomi,danmasyarakat.													
5.5.1*	Proporsikursiyang didudukiperempuandi parlementingkatpusat, parlemendaerahdan pemerintahdaerah.	Meningkatnyaketerwakilan perempuandiDPR(Hasil Pemilu2014: 16,6%).	17%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	20,00%*	0	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
5.5.2*	Proporsiperempuanyang beradadiposisi managerial.	Meningkatnyaketerwakilan perempuansebagai pengambilkeputusandi lembagaeksekutif(EselonI danII)(2014:EselonI= 20,66%danEselonII= 16,39%).	Meningkat	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	13,27%*	0,12	14,80%	16,33%	17,86%	19,39%	20,93%	22,46%	Meningkat	SS
Target TPB	5.6Menjaminaksesuniversalterhadapkesehatanseksualdanreproduksi,danhakreproduksisepertiyangtelahdisepakatisesuaidenganProgrammeofActionoftheInternationalConferenceonPopulationandDevelopmentandtheBeijingPlatformsertadokumen-dokumenhasilreviudarikonferensi-konferensi tersebut.													
5.6.1*	Proporsiperempuanumur 15-49tahunyangmembuat keputusansendiriterkait hubunganseksual, penggunaankontrasepsi, danlayanankesehatan reproduksi.	Meningkat	Meningkat	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
5.6.1.(a)	UnmetneedKB(Kebutuhan KeluargaBerencana/KB yangtidakterpenuhi).	Menurunnyaunmeetneed kebutuhanber-KBpada tahun2019menjadi9,9% (2012-2013:11,4%).	5,80%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan	6,23%	-0,06	5,83%	5,43%	5,02%	4,62%	4,22%	3,82%	5,80%	**SS**
				Perlindungan Anak										
5.6.1.(b)	Pengetahuandan pemahamanPasangan Usia Subur(PUS)tentang metodekontrasepsi modern.	Meningkatnyapengetahuan danpemahamanPasangan UsiaSubur(PUS)tentang metodekontrasepsi modernminimal4jenis padatahun2019menjadi 85%(2012:79,8%).	85	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	5.bMeningkatkanpenggunaanteknologiyangmemampukan,khususnyateknologiinformasidankomunikasiuntukmeningkatkanpemberdayaanperempuan.													

PermendagriNo.7Tahun2018							ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB	Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
5.b.1*	Proporsiindividuyang menguasai/memiliki telepongenggam.	"Meningkatnyaproporsi individuyangmenguasai/ memilikiteleponggenggam menjadi75,7% (2020:57,48%)"	75,70%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%*	0,02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	24,30%	SS
PILAREKONOMI														
TPB	7.MenjaminAksesEnergiyangTerjangkau,Andal,BerkelanjutandanModernuntukSemua													
Target TPB	7.2Padatahun2030,meningkatsecarasubstansialpangsaenergiterbarukandalambauranenergiglobal.													
7.2.1*	Bauranenergiterbarukan.	Bauranenergiterbarukan mencapai10-16%pada tahun2019.	26,10%	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB														
7.3.1*	Intensitasenergiprimer.	Intensitasenergiprimer (penurunan1%pertahun) menjadi463,2SBMpada tahun2019.	380,8SMB/MiliarRp	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
TPB	8.MeningkatkanPertumbuhanEkonomiyangInklusifdanBerkelanjutan,KesempatanKerjayangProduktifdanMenyeluruh,sertaPekerjaanyangLayakuntukSemua													
Target TPB	8.1Mempertahankanpertumbuhanekonomiperkapitasesuaidengankondisinasionaldan,khususnya,setidaknya7persenpertumbuhanprodukdomestikbrutopertahundinegarakurangberkembang.													
8.1.1*	LajupertumbuhanPDB per kapita.	MeningkatnyaGross NationalIncome(GNI)per kapita(AtlasMethod) diharapkanmenjadiUSD 5.810-6.000perkapita (2020:USD3.870)	5,40%	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	4,71%	0,15	5,31%	5,91%	6,51%	7,11%	7,71%	8,31%	Meningkat	**SS**
8.1.1.(a)	PDBperkapita.	MeningkatnyaProduk DomestikBruto(PDB)per kapitapertahunmenjadi lebihdariRp50jutapada tahun2019(2015:Rp45,2 juta).	50	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	34,42	0,07	36,82	39,22	41,62	44,02	46,42	48,83	-1,17	SB
Target TPB	8.2Mencapaitingkatproduktivitasekonomiyanglebihtinggi,melaluidiversifikasi,peningkatandaninovasiteknologi, termasukmelaluifokuspadasektoryangmemberinilaitambahtinggidanpadatkarya.													
8.2.1*	LajupertumbuhanPDB per tenagakerja/Tingkat pertumbuhanPDBriilper orangbekerjapertahun.	PertumbuhanPDBriilper orangyangbekerja meningkathinggatahun 2019.	Meningkat	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
Target TPB	8.3Menggalakkankebijakanpembangunanyangmendukungkegiatanproduktif,penciptaanlapangankerjalayak,kewirausahaan,kreativitasdaninovasi,danmendorongformalisasidanpertumbuhanusahamikro,kecil,danmenengah,termasukmelaluiaksesterhadapjasakeuangan.													
8.3.1*	Proporsilapangankerja informalsektornon-pertanian,berdasarkan jeniskelamin.	Meningkat	Menurun	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	75,57%*	0,04	78,25%	80,92%	83,60%	86,28%	88,96%	91,63%	Meningkat	SB
8.3.1.(a)	Persentasetenagakerja formal.	Persentasetenagakerja formalmencapai51%pada tahun2019(2015:42,2%).	51%	Dinas Penanaman Modal,dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu,dan TenagaKerja	4,93%*	0,01	4,96%	4,98%	5,01%	5,04%	5,06%	5,09%	-45,91%	SB
8.3.1.(b)	Persentasetenagakerja informalsektorpertanian.	Menurun	Menurun	Dinas Pertanian	19,05%*	-0,11	16,90%	14,75%	12,60%	10,45%	8,30%	6,15%	Menurun	SS
8.3.1.(c)	PersentaseaksesUMKM (UsahaMikro,Kecil,dan Menengah)kelayanan keuangan.	AksesLayananKeuangan formalUsahaMikro,Kecil danMenengah(UMKM) 25%padatahun2019 (2014: 17,8%).	41,60%	Dinas Perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	8.5Padatahun2030,mencapaipekerjaantetapdanproduktifdanpekerjaanyanglayakbagisemuaperempuandanlaki-laki, termasukbagipemudadanpenyandangdifabilitas,danupahyangsamauntukpekerjaanyangsamanilainya.													
8.5.1*	Upahrata-rataperjam pekerja.	Meningkat	Meningkat	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	22.676,92*	0,08	24.416,02	26.155,13	27.894,23	29.633,33	31.372,43	33.111,54	Meningkat	SS
8.5.2*	Tingkatpengangguran terbukaberdasarkanjenis kelamindankelompokumur.	Menurun	3,80%	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	3,24%*	0,03	3,35%	3,46%	3,57%	3,68%	3,79%	3,90%	-0,10%	SB
8.5.2.(a)	Tingkatsetengah pengangguran.	Menurun	Menurun	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	55,13%*	0	54,96%	54,79%	54,62%	54,45%	54,27%	54,10%	Menurun	SS
Target TPB	8.6Padatahun2020,secarasubstansialmengurangiproporsiusiamudayangtidakbekerja,tidakmenempuhpendidikanataupelatihan.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
8.6.1*	Persentaseusiamuda(15-24tahun)yangsedangtidaksekolah,bekerjaatau mengikutipelatihan(NEET).	Meningkatnyaketerampilan pekerjarentanagardapat memasukipasartenagakerja.	Meningkat	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintudan TenagaKerja	2,83%*	0,07	3,04%	3,24%	3,45%	3,65%	3,86%	4,06%	Meningkat	SS
Target TPB	8.9Padatahun2030,menyusundanmelaksanakankebijakanuntukmempromosikanpariwisataberkelanjutanyangmenciptakanlapangankerjadanmempromosikanbudayadanproduklokal.													
8.9.1*	Proporsikontribusi pariwisataterhadapPDB.	Meningkatnyakontribusi pariwisatamenjadi8% terhadapPDBpadatahun 2019(2014:4,2%).	42,80%	Dinas Kepemudaan, OlahRaga,dan Pariwisata	8,61%*	0,01	8,68%	8,75%	8,82%	8,89%	8,96%	9,02%	Meningkat	SS
8.9.1.(a)	Jumlahwisatawan mancanegara.	Meningkatnyajumlahwisatawanmancanegara menjadi20jutapadatahun 2019(2014:9juta).	Meningkat	Dinas Kepemudaan, OlahRaga,dan Pariwisata	353*	0,27	448	542	637	732	826	921	Meningkat	SS
8.9.1.(b)	Jumlahkunjungan wisatawannusantara.	Meningkatnyajumlan perjalananwisatawan nusantaramenjadi320-335jutaperjalanan(2020: 198,24juta)	Meningkat	Dinas Kepemudaan, OlahRaga,dan Pariwisata	519.918	0,17	609.375,04	698.832,08	788.289,12	877.746,16	967.203,20	1.056.660,24	Meningkat	SS
8.9.1.(c)	Jumlahdevisasektor pariwisata.	Meningkatnyadevisa pariwisatamenjadiUSD 21,5-22,9miliar(2020: 3,46miliar)	Meningkat	Dinas Kepemudaan, OlahRaga,dan Pariwisata	rp1.009.501	-0,53	Rp514.771	Rp20.040	-Rp474.690	-Rp969.421	-Rp1.464.151	-Rp1.958.882	Menurun	SB
8.9.2*	Jumlahpekerjapada industripariwisatadalam proporsiterhadaptotal pekerja.	Meningkat	Meningkat	Dinas Kepemudaan, OlahRaga,dan Pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB														
8.10.1*	Jumlahkantorbankdan ATMper100.000penduduk dewasa	Meningkat	Meningkat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan TerpaduSatu Pintu,dan TenagaKerja	11*	0	11	11	11	11	11	11	Tetap	SB
8.10.1.(a)	Rata-ratajaraklembagakeuangan(BankUmum).	Meningkatnyaperluasan aksespermodalandan layanankeuanganmelalui penguatanlayanan keuanganhinggatahun 2019.	Meningkat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan TerpaduSatu Pintu,dan TenagaKerja	1*	0	1	1	1	1	1	1	Tetap	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
8.10.1.(b)	ProporsikreditUMKM terhadaptotalkredit.	Meningkatnyaperluasan aksespermodalandan layanankeuanganmelalui penguatanlayanan keuanganhinggatahun 2019.	Meningkat	Dinas Perdagangan	13,29%	0	13,23%	13,16%	13,10%	13,04%	12,98%	12,91%	Menurun	SB
TPB	9.MembangunInfrastrukturyangTangguh,MeningkatkanIndustri InklusifdanBerkelanjutan,sertaMendorongInovasi													
Target TPB	9.2Mempromosikanindustrialisasi inklusifdanberkelanjutan,danpadatahun2030,secarasignifikanmeningkatkanproporsi industridalamlapangankerjadanprodukdomestikbruto,sejalandengankondisinasional,danmeningkatkanduakali lipatproporsinyadinegarakurangberkembang.													
9.2.1*	Proporsinilaitambah sektorindustrimanufaktur terhadapPDBdanperkapita.	Meningkat	21,15%	Dinas Perdagangan	13,96*	-0,01	13,86	13,76	13,67	13,57	13,47	13,37	13,16	SB
9.2.1.(a)	LajupertumbuhanPDB industrimanufaktur.	Meningkatnyalaju pertumbuhanPDBindustri manufaktursehinggalebih tinggidaripertumbuhan PDB(2015:4,3%).	Lebihtinggidari pertumbuhanPDB	Dinas Perdagangan	9,48*	0,28	12,12	14,77	17,41	20,05	22,69	25,34	Meningkat	SS
9.2.2*	Proporsitenagakerjapada sektorindustrimanufaktur.	Meningkat	17,98%	Dinas Penanaman Modal,dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu,dan TenagaKerja	2,54%*	0,04	2,64%	2,74%	2,85%	2,95%	3,05%	3,15%	-15,13%	SB
Target TPB	9.3Meningkatkanaksesindustridanperusahaanskalakecil,khususnyadinegaraberkembang,terhadapjasakeuangan,termasukkreditterjangkau,danmengintegrasikankedalamrantainilaidanpasar.													
9.3.1*	Proporsinilaitambah industrikecil terhadaptotal nilaitambahindustri.	Meningkat	Meningkat	Dinas Perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
9.3.2*	Proporsiindustrikecil denganpinjamanatau kredit.	Meningkat	Meningkat	Dinas Perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	9.5Memperkuatrisetilmiah,meningkatkankapabilitasteknologisektorindustridisemuanegara,terutamanegara-negaraberkembang,termasukpadatahun2030,mendoronginovasidansecarasubstansialmeningkatkanjumlahpekerjapenelitiandanpengembanganper1 jutaorangdanmeningkatkan pembelanjaanpublikdanswastauntukpenelitiandanpengembangan.													
9.5.1*	Proporsianggaranriset pemerintahterhadapPDB.	Meningkat	0,63%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,dan Pengembanga n Daerah	0,20%*	-0,07	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,13%	0,12%	Menurun	**SB**
Target TPB	9.cSecarasignifikanmeningkatkanaksesterhadapteknologiinformasidankomunikasi,danmengusahakanpenyediaanaksesuniversaldanterjangkauinternetdinegara-negarakurangberkembangpadatahun2020.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
9.c.1*	Proporsipendudukyang terlayani mobile broadband.	Meningkat	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,55%*	0,03	79,11%	81,68%	84,24%	86,81%	89,37%	91,94%	-8,06%	SB
9.c.1.(a)	Proporsiindividuyang menguasai/memiliki telepongenggam	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%*	0,01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
9.c.1.(b)	Proporsiindividuyang menggunakaninternet	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,02%*	0,18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
TPB	10.MengurangiKesenjanganIntra-danAntarnegara													
Target TPB	10.1Padatahun2030,secaraprogresifmencapaidanmempertahankanpertumbuhanpendapatanpendudukyangberadadibawah40%daripopulasipadatingkatyanglebihtinggidarirata-ratanasional.													
10.1.1*	KoefisienGini.	KoefisienGinipadatahun 2019menjadi0,36(2014: 0,41).	0,363	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,dan Pengembanga n Daerah	0,22*	-0,03	0,21	0,21	0,2	0,19	0,18	0,18	0,19	SS
10.1.1.(a)	Persentasependudukyang hidupdibawahgaris kemiskinannasional, menurutjeniskelamindan kelompokumur.	Tingkatkemiskinanpada tahun2019menjadi7-8% darijumlahpenduduk (2015:11,13%).	8,50%	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5,99%*	0	6,02%	6,05%	6,08%	6,11%	6,14%	6,16%	2,34%	SS
10.1.1.(c)	Jumlahdesatertinggal.	BerkurangnyaDesa Tertinggalsebanyak5.000 desa.	Menurun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa	4	-0,37	0	0	0	0	0	0	Menurun	SS
10.1.1.(d)	JumlahDesaMandiri.	MeningkatnyaDesaMandiri palingsedikitsebanyak 2.000desa.	Meningkat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa	93	2,44	320	547	774	1000	1227	1454	Meningkat	SS
Target TPB	10.2Padatahun2030,memberdayakandanmeningkatkaninklusisosial,ekonomidanpolitikbagisemua,terlepasdariusia, jeniskelamin,difabilitas,ras,suku,asal,agamaataukemampuanekonomiataustatuslainnya.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
10.2.1*	Proporsipendudukyang hidupdibawah50persen darimedianpendapatan, menurutjeniskelamindan penyandangdifabilitas.	Meningkat	Meningkat	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100%*	0,24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
Target TPB	10.3Menjaminkesempatanyangsamadanmengurangikesenjanganhasil, termasukdenganmenghapushukum,kebijakandanpraktikyangdiskriminatif,danmempromosikanlegislasi,kebijakandantindakanyangtepatterkaitlegislasidankebijakantersebut.													
10.3.1.(a)	IndeksKebebasanSipil.	MeningkatnyaIndeks KebebasanSipilmenjadi87 padatahun2019(2015: 80,3).	84	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	50	0	50	50	50	50	50	50	-34	SB
10.3.1.(d)	Jumlahkebijakanyang diskriminatifdalam12bulan laluberdasarkan pelarangandiskriminasi menuruthukumHAM Internasional.	(tidakadadalamlampiran Perpres59/2017)	Tidakterdapat kebijakandiskriminatif	Bidang Pemerintahan SETDA	tidakadakebijakan	N/A	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	TidakAdaKebijakan Diskriminatif	tidakadakebijakan*	SS
Target TPB	10.4Mengadopsikebijakan,terutamakebijakanfiskal,upahdanperlindungansosial,sertasecaraprogresifmencapaikesetaraanyanglebihbesar.													
10.4.1.(b)	ProporsipesertaProgram JaminanSosialBidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnyakepesertaan SistemJaminanSosial Nasionalbidang ketenagakerjaanuntuk tenagakerjaformalpada tahun2019menjadi62,4 jutadantenagakerja informalpadatahun2019 menjadi3,5juta(2014: Formal29,5juta;Informal 1,3juta).	74,57%tenagakerja formal 25,94%tenagakerja informal	Dinas Penanaman Modal,dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu,dan TenagaKerja	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
TPB	17.MenguatkanSaranaPelaksanaandanMerevitalisasiKemitraanGlobaluntukPembangunanBerkelanjutan													
Target TPB	17.1Memperkuatmobilisasisumberdayadomestik,termasukmelaluidukunganinternasionalkepadanegaraberkembang,untukmeningkatkankapasitaslokalbagipengumpulanpajakdanpendapatanlainnya.													
17.1.1*	Totalpendapatan pemerintahsebagai proporsiterhadapPDB menurutsumbernya.	Meningkatnyarasio pendapatannegara menjadi11,4-12,0%PDB (2020:10,68%PDB)	11,40%	Badan Pengelola Pajakdan Retribusi Daerah	2,44%	0,09	2,67%	2,89%	3,12%	3,35%	3,58%	3,80%	-7,60%	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
17.1.1.(a)	Rasiopenerimaanpajakterhadap PDB.	Tercapainyarasio penerimaanperpajakan terhadapPDBdiatas12% pertahun(2015:10,7%).	12,00	Badan Pengelola Pajakdan Retribusi Daerah	0,20%*	0,05	0,21%	0,22%	0,23%	0,24%	0,25%	0,26%	-13,94%	SB
17.1.2*	Proporsianggaran domestikyangdidanaioleh pajakdomestik.	Meningkat	Meningkat	Badan Pengelola Pajakdan Retribusi Daerah	24,38%*	0,16	28,17%	31,95%	35,74%	39,53%	43,31%	47,10%	Meningkat	SS
Target TPB	17.6MeningkatkankerjasamaUtara-Selatan,Selatan-Selatandankerjasamatriangularsecararegionaldaninternasionalterkaitdanaksesterhadapsains,teknologidaninovasi,danmeningkatkanberbagipengetahuanberdasarkesepakatantimbalbalik,termasukmelaluikoordinasiyanglebihbaikantara mekanismeyangtelahada,khususnyaditingkatPerserikatanBangsa-Bangsa(PBB),danmelaluimekanismefasilitasiteknologiglobal.													
17.6.2.(b)	Tingkatpenetrasiaksestetappitalebar(fixed broadband)diPerkotaan dandiPerdesaan. Persentasekecamatan yangterjangkau infrastrukturjaringan seratoptik (kumulatif)	Meningkatnyapenetrasi aksestetappitalebar (fixedbroadband)pada tahun2019di:-Perkotaan (20Mbps)menjangkau 71% rumahtangga(2015:38%) dan30%populasi(2015: 16%).-Perdesaan(10 Mbps)menjangkau49% rumahtangga(2015:26%) dan6%populasi(2015: 3%).	30	Dinas Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
17.6.2.(c)	Proporsipenduduk terlayanimobilebroadband	Meningkatnyapenetrasi aksesbergerakpitalebar (mobilebroadband)dengan kecepatan1Megabyteper second(Mbps)padatahun 2019di:-Perkotaan menjangkau100% populasi.-Perdesaan menjangkau52%populasi.	Perkotaan100% populasi;Perdesaan 52%populasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,55%*	0,03	79,11%	81,68%	84,24%	86,81%	89,37%	91,94%	39,94%	SS
Target TPB	17.8Mengoperasionalisasikansecarapenuhbankteknologidansains,mekanismepembangunankapasitasteknologidaninovasiuntuknegarakurangberkembangpadatahun2017danmeningkatkanpenggunaanteknologiyangmemampukan,khususnyateknologiinformasidankomunikasi.													
17.8.1*	Proporsiindividuyang menggunakaninternet.	Meningkatnyapersentase penggunaintemetmenjadi 82,30%(2019:73,70%)	89,10%	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,02%*	0,21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10,90%	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
17.8.1.(a)	Persentasekabupaten3T yangterjangkaulayanan aksestelekomunikasi universaldaninternet.	Tersedianyajangkauanlayananakses telekomunikasiuniversal daninternetmencapai 100%diwilayahUniversal ServiceObligation(USO), denganprioritasdaerah terpencil, terluar,dan perbatasan.	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	17.17Mendorongdanmeningkatkankerjasamapemerintah-swastadanmasyarakatsipilyangefektif,berdasarkanpengalamandanbersumberpadastrategikerjasama.													
17.17.1.(a)	Jumlahproyekyang ditawarkanuntuk dilaksanakandengans kema KerjasamaPemerintah dan BadanUsaha(KPBU).	Tersedianyaalternatif pembiayaanuntuk pembangunanmelalui skemaKerjasama PemerintahSwasta (KPS)/Kerjasama PemerintahdenganBadan UsahaDalamPenyediaan Infrastruktur(KPBU).	ada	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Meningkat	SS
17.17.1.(b)	Jumlahalokasipemerintah untukpenyiapanproyek, transaksiproyek,dan dukunganpemerintah dalamKerjasama PemerintahdanBadan Usaha(KPBU).	Tersedianyaalokasidana APBNuntukpenyiapan, transaksidandukungan Pemerintahbagiproyek KPS/KPBU.	ada	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	17.18Padatahun2020,meningkatkandukunganpengembangankapasitasuntuknegaraberkembang,termasuknegarakurangberkembangdannegaraberkembangpulaukecil,untukmeningkatkansecarasignifikanketersediaandataberkualitastinggi, tepatwaktudandapatdipercaya,yangterpilahberdasarkan pendapatan,gender,umur,ras,etnis,statusmigrasi,difabilitas, lokasigeografisdankarakteristik lainnyayangrelevandengankonteksnasional.													
17.18.1.(a)	Persentasekonsumen BadanPusatStatistik(BPS) yangmerasapuasdengan kualitasdatastatistik.	Meningkatkanhubungan denganrespondendan penggunadata	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%*	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
17.18.1.(b)	Persentasepublikasi statistikyangmenerapkan standarakurasisebagai dasarperencanaan, monitoringdanevaluasi pembangunannasional.	Meningkatnyapenggunaan standardanmetodologi statistikinternasionald i Indonesia	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%*	0,06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
17.18.1.(c)	Jumlahmetadatakegiatan statistikdasar,sektoral, dankhususyangterdapat dalamSistemInformasi RujukanStatistik(SIRuSa).	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	54*	0,68	91	127	164	201	237	274	Meningkat	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
17.18.1.(d)	PersentaseindikatorSDGs terpilahyangrelevandengantarget.	Meningkat	Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,dan Pengembanga n Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	17.19Padatahun2030,mengandalkaninisiatifyangsudahada,untukmengembangkanpengukuranataskemajuanpembangunanberkelanjutanyangmelengkapiProdukDomestikBruto,danmendukungpengembangankapasitasstatistikdinegaraberkembang.													
17.19.2.(b)	Tersedianyadataregistrasi terkaitkelahirandan kematian(VitalStatistics Register)	Tersedianyadata registrasiterkaitkelahiran dankematian(Vital StatisticsRegister)di20 provinsi	Meningkatmenjadi 20 provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada*	Tersedi a	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Meningkat	SS
17.19.2.(c)	Jumlahpengunjung eksternalyangmengakses datadaninformasistatistik melaluiwebsite.	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.460*	0,32	45.580	56.701	67.821	78.941	90.061	101.182	Meningkat	SS
17.19.2.(d)	Persentasekonsumenyang puasterhadapaksesdata BadanPusatStatistik (BPS).	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%*	0,01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS
					PILARLINGKUNGAN									
TPB	6.MenjaminKetersediaansertaPengelolaanAirBersihdanSanitasiyangBerkelanjutan													
Target TPB	6.1Padatahun2030,mencapaiaksesuniversaldanmerataterhadapairminumyangamandanterjangkaubagisemua.													
6.1.1.(a)	Persentaserumahtangga yangmemilikiakses terhadaplayanansumber airminumlayak.	Meningkatnyaakses terhadaplayananair minumlayakpadatahun 2019menjadi100%(2014: 70%).	100%	DinasPUPR	83,69%	0,01	84,91%	86,12%	87,34%	88,56%	89,77%	90,99%	-9,01%	SB
6.1.1.(b)	Kapasitasprasaranaairbakuuntukmelayanirumah tangga,perkotaandan industri,sertapenyediaan airbakuuntukpulau-pulau.	Meningkatnyakapasitas prasaranaairbakuuntuk melayanirumahtangga, perkotaandanindustri padatahun2019menjadi 118,6m3/detik(2015:51,44	131,36	DinasPUPR	0,25*	0,04	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	-131,05	SB
		m3/detik)danpenyediaan airbakuuntuk60pulau.												

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
6.1.1.(c)	Proporsipopulasiyang memilikiakseslayanan sumberairminumaman danberkelanjutan.	Meningkatnyaakses terhadaplayananair minumlayakpadatahu n 2019menjadi100%(20 14: 70%).	100%	DinasPUPR	83,64%*	0,01	84,83%	86,03%	87,22%	88,41%	89,61%	90,80%	-9%	SB
Target TPB	6.2Padatahun2030,mencapaiaksesterhadapsanitasidankebersihanyangmemadaidanmeratabagisemua,danmenghentikanpraktikbuangairbesarditempatterbuka,memberikanperhatiankhususpadakebutuhankaumperempuan,sertakelompokmasyarakatrentan.													
6.2.1.(a)	Proporsipopulasiyang memilikifasilitascuci tangandengansabunda n air.	Meningkat	Meningkat	Dinas Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
6.2.1.(b)	Persentaserumahtangg a yangmemilikiakses terhadaplayanansanita si layak.	Meningkatnyaakses terhadapsanitasiyang layakpadatahun2019 menjadi100%(2014: 60,9%).	100%	Dinas Kesehatan	68,07%	0,02	69,20%	70,34%	71,47%	72,60%	73,74%	74,87%	-25,13%	SB
6.2.1.(c)	Jumlahdesa/keluraha n yangmelaksanakan SanitasiTotalBerbasis Masyarakat(STBM).	Meningkatnyajumlah desa/kelurahanyang melaksanakanSanitasi TotalBerbasisMasyara kat (STBM)menjadi45.000 padatahun2019(2015: 25.000).	Meningkat	DinasPUPR	457,9*	0,87	857,6	1257,3	1657	2056,7	2456,4	2856,1	Meningkat	SS
6.2.1.(d)	Jumlahdesa/keluraha n yangOpenDefecationFr ee (ODF)/StopBuangAir BesarSembarangan(SB S).	Persentaserumahtang ga yangmasihmempraktikkan BuangAirBesar Sembarangan(BABS)di tempatterbukasebesar 0%(2020:6,91%)	0%	Dinas Kesehatan	82,37%*	0,27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SB
6.2.1.(e)	Jumlahkabupaten/kot a yangterbangun infrastrukturairlimbah dengansistemterpusat skalakota,kawasandan komunal.	Terbangunnya infrastrukturairlimbah dengansistemterpusat skalakota,kawasan, komunalpadatahun20 19 di438kabupaten/kota.	Terbangunnya infrastrukturair limbahterpusat	DinasPUPR	0*	-	0	0	0	0	0	0	Tidakterbangun infrastrukturlimb ah terpusat	SB
6.2.1.(f)	Proporsirumahtangga yangterlayanisistem pengelolaanairlimbah terpusat.	Jumlahsambunganru mah yangterlayaniSPALD-T skala permukiman/kota/reg iona l (SR)sebesar3,9juta sambungan(2019:2,2jt sambungan)	Meningkat	DinasPUPR	0*	N/A	0	0	0	0	0	0	RTtidakterhubun g jaringanperpipaa n terpusat	SB
Target TPB	6.3Padatahun2030,meningkatkankualitasairdenganmengurangipolusi,menghilangkanpembuangan, danmeminimalkanpelepasanmaterialdanbahankimiaberbahaya,mengurangisetengahproporsiair limbahyangtidakdiolah,dansecarasignifikanmeningkatkandaurulang, sertapenggunaankembali barangdaurulangyangamansecaraglobal.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
6.3.1.(a)	Jumlahkabupaten/kota yangditingkatkankualitas pengelolaanlumpurtinja perkotaandandilakukan pembangunanInstalasi PengolahanLumpurTinja (IPLT).	Peningkatankualitas pengelolaanairlimbah sistemsetempatmelalui peningkatankualitas pengelolaanlumpurtinja perkotaandan pembangunanInstalasi PengolahanLumpurTinja (IPLT)di409 kabupaten/kota.	Terbangunnya instalasi lumpurtinja (IPLT)	DinasPUPR	1*	0	1	1	1	1	1	1	TerbangunIPLT	SS
6.3.1.(b)	Proporsirumahtangga yangterlayanisistem pengelolaanlumpurtinja.	Jumlahrumahtanggayang terlayaniInstalasi PengolahanLumpurTinja (IPLT)sebesar8,6jt rumahtanggapada2020- 2024(2019:900ribu rumahtangga)	Meningkat	DinasPUPR	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	N/ A
6.3.2.(b)	Kualitasairsungaisebagai sumberairbaku.	Peningkatankualitasair sungaisebagaisumber air bakumenujubakumutu rata-rataairsungaikelas II.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	57,67*	0	57,84	58,01	58,18	58,35	58,52	58,69	Meningkat	SS
Target TPB	6.4 Padatahun2030,secarasignifikanmeningkatkanefisiensipenggunaanairdisemuasektor,danmenjaminpenggunaandanpasokanairtawaryangberkelanjutanuntukmengatasikelangkaanair,dansecarasignifikanmengurangijumlahorangyangmenderitaakibatkelangkaanair.													
6.4.1.(b)	Insentifpenghematanair pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberianinsentif penghematanair pertanian/perkebunan dan industritermasuk penerapanprinsipreduce, mengembangkanreuse dan recycle,ser-ta pengembangankonsep pemanfaatanairlimbah yangamanuntukpertanian	Terdapatinsentif penghematanair pertanian/perkebunan danindustri	DinasPUPR	Ada*	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Terdapatinsentif penghematanair pertanian/perkebuna ndanindustri	SS
		(safeuseofastewaterinagriculture).												
Target TPB	6.5Padatahun2030,menerapkanpengelolaansumberdayaairterpadudisemuatingkatan, termasukmelaluikerjasamalintasbatasyangtepat.													
6.5.1.(a)	JumlahRencana PengelolaanDaerahAliran SungaiTerpadu(RPDAST) yangdiinternalisasikedalamRencanaTataRuang Wilayah(RTRW).	Internalisasi108Rencana PengelolaanDaerahAliran SungaiTerpadu(RPDAST) yangsudahdisusunkedalamRencanaTataRuang Wilayah(RTRW).	Terintegrasinya RencanaPengelolaan DASkeRTRW	DinasPUPR	3*	N/A	3	3	3	3	3	3	Terintegrasinya RencanaPengelolaan DASkeRTRW	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
6.5.1.(c)	Jumlahjaringaninformasi sumberdayaairyang dibentuk.	Pembentukanjaringan informasisumberdaya air di8WilayahSungai.	8	DinasPUPR	1*	0	1	1	1	1	1	1	Terbentukjaringan informasisumber dayasungai	SS
6.5.1.(f)	Jumlahwilayahsungaiyang memilikipartisipasi masyarakatdalam pengelolaandaerah tangkapansungaidan danau.	Peningkatanpartisipasi masyarakatdalam pengelolaandaerah tangkapansungaidan danaudi10WilayahSungai	10	DinasPUPR	1*	0	1	1	1	1	1	1	Partisipasi masyarakatdalam pengelolaansungai	SS
6.5.1.(g)	Kegiatanpenataan kelembagaansumberdaya air.	Melanjutkanpenataan kelembagaansumberdaya air,antaralaindengan: Mensinergikanpengaturan kewenangandantanggung jawabdisemuatingkat pemerintahanbeserta seluruhpemang-ku kepentinganserta menjalankannyasecara konsisten;Meningkatkan ke-mampuankomunikasi, kerjasama,dankoordinasi antarlembagasertaantar- wadahkoordinasi pengelolaansumberdaya airyangtelahterbentuk; danMeningkatkan kapasitaskelembagaan pengelolaansumberdaya air.	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaansumber dayaair	DinasPUPR	Ada*	ada	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdayaair	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdayaair	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdayaair	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdayaair	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdayaair	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaan sumberdaya	Terlaksananya kegiatanpenataan kelembagaansumber dayaair	SS
TPB	11.MenjadikanKotadanPermukimanInklusif,Aman,TangguhdanBerkelanjutan													
Target TPB	11.1Padatahun2030,menjaminaksesbagisemuaterhadapperumahanyanglayak,aman,terjangkau,danpelayanandasar,sertamenatakawasankumuh.													
11.1.1.(a)	Proporsirumahtanggayangmemilikiakses terhadaphunianyanglayak danterjangkau.	Tersedianyaaksesbagi 3,7 jutarumahtangga terhadaphunianyanglayak danterjangkauhingga tahun2019	68,06%	Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman	92,53%*	0	92,79%	93,04%	93,30%	93,56%	93,82%	94,07%	24,07%	SS
Target TPB	11.3Padatahun2030,memperkuaturbanisasiyanginklusifdanberkelanjutansertakapasitaspartisipasi,perencanaanpenangananpermukimanyangberkelanjutandanterintegrasidisemuanegara.													
11.3.2.(b)	Jumlahlembaga pembiayaaninfrastruktur.	Tersedianyalembaga pembiayaaninfrastruktur.	Ada	DinasPUPR	Ada*	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	SS
Target TPB	11.4Mempromosikandanmenjagawarisanbudayaduniadanwarisanalamdunia.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
11.4.1.(a)	Jumlahkotapusakadikawasanperkotaanmetropolitan,kotabesar,kotasedangdankotakecil.	Terwujudnyakotadankawasanperkotaanlayak hunimelaluipengembangankotapusakaberbasiskarakter sosialbudaya(heritage city)dikawasanperkotaan	Ada	DinasPUPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
		metropolitan,kotabesar,sedang,dankecil,hingga tahun2019.												
Target TPB	11.5Padatahun2030,secarasignifikanmengurangijumlahkematiandanjumlahorangterdampak,dansecarasubstansialmengurangikerugianekonomirelatifterhadapPDBglobalyangdisebabkanolehbencana,denganfokusmelindungiorangmiskindanorang-orangdalamsituasirentan.													
11.5.1*	Jumlahkorbanmeninggal,hilangdanterkenadampakbencanaper100.000orang.	Rata-ratakorbanakibatbencanadidaerahrawanbencanamaksimalsebesar0,2per100.000jiwasetiaptahunnya	0,2	BPBD	0*	-0,44	0	0	0	0	0	0	0,2	SS
11.5.1.(a)	IndeksRisikoBencanaIndonesia(IRBI).	MenurunnyaIndeksRisikoBencana(IRB)mencapai30%hinggatahun2019.	30%	BPBD	9,79%*	0,28	12,55%	15,31%	18,08%	20,84%	23,60%	26,36%	Meningkat	SB
11.5.1.(c)	Jumlahsistemperingatandinicuacadaniklimserta kebencanaan.	Tersedianyasistemperingatandinicuacadaniklimsertakebencanaan.	ada	BPBD	Ada*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS
11.5.2.(a)	Jumlahkerugianekonomilangsungakibatbencanarelatifterhadap PDB	Persentasekehilangan PDB akibatdampakbencanasebesar0,1%dariPDB	0,1	BPBD	0,0139*	-0,1	0,0125	0,0111	0,0098	0,0084	0,007	0,0056	-0,09	SS
Target TPB	11.6Padatahun2030,mengurangidampaklingkunganperkotaanperkapitayangmerugikan,termasukdenganmemberiperhatiankhususpadakualitasudara,termasukpenanganansampahkota.													
11.6.1.(a)	Persentaserumahtanggadiperkotaanyangterlayanipengelolaansampah Persentasesampahperkotaanyangtertangani.	Meningkatnyacakupan penanganansampahperkotaanmenjadi80% padatahun2019(2013: 46%).	80%penanganan20%pengurangan	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	38,52%*	-0,11	34,30%	30,09%	25,87%	21,66%	17,44%	13,23%	-66,77%	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
11.6.1.(b)	Jumlahkotahijauyang mengembangkandan menerapkangreenwast edi kawasanperkotaan metropolitan.	Terwujudnyakotahijau yangberketahananikli m danbencanamelalui pengembangandan penerapangreenwater, greenwaste(pengelolaa n sampahdanlimbahmel alui reduce-reuse-recycle), greentransportation khususnyadi7kawasa n perkotaanmetropolita n, hinggatahun2019.	Meningkat/ada	DinasPUPR	Ada*	N/A	Terdapat pengelolaan	Terdapat pengelolaan	Terdapat pengelolaan	Terdapat pengelolaan	Terdapat pengelolaan	Terdapat pengelolaan	Terdapatpengelol aan	SS
Target TPB	11.7Padatahun2030,menyediakanruangpublikdanruangterbukahijauyangaman,inklusifdanmudahdijangkauterutamauntukperempuandananak,manuladanpenyandangdifabilitas.													
11.7.1.(a)	Jumlahkotahijauyang menyediakanruangter buka hijaudikawasanperkot aan metropolitandankota sedang.	Terwujudnyakotahijau yangberketahananikli m, melaluipenyediaanruang terbukahijau,palingse dikit di12kawasanperkotaa n metropolitandan20kot a sedang,hinggatahun2 019.	Meningkat/ada	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubunga n	N/A	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia	SS
Target TPB	11.bPadatahun2020,meningkatkansecarasubstansial jumlahkotadanpermukimanyangmengadopsidanmengimplementasikebijakandanperencanaanyangterintegrasitentangpenyertaan,efisiensisumberdaya,mitigasidanadaptasiterhadapperubahaniklim,ketahananterhadapbencana,serta mengembangkandanmengimplementasikanpenangananholistikrisikobencanadisemualini,sesuaidengantheSendaiFrameworkforDisasterRiskReduction2015-2030.													
11.b.2*	Dokumenstrategi penguranganrisiko bencana(PRB)tingkat daerah.	Jumlahkegiatankajian teknis,risetdandukung an teknispengembangan strategipenanggulanga n bencanayangdilaksan akan sebanyak18 kegiatan/tahun	Meningkat	BPBD	Ada*	N/A	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SS
TPB	12.MenjaminPolaProduksidanKonsumsiyangBerkelanjutan													
Target TPB	12.4Padatahun2020mencapaipengelolaanbahankimiadansemuajenislimbahyangramahlingkungan,disepanjangsiklushidupnya,sesuaikerangkakerjainternasionalyangdisepakatidansecarasignifikanmengurangipencemaranbahankimiadanlimbahtersebutkeudara,air,dantanahuntukmeminimalka n dampakburukterhadapkesehatanmanusiadanlingkungan.													
12.4.2.(a)	JumlahlimbahB3yang terkeloladanproporsi limbahB3yangdiolah sesuaiperaturan perundangan(sektor industri).	Meningkatnyapengelol aan limbahB3menjadi150j uta tonpadatahun2019(20 15: 100jutaton).	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubunga n	59,86*	0,03	61,68	63,51	65,33	67,15	68,97	70,8	Meningkat	SS
Target TPB	12.5Padatahun2030,secarasubstansialmengurangiproduksilimbahmelaluipencegahan,pengurangan,daurulang,danpenggunaankembali.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
12.5.1.(a)	Jumlahtimbulansampah yangdidaurulang.	Meningkatnyapengelolaan sampahterpadu(reduce, reuse,andrecycle/3R) melaluiberoperasinya115 unitrecyclecenterskalakotadengankapasitas20 tonperharihinggatahun 2019(2015: 1unit).	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	86,06*	0,02	87,99	89,92	91,85	93,77	95,7	97,63	Meningkat	SS
Target TPB	12.6Mendorongperusahaan,terutamaperusahaanbesardantransnasional,untukmengadopsipraktek-praktekberkelanjutandanmengintegrasikaninformasikeberlanjutandalamsikluspelaporanmereka.													
12.6.1.(a)	Jumlahperusahaanyang menerapkansertifikasi SNI ISO14001.	Meningkatnyajumlah perusahaanyang menerapkansertifikasi SNI ISO14001(Sistem Manajemen Lingkungan/SML)hingga tahun2019.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	0*	N/A	0	0	0	0	0	0	TidakAda	SB
Target TPB	12.7Mempromosikanpraktekpengadaanpublikyangberkelanjutan,sesuaidengankebijakandanprioritasnasional.													
12.7.1.(a)	Jumlahprodukramah lingkunganyangteregister.	Dikembangkannyaproduk ramahlingkunganberupa kategori/kriteriaproduk yangteregisterdalam pengadaanpublik(Green PublicProcurement,GPP) hinggatahun2019.	25	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	0*	N/A	0	0	0	0	0	0	-25	SB
Target TPB	12.8Padatahun2030,menjaminbahwamasyarakatdimanapunmemiliki informasiyangrelevandankesadaranterhadappembangunanberkelanjutandangayahidupyangselarasdenganalam.													
12.8.1.(a)	Jumlahsatuanpendidikan formaldan lembaga/komunitas masyarakatpedulidan berbudayalingkungan hidup	Meningkatnyajumlah satuanpendidikanformal danlembaga/komunitas masyarakatpedulidan berbudayalingkungan hidupsebanyak1.080unit	Meningkat	DinasPUPR	85*	0,56	133	180	228	276	323	371	Meningkat	SS
TPB	13.MengambilTindakanCepatuntukMengatasiPerubahanIklimdanDampaknya													
Target TPB	13.1Memperkuatkapasitasketahanandanadaptasiterhadapbahayaterkaitiklimdanbencanaalamdisemuanegara.													
13.1.1*	Jumlahkorbanmeninggal, hilangdanterkenadampak bencanaper100.000 orang.	MenurunnyaIndeksRisiko Bencanamelaluistrategi penguranganrisiko bencanatingkatnasional dandaerahhinggatahun 2019.	0,2	BPBD	0*	-0,44	0	0	0	0	0	0	2	SS

PermendagriNo.7Tahun2018							ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB	Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
13.1.2*	Rencanadanimplementasi strateginasional penanggulanganbencana yangselarasdenganthe SendaiFrameworkfor DisasterRiskReduction 2015–2030	Rencanadanimplementasi strateginasional penanggulanganbencana yangselarasdenganthe SendaiFrameworkfor DisasterRiskReduction 2015–2030	Menurun	BPBD	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana*	N/A	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasiny astrategi penanggulangan bencana	Terimplementasinya strategi penanggulangan bencana	SS
TPB	15.Melindungi,MerestorasidanMeningkatkanPemanfaatanBerkelanjutanEkosistemDaratan,MengelolaHutansecaraLestari,MenghentikanPenggurunan,MemulihkanDegradasiLahan,sertaMenghentikanKehilanganKeanekaragamanHayati													
Target TPB	15.1Padatahun2020,menjaminpelestarian,restorasidanpemanfaatanberkelanjutandariekosistemdaratandanperairandaratsertajasalingkungannya,khususnyaekosistemhutan,lahanbasah,pegunungandanlahankering,sejalandengankewajibanberdasarkanperjanjianinternasional.													
15.1.1.(a)	Proporsitutupanhutan terhadapluaslahan keseluruhan.	Meningkatnyakualitas lingkunganhidupmelalui peningkatantutupan lahan/hutanhinggatahun 2019	45,50%	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	15.3Padatahun2020,menghentikanpenggurunan,memulihkanlahandantanahkritis,termasuklahanyangterkenapenggurunan,kekeringandanbanjir,danberusahamencapaiduniayangbebasdari lahanterdegradasi.													
15.3.1.(a)	Proporsiluaslahankritis yangdirehabilitasi terhadapluaslahan keseluruhan.	Berkurangnyaluasanlahan kritismelaluirehabilitasi seluas5,5jutahektardidalamKesatuan PemangkuanHutan(KPH) danDaerahAliranSungai (DAS)Prioritashinggatahun2019(2015: 1,25juta hektar).	16%	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	15.6Meningkatkanpembagiankeuntunganyangadildanmeratadaripemanfaatansumberdayagenetik,danmeningkatkanaksesyangtepatterhadapsumberdayatersebut,sesuaikesepakataninternasional.													
15.6.1*	Tersedianyakerangka legislasi,administrasidan kebijakanuntuk memastikanpembagian keuntunganyangadildan merata.	Ada	Ada	Bidang Pemerintahan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	15.9Padatahun2020,mengintegrasikannilai-nilaiekosistemdankeanekaragamanhayatikedalamperencanaannasionaldandaerah,prosespembangunan,strategidanpenganggaranpengurangankemiskinan.													
15.9.1.(a)	Dokumenrencana pemanfaatan keanekaragamanhayati.	Meningkatnyapemanfaatan keanekaragamanhayati untukmendukung pertumbuhanekonomi, dayasaingnasionaldan kesejahteraanmasyarakat hinggatahun2019.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidupdan Perhubungan	0	N/A	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	Tidakadadokumen	SB

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
PILARHUKUMDANTATAKELOLA														
TPB	16.MenguatkanMasyarakatyangInklusifdanDamaiuntukPembangunanBerkelanjutan,MenyediaanAksesKeadilanuntukSemua,danMembangunKelembagaanyangEfektif,Akuntabel,danInklusifdiSemuaTingkatan													
Target TPB	16.1Secarasignifikanmengurangisegalabentukkekerasandanterkaitangkakematiandimanapun.													
16.1.1.(a)	Jumlahkasuskejahatan pembunuhanpadasatu tahunterakhir.	Menurun	Menurun	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	1*	0,21	1	1	1	1	1	2	Meningkat	SB
16.1.2.(a)	Kematiandisebabkan konflikper100.000 penduduk.	Menurun	Menurun	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	0*	0,09	0	0	0	0	0	0	Menurun	SS
16.1.3.(a)	Proporsipendudukyang menjadikorbankejahatan kekerasandalam12bulan terakhir.	Menurun	Menurun	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	10*	-0,11	9	8	7	5	4	3	Menurun	SS
16.1.4*	Proporsipendudukyang merasaamanberjalan sendiriandiareatempat tinggalnya.	Meningkatnyaupaya keberlanjutan pembangunansosialyang ditandaidengan terkendalinyakekerasan terhadapanak, perkelahian,Kekerasan DalamRumahTangga (KDRT),danmeningkatnya keamananyangtercermin dalamrendahnyakonflik horizontaldanrendahnya tingkatkriminalitas.	60%	Kantor Kesatuan Bangsadan Politik	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	SS
Target TPB	16.2Menghentikanperlakuankejam,eksploitasi,perdagangan,dansegalabentukkekerasandanpenyiksaanterhadapanak.													
16.2.1.(a)	Proporsirumahtangga yangmemilikianakumur1-17tahunyangmengalami hukumanfisikdan/atau agresipsikologisdari pengasuhdalamsetahun terakhir.	Menurun	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00%	-0,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Menurun	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
16.2.1.(b)	Prevalensikekerasan terhadapanaklaki-lakidan anakperempuan.	Menurunnyaprevalensi kekerasan terhadapanakpadatahun 2019(2013:38,62%untuk anaklaki-lakidan20,48% untukanakperempuan).	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,04%*	0,32	0,05%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,12%	Meningkat	SB
16.2.3.(a)	Proporsiperempuandan laki-lakimudaumur18-24 tahunyangmengalami kekerasanseksualsebelum umur18tahun.	Menurun	Menurun	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	16.5Secarasubstansialmengurangikorupsidanpenyuapandalamsegalabentuknya.													
16.5.1.(a)	IndeksPerilakuAnti Korupsi(IPAK).	MeningkatnyaIndeks PerilakuAntiKorupsi (IPAK)menjadi4,0pada tahun2019(2015:3,6).	4,5	Inspektorat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	16.6Mengembangkanlembagayangefektif,akuntabel,dantransparandisemuatingkat.													
16.6.1*	Proporsipengeluaran utamapemerintah terhadapanggaranyang disetujui.	Meningkat	Meningkat	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	100%*	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	SS
16.6.1.(a)	PersentasepeningkatanOpiniWajarTanpa Pengecualian(WTP)atas LaporanKeuangan Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) .	Meningkatnyapersentase opiniWajarTanpa Pengecualian(WTP)atas laporankeuanganpada tahun2019untuk Kementerian/Lembaga: 95%,Provinsi:85%, Kabupaten:60%,Kota: 65% (2015untukK/L:74%, Provinsi:52%,Kabupaten: 30%,Kota:41%).	StatusWTP	Inspektorat	WTP*	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SS

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
16.6.1.(b)	Persentasepeningkatan SistemAkuntabilitas KinerjaPemerintah(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnyapersentase SkorBatasSistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah (SAKIP)untuk Kementerian/Lembaga: 85%,Provinsi:75%, Kabupaten/Kota:50% padatahun2019(2015: K/L:60,24%,Provinsi: 30,30%,Kabupaten/Kota: 2,38%).	85% Kementerian/Lembaga 75%Provinsi	Bidang Pemerintahan SETDA	80,98%*	0,05	85,09%	89,19%	93,30%	97,41%	100%	100%	50	SS
			50%Kabupaten/Kota											
16.6.1.(c)	Persentasepenggunaan E-procurementterhadap belanjapengadaan.	Meningkatnyapenggunaan E-procurementterhadap belanjapengadaanmenjadi 80%padatahun2019 (2013:30%).	80	Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
16.6.1.(d)	Persentaseinstansi pemerintahyangmemiliki nilai IndeksReformasi BirokrasiBaik Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnyapersentase instansipemerintahyang memilikinilai Indeks ReformasiBirokrasiBaik untuk Kementerian/Lembaga menjadi75%,Provinsi: 60%,Kabupaten/Kota: 45%padatahun2019 (2015:untukK/L:47%, Provinsi:NA, Kabupaten/Kota:NA).	Meningkat	Bidang Administrasi UmumSETDA	100%*	0,08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	SS
16.6.2.(a)	PersentaseKepatuhan pelaksanaanUUPelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnyapersentase Kepatuhanpelaksanaan UU PelayananPublikuntuk Kementerian:100%, Lembaga:100%,Provinsi: 100%,Kabupaten/Kota: 80%padatahun2019.	Meningkat	Bidang Pemerintahan SETDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	16.7Menjaminpengambilankeputusanyangresponsif, inklusif,partisipatifdanrepresentatifdisetiaptingkatan.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
16.7.1.(a)	Persentaseketerwakilan perempuandiDewan PerwakilanRakyat(DPR) danDewanPerwakilan RakyatDaerah(DPRD).	Meningkatnyaketerwakilan perempuandiDPRdan DPRD(HasilPemilu2014 untukDPR:16,6%).	22,52%DPRRI 20%DPRDProv 17%DPRDKab/Kota	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	20%*	0	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,00%	SS
16.7.1.(b)	Persentaseketerwakilan perempuansebagai pengambilankeputusandi lembagaeksekutif[EselonI danII).	Meningkatnyaketerwakilan perempuansebagai pengambilkeputusandi lembagaeksekutif[EselonI danII](2014:EselonI=20,66%danEselonII=16,39%).	Meningkat	DinasSosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25,38%*	-0,13	22,13%	18,88%	15,63%	12,38%	9,13%	5,88%	Menurun	SB
Target TPB	16.9Padatahun2030,memberikanidentitasyangsyahbagisemua,termasukpencatatankelahiran.													
16.9.1*	Proporsianakumurdibawah5tahunyang kelahirannyadicatatoleh lembagapencatatansipil, menurutumur.	Meningkatnyaproporsianakumurdibawah5 tahunyangkelahirannya dicatatolehlembaga pencatatansipilmenjadi 100%(2020:77,20%)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%*	0,03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	SS
16.9.1.(a)	Persentasekepemilikan aktalahiruntukpenduduk 40%berpendapatan bawah.	Meningkatnyapersentase kepemilikanaktakelahiran pendudukusia0-17tahun menjadi100%(2020:88,11%)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,99%*	0,1	73,98%	80,97%	87,96%	94,95%	100%	100%	0,00%	SS
16.9.1.(b)	Persentaseanakyang memilikiaktakelahiran.	Meningkatnyapersentase anakyangmemilikiaktekelahiranmenjadi85% padatahun2019(2015:75%).	85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%*	0,07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15,00%	SS
Target TPB	16.10Menjaminaksespublikterhadapinformasidanmelindungikebebasanmendasar,sesuaidenganperaturannasionaldankesepakataninternasional.													

PermendagriNo.7Tahun2018		Parameter	Target Indikator TPB 2030	OPD	Baseline	Rate	ProyeksiCapaianTPB						AnalisisGAP&Capaian 2030	
No. IndikatorTPB	IndikatorTPB						2025	2026	2027	2028	2029	2030	GAP	Status Capaian
16.10.2.(c)	JumlahkepemilikansertifikatPejabatPengelola InformasidanDokumentasi (PPID)untukmengukurkualitasPPIDdalam menjalankantugasdan fungsisebagaimanadiatur dalamperaturan perundang-undangan.	Meningkatnyakualitas PejabatPengelola InformasidanDokumentasi (PPID)dalammenjalankan tugasdanfungsi sebagaimanadiaturdalam peraturanperundang-undanganyangditandai denganadanyasertifikasi PPID.	Meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/ A
Target TPB	16.bMenggalakkandanmenegakkanundang-undangdankebijakanyangtidakdiskriminatifuntukpembangunanberkelanjutan.													
16.b.1.(a)	Jumlahkebijakanyang diskriminatifdalam12bulan laluberdasarkan pelarangandiskriminasi menuruthukumHAM Internasional.	Terbitnyasurat rekomendasiharmonisasi kebijakandan/atau peraturanperundang-undanganuntuk perlindungandan pemajuanhakperempuan denganperspektifkorban sebanyak40rekomendasi padatahun2024(202:20 rekomendasi)	Meningkat	Bidang Pemerintahan SETDA	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	N/A	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	tidakadakebijakan yangdiskriminatif*	SS

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029

E. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

Dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama ini memiliki berbagai permasalahan yang cukup beragam, baik permasalahan series (terus mengiringi) maupun permasalahan baru yang muncul berdasarkan kondisi global. Permasalahan tersebut akan membentuk suatu rumusan-rumusan yang jika diintegrasikan dengan kajian dan analisis isu-isu strategis pembangunan akan memberikan sebuah antisipasi dan jalan keluar permasalahan selama ini.

Tabel 2. 62 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD HST
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sumber Daya Manusia Produktif Melimpah	Kualitas dan daya saing SDM rendah				Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Masih Rendah	Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Sehat Berbasis IPTEK dan IMTAQ
Kearifan lokal dan nilai budaya religius yang kuat	Tergerusnya nilai sosial budaya lokal					Belum Optimalnya Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis
Sektor pertanian dan SDA unggulan	Ketergantungan pada sektor primer, pengolahan minim		Dunia semakin proteksionis. Meningkatnya proteksionisme mendorong ketidakpastian terhadap perdagangan global	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi Potensial dan Pengentasan Kemiskinan
Sumber daya alam yang melimpah dan lingkungan yang masih terjaga	Potensi Kerusakan lingkungan dan konversi lahan		Emisi GRK meningkat, target net zeroemission	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zeroemission	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal	Terjadinya Perubahan Iklim, Peningkatan Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan
Letak strategis dan jaringan antarwilayah potensial	Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas				Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian, serta Konektivitas yang Masih Terbatas	Belum Optimalnya Pemerataan Infrastruktur
Kondisi Pemerintahan Daerah yang Harmonis dan Sinergis	Pelayanan publik dan birokrasi belum efektif			Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang belum optimal	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu

strategis pembangunan baik isu global, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis Provinsi, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

1). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Saat ini, sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya. Sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki ijazah SD atau sederajat bahkan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah utamanya bidang terkait perlu memfokuskan terhadap isu ketenagakerjaan ini agar kedepannya kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Adapun aspek peningkatan SDM memerlukan prasyarat antara lain :

- Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan tata kelola kependudukan yang lebih baik.
- Adanya perlindungan sosial yang memadai khususnya bagi penduduk yang rentan goncangan.
- Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta sanitasi dan air minum.
- Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
- Peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja.

2). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi strategis untuk terus ditingkatkan. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau.Tentunya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.Perekonomian masyarakat di Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan kecil, perdagangan, dan jasa.

3). Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan

memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Pembangunan pada dasarnya adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kemajuan suatu wilayah biasanya diukur dari berkembangtidaknya suatu wilayah.Wilayah akan semakin maju dan berkembang apabila didukung dengan semakin lengkap dan baiknya kondisiinfrastruktur wilayah yang ada, baik infrastruktur pelayanan dasar maupun penunjang.

4). Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih mempunyai kawasan hutan hujan tropis yang terjaga kelestariannya dengan baik.Sebagai satu-satunya kawasan yang masih lestari di Provinsi Kalimantan Selatan, maka hal tersebut harus dipertahankan kelestarian. Selain itu setiap pembangunan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai.

Lingkungan hidup yang baik juga akan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Selama ini Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu mengalami bencana khususnya bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi resiko bencana, maka perlu peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Adanya kejadian bencana pandemic covid 19 sejak awal tahun 2020, telah berdampak pada munculnya kebiasaan-

kebiasaan baru (new normal) perilaku masyarakat yang sebelumnya hampir tidak ada, tidak berkembang, sekarang menjadi berkembang dengan pesat seperti pembelajaran secara daring, berkembangnya perdagangan online, sepinya perdagangan konvensional, pertemuan-pertemuan, webinar dan lain-lain.Teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan baru bagi seluruh masyarakat dengan tumbuhnya berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.Semua dampak dan timbulnya kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku baru masyarakat yang berkembang dengan pesat harus diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat agar pembangunan tidak menjadi ketinggalan.

5). Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan /Pelayanan Umum

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah, perlu adanya perwujudan good governance dengan prinsip dasarnya yaitu akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan

penegakan hokum, pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar capaian kinerja lebih optimal.

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani merupakan aspek-aspek permasalahan layanan publik yang banyak disoroti. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang baik akan meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat / publik.

6). Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Budaya

Peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi strategis untuk terus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan yang tinggi sehingga mengganggu proses pembangunan.Kemiskinan menjadi penting untuk terus ditanggulangi.Kualitas keluarga dan mayarakat serta pengarusutamaan gender juga harus terus ditingkatkan agar

masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin berdaya dan meningkat partisipasinya dalam pembangunan.

Suasana masyarakat yang kondusif dan harmonis merupakan prasyarat mutlak untuk berjalannya pembangunan.Dengan demikian menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan. Terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan pandangan keagamaan maupun perbedaan sosial dan golongan akan menghambat pembangunan.

Keharmonisan kehidupan masyarakat yang tercipta akan mampu menjadikan masyarakat menjadi lebih dinamis sehingga dapat mengakselerasi pembangunan.Kehidupan masyarakat yang terjaga dengan suasana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga dan terkendali mampu meningkatkan dinamisasi kehidupan masyarakat.

7). Peningkatan produktivitas daerah

Peningkatan produktivitas daerah juga sangat strategis untuk dilakukan agar mampu bersaing pada tingkat regional, nasional maupun global.Produktivitas daerah yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan kesejahteraan.Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan barang dan jasa akan dapat meningkatkan daya saing.Peningkatan produktivitas daerah ini didorong dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan investasi, kewirausahaan, peningkatan ekosistem inovasi pada sektor-sektor unggulan/utama daerah, penerapan ekonomi hijau dan penggunaan energi ramah lingkungan, perkuatan infrastruktur yang berkelanjutan, percepatan transpormasi digital, hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kawasan perekonomian yang

berdaya saing dengan memperhatikan potensi lokal, keadilan dan inklusivitas.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah pernyataan yang berisi cita-cita, aspirasi, dan tujuan suatu organisasi atau lembaga dalam jangka waktu tertentu. Visi RPJMD merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan dengan memerhatikan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat, serta arti penting *paradigma* pembangunan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Visi Daerah yang dituangkan sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi yang diusung oleh pasangan kepala daerah yang terpilih. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selanjutnya dijabarkan sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa bhakti jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian

pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2024, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menanamkan nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan yang merata, serta menjunjung tinggi martabat daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini juga diharapkan mampu menjadi landasan utama dalam mempersiapkan Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik yang kokoh di masa depan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang menjadi pilar pembangunan:

1. **Religius** menggambarkan Pemerintahan yang jujur, adil, bermanfaat dan disiplin serta Masyarakat yang aman dan tenteram dengan berlandaskan Agama. Religius menggambarkan bahwa dalam aspek hidup bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan nilai-nilai moral, etika dan agama menjadi pedoman dan landasan dalam menciptakan harmoni sosial, memperkuat solidaritas, kerjasama dan kolaborasi, tidak diskriminatif yang menciptakan konflik bernuansa SARA. Religius juga digambarkan dengan terjadinya peningkatan praktik-praktik dan tingkat pemahaman keagamaan baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek kehidupan bermasyarakat ditandai dengan semakin makmurnya kegiatan keagamaan di masyarakat ataupun berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga akan terlihatnya nuansa keagamaan di segala lini aktifitas masyarakat. Pada kehidupan ekonomi ditandai dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syariah, peningkatan perdagangan produk halal serta penguatan potensi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan terjadinya peningkatan karakter pemerintahan yang berakhlak, budaya kerja yang berbasis religius. Nilai-nilai kejujuran, keadilan dan disiplin serta berorientasi kebermanfaatan bagi masyarakat menjiwai setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator elemen visi ini adalah angka konflik yang bernuansa SARA, semakin efektifnya pengendalian korupsi, dan angka kriminalitas.

2. **Sejahtera** menggambarkan kehidupan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Tingkat kemiskinan yang rendah. Pembangunan yang dapat mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman. Pembangunan yang dilakukan berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan, hak, dan kepentingan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Sejahtera juga mengacu pada pembangunan yang menghormati martabat, kebebasan, dan keadilan sosial bagi semua orang, serta mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Sejahtera adalah kondisi dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan pendapatan masyarakat. Indikator pencapaian pokok visi Sejahtera adalah PDRB Per Kapita, ketimpangan pendapatan yang rendah dan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2029. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan bertumpu pada pengembangan kegiatan ekonomi sektor jasa dan logistik, meliputi distribusi logistik, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya, pusat produksi hasil-hasil pertanian, penyimpanan/transit barang, distribusi dan transportasi, pengelola informasi, dan penyedia barang dari hilirisasi industri sumber daya lokal.

3. **Bermartabat** menggambarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, berdaya saing serta unggul dalam aspek kualitas Sumber Daya Manusia, Perkekonomian, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dibandingkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

4. **Maju** adalah kondisi dimana selalu terjadi peningkatan, perkembangan atau bergerak dinamis ke arah yang lebih baik baik, lebih tinggi, lebih sejahtera, lebih unggul. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah

yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh dan inovatif. Hal ini ditandai dengan perekonomian yang selalu tumbuh positif, PDRB daerah yang semakin besar dan kuat serta berkelanjutan.

5. **Berdaya saing dan unggul** adalah suatu kondisi yang lebih baik, lebih kuat, cakap dari yang lain-lain. Suatu kondisi yang menunjukkan kelebihan atau kemenangan atas yang lain. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menciptakan suatu kondisi daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari daerah sekitar yang ditandai dengan meningkatknya daya saing sumberdaya manusia, sarana Infrastruktur wilayah dan pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Unggul juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi lokal serta memperluas kerjasama-kerjasama baik regional, nasional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dan indikator IPM, dengan sarana prasarana wilayah yang mampu mendorong perwujudan perkuatan pondasi sebagai pusat kegiatan jasa dan logistik wilayah sekitarnya khususnya klaster banua anam, pelayanan umum yang tinggi serta terjalinnya kerjasama-kerjasama nasional dan internasional.

Perwujudan visi RPJMD tahun 2025-2029 ini tercermin dari sasaran-sasaran makro pembangunan yaitu :

a. Meningkatnya PDRB per kapita
b. Menurunnya kemiskinan dan terjaganya ketimpangan
c. Meningkatnya daya saing daerah
d. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia
e. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2045 adalah bahwa RPJMD periode ini merupakan pelaksanaan dari tahapan I RPJPD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029 merupakan tahap ke-I (pertama) dari 4 tahapan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pencapaian visi daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam tahapan dan prioritas pembangunan yang didasarkan kepada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 (tahap I RPJMD) adalah " PENGUATAN FONDASI", maka perwujudan visi RPJMD Tahun 2025 - 2029 adalah dalam rangka perwujudan penguatan fondasi untuk ketercapaian visi daerah jangka panjang.

Tabel 3. 1 Persandingan Visi RPJPD dengan RPJMD

	VISI
RPJPD Kab. HST Tahun 2025-2045	"Hulu Sungai Tengah Pusat Jasa dan Logistik Yang Sejahtera, Unggul, Maju dan Berkelanjutan"
RPJMD Kab. HST Tahun 2025-2029	"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera Dan Bermartabat "

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

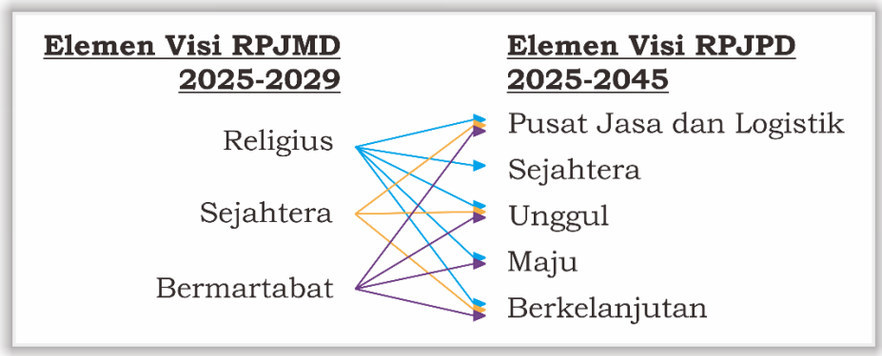
Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam RPJPD 2025-2045 adalah "Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pusat Jasa dan Logistik yang Sejahtera, Unggul, Maju, dan Berkelanjutan". Visi ini mencerminkan arah pembangunan daerah yang bertumpu pada penguatan peran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kemajuan di berbagai sektor, serta keberlanjutan pembangunan.

Sebagai tahapan awal dalam mewujudkan visi jangka panjang tersebut, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029 mengusung visi **"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang Religius,**

Sejahtera, dan Bermartabat". Visi ini menekankan pentingnya nilai-nilai religiusitas, kesejahteraan, dan martabat masyarakat sebagai dasar dalam membangun penguatan fondasi ekosistem yang mendukung peran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik. Perwujudan visi RPJMD adalah dalam rangka mendukung dari perwujudan penguatan fondasi visi RPJPD.

Keterkaitan elemen visi pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2025-2029 dengan elemen visi daerah tahun 2025 - 2045 seperti terlihat dari diagram dibawah ini :

Gambar 3. 1 Persandingan Elemen
Visi RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Elemen religius berupa nilai-nilai religius akan menjadi sumber pengambilan kebijakan dalam perwujudan penguatan fondasi sebagai pusat jasa dan logistik. Nilai-nilai religius juga menjadi sumber pijakan dalam rangka perwujudan dari peningkatan kesejahteraan, keunggulan, kemajuan dan keberlanjutan. Elemen Sejahtera menggambarkan upaya bahwa Kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai akan diselaraskan dengan sumber kesejahteraan yang menitik beratkan pada potensi ekonomi lokal dan keberlanjutannya untuk penguatan fondasi pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik. Elemen Bermartabat menggambarkan upaya untuk meraih keunggulan dan kemajuan yang berkelanjutan dengan titik berat pada penguatan fondasi sebagai pusat jasa dan logistik.

Keterkaitan antara visi pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 - 2029 dengan visi RPJMN tahun 2025 - 2029 dan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029, adalah sebagai berikut :

Bahwa visi RPJMD 2025-2029 harus mempertimbangkan keselarasan dan kesinambungan dengan visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke depan akan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta berorientasi pada pencapaian target jangka panjang yang telah ditetapkan.

Gambar 3. 2 Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Diolah dari dokumen RPJMN 2025-2029, RPJMD Prov. Kalsel 2025-2029, dan data Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Dari persandingan tersebut secara substansi ada kesamaan antara visi nasional, provinsi dengan visi kabupaten. Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dalam rangka mendukung pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan Visi Pembangunan Nasional. Indonesia maju. Dari penjelasan aspek sejahtera pada visi kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosial, maka elemen ini bagian dari upaya mendukung elemen maju pada visi nasional. Aspek bermartabat pada elemen visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menggambarkan makna Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, berdaya saing serta unggul dalam aspek kualitas Sumber Daya Manusia, Perkekonomian, Infrastruktur, Pelayanan Publik

dan Tata Kelola Pemerintahan dibandingkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Elemen bermartabat juga mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh dan inovatif yang selaras dengan elemen maju pada visi nasional.

Perwujudan visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dalam rangka perwujudan dari visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Elemen religius dan sejahtera pada visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah selaras dengan elemen visi religi dan sejahtera pada visi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada elemen sejahtera pada penjelasan elemen visi kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menggambarkan bahwa kesejahteraan yang akan dicapai adalah upaya yang bertumpu pada pengembangan kegiatan ekonomi sektor jasa dan logistik, meliputi distribusi logistik, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya, pusat produksi hasil-hasil pertanian, penyimpanan/transit barang, distribusi dan transportasi, pengelola informasi, dan penyedia barang dari hilirisasi industri sumber daya lokal yang didukung oleh posisi strategis kabupaten dalam jaringan transportasi dan distribusi. Arah peningkatan kesejahteraan yang diupayakan tersebut adalah dalam upaya mendukung Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Peran Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dalam hal penyediaan / produksi logistik khususnya produksi hasil-hasil pertanian, rantai pasok dan distribusi logistik melalui penyediaan jaringan transportasi dan sub distribusi dengan kedudukan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang strategis dalam jaringan transpotasi dan distribusi barang dan jasa atau logistik.

Misi merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah untuk menjaga komitmen dan konsistensi kinerja yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

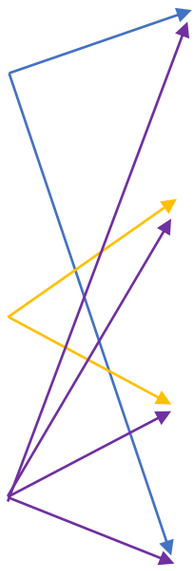
Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2) Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan
3) Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4) Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Keterkaitan antara Misi yang ditetapkan dengan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

Kata Kunci Visi	MISI
RELIGIUS	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya.
SEJAHTERA	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan pri nsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan.
BERMARTABAT	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
	Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.



Elemen **religius** diimplementasikan melalui misi 1 yaitu mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya dan misi 4 yaitu mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional. Elemen religius diimplementasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Elemen **sejahtera** diimplementasikan melalui misi 2 yaitu mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan dan misi 3 yaitu Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat. Elemen sejahtera diwujudkan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan sektor potensial ekonomi dengan prinsip ekonomi yang berkesinambungan yang didukung dengan peningkatan

penyediaan infrastruktur yang semakin merata meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur publik dan infrastruktur ekonomi.

Elemen **bermartabat** diimplementasikan melalui ke-4 (empat) misi yang dijalankan. Peningkatan SDM dan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya, Pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang semakin meningkat kualitasnya dan semakin merata serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang tanggap, santun dan profesional akan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih berdaya saing dan unggul dibandingkan daerah-daerah lain.

Penjelasan dari misi-misi tersebut adalah :

a. MISI PERTAMA : **Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**

Misi ini mencakup upaya mewujudkan transformasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing secara regional maupun nasional. Pembangunan sumberdaya manusia juga diintegrasikan dengan trisula pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas SDM berupa dukungan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis (MBG), pembentukan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain.

Pada misi ini juga mencakup upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara sosial dengan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya. Pembangunan yang dilakukan dapat menyeimbangkan hubungan sosial dan budaya dan partisipasi dalam pembangunan. Melalui misi ini terjadi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengembangan dan penguatan Kebudayaan lokal, Menjaga kerukunan umat beragama, peningkatan

pelaksanaan demokrasi dan kesetaraan gender. Perubahan sosial masyarakat juga dilakukan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin dan terjaganya ketimpangan sosial.

b. MISI KEDUA : **Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan**

Misi ini mencakup upaya melakukan perubahan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal yang produktif seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dan bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan jasa produk unggulan daerah. Pengembangan perekonomian daerah selain memperhatikan baseline ekonomi yang sudah berkembang di masyarakat, tetapi perlu juga memperhatikan pengembangan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masyarakat. Pengembangan sektor ekonomi primer, skunder dan tersier harus berjalan secara sinergi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan ekonomi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi regional, nasional dan global serta tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Disamping itu perubahan perekonomian juga diarahkan dengan upaya meningkatkan produktivitas daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan inovasi, penggunaan iptek dan transformasi digital, mengembangkan kewirausahaan dan badan-badan usaha di desa serta upaya mengembangkan BUMD untuk berperan sebagai lokomotif ekonomi dan investasi di daerah. Perubahan perekonomian daerah juga diupayakan melalui dukungan pelaksanaan program prioritas

nasional seperti memanfaatkan efek dari pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis (MBG), pembentukan koperasi merah putih (KDP) dan program ekonomi syariah, ekonomi hijau dan lain-lain. dampakPerubahan perekonomian daerah diarahkan untuk berdampak pada meningkatnya kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana pembangunan. Pengembangan produktivitas daerah juga diwujudkan dengan mengembangkan ekonomi daerah yang dapat melayani kawasan regional dengan didukung infrastruktur ekonomi skala regional khususnya klaster pertumbuhan banua anam dan berperan aktif dalam distribusi barang jasa di Prov. Kalsel dan mendukung ibu kota nusantara.

Kesinambungan pembangunan diarahkan dengan upaya menjaga stabilitas daerah dengan meningkatkan kolaborasi dari semua unsur yang ada di daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan kantrantibum.

c. MISI KETIGA : **Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.**

Misi ini mencakup upaya pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kualitas, pemerataan dan keadilan pembangunan serta keberlanjutan. Misi ini mencakup peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, ekonomi dan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan baik skala domestik maupun regional yang mampu mendukung Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik.

Prinsip keberlanjutan pada misi ini mencakup upaya memperkuat ketangguhan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Melalui misi ini juga peningkatan infrastruktur dan ketangguhan lingkungan akan menghasilkan ketahanan bencana sebagai modal untuk tahan

menghadapi berbagai bencana, perubahan iklim dan guncangan lingkungan. Ketangguhan lingkungan juga menggambarkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpartisipasi optimal dalam pembangunan. Ketangguhan lingkungan dan ketahanan bencana diwujudkan melalui peningkatan pengelolaan dan kualitas lingkungan, pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta mengurangi risiko dan mitigasi bencana.

d. MISI KEEMPAT : **Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.**

Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola yang profesional diwujudkan dengan membentuk tata kelola birokrasi yang efisein dan efektif, membangun regulasi dan tata kelola yang ber “akhlak”, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Tata kelola pemerintahan juga dilakukan dalam upaya melanjutkan proses reformasi birokrasi dengan membentuk birokrasi yang profesional dengan nilai-nilai religius, berkinerja tinggi, inovatif, berintegritas patuh dan taat pada peraturan peundangan dan pemerintahan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Misi ini sudah menjawab isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti yang tercantum dalam Bab II yaitu :

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
c. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan / pelayanan umum
f. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kehidupan budaya
g. Peningkatan produktivitas daerah

Keterkaitan antara misi dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 3 Keterkaitan antara misi RPJMD dengan isu strategis pembangunan



Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 dengan misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Persandingan Misi RPJPD dengan RPJMD

Misi RPJPD		MISI RPJMD	
1.	Mewujudkan transformasi sosial masyarakat	1.	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2.	Mewujudkan transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif	2.	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	4.	Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional
4.	Memperkuat Kolaborasi Stabilitas Daerah	2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
5.	Memperkuat Ketahanan Ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat	3	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.

Misi RPJPD		MISI RPJMD	
		1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
6	Meningkatkan Daya Saing Daerah	1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
		2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
7	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	3	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
8.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
		4	Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional

Sumber : Diolah dari dokumen RPJPD 2025-2045 Kab. Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan penyandingan antara Misi RPJPD 2025-2045 dan Misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlihat adanya kesinambungan dan keterkaitan dalam arah pembangunan jangka panjang dan menengah. Secara keseluruhan, Misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kesinambungan dengan Misi RPJPD 2025-2045. Misi RPJMD menjadi bagian dari upaya pencapaian misi jangka panjang dengan mengutamakan langkah-langkah yang lebih operasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam periode lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari upaya memastikan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan, penyelarasan misi tidak hanya dilakukan pada tingkat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah tetapi juga dengan dokumen perencanaan jangka menengan tingkat nasional dan provinsi. Hal ini bertujuan agar arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN serta kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMD provinsi.

Penyandingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa misi pembangunan daerah selaras dengan misi pembangunan nasional

dan provinsi serta mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode yang sama.Tabel berikut menyajikan persandingan antara misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3. 4 Persandingan Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Misi RPJMN (ASTA CITA)		MISI RPJMD KAB. HST	
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	2.	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2.	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim.	3.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
		2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.	2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
		2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3	Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesionalperekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama.	1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya
		3	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam

Misi RPJMN (ASTA CITA)		MISI RPJMD KAB. HST	
			mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.

Dari penyandingan antara misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Asta Cita RPJMN, maka misi RPJMD sudah selaras dan pencapaiannya akan mendukung pencapaian Asta Cita.

Tabel 3. 5 Persandingan Misi RPJMD Prov Kalimantan Selatan dan RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah

MISI RPJMD PROV. KALSEL		MISI RPJMD KAB. HST	
1.	Memperkuat pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.	1.	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2.	Memantapkan pembangunan infrastruktur yang handal.	3.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
3.	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah.	2.	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan
4.	Memperkuat Ketahanan terhadap perubahan iklim	3	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
5.	Memantapkan tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat	4	Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional

Dari penyandingan antara misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, maka misi masing-masing RPJMD sudah selaras dan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikut berkontribusi dan mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk periode mendatang. Visi dan misi pembangunan harus dijabarkan ke dalam suatu formulasi kebijakan hingga pada akhirnya menjadi suatu rumusan program dan kegiatan. Terkait hal tersebut, untuk menjembatani antara visi, misi, dan pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskanlah tujuan serta sasaran pembangunan guna efektivitas dan efisiensi serta terkendalinya pelaksanaan pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan lebih mudah dilakukan untuk

ketepatan sasaran dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan. Tujuan yang telah ditetapkan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu gambaran kondisi atau hasil yang akan dicapai dari tujuan secara nyata oleh daerah pada akhir periode rencana pembangunan menengah. Masing-masing tujuan dalam rumusan sasaran direncanakan lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja beserta targetnya.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

1) Untuk mencapai **Misi 1: Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya,** maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya.

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

a. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing,** dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Indeks Kesehatan

- Usia Harapan Hidup
- Indeks Pendidikan
- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
- Indeks SPM Pendidikan

b. **Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan**, dengan indkator pengukuran ketercapaian adalah :

- Indeks Kedalaman Kemiskinan
- Indeks Keparahan Kemiskinan
- Indeks Gini
- Tingkat Pengangguran Terbuka

c. **Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya,** dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- Angka Kejadian Kasus Konflik Bernuansa SARA
- Indeks Pembangunan Kebudayaan

2) Untuk mencapai **Misi 2: Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan,** maka ditetapkan tujuan pembangunan adalah :

Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan.

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan ini adalah PDRB Per Kapita dan Indeks Daya Saing Daerah serta Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial**, dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian
- Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
- Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
- Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman
- Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa
- Nilai Investasi

b. **Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah,** dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Rasio Kewirausahaan Daerah
- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
- Nilai ekspor
- Tingkat Inflasi

3) Untuk mencapai **Misi 3: Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Wilayah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta Indeks Risiko Bencana.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. **Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,** dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Indeks Infrastruktur

b. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**, dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- Indeks Ketahanan Daerah

4) Untuk mencapai **Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak".

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. **Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan**, dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Nilai SAKIP
- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
- Opini BPK

b. **Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan**, dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Indeks Pelayanan Publik
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan / Indeks Pemerintahan Digital

c. **Meningkatnya integritas pemerintahan daerah**, dengan indikator pengukuran ketercapaian adalah :

- Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Indeks Manajemen Risiko (MRI)
- Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 serta target indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT - Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya - Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan - Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat - Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,80	74,33	74,82	75,31	75,80	76,29
			Tingkat Kemiskinan ((%))	5,43	5,26	4,88	4,50	4,12	372
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Indeks Kesehatan (*)	88,12	88,57	89,02	89,47	89,92	90,37
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	72,87	73,14	73,41	73,68	73,95	74,22
			Indeks Pendidikan (*)	62,30	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,36	12,40	12,45	12,50	12,55	12,60
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,39	8,43	8,47	8,51	8,55	8,60
			Indeks SPM Pendidikan (Indeks)	86,64	87,41	88,18	88,95	89,72	90,50
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini (Indeks)	0,216	0,213	0,210	0,207	0,204	0,200
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	0,695	0,645	0,595	0,545	0,495	0,445
			Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)	0,137	0,133	0,129	0,125	0,121	0,117
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04	3,00	2,93	2,87	2,80	2,73
		Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	64,01	65,26	67,51	68,76	70,01	71,26
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	56,75	57	57,25	57,5	57,75	60
			Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA (Kali)	0	0	0	0	0	0
	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	35,90	39,36	42,83	46,27	49,75	57,89
			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,70	3,78	3,85	3,90	3,97	4,00

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,20	5,60	6,00	6,50	7,10
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (%)	3,75	3,90	4,20	4,50	4,87	5,31
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Industri Pengolahan (%)	3,49	3,60	4,00	4,40	4,90	5,50
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum (%)	6,86	7,14	7,70	8,27	8,98	9,83
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (%)	4,13	4,35	4,79	5,23	5,78	6,44
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa (%)	6,36	6,49	6,75	7,01	7,34	7,93
			Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	204,5	250,4	300,48	371,88	464,85	600,31
		Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	12,65	12,70	13,00	13,66	14,75	15,08
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	21,50	21,75	22,00	22,25	22,50	22,75
			Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rupiah)	86,39	116,62	151,60	197,08	266,00	345,82
			Nilai Ekspor (triliun rupiah)	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
			Tingkat Inflasi ((%))	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	72,00	73,54	73,70	73,87	74,03	74,20
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	125,00	124,11	123,41	122,71	122,01	120,31
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur (Angka)	62,89	65,75	68,70	71,62	74,39	76,86

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72,00	72,38	75,25	78,13	81,00	81,20
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (*)	71,50	73,00	75,00	77,50	80,50	82,50
			NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD) (Angka)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2
			Opini BPK (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,55	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,5	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	-	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
		Meningkatnya integritas pemerintah daerah	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,164	3,293	3,422	3,551	3,680	3,809
			Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	3,045	3,148	3,252	3,355	3,459	3,562
			Nilai Survei Penilaian Integritas (*)	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00

Tabel 3. 7 Persandingan dan Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan				Sasaran			
Prov. Kalsel		Kab. HST		Prov. Kalsel		Kab. HST	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	• Indeks Modal Manusia • Indeks Pembangunan Manusia • Persentase Penduduk Miskin	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	• Indeks Pembangunan Manusia • Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	• Usia Harapan Hidup • Prevalensi Stunting • Rata-rata Lama Sekolah • Harapan Lama Sekolah • Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	• Indeks Kesehatan • Usia Harapan Hidup • Indeks Pendidikan • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata Lama Sekolah • Indeks SPM Pendidikan
				Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia	• Indeks Kerukunan Umat Beragama • Indeks Pembangunan Kebudayaan • Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	• Indeks Pembangunan Keluarga • Indeks Pembangunan Kebudayaan • Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA
				Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	• Pengeluaran per kapita disesuaikan • Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Menurunnya kemsikinan dan ketimpangan	• Indeks Gini • Indeks Kedalaman Kemiskinan • Indeks keparahan Kemiskinan • Pengangguran Terbuka
Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pemerataan pembangunan	Indeks Infrastruktur	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	• Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Wilayah • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) • Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya mutu layanan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah	• Indeks infrastruktur dasar • Indeks Konektivitas	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	• Indeks infrastruktur
				Terwujudnya pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam bauran energi primer		

Tujuan				Sasaran			
Prov. Kalsel		Kab. HST		Prov. Kalsel		Kab. HST	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Penguatan Fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	• Laju Pertumbuhan Ekonomi • PDRB per kapita	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan.	• PDRB per kapita • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan • Indeks Ekonomi Hijau Daerah • Indeks Ekonomi Biru Indonesia • Laju PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Laju PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan dan Minum	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	• Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian • Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan • Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan • Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman • Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa • Nilai Investasi
				Berkembangnya Investasi dan sistem logistik yang efisien	• Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Persentase ekspor barang dan jasa terhadap PDRB • Persentase pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB • Tingkat Inflasi	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan • Rasio Kewirausahaan daerah • Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja • Nilai Ekspor • Angka Inflasi
Perekonomian daerah yang inklusif	• Indeks Wiliamson • Ratio Gini			Berkembangnya perekonomian syariah	Indeks ekonomi syariah		
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan UMKM	• Tingkat Pengangguran terbuka • Rasio Kewirausahaan	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan • Rasio Kewirausahaan daerah • Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja • Angka Inflasi

Tujuan				Sasaran			
Prov. Kalsel		Kab. HST		Prov. Kalsel		Kab. HST	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
				Meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa	Indeks Desa		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	• Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Wilayah • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Indeks Risiko Bencana	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	• Indeks Kualitas Air • Indeks kualitas udara • Indeks kualitas air laut • Indeks kualitas lahan • Persentase penurunan emisi GRK tahunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	• Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Indeks Ketahanan Daerah
Menurunnya risiko bencana	Indeks risiko bencana	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	• Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Wilayah • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya mitigasi dan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	• Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Indeks Ketahanan Daerah
Penguatan fondasi tata kelola transformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak"	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalisme ASN	• Nilai SAKIP • Opini BPK • Indeks Integritas • Indeks sistem merit • Indeks Manajemen Risiko	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	• Nilai SAKIP • Nilai EKPPD • Opini BPK
						Meningkatnya integritas pemerintah daerah	• Nilai SPIP • Indeks Manajemen Risiko • Nilai SPI
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalitasi pemerintahan	• Indeks Pelayanan Publik • Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital

Keselarasan indikator sasaran visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 dengan dengan indikator tujuan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Tabel Keselarasan antara indikator sasaran visi RPJPD dengan indkator tujuan RPJMD

RPJPD Tahun 2025-2045		RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Sasaran Visi	**Indikator**	**Tujuan**	**Indikator**
Meningkatnya PDRB per kapita	● PDRB per kapita ● Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan.	● PDRB Per Kapita ● Laju Pertumbuhan Ekonomi ● Indeks Daya Saing Daerah
Menurunnya Kemiskinan dan ketimpangan	● Tingkat Kemiskinan ● Rasio Gini (indeks)	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	● Indeks Pembangunan Manusia ● Persentase Penduduk Miskin
Meningkatnya Daya Saing Daerah	● Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan.	● PDRB Per Kapita ● Laju Pertumbuhan Ekonomi ● Indeks Daya Saing Daerah
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	● Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	● Indeks Pembangunan Manusia ● Persentase Penduduk Miskin
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	● Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	● Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Wilayah ● Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ● Indeks Risiko Bencana

Dari tabel keselarasan di atas, maka indikator antara sasaran visi RPJPD dengan indikator tujuan RPJMD sudah selaras dengan adanya kesamaan alat ukur yang digunakan, sehingga keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD akan mendukung keberhasilan pencapaian visi jangka panjang.

Untuk keselarasan indikator sasaran pokok RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 dengan dengan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Tabel Keselarasan antara indikator sasaran pokok RPJPD dengan indkator sasaran RPJMD

RPJPD Tahun 2025-2045		RPJMD Tahun 2025-2029	
Sasaran Pokok	**Indikator**	**Sasaran Pokok**	**Indikator**
Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Inklusif	● Laju Pertumbuhan Ekonomi ● Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB ● PDRB Per Kapita ● Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB ● Produktivitas Koperasi dan UMKM ● Produktivitas BUMD ● Proporsi UMKM non Pertanian ● Tingkat Pengangguran Terbuka ● Indeks Kesejahteraan Petani (NTP, NTN, NTPi)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	● Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian ● Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan ● Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan ● Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman ● Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa ● Nilai Investasi
		Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	● Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ● Rasio Kewirausahaan ● Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ● Nilai Ekspor ● Angka Inflasi
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	● Indeks Gini ● Indeks Kedalaman Kemiskinan ● Indeks Keparahan Kemiskinan ● Tingkat Pengangguran Terbuka
Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan berbudaya masyarakat maju	● Angka Kemiskinan ● Indeks Gini ● Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ● Indeks Pembangunan Kebudayaan ● Indeks Kerukunan Umat Beragama ● Indeks Ketimpangan Gender ● Indeks Demokrasi ● Konsumsi Listrik per kapita ● Kapasitas air baku	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	● Indeks Gini ● Indeks Kedalaman Kemiskinan ● Indeks Keparahan Kemiskinan ● Tingkat Pengangguran Terbuka

RPJPD Tahun 2025-2045		RPJMD Tahun 2025-2029	
Sasaran Pokok	**Indikator**	**Sasaran Pokok**	**Indikator**
	● Persentase akses rumah tangga terhadap terhadap air minum perpipaan ● Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman ● Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	● Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ● Indeks Pembangunan Kebudayaan ● Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA
Meningkatnya kualitas SDM	● Indeks Pembangunan Manusia ● Indeks Pendidikan ● Skor Literasi dan Numerasi ● Rata-rata lama Sekolah ● Harapan Lama Sekolah ● Indeks Kesehatan ● Usia Harapan Hidup ● Angka kematian Ibu ● Angka kematian bayi ● Prevalensi Stunting ● Cakupan kepesertaan JKN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	● Indeks Kesehatan ● Usia Harapan Hidup ● Indeks Pendidikan ● Harapan Lama Sekolah ● Rata-rata Lama Sekolah ● Indeks SPM Pendidikan
Meningkatnya produktivitas daerah	● Indeks Ekonomi Hijau ● Indeks Ketahanan Pangan ● Indeks Daya Saing Daerah ● Rasio Kewirausahaan ● Inflasi ● Rasio pajak daerah terhadap PDRB ● Indeks Literasi Digital Masyarakat ● Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	● Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ● Rasio Kewirausahaan ● Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ● Nilai Ekspor ● Angka Inflasi
Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	● Indeks Infrastruktur ● Persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	● Indeks Infrastruktur
Meningkatnya tata	● Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan	● Indeks Pelayanan Publik

RPJPD Tahun 2025-2045		RPJMD Tahun 2025-2029	
Sasaran Pokok	**Indikator**	**Sasaran Pokok**	**Indikator**
kelola pemerintahan yang baik	● Indeks Reformasi Birokrasi ● Indeks Inovasi daerah ● Indeks SPBE	digitalisasi pemerintahan	● Indeks SPBE / Pemdi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	● Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ● Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	● Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ● Indeks Ketahanan Daerah

Dari tabel keselarasan di atas, maka indikator antara sasaran pokok RPJPD dengan indikator sasaran RPJMD sudah selaras dengan adanya beberapa kesamaan alat ukur yang digunakan, sehingga keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD akan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pokok RPJPD.

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga mencakup program yang mendukung peningkatan layanan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy-focused management), di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value-added) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari satu sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

VISI :
"TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT “

Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**	
MISI 1 **Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**				
Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	1.1	Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
			1.2	Peningkatan kualitas Pendidikan
			1.3.	Penguatan literasi Masyarakat berbasis inklusi sosial
	2	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	2.1	Peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan
	3	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	3.1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
			3.2	Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			3.3	Peningkatan ketahanan keluarga
			3.4	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban
			3.5	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
MISI 2 **Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan**				
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan.	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	1.1	Mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi daerah
			1.2	Peningkatan investasi
	2	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	2.1	Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi
			2.2.	Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dengan penumbuhan inovasi dan pemanfaatannya di daerah
			2.3	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja
			2.4	Mendorong berkembangnya ekonomi syariah
			2.5	Menjaga stabilitas ekonomi
			2.6	Peningkatan peran serta BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah
MISI 3 **Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.**				
Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1.1	Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			1.2	Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah dan perdesaan yang mantap
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	2.1	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana
			2.2	Peningkatan penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan
			2.3	Peingkatan ketahanan iklim
MISI 4 **Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.**				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak"	1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			1.2	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	2.1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
	3	Meningkatnya integritas pemerintah daerah	3.1	Penguatan nilai dan budaya integritas , dan karakter pemerintahan yang religius serta penguatan pengawasan internal.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pedoman dalam mengarahkan program-program agar lebih sistematis dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan strategi beserta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan masing-masing sasaran pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	Perluasan upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.					
2		Penguatan upaya pencegahan dan penanganan stunting.					
3		Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga medis dan kesehatan.					
4		Penguatan mutu layanan kesehatan masyarakat dan lanjutan.					
5		Perkuatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular					
6	Peningkatan kualitas Pendidikan	Peningkatan rata-rata lama sekolah.					
7		Peningkatan mutu pendidikan.					
8		Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas					
9		Peningkatan akses dan fasilitasi pengembangan pendidikan lanjutan dan tinggi serta vokasi di daerah.					
10		Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang adaptif dan modern.					
11		Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum yang relevan, inovatif, berorientasi pada karakter dan kompetensi.					
12		Pengembangan talenta dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi.					
13		Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.					
14		Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas.					
15		Mengembangkan jejaring kerjasama satuan pendidikan regional, nasional dan internasional.					
16	Peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan					
17		Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang adaptif.					
18		Pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial					

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
19		Mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan perlindungan dari kekerasan, perkawinan anak dan perdagangan orang.					
20	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan lingkungan sosial budaya yang kondusif dan berkeadilan untuk terciptanya kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis.					
21		Penanaman harmoni dalam keberagaman sosial budaya.					
22		Mendorong perubahan sosial budaya yang positif.					
23		Mendorong pemakmuran kegiatan keagamaan di masyarakat dan komunitas					
24	Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah	Pengembangan budaya lokal dan non lokal yang positif.					
25	Peningkatan ketahanan keluarga	Mendorong Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.					
26		Mendorong Peningkatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal.					
27	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan	Mendorong Peningkatan pemberdayaan pemuda dan perempuan.					
28		Mendorong pengarusutamaan gender.					
29		Mendorong pemberdayaan masyarakat.					
30	Mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi daerah	Penguatan fondasi sektor unggulan daerah					
31		Penguatan produksi dan produktivitas komoditas prioritas					
32		Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah.					
33		Modernisasi pertanian agar lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal.					
34		Penguatan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, industri kreatif serta pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi baru.					
35		Penguatan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, industri kreatif serta pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi baru.					
36		Penguatan kualitas produksi dan perluasan jangkauan pasar sektor unggulan daerah.					
37		Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/ Kalimantan.					

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
38		Perkuatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan inklusif.					
39		Perkuatan penerapan ekonomi hijau dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon.					
40	Peningkatan Investasi	Meningkatkan investasi dalam sektor unggulan daerah dengan menyediakan insentif, memberikan bantuan teknis, dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.					
41	Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi	Mendorong Peningkatan kewirausahaan, dengan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha yang berorientasi pada peluang, inovasi, dan nilai tambah,diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemandirian daerah.					
42		Pengembangan Industri Pengolahan yang produktif, Koperasi dan UMKM yang lebih kompetitif, bernilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan serta peluang ekonomi yang lebih luas.					
43		Memperkuat kompetensi teknis, manajerial dan keterampilan serta kewirausahaan.					
44		Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah.					
45	Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dengan penumbuhan inovasi dan pemanfaatannya di daerah	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru dengan berbagai pengembangan inovasi.					
46		Peningkatan penerapan ilmu dan teknologi serta inovasi pada semua sektor ekonomi.					
47		Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi					
48		Mengembangkan Hilirisasi sektor unggulan daerah.					
49		Penguatan pengembangan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berbasis pada efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dan bernilai tambah.					
50	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mendorong Peningkatan daya saing daerah, dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menawarkan barang dan jasa yang berkualitas, berinovasi, dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. dengan penyediaan infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat iklim usaha, dan pemanfaatan potensi lokal.					
50		Mendorong peningkatan usaha-usaha ekonomi dan permodalan syariah					

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
51	Mendorong berkembangnya ekonomi syariah	Mendorong berkembangnya produk-produk dan perdagangan halal					
52		Optimalisasi ZIS untuk usaha ekonomi produktif					
53	Peningkatan peran serta BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah	Peningkatan produktivitas BUMD.					
54		Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/ Kalimantan.					
55		Peningkatan permodalan BUMD					
56	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban	Perkuatan kantrantibum.					
57		Perkuatan nasionalisme dan moderasi beragama.					
58		Menumbuhkan budaya taat hukum di masyarakat.					
59	Menjaga stabilitas ekonomi	Peningkatan pengendalian inflasi daerah					
60		Peningkatan stabilitas makro ekonomi daerah					
61	Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Mendorong Pemenuhan infrastruktur dasar.					
62		Mendorong penyediaan layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang berkualitas untuk energi, jaringan listrik, teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, serta perumahan.					
63	Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah dan perdesaan yang mantap	Pembangunan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan.					
64		Mendorong Pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi.					
65		Mendorong konekvitas intra dan antar wilayah transportasi, ketenagalistrikan, informasi dan komunikasi.					
66	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respon terhadap bencana sertapeningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat					
67		Peningkatan Sosialisasi, edukasi, informasi pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana.					
68		Meningkatkan kualitas perencanaan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko bencana. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana.					
69		Penguatan pencegahan pencemaran lingkungan.					

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
70	Peningkatan penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan.					
71	Peningkatan ketahanan iklim	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.					
72		Penguatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.					
73		Penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle dan replant.					
74	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Optimasi regulasi dan kelembagaan daerah.					
75		Pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dan pemanfaatan teknologi informasi.					
76		Implementasi budaya birokrasi ber- AKHLAK					
77		Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.					
78	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran	Optimalisasi sinergi dan kolaborasi serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja					
79	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Mendorong Penguatan pelayanan umum dan publik serta digitalisasi pelayanan.					
80		Pengembangan smart government untuk penguatan aspek pemerintahan digital.					
81	Penguatan nilai dan budaya integritas , dan karakter pemerintahan yang religius serta penguatan pengawasan interna	Mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.					
82		Peningkatan budaya kerja religius (amanah, jujur, adil) dan pemahaman serta praktik keagamaan bagi ASNPeningkatan budaya kerja religius (amanah, jujur, adil) dan pemahaman serta praktik keagamaan bagi ASN					

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Setelah arah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang relevan. Tahap ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan RPJMD karena perumusan program prioritas menghasilkan rencana pembangunan yang konkret serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan strategis yang mencerminkan visi dan misi pembangunan jangka panjang serta tujuan strategis Kepala Daerah dalam lima tahun. Setiap program yang dirumuskan diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan serta mendukung pemenuhan target kinerja daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan dan urusan pemerintahan yang terkait sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing dan sasaran neningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya.

Program prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan Sekretariat Daerah. Adapun program prioritas daerah yang dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

c. Program Pengembangan Kurikulum
d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
f. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
g. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
h. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
i. Program Perlindungan Perempuan
j. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
k. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
l. Program Perlindungan Khusus Anak
m. Program Pengendalian Penduduk
n. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
o. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
p. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
q. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
r. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
s. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
t. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
u. Program Pengembangan Kebudayaan
v. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
w. Program Pembinaan Perpustakaan
x. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
y. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
z. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

å. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

2) Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan

Prioritas pembangunan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial; meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah; meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan; serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Program prioritas pembangunan daerah pertumbuhan ekonomi berkesinambungan akan dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kantrantibum, Pertanahan, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan, dan urusan Sekretariat Daerah. Adapun program prioritas daerah yang dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
b. Program Penyelenggaraan Jalan
c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
f. Program Penataan Bangunan Gedung
g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
i. Program Pengembangan Perumahan
j. Program Kawasan Permukiman
k. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
m. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
n. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
o. Program Penempatan Tenaga Kerja
p. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
q. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
r. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
s. Program Pengelolaan Persampahan
t. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
u. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
v. Program Administrasi Pemerintahan Desa
w. Program Penanggulangan Bencana Daerah
x. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
y. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
z. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
å. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
ä. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
cc. Program Pengembangan UMKM
aa. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
bb. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
ff. Program Promosi Penanaman Modal
gg. Program Pelayanan Penanaman Modal
ee. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
ff. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
jj. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

kk. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
ii. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
jj. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
kk. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
oo. Program Pemasaran Pariwisata
mm. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
nn. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
oo. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
pp. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
qq. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
uu. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
vv. Program Penyuluhan Pertanian
ww. 'Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
uu. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
vv. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
ww. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
xx. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
bbb. Program Pengembangan Ekspor
zz. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
ddd. 'Program Perekonomian Dan Pembangunan
ää. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
öö. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

aaa. Program Riset Dan Inovasi Daerah

3) Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran menurunnya kemiskinan dan ketimpangan. Prioritas pembangunan daerah penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, dan urusan Perencanaan, Pengawasan dan Sekretariat Daerah. Adapun program prioritas daerah yang dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
e. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
f. Program Pemberdayaan Sosial
g. Program Rehabilitasi Sosial
h. Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial
i. Program Pendaftaran Penduduk
j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
k. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
l. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
m. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
n. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
o. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

p. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
q. Program Hubungan Industrial
r. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
s. Program Penanganan Kerawanan Pangan
t. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
u. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
v. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
w. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
x. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
y. Program Perekonomian Dan Pembangunan
z. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
aa. Program Penyelenggaraan Pengawasan
ä. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pembangunan peningkatan tata kelola pemerintahan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan; meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan; dan meningkatnya integritas pemerintahan daerah. Prioritas pembangunan daerah peningkatan tata kelola pemerintahan akan dilaksanakan oleh seluruh urusan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator. Adapun program prioritas daerah yang dilaksanakan adalah :

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
f. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
g. Program Kepegawaian Daerah
h. Program Riset Dan Inovasi Daerah
i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
j. Program Penyelenggaraan Pengawasan
k. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
m. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
n. Program Pelayanan Penanaman Modal
o. Program Pendaftaran Penduduk
p. Program Pencatatan Sipil
q. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sedangkan program prioritas pembangunan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12 Program Prioritas Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT						
Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya			Tingkat Kemiskinan((%))		
				Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing		Indeks Pendidikan (*)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks SPM Pendidikan (Indeks)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks Kesehatan (*)		
			Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Visit Rate (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio fasilitas kesehatan terhadap penduduk (per 100.000 penduduk)		
			Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka Yang Aktif (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Pemenuhan Gizi Masyarakat	Capaian SPM Balita (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase balita gizi buruk mendapat tatalaksana (%)		
				Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)		
				Prevalensi ibu hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan (%)		
				Capaian SPM Ibu Hamil (%)		
			Meningkatnya kompetensi atlet olahraga Pendidikan dan Prestasi	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi (%)		
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Orang)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya kualitas layanan TIK pada perangkat daerah	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase PD yang menerima layanan TIK sesuai standar (%)		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Numerasi (Angka)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Angka Literasi (Angka)		
			Meningkatnya Mutu Pangan Hasil Olahan	Persentase Pangan Olahan sesuai standar (%)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Nilai Kepuasan Pelayanan Bantuan Kemasyarakatan (Nilai)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Persentase PHBS di 5 Tatanan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Layanan Sesuai Standar	Persentase faskes dengan tingkat kepatuhan petugas terhadap standar (%)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)		
				Rasio Gini (Indeks)		
				Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)		
			Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Keuangan	Persentase temuan/rekomendasi hasil pengawasan keuangan internal yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan kinerja internal yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase rekomendasi hasil evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti (%)		
			Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)		
			Meningkatnya akses pasar IKM		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Visit Rate (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio fasilitas kesehatan terhadap penduduk (per 100.000 penduduk)		
			Meningkatnya diversifikasi pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan UM		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kapasitas usaha koperasi			
			Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Pemenuhan Gizi Masyarakat	Capaian SPM Balita (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	
				Persentase balita gizi buruk mendapat tatalaksana (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi ibu hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan (%)		
				Capaian SPM Ibu Hamil (%)		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD (%)		
				Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah (%)		
			Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Semakin Kondusif	Indeks Hubungan Industrial (Indeks)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya kualitas hidup di desa melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, utilitas dasar, aktifitas dan fasilitas sosial	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat di Desa (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Indeks Sub Dimensi Pendidikan di Desa (%)		
				Indeks Sub Dimensi Aktifitas Sosial di Desa (%)		
				Indeks Sub Dimensi Layanan Utilitas Di Desa (%)		
				Indeks Sub Dimensi Layanan Kesehatan di Desa (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Peraturan & Keselarasan Kebijakan Daerah	Persentase kebijakan yang telah diharmoniskan/ selara (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase kebjakan yang terbit sesuai dengan perencanaan (%)		
				Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan (%)		
			Meningkatnya Kualitas PPKS yang diberdayakan	Persentase PPKS yang diberdayakan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dilakukan Sesuai Standar (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Nilai Kepuasan Pelayanan Bantuan Kemasyarakatan (Nilai)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Peternakan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		
			Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Produksi Usaha Olahan Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Daerah	Persentase Proyek Infrastruktur Daerah yang Terealisasi (%)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Sentra Industri Pengolahan		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Menurunnya Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Optimalnya distribusi air minum di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang mendapatkan distribusi air minum melalui SPAM (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Optimalnya pelayanan dan pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah domestik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Optimalnya Pengelolaan Pengawasan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi instansi/OPD yang memerlukan tanah selama masa renstra 2025-2029 (%)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya		Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
				Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA (Kali)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Angka Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang dideteksi dini (%)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Tribina (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas hidup di desa melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, utilitas dasar, aktifitas dan fasilitas sosial	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat di Desa (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Indeks Sub Dimensi Pendidikan di Desa (%)		
				Indeks Sub Dimensi Aktifitas Sosial di Desa (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Sub Dimensi Layanan Utilitas Di Desa (%)		
				Indeks Sub Dimensi Layanan Kesehatan di Desa (%)		
			Meningkatnya Kualitas Ormas dan Kesiswaan	Persentase Ormas dan Kesiswaan yang memahami perannya di masyarakat (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Perempuan yang berdaya (%)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Kualitas PPKS yang diberdayakan	Persentase PPKS yang diberdayakan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dilakukan Sesuai Standar (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Organisasi Perempuan yang Berdaya	Persentase Organisasi Perempuan yang berdaya (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Nilai Kepuasan Pelayanan Bantuan Kemasyarakatan (Nilai)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Cakupan peserta KB aktif (%)		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (%)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Teredukasinya pemenuhan hak Anak	Persentase anak yang telah teredukasi (%)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terjaganya Suku, Agama dan RAS	Persentase konflik terkait suku ras dan agama (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Terlindunginya Hak hak anak dalam kasus kekerasan	Persentase kasus yang terfasilitasi (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Termanfaatkannya data informasi keluarga yang tepat sasaran	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Persentase pemanfaatan data informasi keluarga (%)		
Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan			Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
				Produk Domestik Regional Bruto per Kapita((Rp Juta))		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial		Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (%)		
				Nilai Investasi (Milyar Rupiah)		
				Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum (%)		
				Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (%)		
				Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Industri Pengolahan (%)		
				Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa (%)		
			Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata (%)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya efektifitas pemasaran Pariwisata	Cakupan Wilayah Pemasaran Pariwisata (Event)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya fasilitasi izin usaha bagi IKM		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan UM		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kapasitas usaha koperasi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Neraca Bahan Makanan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi Penanaman Modal yang Valid (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai LKPM Sesuai Standar (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Penyuluh Pertanian dengan Kinerja Baik (%)		
			Meningkatnya legalitas IKM		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Minat Investasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Pertanian	Persentase Pemanfaatan Lahan Pertanian (Perkebunan) (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Perkebunan (%)		
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Peternakan (%)		
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Perkebunan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Peternakan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Sarana Produksi Peternakan (%)	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		
			Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan SDM dan ekraf yang kompeten (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya penjualan usaha mikro		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Populasi ternak yang terlindungi (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi (*)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi dari Bencana (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Produksi Desa dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Sub Dimensi Produksi Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa (%)		
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Tertib Niaga		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya volume ekspor dan perdagangan		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah		Tingkat Inflasi ((%))		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rupiah)		
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Nilai Ekspor (triliun rupiah)		
			Meningkatnya fasilitasi izin usaha bagi IKM		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan UM		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Neraca Bahan Makanan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Penyuluh Pertanian dengan Kinerja Baik (%)		
			Meningkatnya legalitas IKM		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Peternakan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Peternakan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		
			Meningkatnya penjualan usaha mikro		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Produksi Desa dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Sub Dimensi Produksi Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Indeks Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa (%)		
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Tertib Niaga		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya volume ekspor dan perdagangan		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Indeks)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin)		
				Indeks Risiko Bencana(Indeks)		
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas Lalu Lintas, Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas, Meningkatnya Kendaraan Laik Jalan, Meningkatnya Pengguna Transportasi Darat, Meningkatnya Kualitas Terminal Tipe C	Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan (Nilai)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai standar (%)		
				Persentase Terminal Tipe C yang Layak (%)		
				Persentase pelanggaran lalu lintas (%)		
				Persentase Kendaraan Laik Jalan (%)		
				Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan kawasan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Perlindungan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang fungsi sungai yang terlindungi dari daya rusak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya sistem drainase yang berfungsi baik	Persentase sistem drainase kabupaten yang berfungsi baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Optimalnya distribusi air minum di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang mendapatkan distribusi air minum melalui SPAM (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Optimalnya kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Optimalnya pelayanan dan pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah domestik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi instansi/OPD yang memerlukan tanah selama masa renstra 2025-2029 (%)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)		
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kualitas fasilitas atau prasarana pengelolaan persampahan	Persentase fasilitas pengelolaan persampahan yang berfungsi baik (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Kualitas Lahan yang Hijau dan Berseri	Persentase RTH Hijau (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana Yang Ditangani Sesuai Standar (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemulihan Bencana	Persentase Sarpras Terdampak Bencana Yang Tertangani dan Pemulihan Bencana Sesuai Standar (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa yang Memiliki Kesiapsiagaan Bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Terkelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Persentasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
			Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan		Opini BPK (Predikat)		
				Nilai SAKIP (*)		
				NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD) (Angka)		
			Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	Persentase Wajib Pajak yang taat Pajak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD (%)	PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah (%)		
			Meningkatnya Kualitas ASN	Persentase Kualitas ASN (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Objek Pendapatan Baru	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Baru (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan (%)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase HAKI yang difasilitasi (%)		
			Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		
			Meningkatnya Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kopetensinya (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan (%)		
				Persentase perangkat daerah dengan capaian IKU minimal sebesar 90% (%)		
				Persentase perangkat daerah dengan MR berjalan baik (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi (%)	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase kesesuaian APBD dengan KUA/PPAS, Perubahan APBD dengan Perubahan KUA/PPAS (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase database BMD sesuai regulasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penatausahaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diverifikasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase dokumen penerimaan dan pengajuan pengeluaran kas yang diverifikasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Terciptanya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	Persentasi Pelayanan Kepegawaian yang Tepat Waktu dan Akurat (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Akses Informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas layanan TIK pada perangkat daerah	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase PD yang menerima layanan TIK sesuai standar (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		
		Meningkatnya integritas pemerintah daerah		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Nilai Survei Penilaian Integritas (*)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)		
			Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Program Anti Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas (Nilai)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Persentase unit kerja pelaksana ZI yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM (%)		
				Nilai MCSP (Nilai)		
			Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Keuangan	Persentase temuan/rekomendasi hasil pengawasan keuangan internal yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan kinerja internal yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase rekomendasi hasil evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti (%)		
			Meningkatkan Profesionalitas APIP	Persentase APIP yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan (%)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Efektivitas Implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai PK Maturitas SPIP sesuai yang dipersyaratkan (%)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kematangan manajemen risiko sesuai ketentuan (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Peraturan & Keselarasan Kebijakan Daerah	Persentase kebijakan yang telah diharmoniskan/ selara (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase kebjakan yang terbit sesuai dengan perencanaan (%)		
				Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan (%)		
			Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		

Adapun terkait dengan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan ke dalam kelompok program prioritas pembangunan daerah dan program prioritas daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Penjabaran Janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati ke Dalam Program Pembangunan Daerah

MISI		JANJI-JANJI POLITIK	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
1	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.	Memberikan beasiswa 1000 santri	Peningkatan kualitas SDM	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Mengoptimalkan pelayanan pengobatan gratis untuk seluruh masyarakat Hulu Sungai Tengah	Peningkatan kualitas SDM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Melakukan 1000 bedah rumah / tahun	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan	Pembuatan bendungan untuk pengairan pertanian	Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.	Pemerataan perbaikan jalan dan menyediakan penerangan jalan di setiap desa	Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.	Membuka ruang pendopo sebagai tempat aspirasi dan diskusi bersama masyarakat	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye tersebut mekanisme implementasinya dituangkan kedalam rencana strategis perangkat daerah yang menangani urusan berkenaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan perangkat daerah baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun dokumen perencanaan tahunan. Dari dokumen perencanaan tahunan, maka dituangkan ke dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan. Tantangan implementasi dari janji politik tersebut

adalah komitmen yang kuat untuk merealisasikannya. Tantangan lainnya adalah perkembangan kondisi perekonomian daerah, kemampuan keuangan daerah, kondisi masyarakat atau lingkungan, ketepatan sasaran serta ketersediaan data yang valid..

Keterkaitan prioritas nasional dan dukungan program kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14 Keterkaitan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah

No.	Prioritas / Isu Nasional	Program Prioritas RPJMD
1.	Mencapai swasembada pangan, energi dan air	● Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) ● Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ● Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ● Program Penanganan Kerawanan Pangan ● Program Penanganan Kerawanan Pangan ● Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ● Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ● Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian ● Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ● Program Penyuluhan Pertanian ● Program Perekonomian Dan Pembangunan
2.	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	● Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ● Program Kepegawaian Daerah
4.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	● Program Penyelenggaraan Pengawasan ● Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
5.	Pemberantasan Kemiskinan	● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ● Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ● Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ● Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial ● Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ● Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ● Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) ● Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ● Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

No.	Prioritas / Isu Nasional	Program Prioritas RPJMD
		● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ● Program Hubungan Industrial ● Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ● Program Penanganan Kerawanan Pangan ● Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ● Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ● Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
7.	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia	● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ● Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8.	Penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi	● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Pengembangan Kurikulum ● Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9.	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
10.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	● Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ● Program Perlindungan Perempuan ● Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) ● Program Perlindungan Khusus Anak
11.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	● Program Perencanaan Lingkungan Hidup ● Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ● Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ● Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) ● Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) ● Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
12.	Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13.	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat	● Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ● Program Pengembangan Perumahan ● Program Kawasan Permukiman ● Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh ● Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
14.	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha	● Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ● Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ● Program Pengembangan Umkm

No.	Prioritas / Isu Nasional	Program Prioritas RPJMD
	dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya	● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
15.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	● Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri ● Program Pengendalian Izin Usaha Industri ● Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
16.	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah	● Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
17.	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	● Program Pengembangan Kebudayaan ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya ● Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ● Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Keterkaitan program hasil terbaik nasional dengan program prioritas RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Keterkaitan Program Hasil Terbaik RPJMN dengan Program Prioritas Daerah

No.	8 Program Hasil Terbaik	Program Prioritas RPJMD
1.	Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita	● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ● Program Pengelolaan Persampahan
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap	● Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian ● Program Penyuluhan Pertanian ● Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul, terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Pengembangan Kurikulum

No.	8 Program Hasil Terbaik	Program Prioritas RPJMD
		● Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	● Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ● Program Hubungan Industrial
6.	Menaikkan gaji ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT),dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan terutama generasi milineal, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	● Program Administrasi Pemerintahan Desa ● Program Pengembangan Perumahan ● Program Kawasan Permukiman ● Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domenstik bruto (PDB) i	● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keterkaitan trisula pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 3. 15 Keterkaitan Trisula Pembangunan RPJMN dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

No.	Trisula Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Pertumbuhan tinggi berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan
2.	Penurunan Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan
3.	SDM berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM

Keterkaitan visi, misi, tujuan,sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
									2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat	1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.	1. 1 Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Gender	1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Usia Harapan Hidup Angka Prevalensi Stunting Angka Harapan Lama Sekolah	1.1.1.1 Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	1.1.1.1.1 Perluasan upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.	Peningkatan Kualitas SDM					
					Angka Numerasi Angka Literasi		1.1.1.1.2 Penguatan upaya pencegahan dan penanganan stunting.						
					Raport Karakter Sekolah		1.1.1.1.3 Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga medis dan kesehatan.						
					Indeks Literasi Masyarakat		1.1.1.1.4 Penguatan mutu layanan kesehatan masyarakat dan lanjutan.						
							1.1.1.1.5 Perkuatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular						
						1.1.1.2 Peningkatan kualitas Pendidikan	1.1.1.2.1 Peningkatan rata-rata lama sekolah.	Peningkatan Kualitas SDM					
							1.1.1.2.2 Peningkatan mutu pendidikan.						
							1.1.1.2.3 Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas						
							1.1.1.2.4 Peningkatan akses dan fasilitasi pengembangan pendidikan lanjutan dan tinggi serta vokasi di daerah.						
							1.1.1.2.5 Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang adaptif dan modern.						
							1.1.1.2.6 Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum yang relevan, inovatif, berorientasi pada karakter dan kompetensi.						
							1.1.1.2.7 Pengembangan talenta dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi.						

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
									2025	2026	2027	2028	2029
							1.1.1.2.8 Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.						
							1.1.1.2.9 Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas.						
							1.1.1.2.10 Mengembangkan jejaring kerjasama satuan pendidikan regional, nasional dan internasional.						
						1.1.1.3 Penguatan literasi Masyarakat berbasis inklusi sosial	1.1.1.3.1 Peningkatan budaya membaca dan kecakapan literasi 1.1.1.3.2 Peningkatan akses bahan bacaan 1.1.1.3.3 Penguatan peran perpustakaan berbasis inklusi sosial						
				1.1. 2. Menurunnya penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	1.1.2.1 Peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan	1.1.2.1.1 Penguatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 1.1.2.1.2 Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang adaptif. 1.1.2.1.3 Pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial 1.1.2.1.4 Mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan perlindungan dari kekerasan, perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penanggulangan Kemiskinan					
				1.1.3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pembangunan Kebudayaan Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA Indeks Pemberdayaan Gender	1.1.3.1 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1.1.3.1.1 Pemenuhan lingkungan sosial budaya yang kondusif dan berkeadilan untuk terciptanya kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis. 1.1.3.1.2 Penanaman harmoni dalam keberagaman sosial budaya. 1.1.3.1.3 Mendorong perubahan sosial budaya yang positif. 1.1.3.1.4 Mendorong pemakmuran kegiatan keagamaan di masyarakat dan komunitas	Peningkatan Kualitas SDM					

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
										2025	2026	2027	2028	2029
							1.1.3.2 Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah	1.1.3.2.1 Pengembangan budaya lokal dan non lokal yang positif.						
							1.1.3.3 Peningkatan ketahanan keluarga	1.1.3.3.1 Mendorong Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.						
								1.1.3.3.2 Mendorong Peningkatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal.						
							1.1.3.4 Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan	1.1.3.4.1 Mendorong Peningkatan pemberdayaan pemuda dan perempuan.						
								1.1.3.4.2 Mendorong pengarusutamaan gender.						
								1.1.3.4.3 Mendorong pemberdayaan masyarakat.						
	2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan	2.1. Meningkatkan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan	PDRB per kapita Indeks Daya Saing Daerah	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian Laju Pertumbuhan PDRB Makanan Minuman (Pariwisata)	2.1.1.1 Mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi daerah	2.1.1.1.1 Penguatan fondasi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonommi Berkesinambungan					
								2.1.1.1.2 Penguatan produksi dan produktivitas komoditas prioritas						
								2.1.1.1.3 Modernisasi pertanian agar lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal.						
								2.1.1.1.4 Penguatan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, industri kreatif serta pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi baru.						
								2.1.1.1.5 Penguatan kualitas produksi dan perluasan jangkauan pasar sektor unggulan daerah.						
								2.1.1.1.6 Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/Kalimantan.						
								2.1.1.1.7 Perkuatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan inklusif.						
								2.1.1.1.8 Perkuatan penerapan ekonomi hijau dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon.						

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
											2025	2026	2027	2028	2029
							2.1..1.2 Peningkatan Investasi	2.1.1.2.1	Meningkatkan investasi dalam sektor unggulan daerah dengan menyediakan insentif, memberikan bantuan teknis, dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.						
				2.1.2.	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Industri	2.1.2.1 Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi	2.1.2.1.1	Mendorong Peningkatan kewirausahaan, dengan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha yang berorientasi pada peluang, inovasi, dan nilai tambah,diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemandirian daerah.						
						Rasio Kewirausahaan daerah									
						Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB									
						Return Of Asset (RoA) BUMD									
						Rasio PAD terhadap PDRB		2.1.2.1.2	Pengembangan Industri Pengolahan yang produktif, Koperasi dan UMKM yang lebih kompetitif, bernilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan serta peluang ekonomi yang lebih luas.						
						Indeks Daya Saing Daerah									
						Tingkat Pengangguran Terbuka									
								2.1.2.1.3	Memperkuat kompetensi teknis, manajerial dan keterampilan serta kewirausahaan.						
								2.1.2.1.4	Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah.						
							2.1.2.3 Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dengan penumbuhan inovasi dan pemanfaatannya di daerah	2.1.2.3.1	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru dengan berbagai pengembangan inovasi.						
								2.1.2.3.2	Peningkatan penerapan ilmu dan teknologi serta inovasi pada semua sektor ekonomi.						
								2.1.2.3.3	Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi						
								2.1.2.3.4	Mengembangkan Hilirisasi sektor unggulan daerah.						

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
										2025	2026	2027	2028	2029
							2.1.2.3.4	Penguatan pengembangan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berbasis pada efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dan bernilai tambah.						
						2.1.2.4 Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	2.1.2.4.1	Mendorong Peningkatan daya saing daerah, dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menawarkan barang dan jasa yang berkualitas, berinovasi, dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. dengan penyediaan infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat iklim usaha, dan pemanfaatan potensi lokal.						
						2.1.2.5 Mendorong berkembangnya ekonomi syariah	2.1.2.5.1	Mendorong peningkatan usaha-usaha ekonomi dan permodalan syariah						
							2.1.2.5.2	Mendorong berkembangnya produk-produk dan perdagangan halal						
							2.1.2.5.3	Optimalisasi ZIS untuk usaha ekonomi produktif						
						2.1.2.6 Peningkatan peran serta BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah	2.1.2.6.1	Peningkatan produktivitas BUMD.						
							2.1.2.6.2	Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/Kalimantan.						
							2.1.2.6.2	Peningkatan permodalan BUMD						
				2.1.3 Meningkatnya stabilitas daerah	Angka Gini Ratio Angka Inflasi Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di area tempat tinggalnya	2.1.3.1 Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban	2.1.3.1.1	Perkuatan kantrantibum.						
							2.1.3.1.2	Perkuatan nasionalisme dan moderasi beragama.						
							2.1.3.1.3	Menumbuhkan budaya taat hukum di masyarakat.						
					Angka Kriminalitas									
						2.1.3.2 Menjaga stabilitas harga barang	2.1.3.2.1	Peningkatan pengendalian inflasi daerah						
							2.1.3.2.2	Peningkatan stabilitas makro ekonomi daerah						

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
									2025	2026	2027	2028	2029
	3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.	3.1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks Daya Saing Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3.1.1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Cakupan Pelayanan Infrastruktur Publik Kondisi Baik Cakupan Pelayanan Infrastruktur Ekonomi Kondisi Baik Nilai Pilar Infrastruktur IDSD	3.1.1.1 Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	3.1.1.1.1 Mendorong Pemenuhan infrastruktur dasar.	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan					
							3.1.1.1.2 Mendorong penyediaan layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang berkualitas untuk energi, jaringan listrik, teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, serta perumahan.						
						3.1.1.2 Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah dan perdesaan yang mantap	3.1.1.2.1 Pembangunan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan.						
							3.1.1.2.2 Mendorong Pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi.						
							3.1.1.2.3 Mendorong konekvitas intra dan antar wilayah transportasi, ketenagalistrikan, informasi dan komunikasi.						
				3.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana Angka Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.2.1 Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana	3.1.2.1.1 Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respon terhadap bencana sertapeningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat						
							3.1.2.1.2 Peningkatan Sosialisasi, edukasi, informasi pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana.						
							3.1.2.1.3 Meningkatkan kualitas perencanaan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko bencana. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana.						
						3.1.2.2 Meningkatkan penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan	3.1.2.2.1 Penguatan pencegahan pencemaran lingkungan.						
							3.1.2.2.2 Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan.						

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TAHUN PELAKSANAAN				
									2025	2026	2027	2028	2029
						.3.1.2.3 Peningkatan ketahanan iklim	3.1.2.3.1 Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.						
							3.1.2.3.2 Penguatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.						
							3.1.2.3.3 Penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle dan replant.						
	4. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak"	Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan "Ber Akhlak"	Indeks SPBE Indeks Berakhlak Indeks Inovasi Daerah Indeks Pelayanan Opini BPK Nilai SAKIP Nilai rata-rata SPIP Terintegrasi Indeks Profesionalisme ASN Nilai Merit System Nilai EKPPD	4.1.1.1 Meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN	4.1.1.1.1 Optimasi regulasi daerah. 4.1.1.1.2 Pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dan pemanfaatan teknologi informasi. 4.1.1.1.3 Implementasi budaya birokrasi ber-AKHLAK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan					
						4.1.1.2 Penguatan karakter ASN dan pemerintahan religius	4.1.1.2.1 Mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 4.1.1.2.2 Peningkatan budaya kerja religius (amanah, jujur, adil) dan pemahaman serta praktik keagamaan bagi ASN						
						4.1.1.3 Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	4.1.1.3.1 Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4.1.1.3.2 Mendorong Penguatan pelayanan umum dan publik serta digitalisasi pelayanan. 4.1.1.3.3 Pengembangan smart government untuk penguatan aspek pemerintahan digital.						

Tema pembangunan merujuk pada fokus utama yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tema merupakan fokus pentahapan setiap tahun untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang mencerminkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ingin dicapai. Tema pembangunan RPJMD juga mencerminkan fokus utama pentahapan periodesasi RPJPD, sehingga tema pembangunan RPJMD selain mencerminkan visi dan misi yang ingin dicapai juga mencerminkan pencapaian tema, tujuan dan sasaran tahapan RPJPD berkenaan. RPJMD tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tahap ke-1 RPJPD Tahun 2025 - 2045. Dengan demikian tema pembangunan RPJMD selain mempedomani pencapaian visi misi RPJMD juga mempedomani tema tahap kesatu RPJPD. Tahap ke-1 RPJPD yaitu periode tahun 2025 - 2029 mengusung tema “Perkuatan Fondasi”. Sesuai dengan tema tersebut maka tema pembangunan RPJMD setiap tahunnya adalah :

Tabel 3. 17 Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Kab. Hulu Sungai Tengah

VISI RPJPD 2025-2045 : KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PUSAT JASA DAN LOGISTIK YANG SEJAHTERA, UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN				
TEMA TAHAP 1 (2025-2029) : PERKUATAN FONDASI				
VISI RPJMD 2025-2029 : TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT				
TEMA PEMBANGUNAN				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya saing dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta tata kelola pembangunan yang berkesinambungan	Percepatan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan serta tata kelola pemerintahan yang berakhlak	Penguatan daya saing SDM dan perekonomian daerah yang inklusif dan berkesinambungan serta tata kelola pemerintahan yang berakhlak	Pemantapan daya saing SDM dan perekonomian daerah yang inklusif dan berkesinambungan serta tata kelola pemerintahan yang berakhlak untuk perwujudan HST yang religius, sejahtera dan bermartabat	Perwujudan HST yang religius, sejahtera dan bermartabat untuk perkuatan pondasi pusat jasa dan logistik

Gambar 3. 4 Tahapan dan Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah



3.2.4 Dukungan Terhadap prioritas Nasional (SIPD)

Rencana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 tidak hanya diarahkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tetapi juga berperan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi dan keterpaduan antara pembangunan daerah, provinsi, dan nasional menjadi prinsip utama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah ini.

Keselarasan tersebut diwujudkan melalui dukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap kebijakan dan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional merupakan penjabaran operasional dari Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029.

Dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian setiap Prioritas Nasional tercermin dalam keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan daerah dengan Asta Cita serta Program Prioritas Nasional (PN). Hubungan dan keterpaduan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 18 SANDINGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, ASTACITA, 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
20252029 - TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT								
Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya								
	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
								dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
				KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.03 - PROGRAM	2.07.03.2.01 -	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan	2.18.2.07.3.32.01.0000 - Dinas	Membangun dari desa dan dari bawah untuk

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			BIDANG TENAGA KERJA	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.18.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
					Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGA	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan,	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pengembangan Olahraga Rekreasi	festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Olahraga dan Pariwisata	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	saing, religius dan berbudaya							
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
								dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
					Kabupaten/ Kota			
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.14.2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
							Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.14.2.08.01. 0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.18.2.07.3.32.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.18.2.07.3.32.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.18.2.07.3.32.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.18.2.07.3.32.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Pemangku Kepentingan			
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.05 - PROGRAM	3.25.05.2.01 -	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Ketahanan Pangan dan Perikanan	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
				PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Sarana Pertanian	Berbentuk Biji/Benih		swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya						
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.14.2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.2.14.2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
							Perempuan dan Perlindungan Anak	
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.2.14.2.08.01. 0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1.06.2.14.2.08.01. 0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1.06.2.14.2.08.01. 0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1.06.2.14.2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1.06.2.14.2.08.01.0000 - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
				KEMASYARAKATAN	Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan								
	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Pemerintahan Desa			
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
					Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Daerah Kabupaten/ Kota			
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
				IZIN USAHA INDUSTRI	(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
				DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3.30.3.31.2.17.01.0000 - Dinas Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat								
	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan						
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Kabupaten/ Kota			
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					(SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota			
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			KAWASAN PERMUKIMAN	PERMUKIMAN KUMUH	dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dan Kawasan Permukiman	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
				ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten/ Kota			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.1.06.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.1.06.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.1.06.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.1.06.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
						TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.2.15.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan						
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.21.2.20.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak	Meningkatnya integritas pemerintah daerah						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
					Pemerintahan Desa			
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program adalah serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Karakteristik program adalah adanya sasaran yang jelas, penggunaan sumberdaya yang terencana dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Program merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan arah kebijakan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dirumuskan berbagai jenis program perangkat daerah.

Program Perangkat Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka pendanaan bersifat indikatif dan dapat dilakukan analisis kembali setiap tahun pada saat penyusunan rencana tahunan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pendanaan pembangunan bertujuan

untuk membiayai pelaksanaan rencana pembangunan guna mencapai visi dan misi RPJMD, serta target pembangunan nasional.

Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sumber pendanaan termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, sub-sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang menggunakan APBD diharapkan menjadi stimulus bagi partisipasi aktif unsur non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 - 2029, maka untuk memenuhi keperluan pendanaan pembangunan program-program perangkat daerah tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN baik berupa hibah maupun dana dekonsentrasi. Pendanaan pembangunan juga diharapkan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah daerah lainnya melalui hibah. Selain itu perlu juga dilakukan penggalian potensi pendanaan dari pihak swasta maupun masyarakat atau luar negeri baik dalam bentuk kerjasama pemerintah - swasta maupun murni swasta serta masyarakat. Strategi pendanaan pembangunan tersebut juga bisa dilakukan dalam rangka untuk memperbesar pencapaian target RPJMD.

Kebutuhan pendanaan masing-masing program dan target kinerja yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Program Pembangunan yang merupakan Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					615.008.544.517,00		760.391.697.002,00		775.653.461.789,00		785.055.461.917,00		797.380.695.451,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					347.312.635.461,00		348.991.471.202,00		348.060.680.964,00		348.928.118.717,00		348.323.215.126,00	
Meningkatnya penyelenggaraan kesekretariatan penunjang urusan pemerintahan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	95	95	347.312.635.461,00	95	348.991.471.202,00	95	348.060.680.964,00	95	348.928.118.717,00	95	348.323.215.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					100.394.576.876,00		140.964.316.450,00		156.676.771.475,00		164.699.233.850,00		177.149.270.975,00	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)	0	45,00	46,00	100.394.576.876,00	47,00	140.964.316.450,00	48,00	156.676.771.475,00	49,00	164.699.233.850,00	50,00	177.149.270.975,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)	0	95,40	95,45		95,50		95,55		95,60		95,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)	0	88,26	88,76		89,26		89,76		90,26		90,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)	0	91,00	91,00		91,00		92,00		93,00		94,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)	0	84,44	84,69		84,94		85,19		85,44		85,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					166.463.850.000,00		269.355.950.000,00		269.706.050.000,00		270.098.150.000,00		270.448.250.000,00	
Terwujudnya Pembelajaran yang Merata dan Berkualitas di Satuan Pendidikan	Persentase Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru (%)	0	0	90	166.463.850.000,00	90	269.355.950.000,00	95	269.706.050.000,00	95	270.098.150.000,00	95	270.448.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					137.482.180,00		259.959.350,00		259.959.350,00		259.959.350,00		259.959.350,00	
Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Numerasi (Angka)	0	81,22	83,22	137.482.180,00	85,22	259.959.350,00	87,22	259.959.350,00	89,22	259.959.350,00	90,22	259.959.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Literasi (Angka)	0	80,22	81,22		82,22		83,22		84,22		85,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					700.000.000,00		820.000.000,00		950.000.000,00		1.070.000.000,00		1.200.000.000,00	
Tersusunnya buku cerita anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	0	90	700.000.000,00	90	820.000.000,00	95	950.000.000,00	95	1.070.000.000,00	95	1.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					636.468.080.000,00		698.969.671.195,00		718.246.679.601,00		730.814.858.472,00		767.185.056.854,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					353.943.621.790,00		379.378.363.182,00		402.316.199.497,00		428.347.819.433,00		453.682.601.369,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu (%)		70	75	353.943.621.790,00	80	379.378.363.182,00	85	402.316.199.497,00	90	428.347.819.433,00	95	453.682.601.369,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)		70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	68	70	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)		75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	IKM Layanan BLUD (%)	86,78	88	89		90		91		92		93		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														menangani Bidang Kesehatan
	Peningkatan Pendapatan BLUD RS (%)	1,47	1,5	1,6		1,7		1,8		1,9		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					273.791.541.620,00		312.798.383.826,00		309.092.512.526,00		295.579.524.630,00		306.560.439.563,00	
Meningkatnya Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98,8	100	100	273.791.541.620,00	100	312.798.383.826,00	100	309.092.512.526,00	100	295.579.524.630,00	100	306.560.439.563,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)		36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Lanjut Usia Yang Mandiri (%)	84,8	86	88		90		92		94		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Visit Rate (%)	82	84	85		86		87		88		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Bed Occupancy Rate (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Lenght of Stay (Hari)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	82,90	91,00	91,45		91,90		92,35		92,80		93,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Turn Over Interval (Hari)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	68,1	75	80		85		90		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	82,3	85	88		91		93		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	70,83	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Wasting (%)	8,5	8	7,5		7		6,5		6		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	98	98	99		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.675.671.028,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	6	6	7	7.675.671.028,00	7	6.000.000.000,00	8	6.000.000.000,00	8	6.000.000.000,00	9	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					303.151.290,00		342.499.275,00		342.499.275,00		342.499.275,00		342.499.275,00	
Meningkatnya Mutu Pangan Hasil Olahan	Persentase Pangan Olahan sesuai standar (%)	45	47	50	303.151.290,00	53	342.499.275,00	55	342.499.275,00	57	342.499.275,00	60	342.499.275,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					754.094.272,00		450.424.912,00		495.468.303,00		545.015.134,00		599.516.647,00	
Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Masyarakat ber-PHBS (%)	66	70	71	754.094.272,00	72	450.424.912,00	73	495.468.303,00	74	545.015.134,00	75	599.516.647,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					309.406.311.355,00		272.888.827.580,00		273.770.011.800,00		292.401.721.800,00		287.201.721.800,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.683.025.292,00		25.153.000.000,00		25.153.000.000,00		24.368.000.000,00		24.368.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	88	90	26.683.025.292,00	92	25.153.000.000,00	93	25.153.000.000,00	94	24.368.000.000,00	95	24.368.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	88	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	88	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	61	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					90.513.186.000,00		45.900.000.000,00		32.000.000.000,00		34.700.000.000,00		29.500.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang fungsi sungai yang terlindungi dari daya rusak (%)	39,64	41,06	42,47	80.602.258.000,00	43,89	38.500.000.000,00	45,30	24.300.000.000,00	46,72	26.800.000.000,00	48,14	21.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Optimalnya kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	52,65	55	58	9.910.928.000,00	60	7.400.000.000,00	62	7.700.000.000,00	65	7.900.000.000,00	67,5	7.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.099.822.500,00		9.000.000.000,00		8.800.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
Optimalnya distribusi air minum di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang mendapatkan distribusi air minum melalui SPAM (%)	82,11	82,64	83,30	2.099.822.500,00	83,95	9.000.000.000,00	84,61	8.800.000.000,00	85,27	9.000.000.000,00	85,93	9.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					28.377.519.050,00		540.000.000,00		1.340.000.000,00		1.340.000.000,00		1.340.000.000,00	
Meningkatnya kualitas fasilitas atau prasarana pengelolaan persampahan	Persentase fasilitas pengelolaan persampahan yang berfungsi baik (%)	79,61	82,04	84	28.377.519.050,00	86	540.000.000,00	88	1.340.000.000,00	90	1.340.000.000,00	92	1.340.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.872.762.080,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00	
Optimalnya pelayanan dan pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah domestik (%)	81,31	81,55	82,03	4.872.762.080,00	82,50	5.900.000.000,00	82,98	5.900.000.000,00	83,46	5.900.000.000,00	83,94	5.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.206.852.500,00		15.600.000.000,00		15.900.000.000,00		15.900.000.000,00		15.900.000.000,00	
Meningkatnya sistem drainase yang berfungsi baik	Persentase sistem drainase kabupaten yang berfungsi baik (%)	2,35	2,42	2,49	8.206.852.500,00	2,55	15.600.000.000,00	2,62	15.900.000.000,00	2,68	15.900.000.000,00	2,75	15.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23.095.367.300,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	8,33	10,67	16,00	23.095.367.300,00	21,33	7.625.000.000,00	26,67	7.625.000.000,00	32,00	7.625.000.000,00	37,33	7.625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)	0,005	0,007	0,010		0,014		0,018		0,021		0,025		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.839.113.868,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	8,33	10,67	16,00	2.839.113.868,00	21,33	6.000.000.000,00	26,67	6.000.000.000,00	32,00	6.000.000.000,00	37,33	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)	0,005	0,007	0,010		0,014		0,018		0,021		0,025		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					109.060.717.350,00		146.289.000.000,00		160.917.900.000,00		177.009.690.000,00		177.009.690.000,00	
Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	67,09	70,34	73,59	109.060.717.350,00	76,59	146.289.000.000,00	79,59	160.917.900.000,00	82,59	177.009.690.000,00	85,59	177.009.690.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					7.761.555.600,00		4.431.827.580,00		4.734.111.800,00		4.909.031.800,00		4.909.031.800,00	
Meningkatnya kompetensi pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi lokal yang kompeten dan bersertifikat (%)	30	40	60	7.761.555.600,00	70	4.431.827.580,00	80	4.734.111.800,00	85	4.909.031.800,00	90	4.909.031.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.896.389.815,00		6.450.000.000,00		5.400.000.000,00		5.650.000.000,00		5.650.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan kawasan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	86,67	100	100	5.896.389.815,00	100	6.450.000.000,00	100	5.400.000.000,00	100	5.650.000.000,00	100	5.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					156.654.868.365,00		67.151.718.965,00		72.145.968.965,00		77.710.468.965,00		67.174.968.965,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.253.219.365,00		7.251.427.965,00		12.229.727.965,00		7.239.227.965,00		7.248.727.965,00	
Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sekretariat	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	7.253.219.365,00	100	7.251.427.965,00	100	12.229.727.965,00	100	7.239.227.965,00	100	7.248.727.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					104.926.125.000,00		10.234.225.000,00		10.235.175.000,00		10.790.175.000,00		10.245.175.000,00	
Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	100	100	100	104.926.125.000,00	100	10.234.225.000,00	100	10.235.175.000,00	100	10.790.175.000,00	100	10.245.175.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.727.500.000,00		7.395.800.000,00		7.395.800.000,00		17.395.800.000,00		7.395.800.000,00	
Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	72,22	72,22	73,88	5.727.500.000,00	75,55	7.395.800.000,00	77,21	7.395.800.000,00	78,88	17.395.800.000,00	80,54	7.395.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					25.110.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00	
Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	96,44	96,44	97,52	25.110.000.000,00	98,61	26.660.000.000,00	99,68	26.660.000.000,00	100	26.660.000.000,00	100	26.660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					13.613.024.000,00		15.585.266.000,00		15.600.266.000,00		15.600.266.000,00		15.600.266.000,00	
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	78,78	78,78	81,76	13.613.024.000,00	84,74	15.585.266.000,00	87,72	15.600.266.000,00	90,70	15.600.266.000,00	93,68	15.600.266.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Bertambahnya Jumlah Pengembang yang bersertifikasi	Persentase Permohonan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselesaikan tepat	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	waktu sesuai standar pelayanan (%)													
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.300.469.784,00		36.804.199.729,00		36.884.340.527,00		41.216.300.983,00		45.564.093.284,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.604.956.884,00		17.557.077.401,00		13.062.099.965,00		13.332.377.965,00		13.578.377.965,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.150.000.000,00	100	5.500.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.250.000.000,00	100	6.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	66,37	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	85	86	87	6.454.956.884,00	88	12.057.077.401,00	89	7.062.099.965,00	89	7.082.377.965,00	90	7.078.377.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	86	87		88		89		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perlindungan Masyarakat
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	89,12	89,70	90		90,10		90,30		90,40		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	86	87		88		89		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.795.512.900,00		7.420.500.000,00		9.098.000.000,00		10.217.000.000,00		11.327.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Persentasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah (%)	85	86	87	5.795.512.900,00	88	7.420.500.000,00	89	9.098.000.000,00	89	10.217.000.000,00	90	11.327.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.000.000.000,00		4.476.622.328,00		4.924.240.562,00		5.416.923.018,00		5.958.715.319,00	
Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana Yang Ditangani Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.558.413.915,00	100	1.670.073.147,00	100	1.837.080.462,00	100	2.020.788.508,00	100	2.222.867.358,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemulihan Bencana	Persentase Sarpras Terdampak Bencana Yang Tertangani dan Pemulihan Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100	132.218.416,00	100	193.474.376,00	100	212.921.814,00	100	234.313.995,00	100	257.845.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa yang Memiliki Kesiapsiagaan Bencana (%)	100	100	100	309.367.669,00	100	2.613.074.805,00	100	2.874.238.286,00	100	3.161.820.515,00	100	3.478.002.566,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN,					4.900.000.000,00		7.350.000.000,00		9.800.000.000,00		12.250.000.000,00		14.700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentasi capaian standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran (%)	85	86	87	4.900.000.000,00	88	7.350.000.000,00	89	9.800.000.000,00	89	12.250.000.000,00	90	14.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					16.010.003.037,00		17.921.003.341,00		19.751.595.505,00		21.726.755.056,00		23.899.430.559,66	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.000.008.277,00		6.910.009.105,00		7.601.010.016,00		8.361.111.017,00		9.197.222.119,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	6.000.008.277,00	100	6.910.009.105,00	100	7.601.010.016,00	100	8.361.111.017,00	100	9.197.222.119,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	40,63	60	62		64		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					115.652.951,00		127.218.246,00		139.940.071,00		153.934.078,00		169.327.486,00	
Meningkatnya Kualitas PPKS yang diberdayakan	Persentase PPKS yang diberdayakan (%)	100	100	100	115.652.951,00	100	127.218.246,00	100	139.940.071,00	100	153.934.078,00	100	169.327.486,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.219.982.500,00		9.041.980.750,00		9.946.178.825,00		10.940.796.708,00		12.034.876.378,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran (%)	100	100	100	8.219.982.500,00	100	9.041.980.750,00	100	9.946.178.825,00	100	10.940.796.708,00	100	12.034.876.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	71	72,43		72,93		73,43		73,93		74,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	kebutuhan dasarnya di luar panti (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					746.378.699,00		821.016.569,00		903.118.226,00		993.430.048,00		1.092.773.053,00	
Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dilakukan Sesuai Standar (%)	100	100	100	746.378.699,00	100	821.016.569,00	100	903.118.226,00	100	993.430.048,00	100	1.092.773.053,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	5,2	5,1	5		4,9		4,8		4,7		4,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	71	72,43		72,93		73,43		73,93		74,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					836.076.610,00		919.684.271,00		1.050.144.527,00		1.155.158.981,00		1.270.674.877,66	
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	836.076.610,00	100	919.684.271,00	100	1.050.144.527,00	100	1.155.158.981,00	100	1.270.674.877,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					91.904.000,00		101.094.400,00		111.203.840,00		122.324.224,00		134.556.646,00	
Terkelolanya Taman Makan Pahlawan Nasional dengan Baik	Persentase Taman makam Pahlawan yang mendapat pengelolaan (%)	100	100	100	91.904.000,00	100	101.094.400,00	100	111.203.840,00	100	122.324.224,00	100	134.556.646,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					14.503.561.844,00		15.839.009.660,00		26.927.262.710,00		18.077.262.710,00		18.177.262.710,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Rencana Ketenagakerjaan	Pesentase Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu ke RTKD (%)	44	45	46	0,00	47	0,00	48	0,00	49	150.000.000,00	50	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.881.735.234,00		1.298.930.000,00		11.298.930.000,00		1.298.930.000,00		1.298.930.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	15,90	16,50	17,00	1.881.735.234,00	17,6	1.298.930.000,00	18,1	11.298.930.000,00	18,6	1.298.930.000,00	18,6	1.298.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) (%)	34,14	34,28	35,01	2.443.836.010,00	35,74	2.443.836.010,00	36,47	2.443.836.010,00	37,20	2.443.836.010,00	37,93	2.443.836.010,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					10.177.990.600,00		12.096.243.650,00		13.184.496.700,00		14.184.496.700,00		14.184.496.700,00	
Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Semakin Kondusif	Indeks Hubungan Industrial (Indeks)	3	3,15	3,20	10.177.990.600,00	3,25	12.096.243.650,00	3,30	13.184.496.700,00	3,35	14.184.496.700,00	3,40	14.184.496.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.211.299.963,00		2.303.338.289,00		2.533.672.118,00		2.787.039.329,00		3.065.743.260,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					315.027.700,00		346.530.470,00		381.183.517,00		419.301.869,00		461.232.055,00	
Meningkatnya Organisasi Perempuan yang Berdaya	Persentase Organisasi Perempuan yang berdaya (%)	16,67	20,8	25	315.027.700,00	33,33	346.530.470,00	41,67	381.183.517,00	50	419.301.869,00	58,33	461.232.055,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					158.969.720,00		491.020.222,00		540.122.244,00		594.134.468,00		653.547.915,00	
Meningkatnya Angka Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan (%)	100	100	100	158.969.720,00	100	491.020.222,00	100	540.122.244,00	100	594.134.468,00	100	653.547.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					259.533.668,00		285.487.034,00		314.035.738,00		345.439.312,00		379.983.243,00	
Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Perempuan yang berdaya (%)	23,3	25	26	259.533.668,00	27	285.487.034,00	28	314.035.738,00	29	345.439.312,00	30	379.983.243,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					177.432.175,00		766.849.393,00		843.534.332,00		927.887.765,00		1.020.676.541,00	
Teredukasinya pemenuhan hak Anak	Persentase anak yang telah teredukasi (%)	52	53	55	177.432.175,00	58	766.849.393,00	61	843.534.332,00	64	927.887.765,00	67	1.020.676.541,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					300.336.700,00		413.451.170,00		454.796.287,00		500.275.915,00		550.303.506,00	
Terlindunginya Hak hak anak dalam kasus kekerasan	Persentase kasus yang terfasilitasi (%)	100	100	100	300.336.700,00	100	413.451.170,00	100	454.796.287,00	100	500.275.915,00	100	550.303.506,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.829.195.256,00		9.351.823.500,00		9.551.419.091,00		9.799.543.663,00		10.049.493.360,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.822.489.882,00		6.292.893.500,00		6.460.563.091,00		6.615.543.663,00		6.817.893.360,00	
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	100	100	5.822.489.882,00	100	6.292.893.500,00	100	6.460.563.091,00	100	6.615.543.663,00	100	6.817.893.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	IKM Layanan UPT (Angka)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	42.500.000	42.500.000	43.000.000		44.000.000		44.500.000		45.000.000		45.500.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					518.392.116,00		522.000.000,00		524.000.000,00		526.000.000,00		528.000.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Neraca Bahan Makanan (Kg/KAP/TH)	0	82,04	82,05	518.392.116,00	82,06	522.000.000,00	82,02	524.000.000,00	82,07	526.000.000,00	82,08	528.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.550.362.731,00		1.582.800.000,00		1.610.856.000,00		1.680.000.000,00		1.713.600.000,00	
Meningkatnya diversifikasi pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	0	4,95	4,85	1.550.362.731,00	4,75	1.582.800.000,00	4,65	1.610.856.000,00	4,55	1.680.000.000,00	4,45	1.713.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					806.731.989,00		820.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		850.000.000,00	
Menurunnya Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	0	7,1	6,5	806.731.989,00	5,9	820.000.000,00	5,3	820.000.000,00	4,7	840.000.000,00	4,1	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					131.218.538,00		134.130.000,00		136.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan (%)	90,9	63,79	63,8	131.218.538,00	63,9	134.130.000,00	63,95	136.000.000,00	64,10	138.000.000,00	64,2	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.000.569.200,00		2.037.711.500,00		2.079.601.875,00		2.126.973.594,00		2.140.435.117,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					227.569.200,00		234.461.500,00		243.076.875,00		253.846.094,00		267.307.617,00	
Meningkatnya Penanganan Sengketa Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	100	227.569.200,00	100	234.461.500,00	100	243.076.875,00	100	253.846.094,00	100	267.307.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi instansi/OPD yang memerlukan tanah selama masa renstra 2025-2029 (%)	100	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Terselenggaranya Redistribusi Tanah dan Penataan Pemanfaatan Tanah	Persentase Capaian Luasan Objek Redistribusi Tanah dan Jumlah Subjek Penerima Reforma Agraria (Kantor Pertanahan HST) (%)	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tercapainya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan tanah Ulayat yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00	
Tercapainya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	100	100	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00	
Dikeluarkannya Rekomtek Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah / izin Perubahan dan Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					352.500.000,00		382.750.000,00		416.025.000,00		452.627.500,00		452.627.500,00	
Terselenggaranya Redistribusi Tanah dan Penataan Pemanfaatan Tanah	Persentase penatagunaan lahan yang sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	352.500.000,00	100	382.750.000,00	100	416.025.000,00	100	452.627.500,00	100	452.627.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					29.902.044.001,00		72.786.236.929,00		73.051.921.102,00		74.804.245.112,00		73.853.544.324,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.560.014.329,00		10.182.500.000,00		9.897.500.000,00		10.337.500.000,00		10.722.500.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	8.560.014.329,00	100	10.182.500.000,00	100	9.897.500.000,00	100	10.337.500.000,00	100	10.722.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	75,855	76,355	76,855		77,355		77,855		78,355		78,855		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	IKM Layanan UPT (Angka)	87,085	88,015	88,45		88,775		88,97		89,315		89,495		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	370.000.000	370.000.000	370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					431.822.680,00		1.091.112.700,00		1.151.112.700,00		1.586.112.700,00		871.112.700,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkesuaian dengan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	431.822.680,00	100	1.091.112.700,00	100	1.151.112.700,00	100	1.586.112.700,00	100	871.112.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.206.981.524,00		1.364.254.466,00		1.500.679.913,00		1.650.747.904,00		1.815.822.695,00	
Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu (%)	93	94	95	1.206.981.524,00	96	1.364.254.466,00	97	1.500.679.913,00	98	1.650.747.904,00	98	1.815.822.695,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.308.530.900,00		1.441.001.463,00		1.710.260.189,00		2.352.516.208,00		1.792.690.629,00	
Meningkatnya Kualitas Lahan yang Hijau dan Berseri	Persentase RTH Hijau (%)	100	100	100	1.308.530.900,00	100	1.441.001.463,00	100	1.710.260.189,00	100	2.352.516.208,00	100	1.792.690.629,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					175.600.000,00		1.202.775.000,00		1.202.775.000,00		1.202.775.000,00		891.825.000,00	
Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3	Persentase Penghasil yang patuh terhadap ketentuan pengelolaan B3/limbah B3 (%)	0	0	25	175.600.000,00	30	1.202.775.000,00	35	1.202.775.000,00	40	1.202.775.000,00	50	891.825.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					281.579.012,00		285.470.800,00		300.470.800,00		315.470.800,00		330.470.800,00	
Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi Lingkungan Hidup (%)	56	59	62	281.579.012,00	65	285.470.800,00	68	300.470.800,00	71	315.470.800,00	71	330.470.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					54.981.200,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Adat/Kearifan Lokal Yang Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (%)	16,12	17	18	54.981.200,00	19	4.935.000.000,00	20	4.935.000.000,00	21	4.935.000.000,00	22	4.935.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					88.393.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00	
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Terlatih Dalam Pengelolaan LH (%)	16,12	17	18	88.393.000,00	19	3.213.000.000,00	20	3.213.000.000,00	21	3.213.000.000,00	22	3.213.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					388.376.356,00		429.426.100,00		439.426.100,00		449.426.100,00		459.426.100,00	
Meningkatnya Peran Serta Lembaga Pendidikan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase lembaga pendidikan yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup (%)	64	65	66	388.376.356,00	67	429.426.100,00	68	439.426.100,00	69	449.426.100,00	70	459.426.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					224.739.200,00		419.696.400,00		479.696.400,00		539.696.400,00		599.696.400,00	
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	224.739.200,00	100	419.696.400,00	100	479.696.400,00	100	539.696.400,00	100	599.696.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					17.181.025.800,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Terkelola (%)	58,41	60	65	17.181.025.800,00	70	48.222.000.000,00	80	48.222.000.000,00	90	48.222.000.000,00	100	48.222.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.803.728.971,00		11.094.676.382,00		12.204.144.021,00		13.424.558.422,00		14.767.014.264,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.101.116.671,00		8.568.711.402,00		9.425.582.542,00		10.368.140.796,00		11.404.954.876,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	100	100	100	7.101.116.671,00	100	8.568.711.402,00	100	9.425.582.542,00	100	10.368.140.796,00	100	11.404.954.876,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					347.661.950,00		921.742.195,00		1.013.916.415,00		1.115.308.056,00		1.226.838.862,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penduduk	Persentase Layanan Adminduk yang Selesai Tepat Waktu (%)	100	100	100	347.661.950,00	100	921.742.195,00	100	1.013.916.415,00	100	1.115.308.056,00	100	1.226.838.862,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					546.065.900,00		710.672.490,00		781.739.739,00		859.913.713,00		945.905.084,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Pencatatan Sipil yang Selesai Tepat Waktu (%)	100	100	100	546.065.900,00	100	710.672.490,00	100	781.739.739,00	100	859.913.713,00	100	945.905.084,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					668.810.200,00		739.468.620,00		813.415.482,00		894.757.030,00		984.232.733,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Persentase data kependudukan yang ganda dan anomali yang diselesaikan (%)	100	100	100	668.810.200,00	100	739.468.620,00	100	813.415.482,00	100	894.757.030,00	100	984.232.733,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					140.074.250,00		154.081.675,00		169.489.843,00		186.438.827,00		205.082.709,00	
Meningkatnya minat pemanfaatan data oleh Badan Hukum dan Perangkat Daerah	Persentase data kependudukan dalam bentuk profil kependudukan dan agregat kependudukan yang disediakan (%)	100	100	100	140.074.250,00	100	154.081.675,00	100	169.489.843,00	100	186.438.827,00	100	205.082.709,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.034.000.000,00		19.275.557.729,00		18.620.557.062,00		20.384.050.166,00		22.733.714.937,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.657.419.354,00		8.557.057.729,00		6.679.757.062,00		6.835.250.166,00		7.420.474.937,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	4.657.419.354,00	100	8.557.057.729,00	100	6.679.757.062,00	100	6.835.250.166,00	100	7.420.474.937,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	44,4	44,9	45,4		45,9		46,4		46,9		47,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					0,00		987.000.000,00		1.174.000.000,00		1.436.600.000,00		1.676.800.000,00	
Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan akses sarana prasarana yang baik desa mendukung upaya mendukung penanggulangan bencana di Desa	Indeks Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan di Desa (%)		6,62	6,62	0,00	6,62	987.000.000,00	8,19	1.174.000.000,00	8,19	1.436.600.000,00	9,45	1.676.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Penanggulangan Bencana di Desa (%)		2,21	2,21		3,47		3,47		3,47		3,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Kondisi Akses Jalan di Desa (%)		2,83	2,83		2,83		3,14		3,14		3,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Kemudahan Akses di Desa (%)		3,14	3,14		3,61		3,61		3,93		3,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa dengan Penataan Desa sesuai ketentuan (%)		6,83	15,53		22,36		29,19		36,02		40,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					0,00		530.000.000,00		636.000.000,00		775.200.000,00		930.240.000,00	
Meningkatnya Produksi Desa dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Sub Dimensi Produksi Desa (%)		4,72	4,72	0,00	4,72	530.000.000,00	5,98	636.000.000,00	6,29	775.200.000,00	6,29	930.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa (%)		15,56	15,56		16,19		16,35		16,82		17,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.515.760.950,00		4.707.500.000,00		5.247.000.000,00		5.992.840.000,00		6.752.208.000,00	
Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)		5,20	5,20	2.515.760.950,00	5,20	4.707.500.000,00	5,35	5.247.000.000,00	5,35	5.992.840.000,00	5,51	6.752.208.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)		4,25	4,88		5,19		5,35		5,35		5,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.860.819.696,00		4.494.000.000,00		4.883.800.000,00		5.344.160.000,00		5.953.992.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas hidup di desa melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, utilitas dasar, aktifitas dan fasilitas sosial	Indeks Sub Dimensi Pendidikan di Desa (%)		5,03	5,34	2.860.819.696,00	5,66	4.494.000.000,00	6,13	4.883.800.000,00	6,44	5.344.160.000,00	6,60	5.953.992.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Layanan Kesehatan di Desa (%)		14,32	14,80		15,11		15,74		15,74		15,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Layanan Utilitas Di Desa (%)		3,63	3,63		3,63		3,94		3,94		3,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Aktifitas Sosial di Desa (%)		9,29	9,44		9,44		9,60		10,07		10,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat di Desa (%)		2,52	2,52		2,68		2,84		2,84		2,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.500.000.000,00		12.822.233.456,00		14.060.456.802,00		15.418.101.853,00		16.906.672.139,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					2.172.645.000,00		4.025.958.780,00		4.428.554.658,00		4.871.409.495,00		5.358.550.545,00	
Termanfaatkannya data informasi keluarga yang tepat sasaran	Persentase pemanfaatan data informasi keluarga (%)	100	100	100	2.172.645.000,00	100	4.025.958.780,00	100	4.428.554.658,00	100	4.871.409.495,00	100	5.358.550.545,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	26,9	26,8	26,7		26,7		26,6		26,5		26,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Kepadatan Penduduk (Orang/km2)	152	155	158		161		164		167		170		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					811.431.000,00		1.043.174.100,00		1.147.491.510,00		1.262.240.661,00		1.388.464.727,00	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif (%)	79,05	79,5	79,5	811.431.000,00	80	1.043.174.100,00	80	1.147.491.510,00	81	1.262.240.661,00	81	1.388.464.727,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	92,4	92,5	92,6		92,7		92,8		92,9		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.515.924.000,00		7.753.100.576,00		8.484.410.634,00		9.284.451.697,00		10.159.656.867,00	
Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Tribina (%)	47,14	50,3	50,89	3.515.924.000,00	52,07	7.753.100.576,00	53,25	8.484.410.634,00	54,44	9.284.451.697,00	55,62	10.159.656.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59	61,1	62,9		64,7		66,3		67,7		69,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	85,9	86,9	87,9		88,8		89,7		90,5		91,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					14.097.955.999,00		21.405.000.000,00		20.662.500.000,00		26.995.000.000,00		23.202.500.000,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.097.955.999,00		21.405.000.000,00		20.662.500.000,00		26.995.000.000,00		23.202.500.000,00	
Meningkatnya kualitas Lalu Lintas, Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas, Meningkatnya Kendaraan Laik Jalan, Meningkatnya Pengguna Transportasi	Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai standar (%)	0	0	3,77	14.097.955.999,00	3,8	21.405.000.000,00	3,85	20.662.500.000,00	3,9	26.995.000.000,00	4	23.202.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Darat, Meningkatnya Kualitas Terminal Tipe C														
	Persentase pelanggaran lalu lintas (%)	14	12	10		8		6		4		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kendaraan Laik Jalan (%)	92	92	92		93		93		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan (Nilai)	7,56	7,4	7,2		7		6,8		6,6		6,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat (%)	0	0	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Terminal Tipe C yang Layak (%)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.219.997.606,00		16.854.060.000,00		19.382.195.000,00		22.289.552.000,00		25.633.007.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.464.129.577,00		5.158.225.000,00		5.931.974.000,00		6.821.785.000,00		7.845.064.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)		100	100	3.464.129.577,00	100	5.158.225.000,00	100	5.931.974.000,00	100	6.821.785.000,00	100	7.845.064.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	82	84	86		88		90		92		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	sesuai standar operasional prosedur (SOP) (%)													Komunikasi Dan Informatika
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai standar operasional prosedur (SOP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.800.999.845,00		4.143.018.000,00		4.764.477.000,00		5.479.154.000,00		6.301.033.000,00	
Akses Informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.800.999.845,00	100	4.143.018.000,00	100	4.764.477.000,00	100	5.479.154.000,00	100	6.301.033.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten (%)		30	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase konten informasi terkait program	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (%)													menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. (Angka)			1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Sertifikat)			8		16		24		32		37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah Sarana dan Prasarana Informasi (Angka)	8	8	8		8		8		8		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.954.868.184,00		7.552.817.000,00		8.685.744.000,00		9.988.613.000,00		11.486.910.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan TIK pada perangkat daerah	Persentase PD yang menerima layanan TIK sesuai standar (%)	100	100	100	3.954.868.184,00	100	7.552.817.000,00	100	8.685.744.000,00	100	9.988.613.000,00	100	11.486.910.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo (%)	50	60	70		80		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (%)													Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment (Angka)	3	5	7		9		11		13		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar (%)	61,1	62	70		80		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase data yang dapat berbagi pakai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah (%)		10	20		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (%)			5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)													Komunikasi Dan Informatika
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Cakupan Layanan telekomunikasi (%)	92,9	94,08	95,27		96,45		98,22		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	97,03	97,5	98		98,5		99		99,5		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik (%)	26,6	26,6	38,6		50,6		62,6		74,6		86,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)	6,66	13,32	19,98		26,64		33,3		39,96		46,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Penduduk Pengguna Telepon Seluler (%)	69	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet (%)	89	90	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Proporsi individu yang menggunakan internet (%)	69	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan seratoptik(kumulatif) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Literasi Digital (Indeks)	3,49	3,54	3,59		3,64		3,69		3,74		3,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (%)	20	20	36		52		68		84		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	36	36	36		36		36		36		36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city (%)		50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					9.519.281.065,00		13.755.937.500,00		13.910.527.060,00		14.065.121.620,00		14.219.706.180,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.893.128.520,00		8.528.067.250,00		8.682.656.810,00		8.837.251.370,00		8.991.835.930,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	80	80	82	7.893.128.520,00	85	8.528.067.250,00	85	8.682.656.810,00	85	8.837.251.370,00	85	8.991.835.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Persepsi Internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat (Indeks)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	IKM Layanan UPT (Angka)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					57.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi (%)	67,50	70,00	72,50	57.123.250,00	75,00	557.123.250,00	77,50	557.123.250,00	82,50	557.123.250,00	85,00	557.123.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	67,50	75	80		85		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					736.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00	
Meningkatnya kapasitas usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usaha (%)	67,50	70,00	72,50	736.933.400,00	75,00	1.501.933.400,00	77,50	1.501.933.400,00	82,50	1.501.933.400,00	82,50	1.501.933.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi (%)	0	0	3,33		3,00		4,00		5,00		5,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase KSP/USP Sehat (%)	67,50	70,00	72,50		77,50		82,50		87,50		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					832.095.895,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan UM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	29,40	29,7	29,9	832.095.895,00	30,2	1.618.813.600,00	30,4	1.618.813.600,00	30,7	1.618.813.600,00	30,7	1.618.813.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Meningkatnya penjualan usaha mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro (%)	33,14	34,31	36,07	0,00	38,41	1.550.000.000,00	41,33	1.550.000.000,00	44,85	1.550.000.000,00	44,85	1.550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.037.960.751,00		10.187.760.751,00		10.327.760.751,00		10.124.307.351,00		9.939.307.351,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.976.116.799,00		8.001.116.799,00		8.141.116.799,00		7.787.663.399,00		7.787.663.399,00	
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	80	81	7.976.116.799,00	82	8.001.116.799,00	83	8.141.116.799,00	84	7.787.663.399,00	85	7.787.663.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	63,255	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					142.371.800,00		142.371.800,00		142.371.800,00		392.371.800,00		192.371.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi (%)	9,04	9,05	9,24	142.371.800,00	9,48	142.371.800,00	9,73	142.371.800,00	9,97	392.371.800,00	10	192.371.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					91.107.500,00		191.107.500,00		191.107.500,00		91.107.500,00		91.107.500,00	
Meningkatnya Minat Investasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	0,03	0,10	0,20	91.107.500,00	0,20	191.107.500,00	0,21	191.107.500,00	0,25	91.107.500,00	0,29	91.107.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.605.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)	90,17	90,20	90,22	1.605.994.372,00	90,24	1.620.994.372,00	90,26	1.620.994.372,00	90,28	1.620.994.372,00	90,30	1.620.994.372,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					105.200.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai LKPM Sesuai Standar (%)	16,86	17	18	105.200.000,00	19	115.000.000,00	20	115.000.000,00	21	115.000.000,00	22	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00	
Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi Penanaman Modal yang Valid (%)	100	100	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					25.250.000.000,00		45.013.332.965,00		41.453.943.465,00		43.166.014.615,00		47.746.270.061,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.750.000.000,00		12.551.219.965,00		7.557.219.965,00		7.563.219.965,00		8.319.541.961,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	80,95	81,02	82,00	5.750.000.000,00	82,50	12.551.219.965,00	82,75	7.557.219.965,00	83,00	7.563.219.965,00	83,00	8.319.541.961,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	84	85	86		87		88		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	74,24	75	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	79	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	170.000.000	178.000.000	186.000.000		194.000.000		202.000.000		210.000.000		218.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.700.613.000,00		3.095.652.000,00		3.350.216.500,00		3.615.237.650,00		4.246.416.100,00	
Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan (%)	1,4	1,5	1,6	2.700.613.000,00	1,7	3.095.652.000,00	1,8	3.350.216.500,00	1,9	3.615.237.650,00	2	4.246.416.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					16.199.387.000,00		28.866.461.000,00		30.046.507.000,00		31.487.557.000,00		34.630.312.000,00	
Meningkatnya kompetensi atlet olahraga Pendidikan dan Prestasi	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan (%)	20	20	30	16.199.387.000,00	40	28.866.461.000,00	50	30.046.507.000,00	60	31.487.557.000,00	70	34.630.312.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi (%)	20	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka Yang Aktif (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					330.325.200,00		681.548.000,00		783.783.000,00		901.352.000,00		1.036.557.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					330.325.200,00		681.548.000,00		783.783.000,00		901.352.000,00		1.036.557.000,00	
Layanan Data Terbuka Terselenggara dengan Baik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	330.325.200,00	100	681.548.000,00	100	783.783.000,00	100	901.352.000,00	100	1.036.557.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Tersedianya sistem data dan statistik terintegrasi (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Tersedianya buku profil daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan (Angka)	6	8	10		12		14		16		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (Angka)	6	8	10		12		14		16		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral (%)	33,3	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase kelengkapan metadata indicator sektoral (%)	33,3	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. (%)	12	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					299.677.194,00		465.181.000,00		534.960.000,00		615.207.000,00		707.492.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					299.677.194,00		465.181.000,00		534.960.000,00		615.207.000,00		707.492.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PerangkatDaerah (%)	100	100	100	299.677.194,00	100	465.181.000,00	100	534.960.000,00	100	615.207.000,00	100	707.492.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan (%)			100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Sarana dan Prasarana Keamanan Informasi yang tersedia (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah (%)			50		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (%)			100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.688.240.230,00		5.445.230.460,00		10.071.710.920,00		19.074.671.840,00		36.780.593.680,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.470.630.230,00		2.741.260.460,00		5.882.520.920,00		11.765.041.840,00		23.530.083.680,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	20	22	24	1.470.630.230,00	26	2.741.260.460,00	28	5.882.520.920,00	30	11.765.041.840,00	35	23.530.083.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					325.000.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional (%)	80	85	90	325.000.000,00	95	1.068.750.000,00	96	1.068.750.000,00	98	1.068.750.000,00	100	1.068.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku/komunitas sejarah tradisional yang berpartisipasi dalam program pembinaan sejarah (%)	80	85	90	150.000.000,00	95	150.000.000,00	96	150.000.000,00	98	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					407.600.000,00		815.200.000,00		1.630.400.000,00		3.260.800.000,00		6.521.600.000,00	
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	95	95	95	407.600.000,00	95	815.200.000,00	95	1.630.400.000,00	95	3.260.800.000,00	95	6.521.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					335.010.000,00		670.020.000,00		1.340.040.000,00		2.680.080.000,00		5.360.160.000,00	
Persentase Museum yang dikelola	Persentase museum yang memiliki koleksi terdaftar dan terdokumentasi (%)	90	95	95	335.010.000,00	95	670.020.000,00	95	1.340.040.000,00	95	2.680.080.000,00	95	5.360.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.044.168.025,00		11.170.016.858,00		11.334.773.360,00		11.650.795.399,00		11.941.533.407,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.589.261.442,00		5.491.307.658,00		5.508.464.160,00		5.651.886.199,00		5.775.024.207,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	82,105	83	85	3.589.261.442,00	87	5.491.307.658,00	90	5.508.464.160,00	91	5.651.886.199,00	92	5.775.024.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.454.906.583,00		5.678.709.200,00		5.826.309.200,00		5.998.909.200,00		6.166.509.200,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks)	68	69	70	4.454.906.583,00	72	5.678.709.200,00	74	5.826.309.200,00	76	5.998.909.200,00	78	6.166.509.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					499.971.975,00		1.080.000.000,00		1.122.200.000,00		1.165.270.000,00		1.208.897.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					193.062.175,00		470.000.000,00		502.200.000,00		535.270.000,00		568.897.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	Persentase SKPD yang mengelola arsip dinamis dan statis dengan baku. (%)	90	100	100	193.062.175,00	100	470.000.000,00	100	502.200.000,00	100	535.270.000,00	100	568.897.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					306.909.800,00		610.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		640.000.000,00	
Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah (SKPD, Kelurahan dan Desa) dengan retensi dibawah 10 tahun (%)	90	100	100	306.909.800,00	100	610.000.000,00	100	620.000.000,00	100	630.000.000,00	100	640.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.895.801.431,00		7.294.000.000,00		7.402.780.000,00		7.566.346.000,00		7.678.263.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					965.773.717,00		1.070.000.000,00		1.090.000.000,00		1.110.000.000,00		1.130.000.000,00	
Optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil (Angka)	0	3.104,62	3.197,75	965.773.717,00	3.293,69	1.070.000.000,00	3.392,50	1.090.000.000,00	3.494,27	1.110.000.000,00	3.599,10	1.130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.429.359.346,00		3.580.000.000,00		3.606.000.000,00		3.683.000.000,00		3.710.000.000,00	
Optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0	3.104,62	3.197,75	3.429.359.346,00	3.293,69	3.580.000.000,00	3.392,50	3.606.000.000,00	3.494,27	3.683.000.000,00	3.599,10	3.710.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.881.274.677,00		1.930.000.000,00		1.978.500.000,00		2.027.500.000,00		2.077.500.000,00	
Optimalnya Pengelolaan Pengawasan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	1.881.274.677,00	100	1.930.000.000,00	100	1.978.500.000,00	100	2.027.500.000,00	100	2.077.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					619.393.691,00		714.000.000,00		728.280.000,00		745.846.000,00		760.763.000,00	
Meningkatnya Produksi Usaha Olahan Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil (%)	0	2	2	619.393.691,00	2	714.000.000,00	2	728.280.000,00	2	745.846.000,00	2	760.763.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.648.240.997,97		8.324.332.393,00		8.791.962.811,00		9.288.546.352,00		10.217.400.686,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.706.175.200,00		5.442.336.735,00		5.714.453.571,00		6.000.176.250,00		6.600.193.874,00	
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata (%)	56,7	66,7	83,3	3.706.175.200,00	84	5.442.336.735,00	85	5.714.453.571,00	86	6.000.176.250,00	87	6.600.193.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.003.624.967,97		1.849.711.658,00		1.941.997.240,00		2.039.307.102,00		2.243.237.812,00	
Meningkatnya efektifitas pemasaran Pariwisata	Cakupan Wilayah Pemasaran Pariwisata (Event)	50	50	60	3.003.624.967,97	70	1.849.711.658,00	80	1.941.997.240,00	90	2.039.307.102,00	100	2.243.237.812,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					938.440.830,00		1.032.284.000,00		1.135.512.000,00		1.249.063.000,00		1.373.969.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan SDM dan ekraf yang kompeten (%)	58	71	100	938.440.830,00	100	1.032.284.000,00	100	1.135.512.000,00	100	1.249.063.000,00	100	1.373.969.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					55.185.000.000,00		30.933.469.027,00		33.250.950.236,00		35.832.604.796,00		36.475.983.304,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.072.770.885,00		14.522.068.110,00		15.574.789.191,00		16.727.782.380,00		17.091.074.888,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	25.072.770.885,00	100	14.522.068.110,00	100	15.574.789.191,00	100	16.727.782.380,00	100	17.091.074.888,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	71,46	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	136.500.000	146.250.000	150.000.000		161.250.000		165.000.000		168.750.000		172.500.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.487.076.759,00		3.055.171.000,00		2.935.171.000,00		3.128.361.000,00		2.978.361.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi (%)	-.605	2,5	2,5	9.487.076.759,00	2,5	3.055.171.000,00	2,5	2.935.171.000,00	2,5	3.128.361.000,00	2,5	2.978.361.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung (%)	2,09	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai (%)	0	0,2	0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Besar (%)	-34,19	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Rawit (%)	0,87	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang Merah (%)	-3,5	0,60	0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk (%)	0,64	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Sapi (%)	3,51	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kerbau (%)	0,1	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Domba (%)	0,065	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kambing (%)	0,061	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ayam Petelur (%)	0	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Itik Petelur (%)	0	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					17.339.934.468,00		10.078.875.015,00		11.293.574.115,00		12.054.028.815,00		12.615.856.015,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemanfaatan Bantuan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	0	1,32	3,42	7.005.711.166,00	5,58	5.573.958.000,00	8,16	6.771.471.000,00	11,30	7.513.021.000,00	15,00	8.054.053.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Perkebunan (%)	0	15	55		65		75		85		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Peternakan (%)	0	5,24	10,84		16,78		23,07		30,07		37,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Perkebunan	Persentase Pemanfaatan Lahan Perkebunan (%)	6,36	8,48	11,51	199.960.000,00	14,69	4.333.055.665,00	18,03	4.333.055.665,00	21,51	4.333.055.665,00	25,30	4.333.055.665,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi (%)	100	100	100	10.134.263.302,00	100	171.861.350,00	100	189.047.450,00	100	207.952.150,00	100	228.747.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					442.097.900,00		814.523.842,00		895.976.226,00		895.573.848,00		1.084.131.232,00	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Sapi (%)	3,51	10	10	442.097.900,00	10	814.523.842,00	10	895.976.226,00	10	895.573.848,00	10	1.084.131.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kerbau (%)	0,1	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Domba (%)	0,065	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kambing (%)	0,061	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ayam Petelur (%)	0	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Itik Petelur (%)	0	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN					828.442.300,00		691.170.930,00		724.831.023,00		742.365.191,00		779.146.377,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi dari Bencana (%)	0	0,83	2,11	164.700.000,00	2,13	488.289.500,00	2,16	507.286.450,00	2,19	508.691.161,00	2,22	527.729.944,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Populasi ternak yang terlindungi (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi (%)	-6,05	2,5	2,5	663.742.300,00	2,5	202.881.430,00	2,5	217.544.573,00	2,5	233.674.030,00	2,5	251.416.433,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung (%)	2,09	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai (%)	0	0,2	0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Besar (%)	-34,19	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Rawit (%)	0,8	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang Merah (%)	-3,5	0,60	0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk (%)	0,64	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Karet (%)	0,085	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa (%)	0,02	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kopi (%)	0,2	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Lada (%)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.014.677.688,00		1.771.660.130,00		1.826.608.681,00		2.284.493.562,00		1.927.413.792,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian dengan Kinerja Baik (%)	100	100	100	2.014.677.688,00	100	1.771.660.130,00	100	1.826.608.681,00	100	2.284.493.562,00	100	1.927.413.792,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	0	27	29		30		31		32		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.606.476.000,00		18.899.747.200,00		18.999.747.200,00		18.999.747.200,00		18.999.747.200,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga (%)	23,00	37,15	51,31	100.000.000,00	65,46	100.000.000,00	79,62	100.000.000,00	97,31	100.000.000,00	98,00	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.863.132.000,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI (%)	65	70	75	4.863.132.000,00	80	16.608.745.200,00	85	16.608.745.200,00	90	16.608.745.200,00	90	16.608.745.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					0,00		391.002.000,00		391.002.000,00		391.002.000,00		391.002.000,00	
Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	7,23	7,25	7,27	0,00	7,29	391.002.000,00	7,31	391.002.000,00	7,33	391.002.000,00	7,35	391.002.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Volume Ekspor dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekspor Barang (%)	0	0	1,00	100.000.000,00	1,10	100.000.000,00	1,20	100.000.000,00	1,30	100.000.000,00	1,40	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					90.945.000,00		450.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga (%)	23,00	37,15	51,31	90.945.000,00	65,46	450.000.000,00	79,62	550.000.000,00	97,31	550.000.000,00	97,31	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					452.399.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya volume ekspor dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan Total Perdagangan Dalam Daerah (%)	0	0	1,66	452.399.000,00	1,80	1.250.000.000,00	2,00	1.250.000.000,00	2,20	1.250.000.000,00	2,25	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan Ekspor Barang (%)	0	0	1,00		1,10		1,20		1,30		1,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					204.990.000,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					150.000.000,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00	
Meningkatnya akses pasar IKM	Persentase IKM yang Mendapatkan Perluasan Akses Pasar (%)	19,35	20,70	22,04	0,00	23,39	2.600.000.000,00	24,73	2.600.000.000,00	26,08	2.600.000.000,00	26,10	2.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi (%)	19,35	20,70	22,04	0,00	23,39	1.963.740.500,00	24,73	1.963.740.500,00	26,08	1.963.740.500,00	27	1.963.740.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Sentra Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Sentra Industri Pengolahan (%)	10	20	30	150.000.000,00	50	150.000.000,00	70	150.000.000,00	90	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					45.450.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya legalitas IKM	Persentase legalitas IKM (%)	37,1	41,13	45,16	45.450.000,00	45,2	200.000.000,00	49,23	200.000.000,00	53,27	200.000.000,00	57,3	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					9.540.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya fasilitasi izin usaha bagi IKM	Persentase izin usaha IKM yang masuk kedalam SIINAS (%)	37,10	42,47	47,85	9.540.000,00	53,23	100.000.000,00	58,60	100.000.000,00	63,98	100.000.000,00	65	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					88.875.200.000,00		110.787.522.948,00		118.575.990.046,00		126.900.333.198,00		133.296.560.583,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.791.226.554,00		84.402.806.095,00		90.326.686.013,00		96.666.819.883,00		101.531.971.601,00	
Meningkatnya Kepatuhan Pemenuhan Standart Pelayanan	Persentase OPD Yang Telah Memilii SP Yang Up to Date (%)	0	100	100	377.740.033,00	100	698.604.107,00	100	748.958.394,00	100	802.982.682,00	100	846.060.016,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Sekretariat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Ukuran dan Fungsi Organisasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	0	41,30	42,00	275.138.350,00	43,00	531.899.364,00	44,00	569.132.320,00	45,00	608.971.582,00	45,00	639.420.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sarana dan Prasarana dan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (%)	0	100	100	13.907.044.312,00	100	25.142.381.848,00	100	26.913.073.575,00	100	28.808.786.223,00	100	30.270.854.286,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Aset Setda Dalam Kondisi Baik (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas	Nilai Komponen Laporan Kinerja (Nilai)	11,11	11,18	11,21	424.037.688,00	11,25	813.376.452,00	11,30	871.583.304,00	11,35	933.991.685,00	11,35	983.253.445,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Persentase Laporan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP (%)	0	100	100	188.577.778,00	100	381.711.818,00	100	409.817.644,00	100	440.029.480,00	100	464.826.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Rata-rata Kecepatan Layanan Kesetdaan	Persentase Rata-rata Waktu Layanan (%)	0	100	100	18.538.673.613,00	100	25.532.744.115,00	100	27.319.896.201,00	100	29.232.148.935,00	100	30.693.656.379,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Layanan Sekretariat Daerah Yang Di Berikan Tepat Waktu/sesuai SP (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	50,94	51,00	51,50		52,00		52,20		52,50		53,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Rata-rata Ketepatan Layanan KDH dan WKDH	Persentase Layanan KDH dan WKDH Yang Di Berikan Tepat Waktu (%)	0	100	100	13.075.056.555,00	100	16.709.083.373,00	100	17.878.719.208,00	100	19.130.229.552,00	100	20.086.741.031,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Sekretariat Daerah
Menurunnya Aduan Atas Layanan Kesetdaan	Persentase Aduan Yang Masuk (%)	0	100	100	8.004.958.225,00	100	14.593.005.018,00	100	15.615.505.367,00	100	16.709.679.744,00	100	17.547.160.229,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					31.808.175.401,00		22.838.415.227,00		24.453.661.294,00		26.170.895.584,00		27.495.710.364,00	
Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Kepemerintahan	Nilai Pelayanan Kepemerintahan Yang Tepat Waktu (Nilai)	0	100	100	506.978.000,00	100	374.332.472,00	100	417.092.745,00	100	451.767.237,00	100	490.625.599,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kepatuhan Pemenuhan SPM	LPPD Yang Disampaikan Tepat Waktu (Laporan)	1	1	1	1.949.302.822,00	1	1.530.957.796,00	1	1.638.124.842,00	1	1.752.793.581,00	1	1.840.433.260,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase OPD Yang Telah Memiliki SPM Yang Up to Date (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Peraturan & Keselarasan Kebijakan Daerah	Persentase kebjakan yang terbit sesuai dengan perencanaan (%)	0	100	100	1.201.023.209,00	100	1.894.048.643,00	100	2.026.632.048,00	100	2.168.496.292,00	100	2.276.921.106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan yang telah diharmoniskan/ selara (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Nilai Kepuasan Pelayanan Bantuan Kemasyarakatan (Nilai)	0	82,00	82,10	28.150.871.370,00	82,20	19.039.076.316,00	82,30	20.371.811.659,00	82,40	21.797.838.474,00	82,40	22.887.730.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.275.798.045,00		3.546.301.626,00		3.795.642.739,00		4.062.617.731,00		4.268.878.618,00	
Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	0	3	3	82.854.750,00	3	180.586.933,00	3	193.228.018,00	3	206.753.980,00	3	217.091.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	81,98	82,80	83,62		84,46		85,30		86,16		87,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kesehatan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD Yang Sehat (Angka)	1	1	1	520.230.135,00	1	487.452.372,00	1	521.574.038,00	1	558.084.220,00	1	585.988.431,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Jumlah BLUD Yang Sehat (Angka)	5	6	7		8		9		10		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kompetensi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase SDM Pelaksana PBJ Yang Memiliki Sertifikasi (%)	0	100	100	430.735.850,00	100	851.192.393,00	100	910.775.861,00	100	974.530.171,00	100	1.023.256.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Koordinasi Pemantauan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pemantauan Sumber Daya Alam (%)	0	100	100	39.940.375,00	100	104.882.305,00	100	114.024.066,00	100	123.985.751,00	100	133.815.039,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	88,97	89,86	90,76	367.353.365,00	91,66	530.295.549,00	92,58	567.416.237,00	93,51	607.135.374,00	94,44	637.492.142,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Daerah	Persentase Proyek Infrastruktur Daerah yang Terealisasi (%)	0	100	100	169.457.530,00	100	219.448.477,00	100	234.109.870,00	100	249.797.561,00	100	261.787.440,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terjaganya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi ((%))	1,11			665.226.040,00		1.172.443.597,00		1.254.514.649,00		1.342.330.674,00		1.409.447.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					65.150.000.000,00		148.927.685.895,00		148.181.687.935,00		97.050.157.093,00		96.305.366.035,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.344.822.594,00		105.677.430.000,00		100.767.031.350,00		44.084.244.850,00		38.859.404.350,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	80	81	40.344.822.594,00	82	105.677.430.000,00	83	100.767.031.350,00	84	44.084.244.850,00	85	38.859.404.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat DPRD
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	73,655	76	78		80		82		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					24.805.177.406,00		43.250.255.895,00		47.414.656.585,00		52.965.912.243,00		57.445.961.685,00	
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi budgeting	Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi (%)	0	84	85	784.582.588,00	86	554.400.000,00	88	609.840.000,00	89	670.824.000,00	90	737.906.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Legislasi	Persentase pengesahan perda yang tepat waktu (%)	82	83	84	3.779.453.236,00	85	14.149.922.115,00	86	15.564.914.327,00	87	17.121.405.759,00	87,5	18.833.546.335,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan yang Difasilitasi (%)	0	84	86	229.864.218,00	87	217.800.000,00	88	239.580.000,00	89	263.538.000,00	90	289.891.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas DPRD (%)	0	84	86	20.011.277.364,00	87	28.328.133.780,00	88	31.000.322.258,00	89	34.910.144.484,00	90	37.584.617.150,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.508.157.672,00		12.499.068.936,00		13.225.631.435,00		13.265.688.955,00		13.529.766.865,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.412.460.216,00		6.292.799.696,00		6.563.099.696,00		6.563.225.496,00		6.895.825.496,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	100	100	7.412.460.216,00	100	6.292.799.696,00	100	6.563.099.696,00	100	6.563.225.496,00	100	6.895.825.496,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan tepat Waktu (%)	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	91,91	92	93		94		95		96		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)													menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.958.373.710,00		3.343.466.710,00		3.562.514.140,00		3.514.051.510,00		3.343.466.710,00	
Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	100	1.958.373.710,00	100	3.343.466.710,00	100	3.562.514.140,00	100	3.514.051.510,00	100	3.343.466.710,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase perangkat daerah dengan MR berjalan baik (%)	0	0	10		25		40		60		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase perangkat daerah dengan capaian IKU minimal sebesar 90% (%)	91,67	92,67	93,67		94,67		95,67		96,67		97,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.137.323.746,00		2.862.802.530,00		3.100.017.599,00		3.188.411.949,00		3.290.474.659,00	
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	2.137.323.746,00	100	2.862.802.530,00	100	3.100.017.599,00	100	3.188.411.949,00	100	3.290.474.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					276.021.274.953,90		334.178.978.462,55		366.919.510.739,27		402.906.927.614,95		442.450.702.465,70	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.402.547.105,90		18.722.679.194,85		20.147.770.115,34		21.699.610.547,90		23.376.231.328,50	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	8.890.146.509,00	100	9.779.161.160,00	100	10.757.077.276,00	100	11.832.785.003,00	100	13.016.063.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Keuangan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	83,965	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	70	75		77,5		80		82,5		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	100	100	8.512.400.596,90	100	8.943.518.034,85	100	9.390.692.839,34	100	9.866.825.544,90	100	10.360.167.824,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	43,36	44,18	45,20		46,07		46,95		47,54		48,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					252.925.757.203,00		309.625.031.558,00		340.587.534.713,00		374.646.288.185,00		412.110.917.003,00	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP (%)	95	97	98	902.492.400,00	99	992.741.640,00	99,5	1.092.015.803,00	100	1.201.217.384,00	100	1.321.339.123,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Tertib Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (%)	90	92	94	2.939.183.429,00	96	3.233.101.772,00	98	3.556.411.949,00	99	3.912.053.144,00	100	4.303.258.458,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan (%)	100	100	100	248.442.087.324,00	100	304.692.994.691,00	100	335.162.294.160,00	100	368.678.523.576,00	100	405.546.375.933,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase SP2D yang terbit sesuai Anggaran Kas dan SPD (%)	75	77	80	641.994.050,00	85	706.193.455,00	90	776.812.801,00	95	854.494.081,00	100	939.943.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.434.096.288,00		1.247.505.917,00		1.372.256.508,00		1.509.482.159,00		1.660.430.375,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Jumlah OPD yang telah mengelola BMD dengan Baik (%)	91,85	92	93	1.434.096.288,00	94	1.247.505.917,00	95	1.372.256.508,00	96	1.509.482.159,00	97	1.660.430.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.258.874.357,00		4.583.761.792,70		4.811.949.402,93		5.051.546.723,05		5.303.123.759,20	
Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	Persentase Wajib Pajak yang taat Pajak (%)	90	100	100	2.359.071.418,00	100	2.594.978.559,80	100	2.724.727.008,38	100	2.860.963.208,78	100	3.004.011.069,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Objek Pendapatan Baru	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Baru (%)	100	100	100	1.899.802.939,00	100	1.988.783.232,90	100	2.087.222.394,55	100	2.190.583.514,27	100	2.299.112.689,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					29.451.903.389,00		35.528.827.062,00		39.085.639.542,00		42.998.923.412,00		47.304.477.251,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.914.094.838,00		27.032.033.102,00		29.739.166.187,00		32.717.802.723,00		35.995.244.492,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	21.914.094.838,00	100	27.032.033.102,00	100	29.739.166.187,00	100	32.717.802.723,00	100	35.995.244.492,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	35,75	35,75	40,00		45,00		55,00		65,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					7.537.808.551,00		8.496.793.960,00		9.346.473.355,00		10.281.120.689,00		11.309.232.759,00	
Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	78	80	5.204.493.960,00	82	5.741.306.819,00	83	6.315.437.500,00	84	6.946.981.250,00	85	7.641.679.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kopetensinya (%)	85	87	90	1.165.566.925,00	91	1.342.507.342,00	92	1.476.758.076,00	93	1.624.433.883,00	95	1.786.877.271,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Terciptanya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	Persentasi Pelayanan Kepegawaian yang Tepat Waktu dan Akurat (%)	100	100	100	1.167.747.666,00	100	1.412.979.799,00	100	1.554.277.779,00	100	1.709.705.556,00	100	1.880.676.113,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					491.168.840,00		2.504.358.143,00		2.613.559.151,00		2.588.858.795,00		2.336.202.085,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					380.348.580,00		2.277.358.143,00		1.871.559.151,00		1.615.858.795,00		1.663.202.085,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan (%)	100	100	100	380.348.580,00	100	2.277.358.143,00	100	1.871.559.151,00	100	1.615.858.795,00	100	1.663.202.085,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase HAKI yang difasilitasi (%)	48	50	50		60		65		65		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					110.820.260,00		227.000.000,00		742.000.000,00		973.000.000,00		673.000.000,00	
Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi (%)	0	0	10	110.820.260,00	11	227.000.000,00	12	742.000.000,00	15	973.000.000,00	20	673.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.127.452.737,00		19.456.647.588,00		19.977.921.758,00		20.499.218.844,00		20.957.668.844,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.288.270.773,00		14.411.647.588,00		14.637.421.758,00		14.888.468.844,00		15.097.668.844,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	70	75	80	14.288.270.773,00	85	14.411.647.588,00	90	14.637.421.758,00	95	14.888.468.844,00	100	15.097.668.844,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	93,11	93,50	94		94,50		95		95,50		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	70	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.309.997.492,00		2.435.000.000,00		2.600.500.000,00		2.775.000.000,00		2.922.500.000,00	
Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Keuangan	Persentase temuan/rekomendasi hasil pengawasan keuangan internal yang ditindaklanjuti (%)	80	84	88	1.804.570.492,00	92	1.890.000.000,00	96	2.003.000.000,00	100	2.135.000.000,00	100	2.237.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan kinerja internal yang ditindaklanjuti (%)	80	83	86	505.427.000,00	89	545.000.000,00	92	597.500.000,00	95	640.000.000,00	98	685.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Inspektorat Daerah
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.529.184.472,00		2.610.000.000,00		2.740.000.000,00		2.835.750.000,00		2.937.500.000,00	
Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Program Anti Korupsi	Nilai MCSP (Nilai)	85	87	89	1.479.889.796,00	91	1.515.000.000,00	93	1.585.000.000,00	95	1.625.000.000,00	97	1.675.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase unit kerja pelaksana ZI yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM (%)	0	25	50		75		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatkan Profesionalitas APIP	Persentase APIP yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan (%)	70	75	80	55.202.748,00	85	60.000.000,00	90	70.000.000,00	95	85.750.000,00	100	97.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai PK Maturitas SPIP sesuai yang dipersyaratkan (%)	100	100	100	994.091.928,00	100	1.035.000.000,00	100	1.085.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kematangan manajemen risiko sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					55.156.002.799,00		67.322.101.030,00		73.319.808.273,00		80.129.964.573,00		86.929.250.700,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.763.996.925,00		50.376.246.033,00		55.072.132.768,00		60.386.811.465,00		65.890.228.413,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	3.294.139.004,00	100	3.114.359.196,00	100	3.648.445.115,00	100	3.768.374.627,00	100	4.145.212.089,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	88,22	88,30	89		89,50		90		90,50		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	90	92	2.120.331.399,00	94	2.282.000.000,00	96	2.416.500.000,00	98	2.603.500.000,00	100	2.550.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	60,075	62	65		68		70		72		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	65	70	72	9.292.032.808,00	74	9.983.629.709,00	76	10.981.992.680,00	78	12.080.191.949,00	80	13.288.211.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	85	86	4.328.193.526,00	87	4.975.466.722,00	88	5.472.604.304,00	89	6.019.864.734,00	90	6.621.401.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	0	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	71	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	91	92	2.519.226.874,00	93	2.896.130.000,00	94	2.903.388.000,00	95	3.461.388.000,00	96	3.119.888.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	54,89	55,50	56		56,50		57		57,50		58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	87	88		90		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)		100	100	3.250.069.900,00	100	3.988.163.974,00	100	4.311.098.338,00	100	4.482.159.659,00	100	5.004.398.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)		88,80	91,04		93,28		95,52		97,76		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	77,84	80,06	82,27		84,49		86,71		88,92		91,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)		86	88,80		91,60		94,40		97,20		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	96,55	100	100	5.699.329.860,00	100	5.223.845.459,00	100	5.251.345.459,00	100	5.281.845.459,00	100	5.318.845.459,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	96,55	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	74,1	75,1	76,1		77,1		78,1		79,1		80,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	85	87	3.151.992.830,00	89	3.760.504.551,00	91	4.189.816.339,00	93	5.114.108.566,00	95	5.665.031.430,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	83		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	0	75	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	0	85	87		89		90		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	4.200.999.164,00	100	4.502.543.578,00	100	4.749.474.578,00	100	5.091.264.578,00	100	5.636.148.678,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	83,65	85	88		90		92		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	90,55	91,02	2.202.269.080,00	91,67	2.420.882.872,00	92,20	2.620.882.872,00	93,14	2.820.882.872,00	93,60	3.020.882.872,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	88,54	89	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	89	89,55	90	3.705.412.480,00	90,52	7.228.719.972,00	90,98	8.526.585.083,00	91	9.663.231.021,00	91,51	11.519.709.521,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	89	89,50	89,97		90		90,52		90,97		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	44,4	44,9	45,5		46		46,5		46,9		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	89	89,51	89,98		90		90,51		90,98		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					456.765.894,00		638.584.566,00		734.246.470,00		795.278.964,00		899.909.109,00	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	50	51	18.386.380,00	52	40.553.920,00	53	44.609.312,00	54	49.070.243,00	55	53.977.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	50	55	43.230.520,00	60	47.553.572,00	65	52.308.929,00	70	57.539.822,00	75	63.293.804,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	17.139.950,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Urusan Pembangunan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Urusan Pembangunan yang Dilaksanakan (%)	0	87	88	20.501.220,00	89	8.484.000,00	90	9.000.000,00	91	9.500.000,00	92	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	21.589.925,00	100	22.089.925,00	100	22.589.925,00	100	23.089.925,00	100	23.589.925,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelayanan Publik yang berkualitas di Kecamatan (%)	100	100	100	19.710.499,00	100	21.681.549,00	100	36.049.704,00	100	26.234.674,00	100	28.858.142,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	68.251.600,00	100	73.251.600,00	100	78.251.600,00	100	83.251.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	16.346.400,00	100	25.000.000,00	100	32.680.000,00	100	38.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	46,55	75	80	35.700.000,00	85	39.270.000,00	90	43.197.000,00	95	47.516.700,00	100	52.260.370,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (%)	90	90,56	91	144.161.000,00	91,53	325.700.000,00	92	375.560.000,00	92,65	416.076.000,00	93	479.678.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.556.090.884,00		10.241.562.461,00		10.766.172.954,00		11.697.577.447,00		12.308.373.641,00	
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	90	91	92	1.432.882.700,00	93	1.575.670.971,00	94	1.733.688.067,00	95	1.906.856.873,00	96	2.097.242.561,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	0	50	55	188.067.240,00	60	1.164.688.030,00	65	1.281.156.833,00	70	1.409.272.516,00	75	1.550.199.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	2	2	2	200.000.328,00	2	219.493.670,00	2	241.443.037,00	2	265.587.341,00	2	292.146.075,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	100	100	365.123.210,00	100	510.000.000,00	100	520.000.000,00	100	530.000.000,00	100	540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	85	86	282.459.250,00	87	460.396.000,00	88	465.666.500,00	89	500.949.000,00	90	511.247.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang mendapat pendampingan (%)	90	90,55	91	155.707.320,00	91,75	1.716.331.000,00	92	1.759.051.000,00	92,82	2.174.596.000,00	93	2.225.276.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	100	100	717.214.224,00	100	905.000.000,00	100	935.000.000,00	100	959.020.000,00	100	992.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa yang mendapat pendampingan (%)	100	100	100	490.480.280,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	515.249.700,00	100	643.728.470,00	100	708.101.317,00	100	778.911.449,00	100	856.802.594,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	91	92	320.899.900,00	93	374.440.000,00	94	379.440.000,00	95	384.440.000,00	96	389.440.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	100	100	432.898.732,00	100	1.388.553.540,00	100	1.394.053.540,00	100	1.399.553.540,00	100	1.405.053.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	455.108.000,00	100	500.618.800,00	100	565.930.680,00	100	605.748.748,00	100	666.323.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.652.475.972,00		1.931.325.018,00		2.107.266.247,00		2.244.627.943,00		2.419.016.772,00	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	93,26	93,41	93,56	139.800.000,00	93,71	141.461.775,00	93,86	163.534.864,00	94,01	155.961.607,00	94,16	178.984.687,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	188.677.600,00	100	331.630.000,00	100	398.840.000,00	100	461.050.000,00	100	523.260.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	100	100	100	166.795.668,00	100	183.475.235,00	100	201.822.759,00	100	222.005.034,00	100	244.205.538,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	0	50	55	121.064.148,00	60	195.553.600,00	65	215.108.960,00	70	236.619.856,00	75	260.281.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	172.716.792,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	77,84	90	91	188.560.848,00	92	189.560.848,00	93	190.560.848,00	94	190.560.848,00	95	191.560.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase tingkat penanganan masalah trantibum yang muncul di tingkat kecamatan (%)	90	90	90	129.514.556,00	91	130.000.000,00	92	130.000.000,00	93	130.000.000,00	94	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi untuk upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (%)	100	100	100	162.229.600,00	100	178.452.560,00	100	202.397.816,00	100	215.927.598,00	100	237.520.357,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	95.199.960,00	100	71.300.000,00	100	76.300.000,00	100	81.300.000,00	100	86.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	212.713.600,00	100	86.211.000,00	100	95.021.000,00	100	104.023.000,00	100	113.223.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase tingkat penanganan masalah trantibum yang muncul di tingkat kecamatan (%)	90	90,65	91	75.203.200,00	91,52	243.680.000,00	92	243.680.000,00	92,67	247.180.000,00	93	243.680.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.697.456.879,00		3.030.248.332,00		3.398.960.042,00		3.714.097.273,00		4.025.922.276,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	91	92	234.981.160,00	93	364.283.000,00	94	374.283.000,00	95	384.283.000,00	96	394.283.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	85	86	87	302.106.000,00	88	436.792.000,00	89	579.268.000,00	90	717.455.000,00	91	802.486.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	0	100	100	337.336.000,00	100	460.000.000,00	100	525.000.000,00	100	580.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	0	51	52	205.696.600,00	53	286.144.100,00	54	314.758.510,00	55	346.234.361,00	56	380.857.797,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	93,11	95	100	337.704.735,00	100	339.704.735,00	100	341.704.735,00	100	343.704.735,00	100	345.704.735,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	203.743.000,00	100	224.117.300,00	100	246.529.030,00	100	271.181.933,00	100	298.300.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	0	100	100	251.571.484,00	100	252.000.000,00	100	273.000.000,00	100	294.000.000,00	100	315.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	87	87	87	113.625.600,00	90	115.000.000,00	92	120.000.000,00	93	125.000.000,00	95	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	97,4	98,44	98,74	115.843.400,00	99	145.052.017,00	99,34	159.557.219,00	99,64	175.512.941,00	100	193.064.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Urusan Pemerintahan umum diKecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	75	75,50	76	344.135.800,00	77	258.938.680,00	77,50	309.232.548,00	78	313.315.803,00	80	344.647.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	250.713.100,00	100	148.216.500,00	100	155.627.000,00	100	163.409.500,00	100	171.579.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.029.216.245,00		1.104.134.620,00		1.241.029.792,00		1.291.571.481,00		1.385.800.489,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat Desa (%)	100	100	100	96.643.200,00	100	106.307.520,00	100	171.838.272,00	100	128.632.099,00	100	141.495.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	60	62	64	43.352.000,00	66	47.687.200,00	68	52.455.920,00	70	57.701.512,00	72	63.471.663,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	100	100	100	45.094.377,00	100	83.000.000,00	100	102.000.000,00	100	120.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	0	50	55	59.591.778,00	60	92.378.000,00	65	101.615.800,00	70	111.777.380,00	75	122.955.118,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	0	100	100	24.221.690,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	90	91	92	76.649.900,00	93	92.445.000,00	94	97.445.000,00	95	102.445.000,00	96	107.445.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	98,53	100	100	140.915.900,00	100	141.515.900,00	100	142.915.900,00	100	143.915.900,00	100	144.915.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	85	86	87	31.620.000,00	88	21.294.000,00	89	22.359.000,00	90	33.477.500,00	91	38.651.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi dan Pembangunan (%)	87	88	89	67.410.000,00	90	70.578.000,00	91	70.578.000,00	92	78.318.000,00	93	72.232.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	293.337.000,00	100	258.929.000,00	100	284.821.900,00	100	313.304.090,00	100	344.634.499,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi dan Pembangunan (%)	100	100	100	150.380.400,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	162.000.000,00	100	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.550.000.000,00		20.539.016.893,00		13.143.568.582,00		14.455.925.441,00		15.899.517.985,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.983.107.674,00		13.131.646.677,00		4.997.461.346,00		5.497.207.480,00		6.046.928.228,00	
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	3.983.107.674,00	100	13.131.646.677,00	100	4.997.461.346,00	100	5.497.207.480,00	100	6.046.928.228,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	87,98	88,48	88,98		89,48		89,98		90,48		90,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.595.485.247,00		1.704.125.692,00		1.873.538.260,00		2.059.892.087,00		2.264.881.296,00	
Meningkatnya wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (%)	75	75	80	1.595.485.247,00	85	1.704.125.692,00	90	1.873.538.260,00	95	2.059.892.087,00	100	2.264.881.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.962.291.967,00		2.000.879.331,00		2.200.967.264,00		2.421.063.990,00		2.663.170.389,00	
Meningkatnya partisipasi politik dimasyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu (5 tahunan) (%)	84	0	0	1.962.291.967,00	0	2.000.879.331,00	87	2.200.967.264,00	0	2.421.063.990,00	0	2.663.170.389,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase peningkatan kegiatan pendidikan politik oleh partai politik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					240.420.553,00		245.009.490,00		269.510.439,00		296.461.483,00		326.107.631,00	
Meningkatnya Kualitas Ormas dan Kesiswaan	Persentase Ormas dan Kesiswaan yang memahami perannya di masyarakat (%)	10	11	12	240.420.553,00	13	245.009.490,00	14	269.510.439,00	15	296.461.483,00	16	326.107.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					557.581.550,00		549.116.501,00		603.028.151,00		662.330.967,00		727.564.063,00	
Terjaganya Suku, Agama dan RAS	Persentase konflik terkait suku ras dan agama (%)	0	0	0	557.581.550,00	0	549.116.501,00	0	603.028.151,00	0	662.330.967,00	0	727.564.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					13.211.113.009,00		2.908.239.202,00		3.199.063.122,00		3.518.969.434,00		3.870.866.378,00	
Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang dideteksi dini (%)	100	100	100	13.211.113.009,00	100	2.908.239.202,00	100	3.199.063.122,00	100	3.518.969.434,00	100	3.870.866.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2562491923157.87		2947905268868.55		3053567944732.27		3133291616640.95		3259910358207.36	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja membutuhkan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerahyang diindikasikan oleh indikator kinerja dengan target capaian selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan secara umum melalui indikator makro daerah, pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator makro daerah yang merupakan indikator pada tingkat dampak (impact). Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD.

Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).Indikator Kinerja Daerah memuat komitmen pemerintah daerah pada tingkat kinerja dampak (impact) dan hasil (outcome). Kinerja dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Sementara kinerja hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, serta kinerja perangkat daerah.

Penetapan target IKU bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sektor pembangunan memiliki sasaran yang terukur, realistis, dan selaras dengan visi serta misi daerah. Target ini dirancang berdasarkan capaian sebelumnya, potensi sumber daya daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Dengan adanya target yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja secara lebih sistematis, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Evaluasi terhadap pencapaian IKU dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan serta penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat :

Tabel 4. 2 Target Indikator Kinerja Utama Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir Tahun 2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,33	73,8	74,33	74,82	75,31	75,8	76,29
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,81	5,43	5,26	4,88	4,5	4,12	3,72
3	Indeks Kesehatan	Indeks	87,67	88,12	88,57	89,02	89,47	89,92	90,37
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,6	72,87	73,14	73,41	73,68	73,95	74,22
5	Indeks Pendidikan	Indeks	62,03	62,3	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,36	12,4	12,45	12,5	12,55	12,6
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,39	8,43	8,47	8,51	8,55	8,6
8	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	85,87	86,64	87,41	88,18	88,95	89,72	90,5
9	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,216	0,213	0,210	0,207	0,204	0,200
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,745	0,695	0,645	0,595	0,545	0	0,445
11	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,141	0,137	0,133	0,129	0,125	0,121	0,117
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2	3,04	3	2,93	2,87	2,8	2,73
13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,9	64,01	65,26	67,51	68,76	70,01	71,26
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56,4	56,75	57	57,25	57,5	57,75	60
15	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	Angka	0	0	0	0	0	0	0
16	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	34,74	35,9	39,36	42,83	46,27	49,75	57,89
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5	5,2	5,6	6	6,5	7,1
18	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,64	3,7	3,78	3,85	3,9	3,97	4
19	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	%	3,7	3,75	3,9	4,2	4,5	4,87	5,31
20	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	3,44	3,49	3,6	4	4,4	4,9	5,5
21	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	%	4,07	4,13	4,35	4,79	5,23	5,78	6,44

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir Tahun 2030
22	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	6,79	6,86	7,14	7,7	8,27	8,98	9,83
23	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	%	6,33	6,36	6,49	6,75	7,01	7,34	7,93
24	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	185,94	204,5	250,4	300,48	371,88	464,85	600,31
25	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB	%	12,63	12,65	12,7	13	13,66	14,75	15,08
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	21,24	21,5	21,75	22	22,25	22,5	22,75
27	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	63,99	86,39	116,62	151,6	197,08	266	345,82
28	Nilai Ekspor	triliun rupiah	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
29	Tingkat Inflasi	%	1,11	1,5 - 3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
30	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks	-	70	72,5	75	77,5	80	82,5
31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,67	72	73,54	73,7	73,87	74,03	74,2
32	Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,35	114,65	112,95	111,25	109,55	107,85	106,15
33	Indeks Infrastruktur	Indeks		62,89	65,75	68,7	71,62	74,39	76,86
34	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%		1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04
35	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,49	72	72,38	75,25	78,13	81	81,2
37	Nilai SAKIP	Angka	70,02	71,5	73	75	77,5	80,5	82,5
38	NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2
39	Opini BPK atas laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
41	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,37	3,5	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir Tahun 2030
42	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
43	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,04	3,16	3,29	3,42	3,55	3,68	3,81
44	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,94	3,05	3,15	3,25	3,36	3,46	3,56
45	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	69,76	71	72	73	74	75	76

4.2.2 INDIKATOR MAKRO

Target Indikator Makro disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan capaian pembangunan daerah selama periode RPJMD. Indikator ini menjadi acuan untuk mengukur kinerja perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Penetapan target ini mempertimbangkan capaian historis, potensi dan tantangan daerah, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029 juga dimuat arahan kebijakan pembangunan jangka menengah. Untuk mendukung pencapaian target indikator makro nasional dan provinsi kalimantan selatan, maka ditetapkan target indikator makro untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA TAHUN 2030
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5,00	5,20	5,60	6,00	6,50	7,10
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	34,85	35.9	39.36	42.83	46.29	49.75	57.89
3	Tingkat Kemiskinan	%	5,81	5,43	5,26	4,88	4,50	4,12	3,72
4	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,216	0,213	0,210	0,207	0,204	0,200
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,33	73,80	74,33	74,82	75,31	75,80	76,29
6	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0	1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	71,67	72,00	73,54	73,70	73,87	74,03	74,20
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2	3,04	3,00	2,93	2,87	2,80	2,73

4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Indikator Kinerja Daerah disajikan dalam beberapa kelompok yakni Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Indikator-indikator yang disajikan pada tabel di bawah, dilengkapi dengan target yang terukur setiap tahun.

Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Daerah Kab Hulu Sungai Tengah 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,03	82,4	83,5	84,6	85,7	86,8	87,9
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	0	4,95	4,85	4,75	4,65	4,55	4,45
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,67	72	73,54	73,7	73,87	74,03	74,2
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6	6,37	7,37	8,37	9,37	10,37	11,37
6	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang		0,9	5,36	9,81	14,27	18,72	23,18
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0	93	93,5	94	94,5	95	95,5
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0	1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04
9	Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,35	114,65	112,95	111,25	109,55	107,85	106,15
10	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,96	0,92	0,9	0,86	0,83	0,8	0,76
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	152	155	158	161	164	167	170
13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks		21	23,45	25,9	28,35	30,8	33,25
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5	5,2	5,6	6	6,5	7,1
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,81	5,43	5,26	4,88	4,5	4,12	3,72
3	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	34,74	35,9	39,36	42,83	46,27	49,75	57,89
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,2	3,04	3	2,93	2,87	2,8	2,73
5	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,216	0,213	0,21	0,207	0,204	0,2
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,33	73,8	74,33	74,82	75,31	75,8	76,29
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,6	72,87	73,14	73,41	73,68	73,95	74,22
8	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	19,6	12,5	12,13	11,75	11,38	11	10,63
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,39	8,43	8,47	8,51	8,55	8,6
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,36	12,4	12,45	12,5	12,55	12,6
11	Angka Numerasi	Angka	0	81,22	83,22	85,22	87,22	89,22	90,22
12	Angka Literasi	Angka	0	80,22	81,22	82,22	83,22	84,22	85,22
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	68	69	70	72	74	76	78

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
14	Indeks Literasi Digital	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	35,46	57,78	68,3	75,2	81,3	90,25	99,5
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56,4	56,75	57	57,25	57,5	57,75	60
17	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0	70,19	71,5	73	74,2	75,29	76
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)		62,9	64,01	65,26	67,51	68,76	70,01	71,26
19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3
20	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,18	96,24	96,3	96,36	96,42	96,45	96,5
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	39	40	41	42,5	45	47,5	50
22	Tingkat Inflasi	%	1,11	1,5 -3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
23	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	0	17,78	20,81	23,84	26,87	29,89	32,92
24	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	1	4,08	7,15	10,23	13,3	16,38
25	Indeks Pendidikan	Indeks	62,03	62,3	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67
26	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup		136	130,1	124,2	118,3	112,4	106,5
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,53	75,66	76,73	77,8	78,87	79,94	81
28	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%		89,09	91,69	94,3	96,9	99,5	99,5
29	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	71	72,43	72,93	73,43	73,93	74,43
30	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,8	3,86	3,9	3,93	3,96	3,99	4,01
31	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan	%	44,8	45	50	60	70	80	90
32	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%		99,3	99,31	99,32	99,33	99,34	99,35
33	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak	%	81,3	84,28	87,26	89,74	91,29	92,92	93,88
34	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal	%		26	27,7	29,4	31,1	32,8	34,5
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%		60,39	61,2	62,01	62,82	63,63	64,43
36	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	%		99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
37	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel)	Orang		######	######	######	######	######	######
38	Rasio PAD terhadap PDRB	%		3,03	3,07	3,1	3,14	3,17	3,21
39	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/kota	%		10,83	11,79	12,75	13,71	14,66	15,62
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB	%	12,63	12,65	12,7	13	13,66	14,75	15,08
2	Kontribusi Sektor Akomodasi Makan dan Minum terhadap total PDRB	%	4,07	4,13	4,19	4,25	4,3	4,36	4,42
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	21,24	21,5	21,75	22	22,25	22,5	22,75
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,53	75,66	76,73	77,8	78,87	79,94	81
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,7	49,4	54,55	59,7	64,85	70	71,04
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,85	5,9	5,98	6,06	6,1	6,21	6,31
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB		31	33,42	35,83	38,25	40,66	43,08
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%		72,98	75,1	77,22	79,35	81,47	83,6
9	Persentase Desa Mandiri	%	57,76	67,08	72,05	78,88	86,34	90,06	93,79
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,18	0,27	0,28	0,3	0,31	0,33	0,32
11	Tingkat Inflasi	%	1,11	1,5 -3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%		10,5	10,53	10,56	10,59	10,62	10,65
13	Kontribusi PDRB Provinsi	%		3,61	3,57	3,53	3,49	3,45	3,41
14	Return on Aset (ROA) BUMD	%		1	1,08	1,15	1,23	1,3	1,38
15	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya	%		64,6	65,47	66,34	67,21	68,08	68,95
16	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	61,75	61,8	62,46	63,12	63,78	64,44	65,1
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	0	39,52	41,41	43,31	45,2	47,09	48,99

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	0	19,36	21,43	23,5	25,57	27,64	29,71
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum			42,9	44,2	45,5	46,8	48,1	49,4
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,37	3,5	-	-	-	-	-
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
4	Persentase Penegakan Perda	%	85	86	87	88	89	89	90
5	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	80,44	80,56	80,8	81,11	81,54	82,02	82,51
6	Indeks Rasa Aman	Angka	85	86	87	88	89	90	91
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,64	3,7	3,78	3,85	3,9	3,97	4
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	15,5	20	32,5	45	57,5	70	71,88
9	Kapasitas Air Baku	m3/detik	3,29	3,3	3,31	3,32	3,33	3,34	3,35
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	82,9	91	91,45	91,9	92,35	92,8	93,25
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%		72,98	75,1	77,22	79,35	81,47	83,6
12	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	6	6,37	7,37	8,37	9,37	10,37	11,37
13	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.313,00	1.383,00	1.453,00	1.523,00	1.593,00	1.663,00	1.733,00
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	76,8	91	91,45	91,9	92,35	92,8	93,25
15	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	-	0	0	0	0	0	0
	Pendidikan								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	62,03	62,3	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67
2	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Angka	84,56	85,87	90,01	91,32	93,63	93,94	95,25
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,36	12,4	12,45	12,5	12,55	12,6
4	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,35	9,27	9,39	9,51	9,64	9,76	9,89
5	Capaian Raport Pendidikan	Angka	0	64,43	70	71	72	73	74
	Kesehatan								
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,6	72,87	73,14	73,41	73,68	73,95	74,22

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
2	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian	5	5	4	3	2	1	0
3	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian	-	48	46	44	42	40	38
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	19,6	12,5	12,13	11,75	11,38	11	10,63
5	Angka Kesakitan	%	14	13,5	13	12,5	12	11,5	11
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an (yang berkualitas)	Indeks	46,95	48,16	49,36	50,48	51,6	52,72	53,84
2	Persentase Pengembangan Kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Daerah	%	0,03	0,05	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14
3	Persentase panjang sungai yang berfungsi optimal	%	24,98	25,28	25,5	25,73	25,96	26,18	26,4
4	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,55	70,75	71,97	73,19	74,41	75,63	76,85
5	Persentase Rumah Tangga yang Terakses Kebutuhan Pokok Air Minum	%	82,11	82,64	83,3	83,95	84,61	85,27	85,93
6	Persentase Rumah Tangga yang Terkelola Air Limbah Domestik dengan baik	%	7,76	7,99	8,35	8,71	9,07	9,43	9,79
7	Persentase penyebaran infrastruktur fisik berkondisi baik	%	52,46	55,16	58,69	62,13	65,58	69,03	72,48
8	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	48,19	48,2	48,21	48,23	48,24	48,25	48,26
	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak	%	81,3	84,28	87,26	89,74	91,29	92,92	93,88
2	Persentase rumah layak huni	%	97,56	97,86	97,99	98,13	98,62	98,77	99
3	Persentase permukiman yang layak	%	81,3	84,28	87,26	90,24	93,21	96,19	99,17
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Indeks Rasa Aman	Angka	85	86	87	88	89	90	91
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah	%	85	86	87	88	89	90	91
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	%	85	86	87	88	89	90	91
4	Response Time Rate Maksimal 15 Menit	Menit	15	15	15	14	14	13	13
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,35	114,65	112,95	111,25	109,55	107,85	106,15
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51
	Sosial								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,216	0,213	0,21	0,207	0,204	0,2
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,81	5,43	5,26	4,88	4,5	4,12	3,72
3	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial	%	91	92	93	94	95	96	97
4	Persentase penduduk miskin penerima manfaat program jaring pengaman sosial	%	0	8,78	9,5	9,8	10,2	10,8	11,5
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,745	0,695	0,645	0,595	0,545	0,495	0,445
6	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,141	0,137	0,133	0,129	0,125	0,121	0,117
	Tenaga Kerja								
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,2	3,04	3	2,93	2,87	2,8	2,73
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,18	96,24	96,3	96,36	96,42	96,45	96,5
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0	70,19	71,5	73	74,2	75,29	76
	Pangan								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,03	82,4	83,5	84,6	85,7	86,8	87,9
2	Skor PPH	Nilai	92,1	93,5	94,6	95,7	96,8	97,9	98
	Pertanahan								
1	Persentase pertanahan yang termanfaatkan	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98
2	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	31,18	75	80	85	90	95	99
	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		71,67	72	73,54	73,7	73,87	74,03	74,2
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,5	78,22	78,42	78,62	78,82	79,02	79,22
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks		71,18	71,38	71,58	71,78	71,98	72,18
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,72	68,59	68,66	68,73	68,79	68,86	68,93
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	56,2	56,3	56,4	56,5	56,6	56,7	56,8
6	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0	1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Indeks Pelayanan Publik urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	4,59	4,64	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	91,02	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	92

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Indeks Desa	%		80,04	81,66	84,96	90,47	92,35	94,87
2	Indeks Dimensi Layanan Dasar	%	-	22,98	23,76	24,39	25,81	26,12	26,28
3	Indeks Dimensi Sosial	%	-	11,81	11,96	12,12	12,44	12,91	13,22
4	Indeks Dimensi Ekonomi	%	-	20,28	20,28	20,91	22,32	23,11	23,42
5	Indeks Dimensi Lingkungan	%	-	9,57	9,61	10,87	12,45	12,45	13,71
6	Indeks Dimensi Aksesibilitas	%	-	5,97	5,97	6,28	6,75	7,07	7,07
7	Indeks Dimensi Tata kelola Pemerintahan Desa	%	-	9,44	10,07	10,39	10,7	10,7	11,17
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)		62,9	64,01	65,26	67,51	68,76	70,01	71,26
2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,28	2,27	2,26	2,25	2,25	2,24	2,23
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,2	76,7	81,5	84,6	86,5	87,8	88,6
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59	61,1	62,9	64,7	66,3	67,7	69,1
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,9	86,9	87,9	88,8	89,7	90,5	91,2
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	4,1	4,6	5	5,4	5,9	6,3	6,7
	Perhubungan								
1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Nilai	70	72	74	76	78	80	82
2	V/C Ratio	Nilai	0,39	0,39	0,385	0,38	0,375	0,37	0,365
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	61,96	63,44	65,2	65,2	66	66	66,5
	Komunikasi dan Informatika								
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,85	5,9	5,98	6,06	6,1	6,21	6,31
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,37	3,5	-	-	-	-	-
3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	81,4	82,5	84	85,5	87	88,5	90
5	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi (IPTIK)	Indeks	-	65	70	75	80	85	90
6	Nilai monitoring evaluasi Komunikasi Informasi Publik	Nilai	67,85	78	85	90	92	94	95
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0	1,1	1,22	1,37	1,49	1,69	1,33
8	Persentase koperasi berkualitas	%	67,5	75	80	85	90	95	96
9	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	0	0	3	3,59	4,19	4,79	5,39

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
10	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	13,44	29,66	29,92	30,18	30,47	30,7	45,68
11	Proporsi Jumlah UKM	%	0	0	6,02	6,04	6,05	6,06	6,07
	Penanaman Modal								
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	0,03	0,1	0,22	0,23	0,24	0,25	0,29
2	Nilai Investasi	Rp	########	######	######	######	######	######	######
	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	39	40	41	42,5	45	47,5	50
2	Peringkat pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah Tingkat Provinsi	Peringkat	9	8	7	6	5	4	3
3	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan (Wirausaha Muda dan Pemuda Pelopor)	%	7	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8
4	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan	%	44,8	45	50	60	70	80	90
	Statistik								
1	Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Indeks	-	2,5	2,8	3	3,4	4	4,2
	Persandian								
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	224	248	345	472	600	680	761
	Kebudayaan								
1	Pewarisan Kebudayaan	Angka	56,4	56,75	57	57,25	57,5	57,75	60
2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Nilai	57,4	57,75	58	58,25	58,5	58,75	61
3	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	55,4	55,75	56	56,25	56,5	56,75	59
	Perpustakaan								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	74	75	76	77	78	79	80
	Kearsipan								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK)	Indeks	50,62	55,87	56,5	57	57,8	58,4	59
2	Nilai Laporan Audit Kearsipan External (LAKE)	Angka	50,62	55,87	56,5	57	57,8	58,4	59
3	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Angka	52,18	53	54	55	56	57	58
	Pertanian								
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (%)		3,7	3,75	3,9	4,2	4,5	4,87	5,31
2	Jumlah Produksi Padi	Ton	198.395,00	######	######	######	######	######	######
3	Jumlah Produksi Jagung	Ton	5.461,00	5.470,00	5.472,00	5.524,00	5.582,00	5.650,00	5.707,00
4	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	54	60	72	73	74	75	76

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
5	Jumlah Produksi Cabe Besar	Ton	1.423,00	1.427,00	1.430,00	1.494,00	1.586,00	1.677,00	1.830,00
6	Jumlah Produksi Cabe Rawit	Ton	1.095,00	1.099,00	1.101,00	1.170,00	1.196,00	1.222,00	1.248,00
7	Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	176	177	178	179	180	181	182
8	Jumlah Produksi Jeruk	Ton	11.236,00	11.305,00	11.390,00	11.475,00	11.560,00	11.645,00	11.747,00
9	Jumlah Produksi Karet	Ton	19.870,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.400,00	20.500,00
10	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	4.790,00	4.850,00	4.860,00	4.900,00	4.950,00	5.100,00	5.200,00
11	Jumlah Produksi Kopi	Ton	264	267	271	277	282	288	310
12	Jumlah Produksi Lada	Ton	8	9	10	11	12	13	14
13	Jumlah Produksi Daging	Ton	2.842,00	2.845,00	2.856,00	2.869,00	2.881,00	2.892,00	2.904,00
14	Jumlah Produksi Telur	Ton	6.309,00	7.073,00	7.094,00	7.108,00	7.122,00	7.136,00	7.151,00
	Pariwisata								
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	6,79	6,86	7,14	7,7	8,27	8,98	9,83
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Pariwisata	%	8,27	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
	Kelautan dan Perikanan								
1	Persentase Pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	3,7	3,75	3,9	4,2	4,5	4,87	5,31
2	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
3	Angka Konsumsi Ikan	Angka	59,21	60,36	61,52	61,61	61,68	61,76	61,83
	Perdagangan								
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	%	4,07	4,13	4,35	4,79	5,23	5,78	6,44
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	21,24	21,5	21,75	22	22,25	22,5	22,75
3	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap total PDRB	%	13	14,84	15,12	15,57	16,17	16,87	16,88
	Perindustrian								
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	3,44	3,49	3,6	4	4,4	4,9	5,5
2	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	%	6,33	6,36	6,49	6,75	7,01	7,34	7,93
3	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap total PDRB	%	12,63	12,65	12,7	13	13,66	14,75	15,08
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0	0	0,1	0,12	0,13	0,14	0,14
5	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	%	0	0	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
	Perencanaan Pembangunan								
1	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	97,82	98	98,5	99	99,5	100	100
2	Indeks Perencanaan	Angka	96,75	97	98	99	99,5	100	100
3	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Angka	22,64	22,9	24,5	26	28	30	30
4	Persentase capaian IKU RKPD	Angka	93,03	94	94,5	95	95,5	96	96,5
5	Persentase perangkat daerah yang berkinerja tinggi	%	88,74	89,24	89,74	90,24	90,75	91,24	91,74
	Keuangan								
1	Opini BPK atas laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,8	3,86	3,9	3,93	3,96	3,99	4,01
3	Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	90	92	94	96	98	99	100
4	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	%	75	77	80	85	90	95	100
5	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	95	97	98	99	99,5	100	100
6	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Ketentuan	%	91,85	92	93	94	95	96	97
7	Rasio Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB	Angka	0.20%	0.21%	0.23%	0.24%	0.25%	0.26%	0.27%
8	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	-2,02	1	5	5,5	6	6,5	7
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
1	Indeks Kepuasan Aparatur Sipil Negara	Indeks	90,11	91	92	93	95	96	97
2	Nilai Sistem Merit	Nilai	267	280	295	310	325	350	360
	Penelitian dan Pengembangan								
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,7	49,4	54,55	59,7	64,85	70	71,04
2	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	Angka	59	60	65	70	75	80	90
	Pengawasan								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,04	3,16	3,29	3,42	3,55	3,68	3,81
2	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,94	3,05	3,15	3,25	3,36	3,46	3,56
3	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	69,76	71	72	73	74	75	76
4	Persentase capaian tindaklanjut hasil pengawasan keuangan eksternal yang sudah diselesaikan	%	88	89	90	91	92	93	94

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
5	Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi internal AKIP berkategori Memuaskan	%	52,77	55	60	65	70	75	80
6	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3,02	3,045	3,075	3,105	3,145	3,175
7	Nilai IEPK	Nilai	3	3,02	3,045	3,075	3,105	3,145	3,175
	Sekretariat DPRD								
1	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	80	81	82	83	84	85	85
2	Persentase layanan Sekretariat DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	%	80,18	81	82	83	84	85	85
	Sekretariat Daerah								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,49	72	72,38	75,25	78,13	81	81,2
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	77,37	78	79	80	81	82	82
3	Nilai SAKIP	Angka	70,02	71,5	73	75	77,5	80,5	82,5
4	Nilai LPPD	Nilai	2,93	2,95	2,97	2,98	3,06	3,15	3,23
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	0	70	75	80	85	90	90
7	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0	1	1,08	1,15	1,23	1,3	1,38
8	Presentase realisasi APBD	%	88,34	88,61	88,92	90,5	91	91,5	92
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	Angka	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2025-2030, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, dan RPJM Nasional 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 mempunyai visi yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat"** dengan misi yaitu (1) Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya; (2) Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan; (3) Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat; dan (4) Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Misi ini menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi; (3) Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; (4) menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana; (5) peningkatan tata kelola pemerintahan/pelayanan umum; (6) peningkatan kesejahteraan sosial dan kehidupan budaya; dan (7)

peningkatan produktivitas daerah. Ada 4 prioritas pembangunan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yaitu (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; (3) Penanggulangan Kemiskinan; dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

b. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya;

c. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memuat program-program prioritas

sesuai tugas pokok dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diemban guna mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai tujuan dan sasaran capaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Renstra-PD tersebut dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

d. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar arah kebijakan tahunan yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan dapat dicapai;

e. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;

f. Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban untuk menyusun kegiatan Rencana strategis PD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

g. Terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;

h. Dalam rangka terwujudnya segala dokumen perencanaan daerah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekewajiban melakukan Monitoring, Pengendalian dan

Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan RPJMD dan RKPD secara berkala.

i. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah bersumber dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

j. Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko strategis pemerintah daerah serta manajemen risiko strategis dan operasional perangkat daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

k. RPJMD akan menjadi pedoman dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun.

5.3 Pedoman Transisi

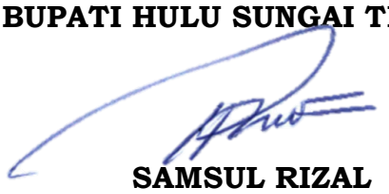
Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pada saat transisi dan dengan adanya pilkada serentak dan kekosongan jabatan politik kepala daerah, maka RKPD 2025 merupakan bagian dari RPJMD periode ini serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2030-2035 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2030, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tahun 2025-2045 merupakan dasar dalam penyusunan RKPD tahun 2030 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2030. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2030 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Pedoman masa transisi tersebut bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan periode RPJMD ini berakhir, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



SAMSUL RIZAL